



SEMINAR SEJARAH NASIONAL IV

SUB TEMA DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI BANGSA INDONESIA

ektorat
ayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



SEMINAR SEJARAH NASIONAL IV

330.9

SEM

#

SUB TEMA DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI BANGSA INDONESIA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

1985

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud, sesuai program kerja tahun 1985/86 telah menyelenggarakan Seminar Sejarah Nasional IV dari tanggal 16 – 19 Desember 1985 bertempat di Hotel Garuda Yogyakarta, dengan tema "Sumbangan Penelitian dan Penulisan Sejarah terhadap Pembangunan".

Dalam hal ini penelitian dan penulisan sejarah hendaknya kita lihat pada konteks yang luas, yaitu dalam rangka pembinaan kebudayaan termasuk pula semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "pemerintah memajukan Kebudayaan nasional Indonesia", itu mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mewujudkan identitas nasional berlandaskan aneka ragam kebudayaan Indonesia.

Di sini perlu kita perhatikan adanya kenyataan, bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Di samping itu, dengan pengembangan kebudaya-

an nasional itu diharapkan akan menjadi pegangan ataupun pedoman tingkah laku pergaulan sosial antar warga negara ke luar batas lingkungan suku atau daerah. Kemudian, masih perlu diperhitungkan, bahwa terdapat pula beberapa masalah sebagai akibat pembangunan yang pada hakekatnya merupakan proses perubahan di segala bidang.

Kesemuanya itu berlangsung dalam lingkup ruang dan waktu, yang perlu kita buat inventarisasi dan dokumentasinya sebagai dukungan data yang memadai. Data dan informasi kesejarahan itu pada khususnya diperlukan antara lain untuk menyusun kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam rangka usaha pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula diperlukan untuk melihat berbagai kecenderungan yang terjadi dalam proses integrasi nasional secara menyeluruh.

Di dalam Seminar Sejarah Nasional IV itu dapat ditemukan para sejarawan dan berbagai fihak yang menaruh minat dalam kesejarahan. Dalam Seminar itulah dipersembahkan hasil penelitian para sejarawan, dan mereka memanfaatkannya untuk mempertajam konsep, menyempurnakan metode dan metodologi untuk mempertinggi kemampuan mengungkapkan kembali sejarah bangsa di tingkat nasional maupun daerah. Juga diharapkan untuk mencapai keseragaman bahasa dan penafsiran berbagai peristiwa sejarah bangsa, sehingga dapat menjernihkan berbagai masalah kesejarahan dan mempermudah penanaman kesadaran sejarah pada masyarakat.

Dalam Seminar Sejarah Nasional IV ini dibahas enam masalah pokok, yang terdiri atas : 1) Dinamika politik, 2) Dinamika ekonomi, 3) Dinamika Sosial Budaya, 4) Historiografi, 5) Kajian Bandingan dan 6) Pendidikan Sejarah.

Kesemua materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan (Jakarta, Bali, Banda Aceh, Bandung, D.I. Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Riau, Banjarmasin, Palembang, Bima,

Ujungpandang, Sulawesi Utara, Medan dan Samarinda). Demikian pula tulisan tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinal, berskala nasional ataupun lokal; dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya, dengan diterbitkannya bahan hasil Seminar Sejarah Nasional IV ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, Desember 1985
**PROYEK INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL**

**SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA SEMINAR SEJARAH NASIONAL IV DI
YOGYAKARTA TANGGAL 16 DESEMBER 1985**

Pada kesempatan ini saya merasa berpeluang untuk menyampaikan beberapa butir pemikiran yang kiranya bisa merupakan sekedar sumbangan bagi Saudara-saudara para peserta Seminar Sejarah yang berlangsung sekarang ini. Belum lama berselang kita dihadapkan pada permasalahan penulisan sejarah, dan segera saya secara pribadi maupun sebagai petugas yang terlibat menyadari benar betapa perlunya kaum sejarawan kita menangani permasalahan penulisan sejarah pada khususnya.

Sejarah adalah manifestasi yang khas manusiawi; pengenalan sejarah merupakan kenyataan manusiawi yang dapat kita telusuri sejak perkembangan kemanusiaan yang paling dini, sejauh masa itu meninggalkan jejak-jejaknya melalui fakta-fakta tertentu.

Dari goresan berupa lukisan atau tulisan sampai dengan jejak yang berupa dokumen dan monumen, manusia seperti ini ingin merekam kehadirannya dalam sesuatu masa, dan rekaman yang ditinggalkannya itu kelak akan menjadi petunjuk tentang kehadirannya itu. Tidak jarang rekaman itu dibuat oleh orang lain. Seperti halnya dalam masa Firaun rekaman

fakta dan peristiwa itu ditugaskan kepada tokoh "the Scriber" yang kerjanya tidak lain dari menulis catatan harian mengenai berbagai fakta dan peristiwa. Dan banyak contoh lainnya yang menunjukkan bahwa ikhtiar untuk merekam serupa itu cukup dikenal oleh setiap sejarawan.

Akan tetapi jelas pula bahwa tidak semua fakta dan peristiwa direkam dan tidak untuk semua orang dibangun cerita atau tugu; tentunya ada sesuatu makna, mengapa sesuatu realitas diinginkan untuk bertahan dan dikenali.

Sejarah memang berusaha mengungkapkan sesuatu realitas di masa lalu, akan tetapi tidak semua realitas di masa lalu punya alasan untuk bertahan dan dikenali kembali sebagai kenyataan historis.

Maka di sinilah letak tantangan pertama bagi para sejarawan; ia harus bertaut dengan kenyataan-kenyataan masa lalu, dan untuk ini ia harus dijembatani oleh jejak-jejak yang merekam masa lalu, apapun bentuk jejak-jejak itu. Ia seolah-olah harus meneropong masa lalu melalui konfrontasinya dengan realitas fisik dan material di masa kini. Realitas dimaksud pada hakikatnya tidak lebih dari sekeping kenyataan yang pada sendirinya bisu belaka; sejauh mana kenyataan tersebut bisa diterobos kebisuannya dan selanjutnya berperan memberikan kesaksian pada suatu fragmen di masa lalu, sangat tergantung dari kemahiran sang sejarawan untuk menemuinya sebagai representasi dari masa yang sudah silam. Melalui kenyataan yang ditemuinya itu sang sejarawan seolah-olah harus membuat perjalanan *retrogresif*. Akan tetapi dalam menelusuri jalan mundur itu ia harus sangat berhati-hati dalam membuat evaluasi dan interpretasinya tentang segala temuannya. Sebab pasti bukanlah hal yang mudah untuk menilai dan menafsirkan temuan-temuan dari masa lalu dari sudut pandang masa kini. Seorang sejarawan diharapkan bisa menyajikan kembali masa lalu secara objektif; akan tetapi mungkin perlu dipertanyakan, bagaimana objektivisme historis itu harus dipenuhi. Berbeda dengan seorang ilmuwan lain yang melakukan observasi terhadap kenyataan objek-

tif "kini & di sini", seorang sejarawan melalui pertemuannya dengan sesuatu yang ada "kini & disini" harus menjelajah ke kenyataan yang sudah sirna dan tidak mungkin diungkapkan kembali dalam kesejatian wujudnya.

Dalam penjelajahannya yang retrogresif itu tidak segala temuannya dinilai signifikan: di antara banyak pepohonan mungkin ada satu pohon yang dinilainya bersejarah, di antara sekian banyak manusia satu nama menonjol dan punya makna, di antara banyak reruntuhan dan puing-puing bangunan ada satu-dua yang segera menarik perhatiannya; pendeknya, dalam perjalanannya yang mundur itu, sang sejarawan mengungkapkan berbagai kenyataan yang bermakna di masa lalu.

Maka mengandung kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh Friedrich Schlegel, bahwa sejarawan itu ibarat "*eine ruckwärts gekehrten Propheten*". Demikianlah seharusnya; tidak ringanlah tanggungjawab yang terbebankan pada seorang sejarawan untuk menyajikan kembali masa lalu sebagaimana ditemuinya, bukan sebagaimana masa lalu dibangunnya kembali sesuai selera dan subjektivitas persepsi atau emosinya. *Minat dan keterkaitan seorang sejarawan dengan sesuatu fakta atau peristiwa di masa lalu seharusnya terkendali secara intelektual dan bukannya emosional. Disiplin inilah yang terasa berat manakala sejarawan itu dihadapkan dengan tugas untuk merekam fakta dan peristiwa dari zamannya sendiri.*

Makin jauh suatu zaman dari posisi seorang sejarawan dalam ruang dan waktu, makin rumit pula tugasnya untuk menghimpun fragmen-fragmen yang ditemuinya guna dibangun kembali secara koheren. Tidak jarang kenyataan masa lalu itu ditemui oleh sang sejarawan sebagai "disiecta membra" yang menuntut perakitan kembali secermat-cermatnya untuk kemudian dimantapkan sebagai fakta sejarah. Menarik sekali misalnya, betapa akhir-akhir ini orang mempersoalkan masalah "mana" sesungguhnya makam Diponegoro? Sampai sekarang pun belum disepakati penuh, di mana sebenarnya Adolf Hitler berakhir ri-

wayatnya dan di mana kemudian ia dikubur? Apakah ceritera tentang Anastasia sekedar dongeng yang berkembang dalam masa pasca-revolusi Rusia, ataukah ceritera yang benar-benar terjadi menyangkut seorang keturunan Tsar yang berhasil meloloskan diri dan kemudian mengembara di luar Rusia?

Jelaslah bahwa dalam hubungan dengan contoh-contoh di atas ini, tugas untuk "*merakit sejarah*" berbeda dengan upaya "*meramu dongeng*". Keduanya punya gaya tersendiri untuk memukau, keduanya punya cara tersendiri untuk memikat kita; namun demikian yang satu tetap harus diperbedakan dari lainnya. "*Dichtung und Wahrheit*" sama-sama punya fungsi, tapi fungsi itu bukannya sama satu dengan lainnya. Dalam sejarah bangsa-bangsa pun terdapat cukup banyak petunjuk bahwa "*Dichtung*" maupun "*Wahrheit*" itu ada jasanya dalam pembinaan identitas bangsa.

Pembinaan identitas bangsa tidak mungkin dilepaskan dari kesadaran bangsa itu sebagai kesejarahan (*historicity*); sejarah (*history*) saja mungkin ditampilkan kembali sebagai suatu kronologi peristiwa, suatu proses yang berlangsung dalam waktu dan mustahil dihindari atau dihentikan. *Kesejarahan adalah kesadaran keterkaitan pada masa lalu yang bermakna dan ikut membentuk "status praesens"*. Dalam arti inilah maka kesejarahan itu sangat penting artinya dalam pembentukan identitas — (sebagai pribadi ataupun sebagai kolektivitas).

Kenyataan manusiawi mustahil difahami sekedar melalui ontologi yang Eleatik belaka. "Esensi daripada kenyataan manusiawi adalah eksistensi", demikianlah formula para filsuf eksistensialis. Manusia bukan sekedar "ada", melainkan lebih dari itu manusia adalah "ada-dalam-perkembangan-senantiasa" (*more than just a "being" man is a continuum of becoming*). Sejiwa dengan rumus ini, filsuf Spanyol J. Ortega y Gasset menegaskan rumusnya: "*Man has no nature, what he has is... history*".

Apa yang diutarakan di atas kiranya bisa menjadi petunjuk betapa pentingnya arti sejarah sebagai fenomena manusiawi.

Sejarah adalah sumber orientasi (masa lalu) yang dikenali kembali dari suatu pusat orientasi lain (masa kini). Upaya pengenalan itu nampaknya didorong oleh keinginan kita untuk menemukan sambungan antara masa lalu dan masa kini. Maka tidak sepenuhnya keliru untuk menyimpulkan, bahwa pengenalan sejarah itu antara lain berfungsi untuk merentangkan kesinambungan antara dua kutub yang bertentangan, yaitu kutub kenyataan yang sudah silam dan sirna dengan kutub yang masih nyata dan kentara.

Dalam membahas masalah-masalah sejarah nasional Indonesia, hendaknya para sejarawan kita bukan sekedar menuntaskan ikhtiar untuk memantapkan penulisannya sebagai serangkaian peristiwa, akan tetapi juga mampu menyajikannya sebagai sumber andalan kesadaran kesejarahan eksistensial bagi kehidupan kebangsaan Indonesia dengan identitasnya yang mantap.

Dengan ketekunan Saudara-saudara menjelajahi masa lalu, dengan kecermatan Saudara-saudara untuk merakit segala temuan dalam penjelajahan itu, dengan kecermatan Saudara-saudara untuk memilih antara "Dichtung" dengan "Wahrheit", maka kita boleh berharap bahwa dari Seminar ini akan dikristalisasi hasil-hasil pemikiran yang segar dan mendasar perihal studi sejarah pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan sejarah nasional Indonesia.

Tugas Saudara-saudara memang berat, akan tetapi mulia; dan mudah-mudahan terwujudlah melalui Saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Schlegel, bahwa sejarawan adalah "*eine ruckwärts gekehrten Propheten*".

Saya mohon kelapangan dada Saudara-saudara untuk memaafkan saya bila dalam kata-kata sambutan saya ini terdapat kekeliruan dan kekurangan faham; bukan keahlian dalam seja-

rah, melainkan hanya itikad baiklah yang hendak saya sumbangkan pada Seminar Sejarah kali ini.

Demikianlah, maka sepersetujuan segenap hadirin, bersama ini Seminar Sejarah Nasional IV saya nyatakan dengan resmi dibuka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fuad Hassan', written in a cursive style.

Fuad Hassan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SUBTEMA UMUM	
1. Sebuah Biografi dari Historiografi Indonesia (oleh Sartono Kartodirdjo)	1
2. Fakta dalam Penulisan Sejarah Indonesia (oleh Harsya W. Bachtiar)	22
3. Pengalaman yang Berlaku, Tantangan yang Mendatang: Ilmu Sejarah di Tahun 1970-an dan 1980-an (oleh Taufik Abdullah)	43
SUBTEMA DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI BANGSA INDONESIA	
1. Pengaruh Ekonomi Penjajahan (<i>landrente</i>) Terhadap Kehidupan Bangsa Indonesia (oleh AA. Bagus Wirawan)	74

2. Pasifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh (oleh Rusdi Sufi)	105
3. Singaraja: Kota Perdagangan pada Belahan Kedua Abad Ke-19 (oleh Cokorda Istri Surya- wati)	124
4. Truman dan Barus: Dua Pusat Perdagangan di Pantai Barat Sumatra pada Awal Abad Ke-19 (oleh Muhammad Gade Ismail)	148
5. Perekonomian Makassar 1847-1849 (oleh Daud Limbu Gau)	165
6. Golongan Etnis Cina sebagai Pedagang Peran- tara di Indonesia 1870-1930 (oleh Tri Wahyu- ning Mahrus Irsyam)	192
7. Beberapa Faktor Kesejarahan Sebagai Penye- bab Mobilitas Ekonomi Masyarakat Cina dan Pengaruhnya bagi Orang Melayu (oleh Azhar Djohan)	215
8. Peranan Orang-orang Perantara dalam Kehi- dupan Perekonomian di Bali Abad Ke-19 (oleh I Putu Gde Suwitha)	235
9. Peranan Suku Bugis Makassar dalam Aktivitas Perekonomian di Kerajaan Gowa-Tallo Abad Ke-17 (oleh Anwar Thosibo)	259
10. Masyarakat Jawa Kuna dan Masalah Tanah (oleh Edhie Wuryantoro)	284
11. Krisis di Awal Kebangkitan Pengguntingan Uang pada Masa RIS 1950 (oleh Bambang Purwanto)	297
12. Dinamika Perekonomian Bangsa Indonesia (oleh Wisnuadji)	314
DAFTAR PEMBAWA MAKALAH	333
LAMPIRAN	340

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN	Halaman
1. Rumusan Seminar Sejarah Nasional IV	340
2. Sambutan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Selaku Penanggungjawab Seminar Sejarah Nasional IV	348
3. Sambutan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pembukaan Seminar Sejarah Nasional IV	352

SEBUAH BIOGRAFI DARI HISTORIOGRAFI INDONESIA

(oleh Sartono Kartodirdjo)

I

Pada tempatnya kiranya kita berkumpul sekarang ini sekedar mengenangkan Seminar Sejarah Nasional (SSN) Pertama yang diselenggarakan tepat 28 tahun yang lalu sebagai batu tonggak sejarah, penting dalam rangka mengembangkan historiografi Indonesia. Pada saat itulah kita menemukan momentum baik untuk menyatakan kesadaran sejarah bangsa Indonesia yang telah memasuki pertengahan abad ke-20 sebagai nasyon yang berdaulat. Peningkaran-peningkaran yang menjiwai historiografi kolonial menimbulkan rangsangan untuk membangkitkan kesadaran sejarah sebagai resonansi kesadaran kehidupan politik merdeka di satu pihak, dan pada pihak lain sebagai ekspresi aspirasi nasional untuk menemukan kembali identitasnya. Apabila cakrawala pemikiran sejarah dinyatakan berpusat pada indonesiasentrisme, suatu visi yang secara dialektis merupakan sintesa dari Neerlandosentrisme dan etnosentrisme, strukturalisasi penulisan sejarah berdasarkan periodisasinya berlandaskan prinsip integrasi.

Adapun penjabaran gagasan-gagasan dasar untuk penulisan buku pelajaran sejarah secara ideal dicita-citakan segera dapat terwujud, pada waktu ini kita ada dalam posisi lebih baik untuk menilai kompleksitas permasalahan serta pelaksanaannya daripada masyarakat waktu itu. Pada hemat saya, terlepas dari segala keterbatasannya, SSN I cukup meninggalkan dampak sebagai "mercu suar" yang menunjukkan jalur pelayaran mana yang perlu ditempuh untuk mengarah kepada historiografi nasional, suatu sejarah yang dari dalam mengungkapkan seluruh pengalaman bersama bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya serta merealisasikan dirinya sepenuhnya.

Sudah berkali-kali dibuat neraca perkembangan historiografi Indonesia tidak hanya untuk mengukur kemajuannya, akan tetapi juga untuk menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol. Selaku orang yang turut berperan dalam proses perkembangan itu sejak sebelum SSN I diselenggarakan, kali ini pembicara akan mengungkapkan pengalaman pribadi sebagai pencerminan proses umum strukturasi kesadaran sejarah atau dengan perkataan lain kristalisasi proses rekonstruksi sejarah seperti yang dihayati selama tiga setengah dasawarsa terakhir ini.

Kalau ada suatu tindak lanjut yang merupakan konsekuensi logis dari problematik yang dibahas dalam SSN I tak boleh tidak rekonstruksionisme adalah prioritas utama dalam agenda penulisan sejarah. Peningkaran-peningkaran yang *inherent* ada dalam Neerlandosentrisme menuntut rekonstruksi sejarah Indonesia sebagai konstruk yang otonom, dengan unit geopolitis yang dengan kekuatan endogin menyelenggarakan eksistensinya penuh dengan kejadian-kejadian yang secara presesual dan struktural mewujudkan pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Per definisi sejarah nasional itu memberi legitimasi kepada nasyon Indonesia dan sekaligus menunjukkan acara dari penulisan sejarah nasional.

Secara kebetulan pada titik pertumbuhan itu bidang studi Sejarah kritis mulai mengadakan pembibitan keahlian sebagai

proses wajar ke arah Institusionalisasi keahlian sejarah sebagai profesi. Tidak mengherankan apabila waktu memasuki tahun enampuluhan Rekonstruksionisme menjadi dominant dalam perkembangan historiografi Indonesia. Pada hemat pembicara, baik pada waktu itu maupun ditinjau kembali dari masa kini, jawaban yang tetap dalam menghadapi tantangan yang terkandung dalam problematik SSN I tak lain tak bukan ialah melakukan rekonstruksi sejarah dengan visi dan pendekatan baru. Apakah implikasi teoretis dan metodologinya hanya prosedur kerja dalam perbengkelan akan mampu memberikan gambaran yang memadai, lagi pula dapat mengungkapkan tidak hanya ke-trampilan teknis, melainkan juga bagaimana keahlian, tercampur dengan inspirasi imajinasi serta seni-seni penulisan, kesemuanya dituntut dari rekonstruksionis untuk dihayati sepenuhnya.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa wetiap rekonstruksi tidak terjadi "*in vacuo*" (dalam kekosongan) namun perlu ditempatkan dalam konteks tertentu. Untuk dapat memahami karya seorang sejarawan sepenuhnya, maka perlu diketahui "cakrawala intelektualnya" yang mencakup tidak hanya kerangka kosneptualnya dan metodologinya tetapi juga latar belakang hidupnya, *lebensweltnya* (lingkungan hidupnya sehari-hari), *welt anschauung*-nya (pandangan hidup), *zeitgeist*-nya (jiwa zaman), dan lain sebagainya, pendeknya seluruh pengalamannya. Justru pengalaman rekonstruksionis itulah yang senantiasa berfungsi sebagai medium interpretasi peristiwa-peristiwa dan dengan demikian menjadi determinan dalam proses strukturasi kesadaran sejarah. Dipandang dalam perspektif itu makna suatu teks sejarah tidak hanya terletak pada apa yang intrinsik ada pada teks itu tetapi lebih-lebih pada hal-hal yang ekstrinsik, maka pendekatan secara kontekstual akan lebih mampu mengungkapkan maknanya. Tidak dengan sendiri suatu naskah mengungkapkan maksud apakah yang ada di belakang penulisannya, sebab apakah pilihan jatuh pada tema atau topik tulisan itu, ciri-ciri apakah yang sebenarnya mencerminkan jiwa

zaman, bagaimanakah mendudukan teks itu dalam fase perkembangan historiografi nasional, dan seterusnya.

II

Pandangan retrospektif dan sekaligus introspektif tentang karya pribadi sekali-kali tidak dimaksud sebagai ekspresi egologis namun untuk memproyeksikan diri serta mengobyektifikasikan diri sehingga dapat dipakai sebagai bahan komunikasi intersubjektif. Dengan demikian pemikiran pada bidang pribadi dapat dipindahkan ke bidang umum sebagai bagian dari proses universalisasi.

Di sini tidak ada anggapan mengenai autentisitas pembicara dari pelbagai konstruk yang dipakainya. Seluruh uraian mengungkapkan adanya dari fase awal secara terus-menerus adanya proses dialektik antara problematik, pandangan serta teori ataupun aliran pemikiran yang sedang menonjol dengan pemikiran pembicara yang lewat internalisasi mencoba menyintesa-kan kesemuanya itu ke dalam perbendaharaan pengetahuannya. Apabila setiap pengakuan (*confession*) menimbulkan "penjerihan" atau "pemurnian" realitas subyektif, artinya menjadi dekat atau *conform* dengan realitas obyektif, maka pemikiran reflektif diharapkan mendistansiasikan diri dari subyektivitas. Kalau setiap verbalisasi pikiran memudahkan komunikasi intersubjektif maka diharapkan perumusan pengalaman pribadi berfungsi sebagai katalisator dalam menemukan realita intersubjektif atau obyektivitas.

Dengan demikian terjadi pengkristalisasi konstruk atau struktur-struktur kesadaran sejarah pribadi menjadi konstruk pengalaman kolektif. Proses yang terus-menerus terjadi tetapi tidak tampak hanya dapat diungkapkan lewat dimensi pribadi. Sama sekali tidak dikandung maksud di sini menepuk dada ataupun membanggakan diri. Pemikiran reflektif menjadi cara mengeksternalisasikan dan mengintersubjektivaskan hal-hal yang subyektif sehingga dapat ditransandensikannya. Proses itu

merupakan bagian esensial dari transformasi hal-hal subyektif menjadi realitas obyektif.

Pendekatan biografis ini sebenarnya hanya merupakan suatu cara membuat eksplisit hal-hal yang biasanya terkandung dalam setiap kelakuan ekspresif memuatnya secara implisit.

Pengalaman di bawah kesadaran akan berubah menjadi pengalaman penuh kesadaran yang lewat transandensi diri itu menjadi pengalaman kolektif. Apabila sejarah sebagai konstruk dapat dianggap sebagai pengalaman kolektif itu maka pemikiran reflektif sejarawan mengenai biografi historiografinya akan mempertinggi derajat kesadaran kolektif itu. Kalau pengalaman individual merupakan medium utama dalam menginterpretasi fakta sejarah dan situasi kontemporer maka pengalaman kolektif itu menjadi kerangka referensi umum dalam memahami situasi kita baik di masa lampau maupun masa kini.

Lagi pula pemikiran reflektif akan memperkuat kemampuan memahami situasi orang lain atau tokoh sejarah tidak lain karena ada truisme yang mengatakan bahwa untuk dapat memahami orang lain kita terlebih dulu memahami diri sendiri.

Untuk dapat memahami metodologi serta teori yang mendukungnya dari seorang sejarawan diperlukan pengetahuan seluruh latar belakang hidupnya sebagai totalitas, lebih-lebih lokasi sosiohistorisnya. Metodologi itu tidak hanya disusun dalam menghadapi fakta-fakta beserta permasalahannya, tetapi lebih-lebih berhubungan erat dengan pengalaman pribadi dan realitas sosial yang dihadapi sejarawan.

Tidak jarang metodologi itu tersusun sebagai "jawaban" terhadap negasi atau pengingkaran-pengingkaran, terutama justru untuk membantah negasi itu. Bukankah prinsip Indonesia-sentrisme dikonseptualisasikan justru untuk membantah negasi dari eksistensi sejarah Indonesia yang otonom dan autentik, d.p.l. suatu negasi terhadap identitas bangsa Indonesia yang dilambangkan oleh sejarah Indonesia itu.

Metodologi semacam itulah yang disusun oleh Gadamer dalam bukunya *Wahrheit und Methode*, yang memaparkan suatu hermeneutika baru sebagai prosedur untuk menginterpretasikan gejala dengan pendekatan yang mencakup totalitas dari pengalamannya.

III

Dalam rangka rekonstruksi sejarah nasional amat penting untuk memahami makna karya-karya sejarah serta menentukan identitasnya terutama untuk memperlihatkan bahwa proses rekonstruksi sebagai proses strukturasi kesadaran sejarah. Senantiasa merupakan proses dialektis antara pengalaman negatif adanya pengingkaran-pengingkaran dengan totalitas pengalaman pribadi pada satu pihak, dan pada pihak lain proses interpretif dari orang lain oleh diri sendiri. Yang terakhir ini berarti bahwa untuk dapat memahami orang lain sebagai aktor historis terlebih dulu orang harus mengenal diri-sendiri.

Menurut garis pemikiran ini pengenalan diri serta penyadaran diri menjadi pangkal tolak proses rekonstruksi maka suatu biografi dari penulisan sejarah pembicara akan mengungkapkan makna karya-karyanya, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan historiografi nasional. Sikap refleksif terhadap historiografi yang kita susun akan mampu menonjolkan unsur-unsur legitimasi dan apologi mengenai *status quo*, perhatian atau kepentingan non-akademika atau ekstra-teoretis, lagi pula segala macam distorsi yang berakar dari subyektivitas. Mengenal diri sendiri secara terus-menerus akan mempermudah proses distansiasi dari segala macam subyektivitas itu.

Sehubungan dengan hal di atas perlu di sini ditegaskan bahwa kompleksitas latar belakang karya sejarah jarang atau hampir tak pernah dinyatakan secara eksplisit, oleh karena si pengarang menganggapnya hal yang biasa, namun sebenarnya bagi suatu identifikasi karya itu sangatlah penting untuk melakukan anatomi terhadap kompleksitas itu. Dengan demikian

pelbagai komponen yang tercakup dalam suatu pengambilan keputusan mengenai pemilihan obyek pengkajian akan terungkapkan. Biasanya pemilihan merupakan titik konvergensi pelbagai alasan.

Sebagai ilustrasi dapatlah diambil studi kasus Pembrontakan Petani Banten pada 1888, mengapa tema itu dipilihnya? Suatu perbengkelan sejarah memang memerlukan alat-alat konseptual dan analitis seperti yang umum kenal dari studi formal teori dan metodologi sejarah. Akan tetapi di samping itu banyak prosedur kerja suatu proses pembuatan yang tidak termuat dalam studi formal itu. Untuk memperoleh *expertise* serta pengalaman dalam profesi sejarah tidak berlebih-lebihan kalau ada tuntutan latihan kerja yang intensif agar ada kesempatan leluasa menjadi akrab dengan metode kerja yang praktis. Tanpa pengalaman itu rasanya canggung untuk mulai suatu pengkajian secara sungguh-sungguh.

Pembicara teringat waktu sedang mengurus macam-macam dokumen untuk belajar ke luar negeri berjumpa dengan seorang kenalan yang memberi komentar tentang rencana studi itu dengan pertanyaan "mengapa belajar sejarah Indonesia justru di luar negeri?". Dalam konteks politik waktu itu (Agustus 1962) ucapan itu sungguh dapat dipahami. Selebihnya mengingat situasi akademiknya sebenarnya wajar sekali, lebih-lebih kalau diperhatikan kesempatan latihan dan penelitian sangat minimal. Tradisi studi sejarah kritis belum ada atau masih lemah sekali. Yang sangat diperlukan ialah keahlian plus ketrampilan penulisan sejarah berdasarkan teori dan metodologi yang lazim dipakai dalam studi sejarah kritis. Rekonstruksionisme tanpa hal itu akan mengarah ke deviasi seperti penulisan sejarah nasionalis, sejarah "mistisistik" dan bentuk-bentuk metahistoris lainnya.

Di manakah letak sejarah suatu kasus dalam historiografi Indonesia? Pertanyaan ini mengandung jawaban rangkap, yaitu (1) kedudukannya dalam hubungannya dengan gejala-

gejala historis sejenis; (2) hubungannya dengan sejarah nasional. Apakah eksplanasi dalam studi kasus itu digarap dengan sendiri akan bermunculan pelbagai faktor determinan atau kausal dari kejadian-kejadian yang dideskripsikan.

Hal semacam itu tidak dengan sendiri tampak apabila digarap secara deskriptif-naratif belaka. Yang lebih menarik lagi ialah bahwa faktor-faktor determinan itu mengundang eksplorasi permasalahan luar yang menyangkut gejala-gejala sejenis, dengan perkataan lain, ada semacam tuntutan membuat perbandingan serta generalisasi.

Persoalan seperti ini mau tidak mau muncul dalam kesimpulan studi kasus, mengingat bahwa ciri-ciri yang dapat diidentifikasi baru berlaku bagi kasus tersebut. Secara logis suatu kategorisasi berjenis-jenis gejala itu memerlukan studi perbandingan yang mampu mengekstrapolasikan determinan-determinan serta ciri-cirinya. Apabila generalisasi dan kategorisasi sudah berhasil dibuat untuk sebagian besar kasus-kasus di Indonesia terbuka kemungkinan menyusun karakteristik umum untuk Indonesia sebagai unsur dalam kebudayaan atau identitas nasional.

Sehubungan dengan ini perlu diperhatikan apa yang telah dinyatakan oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* nya, ialah bahwa di samping pengungkapan kejadian-kejadian yang menja-di gejolak zaman, sejarawan perlu memperhatikan gejala-gejala umum dan membuat generalisasi.

Perlu ditambahkan bahwa di dalam teorinya Ibn Khaldun memang menguraikan pembentukan negara tidak terlepas dari kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya sistem pemasaran dan kerajinan, tapi sebaiknya konsentrasi permukiman sekitar istana, birokrasi dan militernya, akan mendorong pertumbuhan kota dalam pelbagai dimensinya.

Tidak berlebih-lebihan bila Ibn Khaldun dapat dipandang tidak hanya sebagai sejarawan tetapi juga sebagai pelopor ilmu sosial, lengkap dengan ungkapan pola-pola, dan kecenderungan

pada pelbagai bidang, maka dapatlah pula dibuatnya generalisasi. Jadi kira-kira lima abad sebelum ada proses "*repproachment*" antara bidang sejarah dengan ilmu-ilmu sosial ternyata kerangka teoretis yang diajukan oleh Ibn Khaldun telah menonjolkan kecenderungan/proses itu.

Sayang sekali Mohammad Yamin dalam prasarannya pada SSN I tidak menaruh perhatian pada masalah ini. Pada hemat pembicara sesungguhnya di sinilah terletak segi yang sangat menentukan bagi penjabaran pandangan "Indonesiasentris", untuk penulisan sejarah nasional.

Di sini kita sampai pada masalah mengenai titik temu atau konvergensi antara sejarah lokal dan sejarah nasional. Di sini pula sering dipertanyakan derajat relevansi sejarah lokal terhadap sejarah nasional.

Seberapa jauh gambaran umum mengenai keadaan transisional sebagai dampak proses modernisasi atau westernisasi yang mengikuti penetrasi kolonial dapat "diberlakukan" bagi masyarakat lokal atau regional? Justru karangan Wertheim dengan pendekatan sosiologis historis merupakan tantangan untuk mengkaji sejarah lokal dengan tujuan menyocokkan apakah proses di tingkat nasional serta berskala makro juga terwujud pada tingkat lokal dan berskala mikro atau makro.

Skenario lokal yang diungkapkan dalam sejarah mikro dengan pendekatan multidimensional atau "*social scientific*" (ilmu-ilmu sosial) ternyata tidak hanya kaya raya akan data historis baru akan tetapi juga mampu mengungkapkan manifestasi kompleksitas dari konflik sosial sebagai akibat proses inovasi dalam bidang sosial ekonomi, politik dan kultural. Penggeseran struktur kekuasaan tradisional ke yang modern dengan beralihnya pusat otoritas kharismatis dan tradisional ke yang legal rasional mempengaruhi struktur sosial bersamaan dengan munculnya nilai-nilai baru yang tercakup dalam sistem birokrasi kolonial dedukasi, komersialisasi dan komunikasi modern.

Variant-variant lokal akan tampil, setting lokal dengan faktor-faktor sosio-kulturalnya memberi karakteristik khusus kepada gejala-gejala sejarah yang jelas-jelas tidak akan tampak bila dideskripsikan secara makro pada tingkat nasional secara umum sekali. Pola dan kecenderungan umum dalam prosks perubahan sosial yang dikristalisasikan sebagai struktur atau lembaga-lembaga baru ditonjolkan dalam studi historis sosiologis. Perspektif itu dapat pula dipakai dalam mengkaji sejarah lokal, terutama dengan tujuan mengungkapkan hal-hal yang sama sehingga kejadian-kejadian lokal dan mikro dapat dipahami maknanya, antara lain bila dipandang sebagai manifestasi kecenderungan umum dalam skop nasional. Di sini perlu ditegaskan bahwa penggarapan deskriptif-naratif memang bagian esensial setiap historiografi namun narativisme tidak mampu memberi eksplanasi seperti diuraikan di atas.

Dalam pada itu penggarapan sejarah mikro yang analitis atau struktural mempunyai implikasi metodologis yang berat, yaitu menuntut agar disiapkan alat-alat analitis dan konseptional sedemikian sehingga proses mikro dapat diuraikan untuk mengekstrapolasikan pelbagai faktor kausal secara eksplisit. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa pendekatan yang di-trapkan selayaknya adalah pendekatan "*social scientific*".

Ditinjau dari kerangka referensi sejarah nasional maka sejarah lokal naratif dapat dianggap kurang relevansinya, sedang sejarah struktural-analitis lebih relevant. Lagi pula optik historis yang analitis-struktural itu akan memandang peristiwa-peristiwa sebagai letupan permukaan dari suatu aliran bawah yang berupa proses jangka menengah dan panjang. Peristiwa yang dipandang secara demikian itu merupakan indikator atau manifestasi dari gejala-gejala umum, seperti kecenderungan struktural, konjungtur ekonomis, sosial atau politik, dan lain sebagainya. Optik historis yang demikian akan mampu tidak hanya melihat aspek-aspek unik dari peristiwa, tetapi lebih-lebih pola-pola umum yang terkandung di dalamnya.

Pembrontakan petani dipandang demikian tidak lain merupakan bentrokan (*clash*) antara kekuatan-kekuatan sosial yang terlibat dalam konflik sosial, karena dalam situasi konflik yang diciptakan oleh perubahan sosial, unsur-unsur sosial mempunyai lokasi sosiokultural yang berbeda-beda dalam menghadapi nilai-nilai baru, maka meledaklah bentrokan kepentingan elite religius dan elite tradisional berhdapan dengan elite birokrasi yang cenderung beradaptasi serta mengakomodasikan diri terhadap struktur kekuasaan baru. Di sini proses umum modernisasi sebagai pembawaan regim kolonial didramatisasikan oleh pelaku-pelaku tokoh lokal.

Historama nasional akan lebih menampilkan *haute relief* apabila variant lokal dapat ditonjolkan; sebaliknya membaca sejarah lokal sebagai tekst akan dapat dipahami maknanya apabila dipandang secara kontekstual yaitu dengan menebarkannya pada latar belakang sejarah nasional. Sifat unik secara implisit mencakup aspek umum, jelaslah bahwa di sini kedua segi dari peristiwa dapat dibedakan secara analitis tetapi tidak dapat dipisahkan.

Generalisasi pada skala nasional mencakup perubahan struktur sosial, konflik sosial, integrasi dan desintegrasi, konsentrasi dan proliferasi, institusionalisasi dan disorganisasi, asimilasi, adaptasi, dan penolakan, dan seterusnya. Dalam pelbagai proses itu senantiasa ada konfrontasi antara kekuatan endogen dengan faktor eksogen, maka pandangan dari dalam benar-benar dapat direalisasikan, dan sekaligus pandangan Indonesiasentris. Kalau pembicara pada akhir limapuluhan dan awal enam puluhan memakai istilah "pendekatan multi-dimensional" yang dipikirkan tidak lain ialah sebagai antithese terhadap sejarah politik dalam arti konvensional, lagipula sebagai konsep kontra segala macam determinisme.

Penulisan Pembrontakan Petani sebagai Gerakan Protes sebenarnya didorong oleh hasrat melancarkan protes terhadap penulisan sejarah Indonesia yang konvensional dan Neerlan-

dosentris itu, jadi dengan memakai pendekatan "*sosial scientific*" itu sekaligus untuk meminjam diktum Van Leur, mengubah perspektif 180 derajat dan mengungkapkan wajah "dari dalam". Kalau secara inherant pendekatan itu mengungkapkan segi-segi struktural masyarakat pribumi, pembicara senantiasa menyadari bahwa penonjolan strukturalisme dapat menyederhanakan proses sejarah menjadi kerangka yang telah kehilangan "darah dan daging" yaitu rentetan aksi dan interaksi para pelaku atau obyek-obyek sendiri, yang dalam totalitasnya mewujudkan peristiwa-peristiwa itu.

Penggarapan sejarah lokal sebagai sejarah sosial seperti teruraikan di atas memuat faktor-faktor positif, antara lain:

- (1) menambah ilustrasi mengenai proses umum pada skala nasional, dan dengan demikian meningkatkan generalisasi dalam sejarah nasional;
- (2) mempertinggi kemampuan mengeksplanasi pelbagai gejala historis pada tingkat lokal dengan mengungkapkan pelbagai faktor dan dimensinya, sesuatu yang dalam narativisme dalam sejarah konvensional tak mungkin dilaksanakan.

Dengan demikian penulisan sejarah Indonesiasentris akan lebih mudah dilaksanakan. Disadari atau tidak angkatan enam-puluhan dengan tepat dapat mengidentifikasikan jenis sejarah apa yang perlu dan layak ditulis, lagi pula melihat bahwa tugas historiografi yang mampu mereka laksanakan dan secara efektif dapat diselenggarakan.

IV

Dalam kebanyakan kehidupan kesarjanaan masa pembuatan disertai merupakan episode sentral bagi perkembangan intelektual pribadi, bagi pembicara demikian pula halnya. Dengan demikian masa sebelumnya dapat dipandang sebagai masa persiapan, dan masa sesudahnya sebagai periode perluasan serta pengembangan lebih lanjut. Metafora "pohon pisang yang

hanya berbunga sekali" bagi pembicara merupakan pedoman yang potensial untuk merangsang stamina intelektual dalam berkarya seterusnya.

Kurikulum jurusan sejarah pada Fakultas Sastra UI dalam awal tahun limapuluhan mencakup ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sosial ekonomi, ilmu negara dan antropologi tidak sedikit mengarahkan dan merangsang perhatian kepada dimensi-dimensi itu dalam studi sejarah, sedang filologi tidak lagi berperan. Kecenderungan teoritis semacam itulah menentukan pula corak kertas kerja pertama dalam konferensi internasional di Singapura pada tahun 1961 yang berjudul "*The Genesis of Indonesian Nationalism*" Pendekatannya struktural-analitis, maka tidak mengherankan kalau kemudian dimuat bersama dengan karangan Harry Y. Benda. Berkat rekomendasi beliau pembicara pada tahun akademis 1962 diterima di Yale dalam *department of Southeast Asia Studies*. Selama dua tahun secara agak eklektis diikuti seminar-seminar dalam bidang-bidang ilmu sosial, di samping bidang sejarah. Ramuan itu ternyata produktif juga dalam membentuk kerangka konseptual bagi penulisan disertasi, meskipun program setiap tahun disusun secara fragmentaris tanpa ada pengarahan kepada orientasi tujuan yang konkrit. Rupanya benda sudah dikuasai oleh stereotipe mahasiswa Indonesia-mungkin prasangka belaka-pergi belajar ke luar negeri (AS) barang setahun dan kemudian kembali membawa mobil (Sic). Penilaian semacam ini bagi pembicara diterimanya sebagai tantangan atau cambuk untuk membuktikan hal-hal sebaliknya.

Pembicara tidak akan sampai di Yale apabila mengikuti nasehat kepala sekolahnya pada saat akan masuk UI. Baginya cukup menempuh kursus B1 saja. Disadarinya bahwa pernyataan seperti itu dalam bahasa Jawa "di-pal", justru baginya merupakan dorongan kuat untuk dengan meminjam peristilahan wayang "mantak aji" (menunjukkan kekuatannya). Rupanya Benda Wertheim sehingga jalan untuk promosi di *Universiteit*

van Amsterdam terbuka baginya. Dengan pengalaman studi di AS rasanya penyusunan disertasi menjadi kelanjutan atau perpanjangan saja dari prosedur kerja yang telah dibiasakannya selama dua tahun ikut program Asia Tenggara itu. Kalau perpindahan menyeberang Atlantik dari Dunia Baru ke Negeri Senja membawa perubahan-perubahan gaya hidup serta pelbagai frustasi, namun bagi pembicara beserta isteri banyak hal dirasakan tidak terlalu asing. Lebih-lebih setelah mapan dan pola kerja mantap, kesibukan penulisan membuat waktu lalu dengan cepatnya. Iklim Belanda dan non status pembicara memberi keleluasan berhari-hari kerja dietape ketiga di Valerius strat 22. Periode 2 tahun plus 3 bulan di Nederland betul-betul produktif secara maksimal, sehingga 1 Nopember 1966 promosi terlaksana. Dari penyusunan kerangka konseptual sampai pembuatan indeks perlu dihayati asketisme terus-menerus: ketekunan, ketelitian, ketuntasan serta kesempurnaan teknis perlu dihayati oleh peneliti, memang ia memrakyekkan apa yang dalam Wedatama disebut "*mesubudi*". Bau kertas arsip atau buku kuno akan merangsang semangat itu. Mohon dimaafkan apabila di sini ada nada mistik atau romantis. Menengok ke belakang setelah duapuluh tahun lampau pengalaman itu menggembelng kita seperti kita telah keluar dari "kawah Condrodimuko" menjadi "manusia baru".

Memang identitas sebagai seorang profesional memuat secara inherent suatu expertise (keahlian), ketrampilan dan pengetahuan teknis tinggi, otonom dan memiliki integritas tinggi. Sudah diketahui umum bahwa profesionalisme derajat tinggi itu merupakan tuntutan atau kondisi pokok bagi terselenggaranya suatu masyarakat modern-industrial yang mencakup derajat ilmu dan teknologi yang tinggi pula.

Berbicara tentang perbengkelan sejarawan sebagai bagian esensial dari profesinya, pendekatan arkhivistik membawa beberapa "bahaya", antara lain perfeksionisme dan antikuaria-nisme. Perfeksionisme akan menyita waktu banyak dalam menelaah dokumen-dokumen karena berkali-kali dibacanya sebe-

lum berani menginterpretasikannya. Antikuarianisme menjerumuskan peneliti dalam suatu hasrat mengumpulkan bahan tanpa batasan yang jelas, antara lain tidak mempertimbangkan relevansinya dengan persoalan yang digarap.

Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa penelitian arsip yang dilakukan tanpa konseptualisasi lebih dahulu akan mudah menyesatkan dan pengumpulan data yang kehilangan arah akhirnya menjadi tujuan tersendiri. Di sini perlu disisipkan mitos klasik Barat yang menceritakan perjalanan Persius penuh rintangan untuk mencari kepala Medusa yang mempunyai kekuatan magis menghancurkan bangunan-bangunan. Setelah kepala Medusa diperoleh hanya dengan berkendara pegasus (kuda sembrani) Persius pada waktunya mencapai tempat di mana calon isterinya. Andromeda akan dikorbankan kepada raksasa. Pada saat terakhir sang putri dapat diselamatkan oleh karena raksasa dapat dihancurkan dengan menghadapkan kepala Medusa ke arahnya. Tidak terlalu sulit kiranya kita melihat persamaan fungsi antara Pegasus dan Medusa di satu pihak, da teori serta metodologi di pihak lain, keduanya merupakan alat-alat "analitis" untuk memecahkan permasalahan atau sebagai kiasan menghancurkan raksasa. Adapun pengetrapan teori dan metodologi menyerupai perjalanan yang penuh rintangan dan kesulitan. Sekali lagi sikap asketis menjadi esensi dari *expertise* seorang profesional.

Pada hemat pembicara di sini kita menyentuh soal yang sangat esensial bagi pengembangan kebudayaan akademis, tanpa hal mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu memproduksi hasil kreativitas sendiri. Sudah barang tentu ini membawa implikasi didaktis di jurusan sejarah, yaitu mahasiswa sejarah tidak hanya memperoleh informasi komprehensif dari fakta-fakta historis tetapi perlu dilatih dalam melakukan pemikiran diskursif, deskriptif naratif, analitis dan kritis.

Dalam periode pasca - promosi pembicara semakin menyadari bahwa dia telah memasuki wilayah permasalahan yang da-

lam deseniium berikutnya berkembang menjadi suatu bidang spesialisasi tersendiri, apa yang disebut *Peasant* atau *Rural Studies*, suatu bidang yang cukup interdisipliner. Sebagai langkah yang merupakan konsekuensi logis dari studi kasus tentang Banten, serta sebagai tindak lanjut kesimpulan studi itu, maka pembicara mulai melakukan studi komparatif antara pelbagai gerakan petani dengan maksud agar sampai pada generalisasi dan kategorisasi jenis fenomena itu. Baik menurut ideologinya, maupun berdasarkan kausalitasnya gerakan petani ternyata menunjukkan pelbagai tipe. Sejarah komparatiflah yang mampu menentukan tipologinya, maka dengan demikian pembicara mau tak mau memasuki daerah "frontier" bagi sejarah yang memang memerlukan perintisan juga kalau dilihat dari kerangka referensi sejarah nasional sejarah komparatif memang sangat relevant, antara lain karena skala nasional menuntut tingkat generalisasi tertentu. Secara konsisten pendekatan ilmu sosial dengan sendiri menjadi suatu kemudahan. Mengeksplorasi seluruh Jawa dalam abad ke-19 dan ke-20 mengungkapkan lima variant atau tipe gerakan petani: (1) anti pemerasan; (2) milenaristik; (3) mesianistik; (4) revivalistik; (5) Sarekat Islam lokal.

Disadari sepenuhnya bahwa konstruk seperti yang disajikan di atas rasanya menyimpang dari penulisan sejarah konvensional. Waktu pembicara menyajikannya di depan forum sejarawan Leiden, ternyata ada yang menyangsikan apakah konstruk seperti itu termasuk sejarah. Pernyataan semacam itu lebih meyakinkan pembicara bahwa dia memang dengan penuh kesadaran dan kesengajaan bertindak secara inkonvensional tidak lain karena itulah jalan yang efektif dapat menjabarkan prinsip Indonesiasentrisme dalam historiografi. Bahwasanya dia dianggap sebagai *rara avis in terris* (sebangsa burung aneh di dunia) lagi pula identitasnya memang menggeser ke arah sejarah sosial terbukti pula pernyataan sejarawan Belanda, Brugmaus dalam promosinya ialah bahwa "Sejarah Pembontakan Petani Banten" bukan sejarah seperti yang dikenal umum.

Impetus intelektual yang kuat memberi dukungan kepada kecenderungan itu sewaktu bersama dengan para ketua seksi Panitia Penulisan Sejarah Nasional pada akhir tahun 1971 dan awal 1972 pembicara melakukan riset kepustakaan di Berkeley. Dipilihnya lokasi itu ternyata sangat menggairahkan selera ke arah Sejarah Sosial oleh karena banyak memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi dengan sejarawan sosial seperti Lapidus, Wakeman, Ben Bellah, P. Smith, dan masih banyak lagi. Dampak dari pengkajian di Berkeley itu mungkin tidak tampak dalam struktur Sejarah Nasional, akan tetapi tidak sedikit pengaruhnya dalam karya-karya pembicara dalam tahun tujuh puluhan. Di samping penggeseran tema ke golongan sosial lain, ada pula suatu proses diferensiasi yang mencakup tidak hanya sejarah gerakan, juga sejarah struktural, intelektual dan mentalitas. Kategori-kategori sejarah itu memang sangat relevant untuk dibahas dalam hubungannya dengan proses perubahan sosial yang mengakibatkan transformasi masyarakat tradisional ke yang modern, seperti yang dimanifestasikan dalam pelbagai dimensinya.

Tema-tema baru seperti stratifikasi sosial, struktur kekuasaan, kepribadian elite modern, kesadaran petani, pola pikiran mitologis, identitas religius, dan lain sebagainya, menuntut pendekatan yang semakin bercorak "social scientific" sebagai implikasi teoretis dan metodologis dari substansi dan problematik tema-tema itu. Rasanya perbengkelan sejarah kita yang masih baru itu memberi keleluasaan untuk memasukkan metodologi baru yang sesuai dengan tugas nasional merekonstruksi sejarah nasional kita. Tanpa adanya "*vested interest*" Sikap keterbukaan sejati sebagai tuntutan ilmiah tidak sedikit akan memperkuat stimulus, intelektual para sejarawan.

Penggeseran fokus perhatian dari sejarah sosial ke sejarah intelektual memang wajar oleh karena keduanya itu sifatnya komplementer. Dalam mengembangkan kebudayaan *expertise* dalam profesionalisme sejarah momentum kreatif perlu dipelihara dengan kesadaran bahwa historiografi sebagai sejarah intelektual tidak kecil peranannya dalam formasi negara nasional

kita serta pembentukan kepribadian nasional ataupun identitas bangsa. Untuk sekian kalinya kita perlu diingatkan bahwa bila seseorang yang kehilangan memorinya (ingatannya-sejarahnya) dengan sendiri tidak lagi memiliki kepribadian, maka demikianlah pula halnya dengan suatu bangsa. Tanpa mengenal sejarahnya, bangsa itu akan kehilangan identitasnya.

Dengan memahami sepenuhnya realitas ini sejarawan perlu memenuhi tuntutan profesinya dengan expertisennya sebaik-baiknya, agar rekonstruksi sejarah nasional dapat mengungkapkan realitas pengalaman kolektif bangsa Indonesia, hal-mana tidak hanya memantapkan lambang persatuan bangsa tetapi juga meningkatkan kesadaran nasional. Dalam rangka pembangunan bangsa sejarah sebagai suatu tubuh pengetahuan seyogyanya tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi data historis sebagai pengetahuan faktual tetapi lebih-lebih sebagai suatu proses penyadaran terutama mengenai eksistensi bangsa Indonesia dalam masa lampau dan sekarang di tengah-tengah ziarahnya ke masa depan dengan tujuan menemukan dan merealisasikan diri.

V

Uraian ini bertolak dari suatu pandangan bahwa berbeda dengan seminar-seminar sejarah yang terselenggara lebih dulu kali ini dirasakan mendesaknya keperluan peningkatan keahlian sebagai unsur fundamental dari profesionalisme dalam bidang sejarah. Gagasan itu tumbuh dari permasalahan yang selama tiga dasa warsa lebih terus-menerus kita hadapi ialah rekonstruksi sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional. Baik dalam konteks pembangunan bangsa maupun dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu sejarah, tugas sejarawan Indonesia cukup kompleks. Menyadari peranan strategis historiografi Indonesia di satu pihak dan menyadari pula tuntutan yang semakin berat metodologi sejarah kritis dewasa ini, di pihak lain komunitas sejarawan diharapkan terus-menerus berkar-

ya dengan penuh tanggung jawab sosial, kewajaran ilmiah serta gairah intelektual, sehingga sambil menyempurnakan profesionalismenya membuat sumbangan yang berharga bagi pembentukan dan pemantapan identitas nasional kita.

Suatu biografi sering ditulis dengan perasaan kagum bercampur rasa heran, ataupun kejengkelan terhadap obyeknya namun lazim pula perasaan-perasaan seperti itu dapat diatasi oleh keinginan kuat untuk memproyeksikan diri sebagai bentuk ekspresif untuk membenarkan diri atau mempertanggungjawabkan kegiatannya. Dengan suatu paksaan dari dalam yang kuat segala perasaan enggan, "rikuh", takut ataupun malu, dapat diatasi dan hal itu dapat dipermudah lagi dengan kesadaran bahwa suatu pengungkapan diri bertujuan tidak lain ialah sebagai "penemuan diri".

Dengan demikian pengalaman pribadi dapat diobyektifikasikan untuk dapat diasimilasikan dengan pengalaman kolektif. Di sini proses per-realisan diri terlaksana karena suatu unsur pribadi telah tercakup dalam realitas sosial. Sekaligus kesadaran diri dipertingkat dengan proses proyeksi diri itu suatu faktor yang merupakan esensi dari pribadi sejarawan yang berusaha memahami tokoh sejarah atau orang lain.

Uraian yang telah dipaparkan kiranya perlu diidentifikasi sebagai suatu aspek dari historiografi yang mencakup pikiran-pikiran refleksif, yaitu suatu bentuk pengungkapan diri sebagai dimensi kesadaran sejarah. Di sini gejala gejala mental yang disebut sebagai *mantifact* dengan perspektif eksistensial fenomenologis dapat diinterpretasikan sebagai struktur-struktur kesadaran. Ternyata struktur kesadaran itu sebagai kompleksitas konstruk-konstruk berfungsi sebagai kerangka pemikiran sejarawan. Yang jelas dari uraian di atas ialah bahwa kerangka itu berkembang dan mencakup seluruh pengalaman sejarawan, jadi bukan semata-mata terbentuk oleh pemikiran murni teoretis-empiris belaka. Sebaliknya, ternyata merupakan proses dialektik dengan permasalahan dari dunia praxis, maka kontekstualisme sangat relevant untuk menganalisa sebuah historiografi.

rafi. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pemikiran refleksif itu tidak hanya mempertinggi kritisisme sejarawan tetapi lebih-lebih meningkatkan sofistikasi metodologinya dan dengan demikian menambah produktivitas serta memperbaiki kualitas karyanya.

Dimaksud sejak awal agar lewat apa yang disebut "*Communicative Sharing*" (kebersamaan komunikatif) pengalaman individual dan untuk dapat diobyektivisasikan dan dengan demikian di universalisasikan. Dalam perbengkelan sejarah dengan prosedur seperti itu ada akumulasi pengalaman bersama yang dalam proses pemupukan kultur akademis kita di Indonesia akan memperkuat pertumbuhan ilmu sejarah yang otonom, autentik dan penuh integritas.

VI

Catatan

Pemilihan tema uraian ini dilakukan kecuali sesuai dengan kerangka referensi panitia pengarah, juga berdasarkan anggapan bahwa dewasa ini profesionalisme di kalangan sejarawan merupakan masalah sentral. Di samping segi praxiologis yang mencakup tuntutan agar historiografi mampu menyumbangkan hasilnya bagi konseptualisasi identitas nasional yang bulat, permasalahan metodologi sudah barang tentu fundamental. Pendekatan yang dipakai dalam menghadapi permasalahan itu ialah dapat diidentifikasi sebagai suatu perspektifisme yang mencakup aspek fenomenologis, eksistensialistis dan strukturalistis. Sintese itu dapat dibenarkan karena hal itu merupakan implikasi metodologi dari konsep historiografi sebagai model yang dipakainya.

- (1) Historiografi sebagai suatu jenis *l'histroirementale* menuntut pendekatan fenomenologis yang didasarkan atas pengalaman dan pemahaman pelaku sendiri;
- (2) ada tuntutan agar pengungkapan bersifat reflektif, sehingga tetap ada kesadaran akan subyektivitas diri sendiri,

seperti kepentingan perhatian, logika, metode serta latar belakang historisnya;

- (3) sifatnya harus komprehensif sehingga mempunyai relevansi terhadap pelbagai realitas sosial dari pelbagai tingkat dan ruang lingkup;
- (4) perlu pula mempunyai relevansi terhadap kehidupan praktis.

Antara SSN I dan SSN IV sesungguhnya dalam historiografi telah dilaksanakan strukturasi visi yang secara filosofis digariskan pada SSN I. Proses strukturasi itu membawa implikasi teoretis-metodologis maka dewasa ini kecenderungan kuat ke arah sejarah *social scientific* atau sejarah analitis dapat dipandang sebagai garis perkembangan yang wajar, yang sejak awal sebenarnya secara immanent terdapat dalam konsep Indonesiasentrisme. Dalam pada itu perkembangan historiografi modern terjadi dalam kontek pertumbuhan studi sejarah kritis umum tidak lain karena cukup besar pengaruhnya dalam masa formasinya di Indonesia. Pendekatan secara biografis atau lebih tepat otobiografis dipandang dalam kerangka pemikiran itu rasanya cukup sesuai, sekedar sebagai sumbangan pemikiran mengenai kedudukan studi sejarah Indonesia dewasa ini. Meskipun pembicaraan terutama berkisar sekitar masalah teoretis-metodologis, namun pembicara menganggap perlu untuk menunjukkan secara sederhana dasar falsafah yang menjadi kerangka pemikirannya.

FAKTA DALAM PENULISAN SEJARAH INDONESIA

(oleh Harsya W. Bachtiar)

Kemajuan dalam pengkajian Sejarah Indonesia sangat tergantung pada cara kita, terutama para sejarawan, bekerja dengan fakta-fakta sejarah. Jelas tidak mungkin ada Sejarah Indonesia, atau tulisan mengenai masa lampau di wilayah negara kita, tanpa menampilkan fakta sejarah. Tulisan tanpa fakta sejarah mungkin merupakan tulisan agama, tulisan filsafah, tulisan sastra ataupun tulisan jenis lain, tetapi jelas bukan tulisan sejarah. Bahkan sejarawan cendekiawan menjadikan fakta-fakta sejarah tertentu dasar dari karya tulisannya. Lagi pula, tulisan-tulisan agama, filsafah dan sastra, yang menguraikan masalah-masalah kehidupan manusia, sering juga mengandung fakta-fakta sejarah, sebagai contoh ataupun bukti kebenaran uraian yang disajikan.

Akan tetapi cara kita bekerja dengan fakta sejarah, cara kita memperlakukan fakta sejarah, banyak pengaruhnya pada seberapa banyak pengetahuan tentang Sejarah Indonesia bertambah berkembang, bertambah maju, atau, bisa juga sebaliknya, menjadi mundur. Perlakuan fakta sejarah secara kurang

”baik” bisa menghambat kemajuan pengetahuan sejarah karena perhatian banyak sejarawan, dan anggauta-anggauta masyarakat yang berminat pada sejarah, bisa tepusatkan pada permasalahan yang ditampilkan sebagai masalah sejarah akan tetapi sesungguhnya bukan permasalahan sejarah melainkan permasalahan yang dicipta oleh penulis atas dasar pemikiran yang kurang benar. Perhatian, pemikiran, dan sering juga tulisan menjadi terpusat pada permasalahan yang semu, permasalahan yang bukan permasalahan bilamana penulis yang bersangkutan tidak membuat kesalahan dalam memperlakukan fakta sejarah dalam karya tulisannya.

Oleh sebab itu, fakta sejarah, yang merupakan penggambaran kenyataan yang terdapat atau terjadi di tanah air kita dalam masa lampau, adalah sedemikian penting sehingga ada baiknya dijadikan sasaran perhatian khusus dalam uraian sederhana ini yang disajikan kepada para sesama peserta Seminar Sejarah Nasional IV yang terhormat. Apa yang hendak dikemukakan ini mudah-mudahan mengingatkan kita kembali pada berbagai permasalahan yang perlu kita perhatikan bilamana hendak mengkaji fakta sejarah dan menggunakannya dalam karya tulisan kita sebagai orang-orang yang bekerja dalam bidang pengetahuan sejarah.

Kita semua tahu bahwa sumber fakta sejarah yang digunakan oleh para sejarawan adalah terutama dokumen-dokumen tertulis, seperti laporan-laporan pejabat dan surat-surat pribadi, ataupun bahan-bahan tercetak, seperti surat kabar, majalah, dan buku. Kita juga mengetahui bahwa fakta-fakta yang terkandung dalam dokumen-dokumen tertulis atau bahan-bahan tercetak, meskipun amat banyak - koleksi dokumen tertulis yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan gudang fakta yang tidak terhingga banyaknya, sesungguhnya hanya merupakan rekaman dari sebagian kecil kenyataan yang terwujud atau terjadi di masa lampau di wilayah negara kita. Kebanyakan peristiwa terjadi tanpa meninggalkan bekas dalam bentuk fakta yang dapat dikaji oleh para sejarawan atau

siapa saja yang berminat. Di antara amat banyak peristiwa yang terjadi di pedesaan-pedesaan di tanah air kita pada suatu hari tertentu hanya sebagian yang amat kecil terrekam sebagai fakta yang kemudian dapat dijadikan sasaran pengkajian. Bahkan, kebanyakan peristiwa yang terjadi di kota-kota besar di tanah air kita pada suatu hari tertentu, misalnya tanggal 1 Oktober 1940, juga tidak terrekam sebagai fakta yang kemudian dapat dikaji. Kenyataan ini mengakibatkan para sejarawan tidak mungkin dapat mengkaji segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, melainkan hanya mengkaji kenyataan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau yang meninggalkan bekas dalam bentuk fakta.

Sekarang semakin banyak sejarawan menyadari bahwa fakta juga dapat diperoleh dalam bentuk keterangan lisan. Amat banyak fakta sejarah juga terrekam sebagai ingatan pada otak seseorang, sehingga, melalui wawancara dengan orang-orang yang memiliki fakta-fakta tertentu sebagai rekaman dalam ingatan mereka, pengkaji atau peneliti sejarah juga bisa memperoleh berbagai fakta sejarah yang malah tidak ada terrekam dalam bentuk tulisan melainkan hanya sebagai ingatan orang-orang tertentu. Dalam mengadakan wawancara, pengkaji atau peneliti sejarah masih dihadapkan dengan kewajiban untuk memeriksa apakah pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh pemberi keterangan sebagai fakta adalah memang fakta dan bukan semata-mata hasil daya cipta pemikiran orang yang diwawancara, atau fakta yang telah diubah agar lebih sesuai dengan kepentingan pemberi keterangan.

Beberapa permasalahan

Dalam banyak tulisan tentang Sejarah Indonesia terdapat masalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat kehendak untuk memberikan gambaran yang menyeluruh. Tidak sedikit tulisan sejarah menampilkan kisah tentang masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan bilamana dalam kenyataan yang ditampilkan adalah kisah tentang masyarakat di Jawa saja, atau, bahkan

lebih terbatas, kisah tentang masyarakat Jakarta saja. Adanya penduduk Indonesia yang lain di kepulauan kita, masing-masing dengan riwayat sejarah yang mungkin berbeda daripada yang ditampilkan atas nama mereka, tidak dihiraukan. Penulisan sejarah Indonesia dalam masa jajahan Hindia Belanda sering kali diselenggarakan dengan cara yang sama. Gambaran tentang masyarakat jajahan Hindia Belanda yang ditampilkan sering kali dalam kenyataan adalah hanya gambaran masyarakat jajahan Belanda di pulau Jawa saja.

Demikian pun halnya dengan penampilan riwayat kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Indonesia sebagai kekuatan yang mengatur riwayat perkembangan keseluruhan penduduk di kepulauan kita. Penggambaran kebudayaan ini seringkali bukanlah penggambaran kebudayaan Indonesia, melainkan kebudayaan penduduk di daerah-daerah yang lebih terbatas, biasanya kebudayaan Jawa atau kebudayaan Melayu.

Karena penggunaan pengertian masyarakat Indonesia dan kebudayaan Indonesia dalam karya-karya tulisan sejarah tertentu tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang bersangkutan, maka kisah masyarakat Indonesia dan kisah kebudayaan Indonesia yang bersangkutan tidak merupakan fakta sejarah, melainkan fakta yang diubah sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan fakta. Tentu saja bilamana karya tulisan yang bersangkutan ditulis oleh awam, atau bilamana sejarawan yang menulis tulisan demikian sebagai tulisan populer, tulisan untuk memenuhi kebutuhan politik, penulis berhak membuat apa yang di sini ditanggapi sebagai kesalahan. Akan tetapi, bilamana penulis yang bersangkutan sebenarnya hendak menghasilkan suatu karya ilmiah, ia membuat kesalahan ilmiah.

Dalam penulisan sejarah ada sejarawan-sejarawan yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu, terlebih lagi suatu bangsa, negara, angkatan atau generasi, kebudayaan, zaman, dan bahkan riwayat sejarah sendiri sebagai satu keseluruhan, mengandung hakekat tertentu, suatu inti dasar dari kenyataan atau gejala

yang bersangkutan. Fakta-fakta yang didasarkan atas kenyataan atau gejala yang bersangkutan, seperti peristiwa-peristiwa tertentu, ditanggapi dan ditampilkan sebagai perwujudan hakekat yang tersembunyi itu. Hakekat suatu kenyataan atau gejala tertentu tentu saja sukar dibuktikan, atau mungkin malah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, sehingga menampilkan suatu peristiwa sebagai perwujudan hakekat suatu hal ikhwal tertentu pun bukanlah cara berpikir ilmiah.

Sejarawan-sejarawan tertentu, terutama yang menulis karya-karya tulisan populer yang diharapkan akan dibaca oleh banyak orang, cenderung terpukau pada fakta-fakta yang menyolok, yang aneh, yang kelihatannya luar biasa, atau yang gemilang, dan dengan penuh semangat fakta-fakta ini ditampilkan pada pembaca yang mungkin tidak tertarik pada karya-karya tulisan sejarah yang berusaha memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan tetapi yang dapat menghargai kita tokoh-tokoh, atau peristiwa-peristiwa, yang ditampilkan sebagai tokoh-tokoh, atau peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh istimewa, luar biasa. Pemilihan fakta semata-mata atas dasar sifat kegemerlapan fakta-fakta yang bersangkutan tentu tidak memungkinkan penggambaran sejarah yang cukup seimbang.

Sebaliknya, masalah berkenaan dengan pemilihan fakta sejarah juga terjadi karena ada berbagai sejarawan yang terpukau pada adanya perilaku pelaku-pelaku sejarah yang rupanya senantiasa bertindak atas dasar kelicikan. Para sejarawan demikian cenderung beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa yang berakibat banyak dan oleh sebab itu banyak berpengaruh pada perkembangan politik, ekonomi, masyarakat, atau sektor lain dari kehidupan manusia disebabkan justru oleh tokoh-tokoh yang senantiasa melakukan perbuatan yang terselubung, tindakan-tindakan yang tidak dapat dianggap wajar dan oleh sebab itu senantiasa dirahasiakan. Fakta-fakta yang mengungkapkan apa yang tadinya terselubung, tidak diketahui oleh umum, dianggap amat penting sehingga dijadikan sasaran perhatian utama, sedangkan fakta-fakta yang memperlihatkan kenyataan yang da-

pat dilihat, diamati dengan mudah oleh banyak orang, dianggap tidak ada nilainya, karena dianggap hanya merupakan selubung belaka yang diadakan untuk menutupi kelicikan-kelicikan tertentu. Apa yang mudah terlihat, apa lagi bilamana memberi kesan yang baik, dianggap pasti tidak benar, hanya dibuat-buat saja, meskipun kelihatan jelas sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada daam kenyataan, karena kebenaran dianggap terdiri atas hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang senantiasa disembunyikan oleh orang-orang yang bersangkutan.

Para sejarawan, terutama anu-ahli sejarah yang menganggap diri sebagai pekerja-pekerja dalam lapangan ilmu pengetahuan, diharapkan mengungkapkan apa yang terjadi di masa lampau sebagaimana adanya dengan menyajikan uraian yang seimbang. Akan tetapi, sejarawan-sejarawan tertentu cenderung lebih mengutamakan peranan sebagai semacam ulama, atau pendeta, yang mengangkat diri sendiri sebagai wakil moralitas daripada peranan sebagai ahli dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, ilmu sejarah. Mereka cenderung berusaha dengan gigih, dengan penuh semangat, untuk menampilkan hanya fakta-fakta sejarah yang dapat dibenarkan atas dasar moralitas. Tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa tertentu dipilih untuk ditampilkan sebagai contoh pola-pola prilaku yang baik dan oleh sebab itu perlu dijadikan suri teladan, sedangkan fakta-fakta sejarah yang tidak dapat dibenarkan atas dasar moralitas disembunyikan atau ditampilkan dengan disertai kutukan, atau peringatan agar pola-pola prilaku yang bersangkutan jangan ditiru.

Suatu cara pemilihan fakta yang cukup menarik tapi sering juga tidak dapat dibenarkan atas dasar cara-cara bekerja yang lazim di kalangan pekerja-pekerja dalam lapangan ilmu pengetahuan ialah pemilihan fakta atas dasar kegunaan fakta-fakta yang bersangkutan untuk membenarkan suatu pendapat atau keinginan tertentu. Cara pemilihan fakta demikian, yang dapat disebut pemilihan fakta atas dasar tuntutan pragmatik, didahului dengan apa yang harus ditanggapi sebagai hasil penelitian, atau kesimpulan pengkajian, yang telah ditetapkan sebelum pengkaji-

an atau penelitian diselenggarakan. Pemilihan fakta sejarah kemudian dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat, hal mana tentu adalah cara bekerja yang berbeda sekali dari cara penyelenggaraan pengkajian ilmiah. Cara pemilihan fakta atas dasar tuntutan pragmatik banyak terlihat pada proyek-proyek penelitian pesanan. Pemesan menentukan kesimpulan yang harus ditampilkan dalam laporan hasil penelitian yang akan dibuat, sedangkan sejarawan yang bersangkutan mencari fakta-fakta sejarah yang dapat mendukung kesimpulan yang telah ditentukan. Fakta-fakta sejarah yang tidak mendukung, malah tidak membenarkan kesimpulan yang telah ditetapkan itu, diabaikan, disisihkan, atau, malah kalau bisa, dihapus dari permukaan bumi kita ini tanpa meninggalkan jejak.

Kita lihat bahwa ada berbagai pertimbangan yang digunakan oleh sejarawan dalam memilih fakta yang akan ditampilkan dalam karya tulisannya. Sengaja di sini dikemukakan cara-cara pemilihan fakta sejarah yang mengandung kelemahan bilamana kita hendak mengkaji sejarah dan menulis karya tulisan sejarah sebagai upaya ilmiah. Kelemahan-kelemahan ini ditampilkan dengan harapan agar ada di antara para ahli sejarah kita yang sungguh-sungguh berusaha menghasilkan karya tulisan sejarah yang mengutamakan pedoman-pedoman bekerja yang lazim digunakan oleh pekerja-pekerja dalam lapangan ilmu pengetahuan.

Dan, ada juga sejarawan yang tidak merasa perlu menentukan terlebih dahulu fakta-fakta apa yang ia perlukan buat pengkajiannya, bahkan mungkin tidak merasa perlu menentukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran perhatiannya, sehingga fakta-fakta yang kemudian menjadi sasaran perhatiannya adalah semata-mata fakta-fakta yang secara kebetulan dijumpainya. Fakta-fakta yang ditemui secara kebetulan ini ditampilkan saja tanpa pengetahuan tentang makna fakta-fakta yang bersangkutan serta kaitan fakta-fakta ini dengan fakta-fakta lain yang kebetulan tidak ditemukannya karena memang tidak ada upaya untuk menemukannya. Biasanya atas dasar fakta-fakta demikian dikembangkan uraian yang lebih didasarkan atas imajinasi dari-

pada upaya serius untuk menampilkan kembali keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam masa lampau dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut cara-cara yang lazim dalam bidang pengetahuan sejarah. Banyak tulisan-tulisan sejarah yang bersifat populer dan ditulis oleh awam memperlihatkan pola ini.

Apakah fakta sejarah itu?

Tetapi, apakah yang harus diartikan dengan fakta sejarah? Banyak orang mengartikan fakta sebagai apa yang juga dinamakan kenyataan. Fakta adalah kenyataan, kata mereka. Pemberian arti demikian sudah merupakan kelemahan dasar dalam pengkajian, karena fakta tidak sama dengan apa yang dinamakan kenyataan empirik, sesuatu yang dapat dialami, yang dapat diamati oleh manusia.

Seorang ilmuwan mengemukakan bahwa fakta adalah suatu pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empirik tentang suatu gejala yang ditanggapi dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran (konseptual) tertentu. Dalam pengkajian sejarah tidak mungkin gejala yang menjadi sasaran perhatian diamati untuk menguji fakta yang bersangkutan secara empirik. Gejala, atau kenyataan, yang bersangkutan sudah terjadi sehingga tidak dapat dilihat lagi. Meskipun begitu, pengkaji atau peneliti sejarah tetap diharapkan mempermasalahkan kebenaran pernyataan yang dihadapinya dan berusaha, dengan berbagai cara, memeriksa apakah pernyataan yang dihadapi sungguh-sungguh dapat dianggap menggambarkan gejala, atau kenyataan, yang bersangkutan. Memang sering kali sejarawan yang mengadakan pengkajian menghadapi pernyataan-pernyataan tertulis, ataupun lisan, yang sukar sekali diuji kebenarannya sehingga terpaksa menerima saja pernyataan yang bersangkutan sebagai fakta, tetapi dengan mempertahankan sikap terbuka, menerima kemungkinan bahwa pada suatu waktu terbukti bahwa pernyataan yang bersangkutan sebenarnya bukan fakta.

Setiap fakta, termasuk fakta sejarah, dibuat dengan penggunaan kerangka pemikiran tertentu. Pengamatan kenyataan atau peristiwa yang bersangkutan dengan penggunaan kerangka pemikiran yang lain bisa menghasilkan fakta-fakta yang berlainan sama sekali dan mungkin malah bertentangan dengan fakta-fakta yang dibuat dengan kerangka pemikiran yang pertama. Dalam masa revolusi kita, misalnya, seseorang tertentu bisa digambarkan sebagai sahabat lama bila menggunakan kerangka pemikiran tertentu tetapi bisa juga digambarkan sebagai musuh, orang Nica, bila menggunakan kerangka pemikiran yang lain. "Sahabat lama" dan "musuh" adalah dua pengertian yang bertentangan, akan tetapi dalam hal orang yang bersangkutan kedua-duanya adalah sesuai dengan kenyataan, keduanya adalah fakta. Orang yang sama bisa ditanggapi dengan berbagai kerangka pemikiran yang lain, yang masing-masing menghasilkan fakta tersendiri yang berbeda bila mana dibanding satu dengan yang lain. Itulah sebabnya pengkaji atau peneliti sejarah harus senantiasa sadar bahwa suatu fakta dalam dokumen tertentu dibuat dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran tertentu dan tidak merupakan kemungkinan satu-satunya untuk menggambarkan kenyataan atau peristiwa yang bersangkutan.

Kerangka pemikiran

Dalam pengkajian atau penelitian dan penulisan sejarah dapat diadakan pilihan berkenaan dengan kerangka pemikiran yang hendak digunakan. Pada umumnya, sejarawan hendak menyajikan kisah, riwayat, atau cerita sejarah yang menarik dengan mengikuti pengalaman orang, atau orang-orang, yang ditokohkan, dengan mengisahkan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, dengan menggambarkan suka-duka yang menyertai riwayat mereka.

Kerangka pemikiran yang digunakan dapat juga memberi banyak perhatian pada apa yang menggerakkan para pelaku yang dijadikan sasaran perhatian untuk berbuat. Kerangka pemikiran demikian senantiasa mengarahkan perhatian pembaca

pada penggerak atau motivasi pelaku. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh para pelaku sejarah yang bersangkutan dianggap tidak begitu penting dibanding dengan apa yang menggerakkan mereka untuk berbuat, apa yang mengakibatkan mereka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Kerangka pemikiran lain mengutamakan upaya menggambarkan, menganalisa dan menjelaskan hubungan sebab-akibat dari peristiwa-peristiwa yang menjadi sasaran perhatian, sedangkan ada juga kerangka pemikiran yang memusatkan perhatian pada upaya menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan kesatuan sosial yang menjadi sasaran perhatian. Fakta-fakta yang dijadikan sasaran perhatian dalam pengkajian sejarah banyak tergantung pada kerangka pemikiran yang dipilih untuk digunakan.

Di samping kerangka-kerangka pemikiran yang sudah disebut, masih terdapat kerangka pemikiran yang memusatkan perhatian pada upaya membuat generalisasi, atau analisa, atau analogi, atau perbandingan.

Pemanfaatan teori ilmu-ilmu sosial

Pengkaji atau peneliti sejarah bisa memperoleh banyak manfaat dari pengetahuan teori yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu ekonomi. Teori dalam ilmu-ilmu sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui secara lebih tepat batas-batas pengetahuan yang kita miliki dan pengetahuan yang belum dimiliki. Pengetahuan teori memungkinkan pengkaji atau peneliti mengadakan pilihan permasalahan yang hendak dijadikan sasaran perhatian dengan cara yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada membuat pilihan permasalahan tanpa dasar tertentu. Dengan penggunaan kerangka teori tertentu kerangka pemikiran yang digunakan dalam pengkajian atau penelitian sejarah pun menjadi lebih jelas. Setiap teori dalam ilmu-ilmu sosial mengandung kekuatan-kekuatan tertentu tapi juga kelemahan-kelemahan tertentu. Penggunaan kerangka teori tertentu dalam pengkajian sejarah me-

ungkinkan sekalian yang berkepentingan, termasuk pengkaji atau peneliti sendiri, mengetahui kekuatan maupun kekurangan atau kelemahan yang terkandung dalam pengkajian yang bersangkutan. Tanpa penggunaan kerangka teori tertentu kemungkinan membuat kesalahan atau menghasilkan hasil pengkajian yang mengandung kekurangan dan kelemahan tanpa diketahui oleh pengkaji atau peneliti sendiri cenderung adalah lebih besar.

Teori ilmu-ilmu sosial didasarkan atas kenyataan-kenyataan sosial dan dianggap berlaku di dalam ruang dan waktu mana pun, termasuk masa lampau yang menjadi sasaran perhatian para sejarawan, di mana gejala-gejala sosial yang bersangkutan berada. Integrasi sosial, misalnya, terdapat sedikit banyaknya di setiap masyarakat. Tanpa integrasi sosial masyarakat yang bersangkutan tidak mungkin dapat bertahan. Integrasi sosial juga terdapat, sedikit banyaknya, pada setiap kesatuan sosial, seperti keluarga, perguruan, organisasi politik, perusahaan, ataupun angkatan bersenjata. Teori integrasi memusatkan perhatian pada kenyataan-kenyataan sosial yang merupakan perwujudan segala integrasi ini dan berusaha menjelaskan apa yang menyebabkan adanya integrasi di kesatuan sosial yang bersangkutan. Sebaliknya, pertentangan juga terdapat sedikit banyaknya dalam hampir setiap masyarakat. Biasanya ada pertentangan antar generasi, pertentangan antara yang memerintah dan yang diperintah, sering juga terdapat pertentangan kelas atas dasar kepentingan ekonomi yang berbeda, dan terutama dalam masyarakat modern juga terdapat pertentangan ideologi, sehingga, ada teori-teori ilmu-ilmu sosial yang memusatkan perhatian pada gejala pertentangan sosial dan upaya untuk menjelaskan apa yang menyebabkan adanya pertentangan dalam kesatuan sosial jenis tertentu.

Penggunaan teori ilmu-ilmu sosial sebagai kerangka berpikir dalam pengkajian sejarah memungkinkan pemanfaatan konsep-konsep ilmiah yang telah dikembangkan khusus untuk menggambarkan dan menganalisa gejala-gejala sosial tertentu, ter-

masuk gejala-gejala sosial yang terdapat dalam masa lampau. Banyak di antara konsep-konsep demikian, seperti negara, pelapisan sosial, pranata, patrimonialisme dan elite kekuasaan, telah menjadi bagian dari peralatan ilmiah para ahli sejarah. Konsep-konsep yang digunakan dalam pengkajian atau penelitian sejarah menentukan kenyataan apa yang akan diperhatikan dan fakta-fakta apa yang akan dibuat.

Berbagai kerangka teori ilmu-ilmu sosial pun telah digunakan untuk mengkaji hubungan antar faktor, atau hubungan antara jenis gejala yang satu dengan jenis gejala yang lain, dalam pengkajian sejarah sehingga teori-teori yang bersangkutan telah juga menjadi bagian dari pengetahuan sejarah. Berbagai ahli sejarah, terutama di negara-negara sosialis (komunis), berpedoman pada teori K. Marx dalam mengkaji hubungan antara sistem ekonomi dan pertentangan kelas di suatu masyarakat tertentu dalam masa tertentu. Ada ahli-ahli sejarah yang terpengaruh oleh teori analisa-psiko S. Freud dalam upaya menjelaskan pola prilaku tokoh-tokoh tertentu, seperti M.K. Gandhi dan A. Hitler, dengan menampilkan kaitan antara pengalaman dalam masa anak-anak dengan kecenderungan prilaku mereka. Ada ahli-ahli sejarah yang sangat terpengaruh oleh teori integrasi yang dikembangkan oleh E. Durkheim; dan hubungan antara etika keagamaan dengan perilaku ekonomi sebagaimana ditampilkan oleh M. Weber dalam pengkajiannya tentang etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, serta pengkajiannya tentang agama Cina, Tao, Hindu, Buddha, dan Yahudi Kuno. Agak lebih baru adalah pengaruh teori umum yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yang mengadakan pembedaan antara sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, sistem perilaku serta menjelaskan hubungan antara keempat sistem ini satu dengan yang lain.

Meskipun ahli sejarah memanfaatkan pengetahuan teori ilmu ilmu sosial, ahli sejarah tetap mempunyai tugas khusus dalam ilmu pengetahuan karena sasaran perhatiannya adalah tetap upaya untuk menggambarkan, mengerti dan menjelaskan keadaan-keadaan, proses-proses, ataupun peristiwa-peristiwa yang

terjadi dalam masa lampau. Apa pun teori atau metoda yang digunakannya dalam pengkajian atau penelitiannya, ia tidak dibenarkan menyimpang dari fakta sejarah yang menjadi dasar uraiannya dan bukti kebenaran pernyataan-pernyataan yang ditampilkan dalam karya-karya tulisan sejarahnya.

Tulisan sejarah buat siapa?

Buat siapakah suatu tulisan sejarah ditulis? Buat siapakah seorang sejarawan menulis karya tulisannya? Mungkin tak ada sejarawan yang menulis sekedar untuk memberi sumbangan pada apa yang dinamakan ilmu pengetahuan. Secara sadar ataupun tidak sadar, sejarawan menulis dengan harapan agar tulisannya dibaca oleh orang lain, tidak untuk diabadikan sebagai suatu karya terbitan yang tidak dibaca oleh siapa pun. Secara sadar ataupun tidak sadar, pada waktu menulis karya tulisannya, sejarawan yang bersangkutan berkeinginan agar orang-orang tertentu akan membaca karya tulisannya. Dan lagi, secara sadar ataupun tidak sadar, sejarawan yang bersangkutan berusaha agar tulisannya dapat mempengaruhi pemikiran para pembaca tulisannya, sehingga ia berusaha menulis sedemikian rupa agar pembaca yang menjadi sasaran perhatiannya memang memperhatikan apa yang ditulisnya.

Tentu saja, tidak semua sejarawan berhasil memikat pembaca dengan tulisan mereka, karena antara lain, penulisan suatu karya tulisan sejarah tidak hanya menuntut pengetahuan yang luas dan mendalam tentang fakta-fakta sejarah tertentu melainkan juga kemampuan untuk menulis suatu karya sejarah secara cukup menarik. Kadang-kadang malah gaya penulisan yang menarik bisa menyembunyikan kenyataan bahwa penulis tidak begitu menguasai pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah yang bersangkutan.

Ada kecenderungan pada ahli sejarah yang menganggap dirinya sebagai orang yang bekerja dalam lapangan ilmu pengetahuan dan oleh sebab itu berkeinginan untuk dapat memberi sumbangan pada perkembangan pengetahuan dalam bidang

pengetahuan sejarah, untuk menulis karya tulisannya buat sesama ahli sejarah, atau calon ahli sejarah. Dalam tulisan-tulisan demikian fakta-fakta sejarah ditampilkan dengan berhati-hati, dengan penuh kesadaran bahwa pembaca, rekan dalam bidang sejarah, akan mempelajari fakta-fakta yang bersangkutan, secara cermat, siap untuk memperlihatkan kelemahan dalam penampilan fakta-fakta ini, kebenarannya, pilihannya, penafsirannya, siap untuk menggugat penulis sebagai sejarawan yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya; bahkan, mungkin, siap untuk mempermasalahkan kemampuan penulis sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan ilmiah dalam bidang pengetahuan keahlian mulia yang bersangkutan, bidang pengetahuan sejarah. Asal-usul masing-masing fakta penting yang ditampilkan dijelaskan secara terperinci, sering dalam bentuk catatan kaki yang menakutkan atau, sebaliknya, mengkhawatirkan mahasiswa atau awam pembaca yang menanggapi catatan kaki sebagai tanda keilmiahan suatu karya tulisan. Pasti penulis adalah seorang sarjana yang begitu tinggi mutu pengetahuan ilmiahnya sehingga tidak mungkin dapat dijangkau oleh manusia biasa, seperti mahasiswa yang masih harus belajar banyak untuk menjadi orang terpelajar.

Suatu jenis tulisan sejarah sengaja ditulis untuk dikaji oleh para anak didik, siswa-siswa di sekolah ataupun mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi. Fakta-fakta sejarah yang ditampilkan dalam tulisan-tulisan sejarah demikian, terutama dalam buku-buku yang ditulis sebagai buku pelajaran, pada umumnya adalah fakta-fakta yang seolah-olah sudah menjadi pengetahuan sejarah yang baku, pengetahuan yang sudah dianggap benar oleh kebanyakan ahli sejarah. Pilihan fakta-fakta sejarah yang ditampilkan dan penafsiran masing-masing fakta ini sudah menjadi kela-ziman di kalangan kebanyakan orang. Melalui pengajaran sejarah dengan penggunaan buku-buku pelajaran ini, fakta-fakta yang ditampilkan dalam buku-buku pelajaran yang bersangkutan menjadi lebih baku lagi, karena dijadikan pengetahuan oleh amat banyak peserta didik yang tersebar luas di seluruh

tanah air kita. Fakta-fakta sejarah yang dipilih untuk ditampilkan dalam buku-buku pelajaran sejarah nasional di sekolah-sekolah kita, seperti juga di kebanyakan negara di dunia kita ini, diharapkan membantu pertumbuhan perasaan kebangsaan pada para siswa dan menjadikan mereka warga Negara Republik Indonesia yang bangga bahwa mereka adalah bagian dari kebangsaan Indonesia.

Beberapa karya tulisan sejarah ditulis khusus untuk dibaca, dikaji, oleh para pemimpin bangsa atau negara kita, orang-orang yang menempati kedudukan yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang mempengaruhi kepentingan banyak orang. Karya-karya tulisan yang sengaja ditulis untuk para pemimpin diharapkan memberi pengetahuan sejarah yang sama bagi sekalian pemimpin sehingga cara mereka memandang perkembangan masyarakat, bangsa dan negara di masa lampau, yang mengakibatkan keadaan di masa sekarang dan yang akan mempengaruhi perkembangan di masa akan datang, adalah sama. Karya-karya tulisan demikian biasanya dianggap merupakan sejarah resmi, tafsiran sejarah nasional yang dibenarkan oleh pemerintah dan dijadikan pegangan oleh pejabat-pejabat pemerintah, serta pendukung-pendukung utama mereka.

Golongan-golongan tertentu dalam masyarakat kita juga ingin agar peranan mereka sebagai golongan mendapat tempat yang layak dalam sejarah nasional kita. Keinginan untuk merekam riwayat pertumbuhan dan perkembangan golongan yang bersangkutan, dengan, kalau dapat, memperlihatkan perjuangan yang telah dilaksanakan oleh golongan yang bersangkutan dalam rangka perjuangan gerakan kebangsaan Indonesia melawan penjajahan asing, menghasilkan semakin banyak buku yang ditulis sendiri oleh penulis-penulis golongan yang bersangkutan dan biasanya juga diterbitkan sendiri. Berbagai kesatuan sosial, seperti perguruan tertentu, golongan profesi tertentu, perusahaan tertentu, divisi atau komando daerah militer tertentu, dan organisasi politik tertentu, telah mengumpulkan fakta-fakta sejarah

kesatuan sosial yang bersangkutan dan menghasilkan buku riwayat kesatuan mereka.

Akhir-akhir ini semakin banyak terbit karya tulisan sejarah yang ditulis oleh para sejarawan masyarakat-masyarakat daerah tertentu untuk, terutama, dibaca oleh sesama anggota masyarakat daerah yang bersangkutan. Karya-karya tulisan ini menampilkan banyak fakta sejarah yang belum diperhatikan dalam penulisan sejarah Indonesia. Fakta-fakta yang disajikan dalam karya-karya tulisan sejarah masyarakat daerah masih menunggu untuk diperhatikan, dikaji dan dimasukkan dalam karya-karya tulisan sejarah yang ditampilkan sebagai tulisan-tulisan yang menyajikan kisah sejarah Indonesia.

Akhirnya, ada juga karya-karya tulisan sejarah yang sengaja ditulis untuk dibaca oleh rakyat biasa. Tulisan-tulisan demikian biasanya disajikan dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan atas dasar anggapan bahwa pengetahuan umum yang dimiliki oleh pembaca sangat terbatas. Ada karya-karya tulisan demikian yang diterbitkan untuk menaikkan taraf pengetahuan umum rakyat biasa yang merupakan anggota masyarakat yang paling besar jumlahnya tanpa keinginan untuk mempengaruhi perkembangan politik mereka, tetapi ada juga tulisan yang sengaja ditulis untuk dibaca oleh rakyat biasa agar pemikiran, dan diharapkan kemudian juga kecenderungan tindakan mereka di gelanggang politik, berkembang ke arah pemikiran tertentu. Fakta-fakta sejarah yang ditampilkan adalah biasanya fakta-fakta sejarah yang dapat menggerakkan pemikiran para pembaca.

Buat siapa sejarah ditulis ikut menentukan fakta-fakta mana yang dianggap oleh penulis perlu ditampilkan. Pasti banyak sekali kenyataan yang dapat dijadikan sasaran perhatian oleh Prapanca dalam menulis Negarakertagama, akan tetapi karena penulis sejarah ini menulis untuk raja, ia menampilkan kenyataan-kenyataan tertentu saja dan mengabaikan banyak kenyataan lain. Gambaran yang diperoleh pembaca tentang Majapahit, oleh sebab itu, adalah gambaran yang menampilkan kemegahan, gambaran yang menyenangkan raja sebagai penguasa ne-

gara. Bilamana Prapanca tidak menulis untuk raja melainkan untuk para tani yang harus bekerja giat agar supaya ekonomi di wilayah Kerajaan Majapahit menghasilkan kelebihan (surplus) dalam hasil produksi, kelebihan yang diperlukan untuk memungkinkan pembangunan istana-istana dan bangunan-bangunan lain yang megah; memungkinkan para bangsawan menikmati seni tari dan musik, seni lukis dan seni pahat, falsafah dan ke-susastraan, hukum dan politik, keamanan dan pertahanan, serta pendidikan dan latihan; memungkinkan perjalanan-perjalanan keliling raja, beserta rombongan para pejabat dan petuas, di wilayah negara, penyajian santapan dan pemberian tempat penginapan yang sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota rombongan, serta pementasan hiburan yang dapat mengakibatkan mereka meninggalkan pedesaan atau kota yang bersangkutan dengan rasa senang; memungkinkan tentara dan armada yang mempunyai kemampuan untuk memperluas wilayah kerajaan dan daerah-daerah taklukannya; dan memungkinkan segala sesuatu yang lain yang mengakibatkan Kerajaan Majapahit menjadi kedatuan yang agung, karya tulisan Prapanca mungkin sekali akan menampilkan fakta-fakta yang lain sekali jika dibanding dengan karya tulisan yang kita kenal sekarang ini sebagai kitab *Negarakertagama*. Bilamana Prapanca menulis sejarah untuk para sesama pendeta, yang perhatian utamanya adalah pemikiran dan kegiatan keagamaan, karya tulisannya pasti juga akan menampilkan fakta-fakta yang lain dari pada yang ditampilkan dalam kitab *Negarakertagama* yang sekarang menjadi sumber keterangan utama yang kita miliki dalam mengkaji kenyataan sejarah di Kerajaan Majapahit.

Bahwa sejarawan-sejarawan tertentu bekerja dan menulis seperti Prapanca tidak berarti bahwa gambaran tidak lengkap dan yang juga merupakan gambaran yang diperindah tidak mempunyai tempat yang layak di antara karya-karya tulisan sejarah karena tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku dalam ilmu pengetahuan. Karya-karya tulisan demikian mempunyai kegunaan yang berarti karena dapat memberikan

kebanggaan pada bangsa yang bersangkutan dan kepercayaan akan kebenaran kebijaksanaan pemerintahan negara yang bersangkutan. Akan tetapi tentu saja karya-karya tulisan demikian juga harus ditanggapi sebagai karya-karya pengagungan dengan sekalian akibatnya.

Penutup

Mudah-mudahan kesadaran yang lebih besar tentang beraneka ragam permasalahan yang berhubungan dengan fakta memungkinkan pengkajian dan penulisan sejarah Indonesia yang lebih dapat dipertanggungjawabkan atas dasar pedoman-pedoman yang lazim digunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan. Justru kesadaran akan adanya beraneka ragam permasalahan yang berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai fakta sejarah itulah yang semestinya membedakan ahli sejarah dari awam yang mempunyai minat besar pada sejarah sehingga juga melibatkan diri dalam pengkajian sejarah. Baik ahli sejarah maupun awam yang juga melakukan pengkajian dan penulisan sejarah dapat memberi sumbangan pada perkembangan pengetahuan tentang Sejarah Indonesia. Akan tetapi, ahli sejarah, sebagai orang yang pekerjaan utamanya berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, berkewajiban untuk lebih memperhatikan pedoman-pedoman yang pada umumnya dianggap berlaku bagi orang-orang yang pekerjaan utamanya adalah dalam lapangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ABRAMS, Philip,
Historical Sociology
Somerset, England: Open Books Publishing Ltd., 1982
- BRAUDEL, Fernand,
On History
Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Sarah Matthews
Chicago: The University of Chicago Press, 1980.
- BURKE, Peter,
Sociology and History
London: George Allen & Unwin, 1981.
- CANNON, John, ed.,
The Historian at Work
London: George Allen & Unwin, 1980.
- FERRO, Marc, ed.,
Social Historians in Contemporary France: essays from Annales
Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh staf. Annales,
Paris. New York: Harper Torchbooks, Harper & Row,
1962.
- FISCHER, David Hackett,
- FINBERG, H.P.R., ed.,
Approaches to History: a symposium
Toronto: University of Toronto Press, 1962.

- FISCHER, David Hackett,
 Historians' Fallacies: toward a logic of historical thought
 New York: Harper Colophon Books, Harper & Row,
 1970.
- FORSTER, Robert, dan Orest RANUM, ed.,
 Family and Society: selections from the Annales.
 Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Elborg FORSTER
 dan Patricia M. RANUM.
 Baltimore dan London: The Johns Hopkins Press, 1976.
- FORSTER, Robert, dan Orest RANUM, ed.,
 Rural Society in France: selections from the Annales
 Diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Elborg FORSTER
 dan Patricia M. RANUM.
 Baltimore dan London: The Johns Hopkins Press, 1977.
- HENIGE, David,
 Oral Historiography
 London: Longman, 1982.
- LANDES, David S., dan Charles TILLY, ed.,
 History as Social Science.
 Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1971.
- MARWICK, Arthur,
 The Nature of History
 London: Macmillan Press, 1971.
- NADEL, George H., ed.,
 Studies in the Philosophy of History: selected essays from
 History and Theory
 New York: Harper Torchbooks, Harper & Row, 1965.
- PARSONS, Talcott,
 The Structure of Social Action: A study in social theory
 with special reference to a group of recent European writers
 Cetakan ke-3. New York: The Free Press of Glencoe, 1964
- Social Systems and the Evolution of Action Theory
 New York: The Free Press; London: Collier Macmillan
 Publishers, 1977.

- PEETERS, Harry: Marcel BIELIS; dan Charles CASPERS,
Literatuurgids Historische Gedragwetenschappen.
Baarn: Ambo, 1985.
- RABB, Thodore K., dan Robert I. ROTBERG, edl,
The New History: the 1980s and beyond. Studies in inter-
disciplinary history
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982.
- SCHNEIDER' Louis, dan Charles BONJEAN, ed.,
The Idea of Culture in the Social Sciences.
Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
- SKOOPOL' Theda, ed.,
Vision and Method in Historical Sociology
Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL,
Research in Economic and Social History
London: Heinemann, 1971.
- TAYLOR' A.J.P.,
Essays in English History
Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1976.
- WEBER, Max,
Economy and Society: an outline of interpretive sociology
Disunting oleh Guenther ROTH dan Claus WITTICH. 2
jilid. Berkeley, Cal.: University of California Press, 1978.

**PENGALAMAN YANG BERLAKU, TANTANGAN YANG
MENDATANG: ILMU SEJARAH DI TAHUN
1970-AN dan 1980-AN
(Oleh Taufik Abdullah)**

"Tugas sejarawan ialah menemukan, melukiskan, dan menerangkan aspek sosial dan akibat yang ditimbulkan oleh apa yang telah dilakukan dan diderita manusia", kata Isaiah Berlin.¹⁾ Meskipun dalam mengatakan ini ia berada dalam suasana pemikiran filsafat, tetapi pernyataan ini langsung mengena dari sudut pengerjaan sejarah secara praktis. Memang, demikianlah yang dikerjakan sejarawan-sebagai-sejarawan. Tetapi betapa jauh jarak yang harus ditempuh oleh ketiga proses ini sebelum sampai pada kelegaan, "inilah sejarah". Dan Berlin juga terlalu sadar dalam hal ini, sehingga ia telah menumpahkan perhatian ilmiah dan filsafatnya untuk menerangkan jarak-jarak yang membatasi proses yang panjang tersebut. Dan, siapapun tahu juga bahwa ia tidaklah sendirian, jauh daripada itu.²⁾

Bukankah ketiga proses, "menemukan", "mengisahkan" dan "menerangkan" dapat pula disalin ke bentuk yang dihasilkan, yaitu "kronikel", "kisah sejarah", dan "keterangan-sejarah"³⁾? Dengan begini, maka pada tahap pertama saja sejarawan telah harus melibatkan diri pada usaha penemuan elemen-elemen sejarah, yang menuntut adanya kepastian faktual ten-

tang "apa", "siapa", "bila" dan "di mana". Pada tahap kedua, ketika elemen-elemen sejarah itu harus dirangkaikan ke dalam suatu kisah, dan pertanyaan "bagaimana" harus dijawab, maka bukan saja keutuhan logika harus terjadi, tetapi imajinasi kesejarahan juga ikut memainkan peranan. Bukankah elemen-elemen sejarah tersebut bersifat fragmentaris, serba terpenggal-penggal? Siapakah pula yang akan bisa melupakan peranan bahasa dan kata dalam usaha pengisahan ini? Dalam hal ini kita tidak saja berhadapan dengan ketertiban dan langgam bahasa, tetapi juga, dan bahkan lebih penting ialah/ dengan masalah *representation*, sebab tak ada jaminan adanya garis lurus antara realitas dengan bahasa yang dipakai untuk "mewakilinya". Tak ada pula kepastian adanya kesesuaian yang utuh antara teks, yang berusaha mewakili realitas sejarah itu, dengan pembacanya. Para praktisi sejarah tentu sadar benar, apa artinya verifikasi dan klasifikasi dari fakta yang ditemukan serta pengujian dari sifat kisah. Bukankah kisah, yang murni "deskriptif" pada tahap lanjutan bisa bercorak "emplotment" ketika kisah telah ditujukan kepada penjawaban masalah tertentu dan untuk keperluan khalayak tertentu pula?⁴⁾ Adalah benar bahwa kedua corak penelitian ini termasuk corak *narrative*, tetapi kisah hanyalah deskripsi "datar" dan "murni" sedangkan *emplotment* adalah usaha rekonstruksi yang secara implisit telah ingin menyatakan sesuatu tentang "arti" dan makna dari yang dikisahkan. Pada kedua tahap ini saja masalah "kebenaran-sejarah"/telah menghantui. Maka terlibatlah para sejarawan, apalagi para pemikir dan teoretisi sejarah, dalam permasalahan logika dan realitas.

Dalam rekontruksi sejarah yang mencoba "menghadirkan kembali" kelampauan/pemberian keterangan adalah suatu kemestian yang tak terhindarkan. Bukankah, seperti yang dikatakan seorang sejarawan secara alegoris, "sejarah itu negeri asing, di mana orang melakukan hal-hal yang aneh"? Setelah sampai pada tahap menerangkan ini maka kita kadang-kadang tak hanya berhadapan dengan pemahaman empiris terhadap gejala historis, yaitu sebagaimana elemen-elemen sejarah yang

evident menyampaikan, tetapi juga asumsi teoretis dari sang sejarawan.

Kalau telah begini bukan saja persoalan epistemologi menjadi sesuatu yang bukan asing, malah, dan lebih sering, pandangan-dunia, atau bahkan ideologi (dalam pengertian yang diberikan Shils) menampakkan dirinya. Di samping sikap dan pandangan tentang dasar pengetahuan menjadi masalah, corak pemikiran normatif kadang-kadang menyelinap dalam usaha mengerti realitas itu secara "obyektif", "Kronikel", "kisah"/*emplotment* dan "keterangan historis" memang merupakan proses yang berbeda-beda, tetapi dalam penulisan rekonstruksi sejarah ketiganya semestinyalah merupakan keutuhan.

Hal-hal ini semua bukanlah masalah baru, dan, bahkan telah, atau barangkali seharusnya, menjadi bagian dari latihan setiap sejarawan. Hal-hal ini adalah pula merupakan titik tolak sejarawan ketika ia sekali-kali merenungkan sifat dan tujuan aktivitas akademisnya "menemukan, melukiskan dan menerangkan" kelampauan itu. Dalam perenungan, atau tolehan kepada tugas sebagai sejarawan ini dapat menimbulkan berbagai akibat, yang berada di luar proses itu sendiri. Malah, bukan tak jarang, sifat dari masing-masing proses dan jarak yang mengantara ketiganya dapat menjauhkan ilmu sejarah dari tujuan ideal yang sejak semula melatarbelakangi kehadirannya. Sejarah yang menciptakan integrasi antara "keasingan dengan kelampauan" dengan "keakraban hari kini" serta "ketidakpastian hari nanti", kadang-kadang tampil sebagai penambah unsur disintegratif, ketika "kepalsuan" dan mithologisasi sejarah telah menyelinap dan tatkala kerancuan dimensi-waktu atau anakronisme telah tak lagi terbendung. Jika tidak karena hal-hal ini, tidaklah sejarah kadang-kadang diejek sebagai "sipembelot" dan sejarawan, sebagai ilmuwan, diancam oleh berbagai corak "kengauran"⁶)

Tetapi terlepas dari segala kemungkinan "dosa" dan ketergelinciran kepada segala macam *fallacies* itu, rekonstruksi sejarah memang tak jarang dibayangi oleh *nemesis* yang sewaktu-

waktu bisa tercipta. "Kutuk" yang terberat yang bisa menimpa penulisan sejarah ialah ketika apa yang diajukannya unsur disintegratif sosial. Dalam situasi ini kelihatan dengan jelas adanya hubungan yang bercorak dialektis antara sejarah - yang dikisahkan dengan masyarakat yang menjadi khalayak dan sekaligus objek kajian dari studi sejarah itu. Masyarakat, yaitu objek dan khalayak sejarah, memberi reaksi terhadap gambaran yang telah diberikan terhadap masa lalunya. Dari corak hubungan ini pula, tampak bahwa masyarakat/tidak saja bisa terdiri atas berbagai kelas dan status dan sebagainya, tetapi juga atas berbagai komunitas-sejarah-komunitas yang diikat oleh rasa kewajaran-historis yang sama. Sesuatu yang abstrak, dan bahkan, selalu mengalir, komunitas-sejarah bisa dipersatukan oleh ikatan etnis-kultural tetapi lebih sering oleh ideologi dan solidaritas politik. Pluralitas dari komunitas-sejarah pertanda dari masyarakat peralihan-ketika kepastian situasi tradisional telah kehilangan keampunannya dan di saat dasar solidaritas baru masih sedang dipupuk. Makin terjadi peralihan struktural, yang mengancam berbagai ikatan sosial-politik, makin besar kemungkinan komunitas-sejarah mengadakan hubungan yang intens dengan sejarah yang dikisahkan. Dalam suasana inilah kemungkinan sejarah atau elemen sejarah unsur disintegratif makin menaik. Masalah pokok bukanlah semata-mata berkisar pada kemungkinan telah dirusaknya suatu *accepted history*, sejarah yang telah diterima kebenarannya, bahkan tidak pula selalu bertolak dari belum terdapatnya kepastian-historis (*historical certainty*), tetapi terutama ketika kewajaran-historis (*historical fairness*), yang mengikat komunitas-sejarah telah terganggu kelangsungan hidup komunitas-sejarah itu, yang pada gilirannya telah mendukung ikatan solidaritas tertentu, dirasakan sebagai menjadi taruhan.

Kasus-kasus "surat-surat Bung Karno dari Sukamiskin", "perumusan Pancasila", "buku pelajaran sejarah SMP" dan entah apalagi memperlihatkan dengan jelas betapa unsur disintegratif telah berperan. Maka "gangguan komunikasi" pun terjadi.

Dalam suasana ini, sejarawan mau atau tidak telah terlibat. Perdebatan-perdebatan yang mengiringi kasus-kasus ini, memperlihatkan betapa suatu suasana kewajaran historis, yang telah dirasakan sebagai suatu kepastian, tergoncang oleh tantangan baru. Tantangan ini ternyata tidak diterima sebagai pengujian terhadap kewajaran-historis, yang bahkan telah berperan sebagai *mithos* peneguh itu, tetapi sebagai infiltrasi yang bersifat "subversif", dari konsep kewajaran-historis lain, yang antagonistik.

Konflik antar komunitas-sejarah umumnya lebih bersifat *latent* daripada terbuka. Namun, reaksi dari komunitas-sejarah terhadap segala tantangan yang akan mengurangi validitas kewajaran-historis, merupakan peristiwa yang sering terjadi. Pengengkaran validitas ini mungkin bertolak dari dimensi kebenaran (*dimension of truth*), tetapi dapat pula berfungsi sebagai unsur "demithologisasi". Jika ini telah terjadi maka salah satu sendi yang mungkin merupakan "struktur keniscayaan"⁷⁾ telah digoyahkan. Dengan begini pula konfirmasi sosial terhadap realitas yang diyakini sebagai "riil" menjadi problematik. Maka suasana krisis, betapapun enteng, telah diperkenalkan.

Kasus-kasus perdebatan di sekitar diri dan peranan Bung Karno adalah contoh yang paling akhir. Kasus-kasus ini memang memperlihatkan sifat "kelampauan" (*the past*) yang telah menyelimuti Bung Karno sebagai tokoh sejarah.⁸⁾

Terlepas dari apa yang diperdebatkan dan bagaimana pula tingkah intensitas perasaan yang terlibat di dalamnya, pluralitas sejarah, yang menjadi sebab dari perdebatan ini, sama sekali tidaklah unik. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa sejarah sebagai sesuatu yang dikisahkan, tidaklah urusan sejarawan saja. Sejarah-sebagai kisah harus disampaikan. Maka dengan begini sejarah tidak saja harus memakai wacana, *discourse*, tetapi sejarah itu sendiri adalah suatu *discourse*, suatu berita pikiran. Sebagai wacana, sejarah tidak saja mewakili realitas atau bahkan menciptakannya, tetapi juga menentukan bentuk dan sifat realitas itu. Tanpa sejarah, bukankah peris-

tiwa di masa lalu "tak ada" dan "tak berwujud"? Tetapi, penulisan sejarah sekaligus juga menolak untuk mengadakan formulasi yang sama dari *discoursenya*.⁹⁾ Maka di samping kepastian-historis dari rekonstruksi sejarah, yang telah melalui ketiga proses pengerjaan sejarah yang disebut Berlin, selalu merupakan problematik. Elemen-elemen sejarah, yang membentuk "kronikel", dapat menyentuh khalayak dan objek sejarah tersebut. Dengan begini dinamika hubungan sejarah sebagai bentuk *discourse* dengan masyarakat, serta komunitas-komunitas sejarah yang berada di dalamnya telah bermula.

Dalam konteks masyarakat tradisional, di mana *historical fairness* adalah segala-galanya, baik sebagai mithos-peneguh, maupun sebagai dasar legimitasi kekuasaan, sejarawan "seluruhnya" terluluh dalam masyarakatnya, yang juga sering merupakan, komunitas-sejarahnya, apapun suasana ideologi dan corak sosiologis dari komunitas itu. Tetapi dalam masyarakat yang telah menuntut kepastian historis dan yang telah mengenal tahap-tahap prosedural dari "kronikel", "kisah" dan "keterangan", maka sejarawan tidaklah hanya warga dari masyarakat dan komunitas-sejarahnya, tetapi juga anggota dari dunia akademis. Dalam dunia ini bukanlah suasana konsensus norma dan nilai yang dituntut tetapi ketaatan pada konvensi akademis, yang berlandaskan rasionalitas dan integritas intelektual. Bukanlah nilai-nilai *historical fairness* yang berbicara lantang tetapi tuntutan etis dan teknis dari *the mansion of truth*. Tidaklah keutuhan kosmos yang menjadi perhatian pokok, tetapi pertanggungjawaban akademis terhadap "penemuan, pelukisan, dan pemberian keterangan historis".

Maka suatu suasana dilematis bisa terhampar di hadapan sejarawan. Suasana ini lebih dirasakan dalam masyarakat yang sedang dalam proses perubahan ketika tatanan sosial baru telah dibayangkan tetapi idealisasi dari tatanan lama tetap mencekam. Kasus-kasus perdebatan kesejarahan yang telah dan sedang terjadi di tanah air kita ini mengisyaratkan dengan keras suasana

yang bisa terjadi itu. Tetapi kasus-kasus ini memberi pesan moral yang lain. Di samping menuntut sejarawan untuk sekali-kali merenungkan fungsi dan makna peranannya sebagai cendekiawan, kasus-kasus tersebut juga memperlihatkan betapa mutlak-nya integritas ilmu dan betapa perlunya sejarawan untuk selalu mempertanyakan kemampuan teknis dan methodologisnya sebagai pekerja ilmiah. Kebetulan saja kasus-kasus perdebatan di atas tidak menyumbang apa-apa dalam wawasan teori sejarah, bahkan juga tidak dalam masalah methodologi, kesemuanya hanya bergumul dalam suasana "kronikel", di mana unsur-unsur sejarah faktual dipertengkarkan. Tetapi kasus-kasus ini dengan keras memperlihatkan situasi kultural dalam mana sejarawan harus menjalankan tugasnya dan memainkan peranannya. Dengan begini, maka suasana ini bukan hanya merupakan latar belakang dari berbagai perkembangan historiografi, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi sejarawan. Di samping struktur sosial-ekonomis serta perkembangan dunia akademis, suasana ini semestinya menjadi anjang-ancang pemikiran sejarawan dalam menjadikan peranannya sebagai sejarawan. Anjang-ancang ini pula agar ia tak tergelincir pada kecenderungan antikuriat, yang mengakhiri *significance* problemnya setelah jawab atas pertanyaan didapatkan, atau sengaja ataupun tidak mengalami transformasi diri sebagai ideolog, yang mencari "pembenaran", bukannya "kebenaran".

II

Dengan latar belakang permasalahan yang mungkin dirasakan agak berbau teoretis, maka bagaimanakah corak dan tingkat perkembangan historiografi di tanah air kita dalam sepuluh tahun terakhir ini? Barangkali tak ada salahnya jika pembicaraan ini dimulai dengan mengutip salah satu kesimpulan dari *Seminar Sejarah Nasional I* (1957) yang bersejarah itu. Dalam salah satu kesimpulan ditegaskan bahwa di samping nilai-nilai nasionalisme, maka penulisan sejarah nasional Indonesia "supaya dilaksanakan secara synthesis (istilah Prof. Mr. Muh. Yamin)

atau multiple-approach (istilah Soedjatmoko) dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan apabila unsur kebenaran dan objectiviteit yang menjadi syarat mutlak bagi penyusunan Sejarah Nasional tidak diabaikan".¹⁰⁾ Jadi sudah sejak hampir tiga puluh tahun yang lalu para pemikir sejarah telah menekankan pentingnya dimensi-kebenaran atau kepastian-historis dalam pengerjaan sejarah. Dan, tak kurang pentingnya, seminar sejarah ini mengisyaratkan perlunya pendekatan *synthesis*, apa pun mungkin bentuknya secara *methodologis*. Keistimewaan dari kesimpulan ini ialah sifat "keterasingannya" dalam suasana pemikiran sejarah yang dominan. Waktu itu dan, bahkan juga bahkan sampai awal 1960-an, adalah periode ketika dekolonisasi sejarah, yang bercorak moral, bukannya perspektif, lebih menonjol dan di saat dimensi kewajaran-historis, bukannya dimensi-kebenaran, lebih berkuasa. Hal ini mencapai puncaknya di dalam periode Demokrasi Terpimpin ketika "Manipulasi" sejarah bukan saja diharuskan, tetapi juga diturunkan dari "atas". Keambrokan Demokrasi Terpimpin secara kronologis diikuti oleh kembalinya pluralitas komunitas sejarah dan fragmentasi dalam konsep kesejarahan secara terbuka, tanpa harus berlandung di belakang jargon politik "demi Revolusi yang multi kompleks". Lebih penting lagi bagi perkembangan ilmu sejarah ialah "keterasingan" kesimpulan Seminar Sejarah Nasional yang pertama itu mulai diakhiri.¹¹⁾ Periode pengerjaan sejarah yang bertolak dari dimensi-kebenaran, yang dilandasi oleh studi sejarah kritik, serta kesadaran *methodologis* akan pentingnya pendekatan multi-dimensional bermula.

Pendekatan *multisimensional*, yang dipelopori Sartono Kartodirdjo¹²⁾ bertolak dan praduga teoritis bahwa sejarah sebagai untaian peristiwa-peristiwa di kelampauan hanyalah mungkin dimengerti dan diterangkan dalam konteks struktural yang merupakan wadah peristiwa itu. Suatu peristiwa tidak ditimbulkan oleh faktor tunggal, tetapi oleh konvergensi berbagai faktor. Perbedaan keakraban dari berbagai faktor itu dengan peristiwa atau *event* hanyalah mungkin diketahui dengan pe-

ngujian yang kritis dan empiris. Karena itulah rekonstruksi sejarah, yang telah menggabungkan secara utuh "kronikel", "kisah" dan "keterangan peristiwa" dianggap sebagai "*a crowning achievement*",¹³⁾ jika istilah Namier boleh dipinjam.

Multi-dimensional bukanlah sebuah teori yang tertutup, tetapi suatu sikap ilmiah yang bertolak dari pengakuan umum tentang sifat sejarah yang berdimensi majemuk dan ber-aspek pluralistik, serta kesadaran sejarah yang bersifat kontekstual. Mungkin tak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa pendekatan ini kerap memperlihatkan sifat *academic mood*, jika bukan *2fads and fashion*". Sebagai sikap ilmiah, maka tidak mengherankan jika historiografi yang dihasilkannya kadang-kadang secara teoretik mempunyai kecenderungan eklektik-teori berfungsi sebagai penolong dalam proses konseptualisasi dan sebagai alat perbandingan dalam pemberian keterangan historis. Studi yang dihasilkan bahkan tak jarang bercorak eksploratif dan eksperimental. Jika kecenderungan ini tak jelas kelihatan pada satu-satu karya dari masing-masing praktisi, maka akan tampak jelas manakala keseluruhan karya kesejarahan dari pendekatan ini diperhatikan. Tidak selalu, memang, sifat eklektik, eksperimental, dan eksploratif ini membawa hasil yang memadai, tetapi kegelisahan mencari adalah ciri yang tak terpisahkan dari sikap ilmiah yang multidimensional. Tak jarang karya dan pemikiran yang bertolak dari sikap-ilmiah ini tergelincir pada asumsi teoretis lama, tetapi kesediaan untuk selalu menguji asumsi tersebut adalah *virtue* yang dibanggakan.

Namun ada dua implikasi teoretis yang keras terpancar dari pendekatan multi-dimensional terhadap sejarah. Penekanan pada pencarian kaitan antara peristiwa dengan konteks struktural yang menjadi wadah peristiwa itu, secara implisit menolak determinisme sejarah. Kedua, masalah objektivitas sejarah "dipindahkan" dari lapangan filsafat ke problem metodologis. Masalahnya bukanlah terletak pada pengakuan kelemahan manusia yang tak bisa terlepas dari segala corak subjektivisme, tetapi pada pendekatan metodologi, kemampuan teknis,

kejujuran intelektual dan tentu saja, *historical judgment*/ dari sejarawan. Dan di atas segala-galanya sejarah tergantung dari ada atau tidaknya sumber yang *evident*.

Dari sudut metodologis ini pendekatan multi-dimensional berkaitan erat dengan munculnya gejala lain dalam penelitian dan penulisan sejarah. Pertama, makin intimnya sejarawan dengan cabang-cabang ilmu sosial lain. Sejarawan makin membiasakan dirinya dengan berbagai konsep yang telah lebih dahulu diperkembang oleh disiplin-disiplin ilmu lain. Kecenderungan ini membawa akibat terhadap usaha pemberian keterangan-historis. Sejarawan makin tidak terpaku pada metode *emplotmen*¹⁴⁾ atau *colligation*¹⁵⁾. Peristiwa sejarah tidak lagi diterangkan hanya dengan kisah yang secara bertahap makin memperlihatkan seluruh sifat dan corak peristiwa itu dan juga bukan hanya dengan mencari sebab-sebab pada peristiwa yang mendahuluinya. Argumen yang bertolak dari wawasan teori telah makin kerap mendampingi kisah sejarah. Kedua, sejarah politik, yang berkisar pada dinamika dan sistem kekuasaan, yang secara praktis juga bersifat "elitist", tidak lagi menjadi pemegang monopoli perhatian sebagai "wilayah penelitian". Sejarah sosial, yang sering mewujudkan dirinya dalam "sejarah lokal" dan "sejarah agraris" makin mendapat perhatian. Kegairahan ala Hobsbawm¹⁶⁾ tentang peralihan dari "sejarah sosial" ke "sejarah masyarakat" — dari pendekatan ke sasaran penelitian memang belum begitu bergema, tetapi dengan "sejarah sosial" pada tahap lokal serta dipakaikan pada tema yang dirumuskan dengan jelas (agraris, petani, dan sebagainya) dua hal lain menampilkan dirinya. Di satu pihak kecenderungan ini menyebabkan sejarawan makin mendekati pendukung dinamika sejarah yang sesungguhnya — "orang kecil dalam peristiwa kecil" dan, di pihak lain, sifat komparatif, yang secara implisit telah menjadi bagian dari ilmu sejarah, makin dengan sadar dilakukan. Dengan begini keunikan-sejarah tidaklah harus diterima sebagai patokan filosofis, tetapi sebagai suatu *unit* yang secara kontekstual telah dibentuk. Jadi lebih bersifat metodologis. Kecende-

rungan ketiga ialah, makin banyaknya dikerjakan sejarah-analitis, yang lebih menaruh perhatian pada peristiwa struktural daripada *event*, *l'évenement*, atau letupan-letupan peristiwa yang disebut Braudel "*nouvelle sounant*. 17) Perhatian pada sejarah lokal atau pedesaan adalah contoh yang jelas pada kecenderungan analitis dan struktural ini. Bahkan suatu "letupan seketika", seperti umpamanya berbagai jenis dan corak pembrontakan petani ataupun konflik elite lokal, lebih sering diperlakukan sebagai pantulan dari situasi struktural, bukan sebagai *event* yang penting pada dirinya. Dengan begini masalah kausalitas, sebab-dan-akibat dan "letupan-peristiwa" berada dalam suatu kenyataan struktural, tidak pada untaian proses-ulang dari satu situasi ke situasi lain.

Sering proses barulah menampakkan dirinya ketika struktur-struktur yang serba terpenggal-penggal dilihat dalam suatu *trajectory*. Maka, tanpa disengaja dan bukan pula hasil renungan dan rekonstruksi sejarawan sebagai individual, pendekatan multidimensional memperlihatkan historiografi sebagai berita pikiran, suatu *discourse*¹⁸⁾ Meskipun uraian kesejarahan yang diperlihatkan sibuk mencari berbagai kaitan antara berbagai mata rantai sebab-peristiwa-dan-akibat, tetapi rangkaian uraian itu sebagai historiografi memperlihatkan corak yang terputus-putus.

Sebagai *discourse*, wacana atau berita pikiran, sejarah yang hanya bisa "ada" ketika telah dikomunikasikan dengan bahasa ataupun simbol itu, tidaklah berhenti dan habis pada dirinya. Sebagai keseluruhan karya-karya sejarah itu telah menampilkan seakan-akan merupakan bagian dari sejarah intelektual. Meskipun bertolak dari *the mansion of truth*, sebagai *discourse*, historiografi yang dihasilkan oleh pendekatan multi dimensional, secara implisit juga merupakan rancangan awal dari aktivitas sosial. Sebab apa yang dihasilkan tidak saja peristiwa yang memantulkan makna yang simbolik, tetapi juga kearifan yang praktis.

Barangkali hal ini hanyalah suatu bentukan teoretis terhadap kemungkinan yang terdapat pada tradisi historiografi yang dirintis oleh pendekatan multidimensional. Tetapi dua hal lain yang langsung ataupun tidak berkaitan *discourse* perlu juga disinggung. Pertama, *mode of explanation*, cara pemberian keterangan, yang tidak semata bertolak dengan kecenderungan *emplotment*, ketika pertanggungjawaban "kronikel" harus diberikan, tetapi juga bercorak argumen teori, menyebabkan rekonstruksi harus selalu diuji dan diperdebatkan. Jadi, terlepas dari karakteristik pribadi para praktisi-nya multidimensional secara implisit bersifat toleran dan "liberal". Bukankah wacana harus selalu diuji dari segala kemungkinan kesuciannya dengan realitas yang diwakilinya, selama ia diperlukan sebagai dirinya? Kedua, kecenderungan ini makin pula menyebabkan sejarawan untuk lebih memperhatikan karya sastra. Perhatian ini bukanlah sekedar menjadikan karya sastra sebagai "dokumen", yang diharapkan memberikan fakta-fakta sejarah berdasarkan kritik intern terhadap karya sastra, tetapi sebagai "teks", yang terlibat adalah harus dialog dengan konteksnya¹⁹⁾ suatu dialog yang makin merupakan problem teoretis.²⁰⁾

Setiap *discourse* berkemungkinan untuk memberi berbagai rangsangan intelektual. Meskipun historiografi, hasil rekonstruksi pendekatan multi-dimensional, dapat memantulkan dirinya sebagai kritik-sosial, atau bahkan pengetahuan teknologis (dalam arti biasa dimanfaatkan), tetapi dasar pengerjaannya berasal dari suasana pertimbangan akademis. Pengerjaan studi sejarah yang dilakukan lebih bercorak *academic enterprise* dari pada *social criticisms* ataupun *technological knowledge*.²¹⁾ Namun, meskipun bertolak dari *the mansion of truth*, pendekatan ini tidak mengancam-sekurangnya tidak dalam pola perilaku, jika mungkin demikian dalam tujuan akhir berbagai komunitas-sejarah. Malah tidak pula menyerang secara frontal tradisi penulisan sejarah modern yang cukup didominasi oleh para amatir dan guru-guru sejarah. Pendekatan multi-dimensional mencari *clientele*-nya di kalangan para sejarawan, yang men-

jadikan sejarah sebagai "karya akademis", bukan sebagai pemupuk komunitas-sejarah. Dengan kata lain pendekatan ini hanyalah menambah kecenderungan baru dalam panorama penulisan sejarah. Tetapi dari *clientele* pendekatan inilah, terlepas dari segala perbedaan mutu dan "keanehan-keanehan" individual masing-masing, perkembangan sejarah sebagai ilmu, sebagai *academic enterprise* bisa dilihat. Dari sini pula segala kemungkinan peralihan kecenderungan teoretis dan methodologis dapat diperhatikan.

Tetapi apakah secara konkrit yang telah dihasilkan pendekatan ini selama sepuluh tahun terakhir (sejak 1975)? Untuk mudahnya lebih baik dilihat saja media yang dipakai. Pertama, buku-buku yang diterbitkan secara komersial, kedua makalah-makalah seminar (yang kadang-kadang diterbitkan) dan artikel di majalah ilmiah dan, ketiga, disertasi, yang belum atau tidak diterbitkan.

Kalau dilihat penerbitan karya sejarah-kritik, artinya yang tidak berupa teks dan bukan pula epos pemujaan, dalam sepuluh tahun terakhir ini, maka kesan akan dominannya sejarah populer dan konvensional tak bisa dihindarkan. Kesan kedua yang sangat menonjol ialah sedikitnya, jikapun ada, karya lengkap yang bertolak dari pendekatan multi-dimensional diterbitkan. Tiga buku Sartono yang diterbitkan adalah kumpulan dari studi-studi pendek, yang menjelajahi beberapa aspek sejarah sosial, pedesaan, stratifikasi sosial, gerakan-sosial, dan gagasan teoretis.²²⁾ Bahkan beberapa disertasi yang telah diterbitkan secara komersial, terlepas dari mutunya, lebih memperlihatkan keterikatan pada pertanyaan akademis lama dengan pendekatan yang konvensional.²³⁾ Jadi dari sudut metodologis tak terjadi peristiwa yang berarti. Dalam hal ini penerbitan karya Savitri Scherer tentang alam pikiran Dr. Tjipto Mangunkusumo dan dr. Soetomo, yang berasal dari Thesis M.A.nya, berharga untuk dikecualikan. Karya yang cukup sensitif ini adalah biografi intelektual dari dua tokoh nasionalis dengan sejauh mungkin menempatkan mereka dalam konteks kultural Ja-

wa, daerah-budaya kelahiran mereka.²⁴⁾ Namun, secara keseluruhan dunia penerbitan komersial tetap dirajai oleh karya-karya populer, yang berkisar pada peristiwa revolusi dan perang kemerdekaan serta pergerakan agama dan sejarah propinsi. Secara umum dapat dikatakan bahwa meskipun populer, tendensi akhir-akhir ini karya-karya sejarah itu memperlihatkan peningkatan mutu. Meskipun sebagian besar berada dalam suasana "kepahlawanan" tetapi ketekunan serta pertanggungjawaban sumber telah makin kelihatan.²⁶⁾ Memoire, otobiografi dan kenang-kenangan terhadap tokoh yang telah mencapai usia 70 tahun, adalah penerbitan yang berharga tetapi sering berada di luar ilmu sejarah (meskipun selalu berguna bagi penelitian sejarah).

Penerbitan komersial adalah wadah, tetapi sekaligus adalah pula kendala. Bagaimana pun penerbitan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang biasanya berada di luar pertimbangan akademis. Sebab itu disertasi yang belum/tidak diterbitkan dan makalah seminar serta artikel ilmiah lebih menunjukkan situasi keilmuan sesungguhnya. Pendekatan multidimensional sebagai sikap ilmiah, yang bertolak dari pengakuan umum tentang sifat sejarah, bukannya teori yang bersifat eksklusif tampak dengan jelas dalam "perdebatan" terselubung dari dua disertasi yang ditulis oleh pengajar sejarah dari Universitas Gadjah Mada - T. Ibrahim Alfian dan Djoko Suryo. Disertasi Ibrahim Alfian²⁷⁾ berkisar pada peristiwa, atau lebih tepat kelompok-peristiwa, *cluster of events*, yang telah cukup umum diketahui, yaitu perang Aceh melawan agresi Belanda di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Aspek-aspek ekonomi dan politik dari perang yang terpanjang dan termahal ini telah menjadi sasaran penelitian beberapa studi penting. Maka, pertanyaan pokok yang diajukan oleh Ibrahim Alfian ialah "apakah yang menjadi faktor pendorong dari daya tahan pejuang Aceh melawan agresi Belanda? Bagaimanakah masyarakat Aceh memberi arti terhadap perang tersebut?" Dengan kata lain ia ingin melakukan pendekatan "dari dalam" - suatu kecenderungan ilmiah lain

dari pendekatan multi-dimensional. Maka ia mempersoalkan proses pembentukan "ideologi perang Sabil" serta internalisasinya dalam kesadaran individu dan masyarakat. Perang dan kehadiran kekuatan militer *kaphe* berfungsi sebagai pembenaran dan pendorong proses pembentukan serta internalisasi "ideologi" tersebut. Hubungan dialektis yang berlanjut inilah antara lain merupakan faktor terjadi gejala psikologis *Atjehsch-moor-den* dan dialektik ini pula yang secara struktural merupakan faktor utama dari dominasi peranan ulama, setelah kehancuran kesultanan dan kemerosotan kekuasaan *uluebalang*.

Sebaliknya yang terjadi dengan Djoko Suryo, bukan saja ia tidak bertolak dari "*cluster of events*" yang telah terkenal, ia juga tidak mempersoalkan proses pembentukan "ideologi" - suatu hal yang telah menyebabkan Ibrahim Alfian bergumul dengan interpretasi teks. Ia bahkan hanya melihat peristiwa-peristiwa kecil sebagai ilustrasi, bukan sebagai sasaran perhatian utama, dari kecenderungan struktural daerah pedesaan sekitar Semarang di abad ke-19. Maka bukanlah interpretasi teks dan tidak pula mata-rantai peristiwa, sebagai *willed-event*²⁸⁾ yang diperhatikan tetapi peristiwa sosial-ekonomis. Disertasi ini tidak saja harus memperhatikan statistik, tetapi juga memperlihatkan perubahan grafik. Dengan kata lain langkah ke arah *quanto-history* telah pula dirintis.

Kedua disertasi ini tidak bertolak dari pengingkaran validitas atau kesahihan masing-masing, tetapi menghadapkan diri pada pertanyaan pokok yang berbeda-beda. Tak ada suatu *event* yang akan diterangkan Djoko - ia hanya ingin memperlihatkan perkembangan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dan Ibrahim Alfian tak merasa perlu menerangkan perkembangan sosial ekonomi Aceh, sebab ia telah cukup puas dengan apa yang telah dikerjakan studi lain. Namun perbedaan dalam perhatian ini jika ditarik pada konsekuensi logisnya memperlihatkan asumsi teoretis yang berlainan. Kedua studi ini adalah contoh yang cukup ekstrim yang bisa diharapkan dari sikap ilmiah dan pendekatan ataukah "*academic mood*"? yang telah

makin berpengaruh dalam penulisan sejarah-kritik. Tetapi di antara kedua ufuk ini terdapat tiga studi yang cukup penting, yang masing-masing dihasilkan oleh Kuntowidjojo, Onghokham dan F.A. Soetjipto. Ketiga studi ini seperti kedua studi terdahulu, bukan saja membuka tabir historis yang kurang diketahui dan dipahami, tetapi juga, dan lebih penting, merumuskan permasalahan tematis baru yang menuntut kesadaran metodologis dan kepekaan terhadap sumber yang tinggi. Dalam hal ini memang bisa dibedakan antara Soetjipto di satu pihak dan Onghokhom dan Kuntowidjojo di pihak lain. Soetjipto³⁰⁾ memperlihatkan kekayaan sumber, baik sumber asli, maupun asing, yang hampir *exhaustive* dalam usahanya untuk menelusuri dinamika kota-kota pantai utara Jawa di abad-abad yang silam. Onghokhom³¹⁾ dan Kuntowidjojo³²⁾ harus bergumul dengan masalah tematis, yang menuntut kecermatan konseptualisasi, di wilayah penelitian masing-masing. Lain daripada Soetjipto, yang memperlihatkan kekuatan filologis, kedua studi ini, yang masing-masing mempersoalkan hubungan petani dengan elite lokal dan penetrasi kekuatan luar dalam masyarakat agraris, memperlihatkan pengenalan yang cukup akrab dengan konsep-konsep sosiologis.

Dari sudut keakraban ilmu sejarah dengan cabang ilmu lain ini maka studi Hamid Abdullah³³⁾ tentang desa pendatang dari Bugis di Negeri Sembilan (Malaysia) menarik juga. Dalam studi, yang mencakup kurun waktu lebih dari seabad ini, Hamid Abdullah tidak hanya menjalankan penelitian arsip dan pustaka, sebagaimana biasa dilakukan para sejarawan, tetapi juga penelitian lapangan. Maka ia juga harus berhadapan tidak hanya dengan "sejarah lisan", yang sangat tergantung pada kemampuan membangkitkan daya ingat pengkisah dan kontrol terhadap kemungkinan terbitnya kisah yang palsu, tetapi juga "tradisi lisan" untaian kesaksian yang disebut Vansina sebagai "*mirage of reality*"³⁴⁾

Keenam studi ini tidak dikerjakan pada universitas yang sama, tetapi memperlihatkan moad akademis yang tak jauh ber-

beda. Meskipun masing-masing lebih memperhatikan aspek-aspek tertentu, tetapi kesemuanya bertolak dari kesadaran akademis tentang realitas sejarah yang beraspek majemuk. Keenam studi ini dengan memperlihatkan *trend* yang sedang "in" dalam studi sejarah-mencoba mendekati sejarah ke tahap yang paling intim, yaitu lokalitas tertentu.

Artikel-artikel ilmiah yang tak terlalu banyak ini (antara lain karena terbatasnya media) ternyata lebih menarik, tetapi cenderung bersifat ambivalen. Menarik, karena artikel-artikel ini bisa bercorak eksploratoris dan eksperimental dan sudut teori juga cenderung ekletik. Bukankah resiko relatif kecil? Sifat ambivalen terlihat dalam penyorotan yang khusus pada aspek tertentu dan menjadikan aspek-aspek lain sebagai sesuatu yang "given" atau, tak jarang terjadi, membuatnya tak berfungsi. Dalam hal inilah artikel, yang berwujud makalah seminar, memperlihatkan kelebihannya. Bukan pada mutu yang intrinsik dari makalah letak dari kelebihan itu tetapi pada kesempatannya untuk dikomunikasikan dan dipertanggungjawabkan secara langsung. Dengan kata lain sifat ambivalen dimungkinkan untuk diatasi dalam suatu komunitas akademis, Maka tidaklah terlalu aneh, jika makalah ini kadang-kadang muncul dengan kerangka konseptual yang segar, bahkan menantang, meskipun masih pada tahap eksperimental. Khusus menyangkut masalah perkembangan teori dan metodologi dalam penulisan sejarah maka meskipun berbagai seminar/konferensi internasional telah disertai oleh sejarawan Indonesia, tetapi dua seminar Sejarah Lokal, yang bertahap nasional, yang diadakan oleh Proyek ID SN, masing-masing di Denpasar (Agustus, 1982) dan Medan (1984) dapat dianggap sebagai indikator utama dari perkembangan ilmu sejarah.

Direncanakan berdasarkan gagasan metodologis yang jelas, kedua seminar ini dimulai dengan diskusi yang bersifat konseptual. Diikuti oleh peserta yang sebagian besar berasal dari perguruan tinggi, kedua seminar ini mengambil tema-tema yang cukup bervariasi, mulai dari dinamika masyarakat pedesaan,

pendidikan, sastra lokal, dan stratifikasi sosial, sampai pada masalah hubungan antar daerah dan pembauran etnis. Tema-tema ini tidak terlalu baru, bahkan di antara para peserta ada yang telah lama berkecimpung dengan tema yang mereka pilih. Tetapi perkembangan dalam wawasan teori dan kesadaran metodologis yang terjadi dalam waktu sekitar dua tahun yang mengantarkan kedua seminar Sejarah lokal ini ternyata cukup menyolok. Baik dalam makalah dan, terutama dalam diskusi, para sejarawan muda yang berdatangan dari berbagai propinsi, telah melibatkan diri mereka dengan cukup intens dalam peninjauan dan pengujian dari proses yang melatarbelakangi "kronikel", "kisah" dan "keterangan-historis". Ini artinya para peserta (atau, sebagian besar para peserta) mempersoalkan berbagai hal, mulai dari sikap terhadap sumber dan kritik sumber kepada kemampuan teori dalam menangkap realitas. Jadi, betapapun mungkin reputasi yang telah dikenakan kepada seminar, setidaknya forum komunikasi ilmiah ini telah berjasa memperkuat kemampuan teknis dan gagasan teoretis dan metodologis para sejarawan. Seminar telah berfungsi sebagai faktor pembina masyarakat akademis sejarawan.

Dari uraian singkat, yang memang jauh dari lengkap ini beberapa observasi umum bisa diajukan. Pertama, ilmu sejarah sebagai *academic enterprise* telah makin berkembang dengan baik. Tetapi, karena berbagai hal, perkembangan ini masih belum memberikan dampak pada sejarah populer, apalagi terhadap penulisan yang bercorak "*court history*" (artinya, untuk keperluan resmi). Kedua, perkembangan dalam gagasan teori dan metodologi sebenarnya lebih bersifat horizontal daripada vertikal. Bahkan sifat horizontal, yang berarti melibatkan lebih banyak sejarawan ini, juga sangat tidak seimbang sebagian sangat terbesar dari mereka adalah sarjana tamatan Universitas Gadjah Mada atau yang sedang mengembangkan aktivitas ilmiah di universitas ini. Meskipun telah menjelajahi berbagai tema penelitian dan meninjau berbagai lapisan ruang lingkup sejarah-mulai dari desa terpencil sampai studi regional yang me-

lebih batas-batas nasional suatu "keterlepasan" baru dalam usaha rekonstruksi sejarah dan pemikiran teori dan metodologi masih merupakan impian, yang entah kapan akan tercapai. Malah, baik dari sudut jumlah, apalagi dari sudut mutu, rekonstruksi sejarah yang memperlihatkan keutuhan struktur dan proses dinamika masih sangat langka. Akhirnya, ketiga, dalam proses perkembangan yang bersifat horizontal dan melebar ini, ternyata seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah telah memainkan peranan yang cukup penting. Dan, mungkin tanpa dimaksudkan untuk demikian jadinya, Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen P & K) yang setiap tahun menampilkan tema-tema tertentu, telah pula berperan sebagai komunikator dan penyebar berbagai wawasan metodologis ke daerah-daerah. Hanya saja dampak ini cuma bisa dirasakan oleh pesertanya, tetapi tidak atau kurang oleh dunia akademis (jangankan khalayak ramai) umumnya. Penerbitan pemerintah yang terbatas dan tidak diperjualbelikan, telah berperan sebagai kendala yang cukup memprihatinkan "ada", tetapi di luar jangkauan khalayak.

III

Kalau benar bahwa dalam periode dasawarsa terakhir ini terjadi pelebaran dan perbaikan mutu horizontal dari masyarakat sejarawan, bagaimanakah corak hubungan dan tanggungjawab sejarawan terhadap masyarakat umum dan dunia akademis? Bagaimanakah sejarawan harus menempatkan diri di tengah masyarakat-bangsanya, yang di satu pihak diikat oleh kesadaran akan kewajaran-historis yang sama, tetapi di pihak lain terdiri atas beberapa komunitas-sejarah, yang kadang-kadang berada dalam situasi kompetitif? Karena masyarakat dan komunitas sejarah ini bertolak dari "dimensi makna" dari sejarah, bagaimanakah pula hubungannya dengan dunia akademis, yang berasal dari "dimensi kebenaran" dan ingin kepastian? Barangkali keresahan yang akhir-akhir ini diperhatikan oleh berbagai

komunitas-sejarah-mulai dari kasus-kasus sekitar diri Bung Karno sampai dengan "tempat Islam dalam sejarah nasional" dan, bahkan juga, tempat pahlawan daerah dalam "pantheon nasional" - adalah contoh dari kelemahan sejarawan dalam memahami "dimensi makna" dari "kronikel" dan "kisah". Atau, mungkin juga, hal-hal ini hanyalah pantulan dari *historian's fallacies*, yang tak "berdosa", yang kadang-kadang memunculkan dirinya tanpa terbenang. Atau, siapa tahu, hal-hal tersebut lebih merupakan kompetisi dari berbagai komunitas-sejarah, yang akhirnya berhasil mentransformasikan sejarawan sebagai pemberi validitas "keilmuan". Tetapi, kalau kemungkinan yang terakhir ini bisa "dilupakan", karena transformasi peran ini adalah *nemesis* yang senantiasa membayangi sejarawan di mana pun dan kapan pun maka pertanyaan awal kembali mendesak. Karena sekarang sejarawan telah lebih banyak dan lebih terlatih, mestikah mereka lebih menyadari pentingnya "dimensi makna" yang telah berfungsi tidak saja sebagai "mitos peneguh" dan integrasi sosial dan nasional, tetapi juga dasar motivasi dalam pola perilaku politik? Kalau demikian halnya, siapakah yang selanjutnya harus menyelenggarakan berbagai dinamika yang terdapat di dalam "*the mansion of truth*"? Masalahnya ialah sejarah-sebagai-kisah tidaklah hanya memantulkan makna, tetapi juga kearifan. Dan kearifan ini hanyalah mungkin didapat dari pengetahuan yang tepat dan objektif. Pengetahuan lah yang memberi perspektif-sejarah dan pengetahuan pulalah yang memungkinkan didapatkannya pemahaman yang mendalam tentang perilaku, penderitaan, dan usaha manusia mengatasi segala corak kendala. Dengan kata lain, tanggungjawab pada "dunia akademis", yang bertolak dari "dimensi-kebenaran" adalah suatu kemestian. Tetapi mestikah kedua corak dimensi ini harus dilihat sebagai dilema atautkah hanya suatu kontinum dalam pengerjaan keilmuan?

Masalah ini mungkin terasa terlalu *pedantic*, tetapi adalah landasan utama dalam merumuskan tantangan selanjutnya. Permasalahan yang tampaknya seakan-akan dilematis di atas,

barangkali bisa dijawab dari beberapa aspek. Pertama, semuanya tentu saja bermula dari pertanyaan yang dirumuskan. Pertanyaan awal ini adalah unsur yang paling subjektif dari setiap pengerjaan ilmiah. Tetapi pertanyaan yang *relevance*, yang tidak berhenti pada jawab yang ditemukan, adalah pertanyaan yang bertolak dari keprihatinan sejarawan sebagai cendekiawan. Pertanyaan ini berawal dari dialog antar sejarawan dengan lingkungan sosialnya dan hasil interpretasinya dari dialog itu. Tanpa keakraban dengan lingkungan ini, maka tingkat *relevance* dari pertanyaan itu tak dapat diharapkan. Jadi perumusan pertanyaan secara akademis adalah "jembatan" yang mengantari dunia-sosial dan dunia-akademis si sejarawan. Bukankah tidak semua pertanyaan secara akademis adalah *valid* dan bukankah pula hanya pertanyaan yang telah dirumuskan secara rasional dan sistematis yang mungkin untuk dikerjakan secara ilmiah? Kedua, seran "Jembatan" telah diseberangi, maka adalah tugas akademis dan sekaligus etis, untuk mencapai tingkat ketepatan yang tertinggi. Adalah pula kewajiban dan tanggungjawab akademis, untuk sewaktu-waktu meninjau lagi segala asumsi teoritis yang dianut, kecenderungan metodologis yang biasa dipakai, dan ketepatan serta kemampuan teknis yang biasa diandalkan. Hal-hal ini semua berarti tidak saja keharusan komunitas-akademis untuk selalu berfungsi dengan sehat-antara lain dengan komunikasi dan forum ilmu yang bisa berperan sebagai "penjaga mutu" - tetapi juga keterlibatan diri dan perhatian dalam berbagai permasalahan yang menyangkut teori dan paradigma ilmu. Tak kurang pentingnya ialah peninjauan terhadap validitas dari pola pertanyaan yang biasa dipakai. Bukankah lingkungan dan dunia-sosial itu dinamis dan bergerak? Bukankah perubahan nilai, atau pada tahap yang ekstrim biasa disebut "*transvaluation of values*", tidak pula harus merupakan hal yang mengagetkan? Kalau ini terjadi, maka dialog semestinya pula menghasilkan corak pertanyaan yang *relevance* yang berbeda. Karena itu dapat dikatakan bahwa justru karena tanggungjawab sejarawan terhadap masyarakat-bangsa, dunia-sosialnya, dan kesadarannya atas pentingnya "dimensi makna"

dari sejarah, ia harus sejauh mungkin melibatkan dirinya dalam "dunia akademis". Justru keprihatinan intelektualnya, sebagai anggota masyarakat, ia makin diharuskan menyelenggarakan pengertian sejarah dengan bertolak dari "dimensi kebebasan".

Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka berbagai agenda ilmu sejarah berangkali telah dapat diidentifikasi. Agenda pertama, ialah perluasan wilayah-perhatian dan penentuan fokus-fokus baru dalam penelitian. Demikian banyak hal-hal yang bukan saja belum mendapat perhatian, tetapi juga "terbenam" dalam sejarah. Kisah petani telah makin "dibangkitkan", tetapi kisah tentang berbagai situasi dan perilaku masih terbenam. Bagaimanakah kesengsaraan, kemelaratan, sakit, dan bahkan kematian dihadapi masyarakat, jika dilihat dalam suatu prisma waktu? Bukankah akhirnya lahir, penderitaan, dan kematian adalah pemberi makna dalam hidup manusia? Bagaimanakah pola kemiskinan dari berbagai masyarakat Indonesia? Dengan kata lain, penelitian sejarah tentang suasana dan suara yang "terbenam" serta persepsi yang biasanya berada di luar perhatian sudah waktunya diperhatikan. Dengan begini bukan saja "wilayah" baru dapat dijelajahi dan pemahanan terhadap berbagai gejala sosial-kultural yang tertinggal bisa didapatkan, tetapi penerobosan baru dalam teori juga bukan tak mungkin didapatkan. Dari penelitian ini mungkin pula ditemukan sifat sejarah yang tak selamanya bersifat evolusioner, tetapi lebih merupakan rentetan dari berbagai corak keterputusan, *discontinuity*. Tetapi masalah ini, tentu saja hal lain; yang pasti adalah perluasan wilayah perhatian berarti pelebaran cakrawala pemahaman dan pemikiran. Agenda kedua, bertolak dari salah satu hikmat yang bisa didapatkan dari studi sejarah. Di samping menemukan makna dari pengalaman di hari lampau, sejarah juga memungkinkan orang untuk mendapatkan kearifan dari padanya. Seandainya dugaan teoretis ini dikenakan pada "sejarah nasional Indonesia", yang tentu saja bertolak dari pespektif terbentuknya masyarakat dan negara nasional, maka tampak-

lebihi batas-batas nasional suatu "keterlepasan" baru dalam usaha rekonstruksi sejarah dan pemikiran teori dan metodologi masih merupakan impian, yang entah kapan akan tercapai. Malah, baik dari sudut jumlah, apalagi dari sudut mutu, rekonstruksi sejarah yang memperlihatkan keutuhan struktur dan proses dinamika masih sangat langka. Akhirnya, ketiga, dalam proses perkembangan yang bersifat horizontal dan melebar ini, ternyata seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah telah memainkan peranan yang cukup penting. Dan, mungkin tanpa dimaksudkan untuk demikian jadinya, Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen P & K) yang setiap tahun menampilkan tema-tema tertentu, telah pula berperan sebagai komunikator dan penyebar berbagai wawasan metodologis ke daerah-daerah. Hanya saja dampak ini cuma bisa dirasakan oleh pesertanya, tetapi tidak atau kurang oleh dunia akademis (jangankan khalayak ramai) umumnya. Penerbitan pemerintah yang terbatas dan tidak diperjualbelikan, telah berperan sebagai kendala yang cukup memprihatinkan "ada", tetapi di luar jangkauan khalayak.

III

Kalau benar bahwa dalam periode dasawarsa terakhir ini terjadi pelebaran dan perbaikan mutu horizontal dari masyarakat sejarawan, bagaimanakah corak hubungan dan tanggungjawab sejarawan terhadap masyarakat umum dan dunia akademis? Bagaimanakah sejarawan harus menempatkan diri di tengah masyarakat-bangsanya, yang di satu pihak diikat oleh kesadaran akan kewajaran-historis yang sama, tetapi di pihak lain terdiri atas beberapa komunitas-sejarah, yang kadang-kadang berada dalam situasi kompetitif? Karena masyarakat dan komunitas sejarah ini bertolak dari "dimensi makna" dari sejarah, bagaimanakah pula hubungannya dengan dunia akademis, yang berasal dari "dimensi kebenaran" dan ingin kepastian? Barangkali keresahan yang akhir-akhir ini diperhatikan oleh berbagai

komunitas-sejarah-mulai dari kasus-kasus sekitar diri Bung Karno sampai dengan "tempat Islam dalam sejarah nasional" dan, bahkan juga, tempat pahlawan daerah dalam "pantheon nasional" - adalah contoh dari kelemahan sejarawan dalam memahami "dimensi makna" dari "kronikel" dan "kisah". Atau, mungkin juga, hal-hal ini hanyalah pantulan dari *historian's fallacies*, yang tak "berdosa", yang kadang-kadang memunculkan dirinya tanpa terduga. Atau, siapa tahu, hal-hal tersebut lebih merupakan kompetisi dari berbagai komunitas-sejarah, yang akhirnya berhasil mentransformasikan sejarawan sebagai pemberi validitas "keilmuan". Tetapi, kalau kemungkinan yang terakhir ini bisa "dilupakan", karena transformasi peran ini adalah *nemesis* yang senantiasa membayangi sejarawan di mana pun dan kapan pun maka pertanyaan awal kembali mendesak. Karena sekarang sejarawan telah lebih banyak dan lebih terlatih, mestikah mereka lebih menyadari pentingnya "dimensi makna" yang telah berfungsi tidak saja sebagai "mitos peneguh" dan integrasi sosial dan nasional, tetapi juga dasar motivasi dalam pola perilaku politik? Kalau demikian halnya, siapakah yang selanjutnya harus menyelenggarakan berbagai dinamika yang terdapat di dalam "*the mansion of truth*"? Masalahnya ialah sejarah-sebagai-kisah tidaklah hanya memantulkan makna, tetapi juga kearifan. Dan kearifan ini hanyalah mungkin didapat dari pengetahuan yang tepat dan objektif. Pengetahuan lah yang memberi perspektif-sejarah dan pengetahuan pulalah yang memungkinkan didapatkannya pemahaman yang mendalam tentang perilaku, penderitaan, dan usaha manusia mengatasi segala corak kendala. Dengan kata lain, tanggungjawab pada "dunia akademis", yang bertolak dari "dimensi-kebenaran" adalah suatu kemestian. Tetapi mestikah kedua corak dimensi ini harus dilihat sebagai dilema atautkah hanya suatu kontinum dalam pengerjaan keilmuan?

Masalah ini mungkin terasa terlalu *pedantic*, tetapi adalah landasan utama dalam merumuskan tantangan selanjutnya. Permasalahan yang tampaknya seakan-akan dilematis di atas,

barangkali bisa dijawab dari beberapa aspek. Pertama, semuanya tentu saja bermula dari pertanyaan yang dirumuskan. Pertanyaan awal ini adalah unsur yang paling subjektif dari setiap pengerjaan ilmiah. Tetapi pertanyaan yang *relevance*, yang tidak berhenti pada jawab yang ditemukan, adalah pertanyaan yang bertolak dari keprihatinan sejarawan sebagai cendekiawan. Pertanyaan ini berawal dari dialog antar sejarawan dengan lingkungan sosialnya dan hasil interpretasinya dari dialog itu. Tanpa keakraban dengan lingkungan ini, maka tingkat *relevance* dari pertanyaan itu tak dapat diharapkan. Jadi perumusan pertanyaan secara akademis adalah "jembatan" yang mengantarai dunia-sosial dan dunia-akademis si sejarawan. Bukankah tidak semua pertanyaan secara akademis adalah *valid* dan bukankah pula hanya pertanyaan yang telah dirumuskan secara rasional dan sistematis yang mungkin untuk dikerjakan secara ilmiah? Kedua, seran "Jembatan" telah diseberangi, maka adalah tugas akademis dan sekaligus etis, untuk mencapai tingkat ketepatan yang tertinggi. Adalah pula kewajiban dan tanggungjawab akademis, untuk sewaktu-waktu meninjau lagi segala asumsi teoritis yang dianut, kecenderungan metodologis yang biasa dipakai, dan ketepatan serta kemampuan teknis yang biasa diandalkan. Hal-hal ini semua berarti tidak saja keharusan komunitas-akademis untuk selalu berfungsi dengan sehat-antara lain dengan komunikasi dan forum ilmu yang bisa berperan sebagai "penjaga mutu" - tetapi juga keterlibatan diri dan perhatian dalam berbagai permasalahan yang menyangkut teori dan paradigma ilmu. Tak kurang pentingnya ialah peninjauan terhadap validitas dari pola pertanyaan yang biasa dipakai. Bukankah lingkungan dan dunia-sosial itu dinamis dan bergerak? Bukankah perubahan nilai, atau pada tahap yang ekstrim biasa disebut "*transvaluation of values*", tidak pula harus merupakan hal yang mengagetkan? Kalau ini terjadi, maka dialog semestinya pula menghasilkan corak pertanyaan yang *relevance* yang berbeda. Karena itu dapat dikatakan bahwa justru karena tanggungjawab sejarawan terhadap masyarakat-bangsa, dunia-sosialnya, dan kesadarannya atas pentingnya "dimensi makna"

dari sejarah, ia harus sejauh mungkin melibatkan dirinya dalam "dunia akademis". Justru keprihatinan intelektualnya, sebagai anggota masyarakat, ia makin diharuskan menyelenggarakan pengertian sejarah dengan bertolak dari "dimensi keberanian".

Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka berbagai agenda ilmu sejarah berangkali telah dapat diidentifikasi. Agenda pertama, ialah perluasan wilayah-perhatian dan penentuan fokus-fokus baru dalam penelitian. Demikian banyak hal-hal yang bukan saja belum mendapat perhatian, tetapi juga "terbenam" dalam sejarah. Kisah petani telah makin "dibangkitkan", tetapi kisah tentang berbagai situasi dan perilaku masih terbenam. Bagaimanakah kesengsaraan, kemelaratan, sakit, dan bahkan kematian dihadapi masyarakat, jika dilihat dalam suatu prisma waktu? Bukankah akhirnya lahir, penderitaan, dan kematian adalah pemberi makna dalam hidup manusia? Bagaimanakah pola kemiskinan dari berbagai masyarakat Indonesia? Dengan kata lain, penelitian sejarah tentang suasana dan suara yang "terbenam" serta persepsi yang biasanya berada di luar perhatian sudah waktunya diperhatikan. Dengan begini bukan saja "wilayah" baru dapat dijelajahi dan pemahanan terhadap berbagai gejala sosial-kultural yang tertinggal bisa didapatkan, tetapi penerobosan baru dalam teori juga bukan tak mungkin didapatkan. Dari penelitian ini mungkin pula ditemukan sifat sejarah yang tak selamanya bersifat evolusioner, tetapi lebih merupakan rentetan dari berbagai corak keterputusan, *discontinuity*. Tetapi masalah ini, tentu saja hal lain; yang pasti adalah perluasan wilayah perhatian berarti pelebaran cakrawala pemahaman dan pemikiran. Agenda kedua, bertolak dari salah satu hikmat yang bisa didapatkan dari studi sejarah. Di samping menemukan makna dari pengalaman di hari lampau, sejarah juga memungkinkan orang untuk mendapatkan kearifan dari padanya. Seandainya dugaan teoretis ini dikenakan pada "sejarah nasional Indonesia", yang tentu saja bertolak dari pespektif terbentuknya masyarakat dan negara nasional, maka tampak-

lah betapa berbagai peristiwa lokal telah diberi warna "nasional", tetapi dengan begini makna nasional mungkin didapatkan, namun kearifan historis bisa tertinggal. Dalam buku-buku teks sejarah hal ini sering terjadi dan barangkali wajar juga. Kini timbul pertanyaan, apakah belum waktunya dihadapi masalah "mitos nasional" dan "realitas lokal" ini dengan pikiran dan hati terbuka? Adalah salah satu tugas sejarawan untuk memperhatikan "realitas lokal" ini, justru di saat gagasan Wawasan Nusantara telah makin diisi dan sentralisasi administrasi dan kekuasaan telah makin merupakan kenyataan.

Di samping perluasan "wilayah perhatian" dan kesediaan untuk sekali-kali menyingkap "realitas lokal" yang berada di belakang "mitos nasional" maka percobaan dalam pendekatan baru barangkali telah waktunya juga dirintis. Ada tiga fungsi yang bisa diharapkan dari percobaan ini, yaitu peninjauan kembali terhadap pola rekonstruksi masa lalu, penyingkapan hal-hal yang selama ini terhindar dari perhatian, dan, tak kurang pentingnya, pengkaitan ilmu sejarah dengan perkembangan teori yang sedang terjadi. Memang tak ada keharusan apa-apa bagi ilmu sejarah di tanah air kita untuk ikut-ikutan dengan apa yang terjadi di luar negeri. Bukankah setiap teori sebenarnya bertolak dari kegelisahan intelektual yang pada awalnya bercorak kontekstual? Tetapi inilah masalahnya, betapapun tingginya harapan terhadap "pemribumian" ilmu "internasionalisasi" lebih merupakan kecenderungan umum. Maka dalam hal ini, tentu timbul juga pertanyaan, tidaklah mungkin keprihatinan yang bertolak dari kerangka kontekstual kita berbicara dalam proses yang riil terjadi dalam dunia akademis ini? Dan, siapa tahu dari sumbangan ini tinjauan terhadap paradigma teori yang berlaku dapat pula terjadi. Apalagi jika diingat pula konteks waktu dan tempat telah makin dinisbikan oleh penetrasi teknologi dan interdependensi ekonomi dan politik yang makin bersifat global.

Tetapi terlepas dari ini semua tinjauan terhadap asumsi lama dan penyingkapan dari hal-hal yang masih tersembunyi,

adalah awal dari "terobosan" (*breakthrough*) yang sangat penting dalam ilmu sejarah. Sebab itu dua corak penelitian yang sampai sekarang jarang, jika pun pernah dilakukan, yaitu sejarah intelektual dan studi perbandingan, yang bercorak sosiologi-sejarah, sudah waktunya dirintis. Dalam sejarah intelektual, yang bertolak dari ada dan berfungsinya *discourse*, kita tidaklah terutama berhadapan dengan evolusi pemikiran, dan bukan pula harus terlarut dalam pengikhtisaran pemikiran para tokoh, tetapi terutama pada dialog antara teks dan konteks. Dengan pendekatan inilah kemungkinan ada atau tidaknya "afinitas" antara-pikiran, atau lebih mungkin, struktur perasaan, dengan pola perilaku. Dengan ini pula corak hubungan kesadaran dengan struktur, yang "objektif", bisa ditinjau secara lebih tajam.

Sejarah, kata Mary Wright kira-kira dua puluh tahun yang lalu, secara implisit bersifat komparatif. Ia benar. Tanpa kesadaran perbandingan tak ada generalisasi yang bisa diadakan dan tanpa generalisasi tiada konsep yang dapat diajukan dan, akhirnya, tanpa konsep, sejarah hanyalah seperti air bah tak berbentuk. Dengan corak komparatif yang implisit inilah sejarawan bisa berkata tentang "perang", "revolusi", "elite", "penguasa", dan entah apa lagi, yang nyaris tak terbatas. Tetapi perbandingan yang bertolak dari unit-unit analisis tertentu dari pengalaman sejarah dari berbagai waktu dan tempat, di samping memperkuat ketepatan hal-hal yang bersifat implisit itu terutama dapat juga berperan dalam tiga hal. Pertama, memperjelas dan mempertinggi tingkat ketepatan struktur dari elemen-elemen sejarah (yang merupakan bagian dari "kronikel") dan bahkan juga rekonstruksi secara keseluruhan. Bukankah "putih" akan lebih jelas kelihatan di samping "hitam" dan, terutama, bukankah identitas diri akan lebih jelas setelah berdialog dengan orang lain? Kedua, dengan studi perbandingan sejarah, yang bercorak sosiologis (*historical-sociology*), berbagai pengertian umum tentang dinamika sejarah akan lebih mungkin didapatkan. Dengan pendekatan ini, corak dinamika hubung

an antara struktur dan proses lebih diperjelas. Akhirnya, ketiga, studi komparatif yang bercorak regional-artinya yang mengambil tempat-tempat yang secara teoritis dianggap berada dalam wilayah yang sama (seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, atau Pasifik, atau bahkan unit wilayah yang lebih kecil) memberi kesempatan bagi dilihatnya suatu fokus perhatian dalam perspektif regional. Maka makin kelihatan betapa fokus tertentu itu agama, nasionalisme, industrialisasi atau apa saja-memanifestasikan diri dalam waktu yang relatif sama tetapi dalam konteks tempat yang berbeda. Perspektif ini bukan saja lebih bisa memperkuat ketepatan rekonstruksi, tetapi, bisa pula menyumbang dalam peninjauan, bahkan/perubahan/orientasi teori. Disamping pola dari proses bisa diketahui lebih tepat, keterangan (*explanation*) dari berbagai hubungan kausal lebih mungkin pula diperkuat.

Ketiga agenda ini tentu saja tidaklah diarahkan kepada masing-masing sejarawan, tetapi lebih merupakan imbauan pada masyarakat sejarawan. Ketiga hal ini tidak pula berarti bahwa apa yang sedang menjadi perhatian harus ditinggalkan, tetapi terutama dimaksudkan sebagai seruan akan perlunya perluasan "pembagian kerja" di kalangan sejarawan. Akhirnya semuanya hanyalah akan menjadi impian saja, jika dua pesyarat utama tak terpenuhi. Pertama, peningkatan kemampuan teknis dalam pengumpulan, seleksi, dan kritik sumber, serta percobaan pemakaian teknik baru (seperti analisa teks, statistik, sejarah lisan dan sebagainya). Kedua, dan lebih penting, lancarnya komunikasi ilmiah di dalam masyarakat sejarawan. Prasyarat lain yang terpenting barangkali tak perlu lagi disebutkan, karena telah ada dalam hati dan pikiran masing-masing, yaitu teredanya biaya. Tetapi, dengan ide dan kerangka konseptual yang baik serta didampingi oleh kemampuan teknis yang bisa dipertanggungjawabkan hal yang terpenting ini relatif mudah diatasi.

Demikianlah, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ternyata tidak menyelesaikan masalah, tetapi mengajukan tuntutan

lain. Penghadapan diri kepada khalayak ramai, kepada masyarakat umum, adalah suatu kewajiban setiap ilmuwan, apalagi sejarawan. Sebab, sejarah adalah "dunia" yang paling mudah dimasuki oleh siapa saja yang berminat. Tetapi keterluluhan sejarawan dengan masyarakatnya, tanpa terikat pada "dunia akademis", hanyalah akan menjadikan sejarawan sebagai *literati*. Tak ada jeleknya, setiap masyarakat memerlukannya, tetapi *literati* berada di luar tradisi ilmiah kritik. Jadi, justru karena tugasnya sebagai ilmuwan, sejarawan tak dapat melepaskan diri dari kedua "dunia" itu. Dan kesediaan menerima tantangan yang bercorak akademis adalah juga pengakuan akan keterikatan kepada masyarakat dan dunia akademis itu.

Yogyakarta, Desember 1985

DAFTAR CATATAN

- (1) Isaiah Berlin. *Vico and Herder : Two Studies in the History of Ideas* New York : The Viking Press, 1976, XIII
- (2) Teori dan filsafat Sejarah analitik, tak lain daripada pengumpulan dengan masalah-masalah ini, meskipun "menemukan" lebih sering merupakan problem pusat dari methodologi dan teknik penelitian sejarah.
- (3) Lihat antara lain, Hayden White – *Metahistory : The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe*. Baltimore/London : The John Hopkins University Press, 1973. "Kronikel" dan "kisah", katanya adalah unsur primitif dalam *uraian sejarah*, tetapi keduanya menunjukkan proses seleksi dan pengaturan data dari *catatan sejarah yang belum dikerjakan* guna penyadikan catatan tersebut bisa lebih dimengerti oleh *khalayak tertentu* – (hal. 5) (penekanan dari teks asli).
- (4) Perbedaan antara "kisah" dan *emplotment* diperkenalkan oleh White. *Metahistory*.
- (5) Lihat, umpamanya George C. Hormans. *The Nature of Social Science*, New York : Harcourt Brace & World, Inc.

- 1967 — dan May Brodbeck — "Explanation, Prediction and Imperfect Knowledge" — dalam May Brodbeck (ed.) *Readings in the Philosophy of the Social Sciences* — New York : The Momillan, Company, 1968.
- (6) Dray *History the Betrayer*, London : Routledge & Kegan D.h. Fischer — *Historian's Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought*, New York : Harper Torch book, 1970.
 - (7) Tentang hal ini lihat umpamanya, Peter L. Berger — *The Theretical Imperative : Contemporary Possibilities of Religions Affirmation* Garden City, N.Y. : Anchor Books, 1979 — 15 — 20
 - (8) Tentang perbedaan "the past" dan "history", lihat J.H. Plumb, *The Death of the Past*, London
 - (9) White — *Metahistory*, p. 429 lihat juga Gordon Leff — *History and Social Theory* — Garden City, New York : Anchov Book/Double Day — 1971, 11 — 14.
 - (10) *Seminar Sedjarah Atjara I dan II : Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia* — Yogyakarta/Djakarta : Universitas Gadjah Mada/Universitas Indonesia, p-92.
 - (11) Tinjauan umum, meskipun jauh daripada lengkap, tentang penulisan Sejarah Indonesia, lihat, H.A.J. Klooster. "*Indonesiers schirjven hun geschiedenis : De ontwikkeling van de Indonesische geschiedebeoefening in theorie en praktijk, 1900 — 1980*", Disertasi, Rijks universiteit te Leiden, 1905. Dalam disertasi ini Klooster menguraikan jug pandangan para teoriti Sejarah Indonesia, seperti M. Yamin, M. Ali dan Sartono Kartodirdjo serta corak perkembangan penulisan buku teks sejarah. Sebagai perbandingan lihat juga Taufik Abdullah. "*The Study of History*" dalam Kuntjaraningrat (ed.) *The Social Sciences in Indonesia*". Jakarta : LIPI, 1975, 89 — 166 dan Taufik

- Abdullah dan Abdurrachman Suryomihardjo (eds.) *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Jakarta : Gramedia, 1985.
- (12) Pemikiran Prof. Sartono Kartodirdjo, tentang masalah ini, lihat kumpulan tulisannya – *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia : Suatu Alternatif*. Jakarta : Gramedia, 1982. Rekonstruksi yang paling lengkap; lihat Sartono Kartodirdjo. *The Peasants' Revolt of Banten in 1988. Its Conditions, Course and Sequel*. 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.
 - (13) Sir Lewis Namier – *Personalities and Powers : selected essays*. New York : Harper & Row, 1965.
 - (14) White, *Metahistory*, 7 – 11
 - (15) W.H. Walsh – *An Introduction to the Philosophy of History* – London : Heitchinson University Library – 1951.
 - (16) E.J. Hobsbawn – "From Social History to The History of Society". *Daedalus* (Winter, 1971) 20 – 45.
 - (17) F. Braudel, *On History* – (terjemahan Sarah Matthews) Chicago : The University of Chicago, Press, 1980.
 - (18) Michel Foucault. *The Archaeology of Knowledge* (diterj. A.M. Sheridam Smith), New York : Pantheon Books, 1972 lihat juga Mark Poster – "The Future according to Foucault : *The Archaeology of Knowledge and Intellectual History*" dalam Dominick LaCapra & Steven L. Kaplan (eds.) *Modern European Intellectual History : Reappraisals* – Ithaca/London : Cornell University Press, 1982, 137 – 152.
 - (19) Mengenai masalah "dokumen" dan "teks", lihat Dominick LaCapra, "*Rethinking Intellectual History and Reading Texts*" – dalam LaCapra & Kaplan (eds) – Ibid 47 – 85.
 - (20) Hayden White, "Method and Ideology in Intellectual History : LaCapra & Kaplan (eds) – Ibid 280 – 310.
 - (21) Tentang masalah ini lihat Wawancara Taufik Abdullah dalam *Prisma*, 9, XIII 1984, 55 – 59

- (22) Sartono Kartodirdjo – *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia*, Suatu Alternatif – Jakarta : Gramedia, 1982. *Modern Indonesia : tradition & transformation*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1984 Ratu Adil – Jakarta : Sinar Harapan.
- (23) Meskipun secara "resmi" studi Ekadjati – dianggap sebagai disertasi Sejarah (U.I., 1979) tetapi, sebagaimana ditandaskan juga oleh penulisnya, karya itu lebih bercorak studi filologi, sebab itu karya ini tak dibicarakan, lihat Edi S. Ekadjati *Dipati Ukur : Karya sastra Sejarah Sunda*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1982.
- (24) Savitry Pratiwi Schere – *Keselarasan dan Kejanggalan* – Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1985.
- (25) Contoh dari *genre* populer, tetapi bermutu tinggi ialah, Nasution, A.H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung : 11 Jilid.
Lihat, umpamanya, Rusli Amran *Sumatra Barat hingga Plekat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan 1980.
- (26) Contoh dari biografi yang baik ialah Sidjabat – *Ahu Si Singamangaradja XII* Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1983; Pramoedya Ananta Toer – *Sang Pemula* – Jakarta: Hasta Mitra, 1985.
- (27) T. Ibrahim Alfian – "Perang di Jalan Allah Aceh, 1873 – 1912". Disertasi, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1981.
- (28) Djoko Suryo – "Social and Economic Life in Rural Semarang under Colonial Rule in the Later 19th Century". Ph.D. Thesis, Melbourne : Monash University, 1982.
- (29) H.G. Wood. *Freedom and Necessity in History* – London: Oxford University Press 1957.
- (30) F.A. Soetjipto Tjiptoatmodjo, "Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai medio Abad XIX)" Disertasi, Yogyakarta : University Gadjah Mada, 1983.

- (31) Ongkokham. "The Residency of Madiun. Priyayi and Peasant during the Nineteenth Century" – Ph.D. Thesis. New Haven : Yale University, 1975.
- (32) Kuntowidjojo – "Social Change in as Agrarian Society : Madura, 1850 – 1940" – Ph.D. Thesis, New York : Columbia University, 1980.
- (33) Hamid Abdullah – "Perubahan Sosial di kalangan Masyarakat Keturunan Bugis di Linggi dengan rujukan khas kepada masalah kepemimpinan" – Ijazah Doktor Falsafat. Kuala Lumpur. Jabatan Sejarah, University Malaya, 1985.

LANDRENTE DAN PERUBAHAN SOSIAL DI BALI, 1882 – 1942

(oleh A.A. Bagus Wirawan)

1. Pendahuluan

1.1. Arti Penting Penelitian

Penelitian tentang pajak tanah atau *Lendrente* yang mempunyai dampak terhadap perubahan sosial di Bali tahun 1882-1942, yaitu pada periode kolonial, ditampilkan berdasarkan anggapan bahwa bidang pertanahan dan agraria terutama *land-rente* belum banyak mendapat perhatian para sejarawan. Tulisan-tulisan yang ada, sepengetahuan penulis, hanya menyinggung masalah tanah atau agraria di beberapa daerah di Indonesia seperti di Sumatra Timur,¹ di Jawa,² di Madura,³ untuk Bali dan mungkin juga daerah-daerah lainnya di Indonesia belum banyak mendapat perhatian sejarawan.

Ekotipe sawah di Bali mengacu kepada suatu unit sejarah ekologis tersendiri dengan jenis tanaman padi basah mendominasi jenis-jenis tanaman lainnya yang diusahakan pada tanah kering tegalan. Pengolahan ladang kering menetap atau di-

kenal dengan sebutan *tegal* adalah menjadi tambahan bagi pengolahan sawah. Tegal di Bali sangat mirip dengan ekotipe tegal di Madura.⁴

Tanah vulkanik yang muda yang subur dengan persediaan air cukup membuat pulau di Bali menjadi surplus beras, dan pada masa tertentu mampu mengeksport ke pulau-pulau sekitarnya seperti Jawa Timur dan Madura. Selain padi, diusahakan pula jenis-jenis tanaman lain sebagai penunjang. Jenis tanaman penunjang ialah padi gaga, jagung, kacang-kacangan, kelapa, kopi yang diusahakan pada tanah-tanah tegalan. Faktor penunjang lainnya ialah peternakan sapi, babi, itik, yang mempunyai arti penting juga di dalam ekotipe sawah di Bali. Pemerintah kolonial mengambil manfaat dari kondisi ekologis pulau Bali. Salah satu pemanfaatannya ialah dengan mengadakan pemungutan pajak tanah atau *landrente*. Sistem pemungutan pajak tanah adalah menjadi indikator penting untuk mengeksploitasi pulau Bali sejak akhir abad ke-19 sampai akhir kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1942.

Gejala eksploitasi melalui sistem *landrente* yang dipungut dari penduduk pemilik tanah, ikut mewarnai sejarah Bali pada periode kolonial. Studi sejarah sosial terutama yang menyangkut masalah agraria, khususnya praktek sistem pajak tanah dan perubahan sosial di Bali diharapkan dapat memperjelas gambaran tentang sejarah Indonesia dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya.

1.2. Kerangka Permasalahan

Sejarah sosial yang dimaksud adalah sejarah sosial yang mempunyai garapan masyarakat agraris. Aktivitas yang mencakup di dalam masyarakat agraris tidak hanya aktivitas sosialnya tetapi juga dinamika pertumbuhan ekonomi, pola, pertumbuhan, struktur kekuasaan politik, sistem nilai, tradisi kebudayaan termasuk juga sejarahnya. Bagaimanapun juga sistem pajak tanah yang diterapkan sebagai alat eksploitasi melibatkan hubungan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat

tidak bisa secara tuntas digambarkan jika tidak diketahui latar belakang sejarahnya.

Usaha-usaha di bidang modernisasi industrialisasi pemerintahan kolonial sejak akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 di Bali seperti pembangunan intrastruktur untuk melancarkan mekanisme administrasinya, melancarkan hubungan ekonominya, pembukaan dan perluasan penggunaan tanah. Akan tetapi karena tanah banyak digunakan, makin lama makin merupakan barang yang langka. Di situ perbandingan jumlah penduduk dengan luas tanah menjadi penting. Penggunaan, distribusi dan pengawasan yang telah dipikirkan sejak akhir abad ke-19 dipelbagai tingkatan di dalam masyarakat memberikan suatu gambaran yang kompleks dan sangat menarik mengenai masalah agraria dan tanah. Berbagai macam iklim dan ekologi sebagai aspek teknik dari tanah atau beragamnya pelbagai kelompok etnik juga menambah kompleksitas masalah tanah di Hindia Belanda (Indonesia sekarang).⁵ Kompleksitas demikian, hanya dapat dipecahkan dengan pendekatan antar disiplin seperti yang disarankan. Meliputi politik, ekonomi, demografi, hukum dan sosiologi,⁶ pada periode kolonial di Hindia Belanda.

Pada tahun 1882, Bali dan Lombok. Pusat administrasi pemerintahannya ditetapkan di Singaraja. Pada waktu itu, pulau Bali dan pulau Lombok belum seluruhnya termasuk Wilayah Hindia Belanda, tetapi baru terbagi menjadi dua wilayah administrasi yang disebut *afdeeling*, yaitu *afdeeling* Buleleng dan *afdeeling* Jembrana. Untuk mengurus kedua *afdeeling* itu, di Buleleng ditempatkan seorang asisten residen yaitu A.A. Hoos.⁷

Didirikannya pusat administrasi keresidenan Bali dan Lombok di Singaraja berarti ancaman bagi kerajaan-kerajaan di Bali Selatan dan Lombok. Oleh karena ekspansi kekuasaan kolonial Belanda semakin meluas di pulau Bali dan pulau Lombok pada akhir abad ke 19 dan permulaan abad ke-20, maka semua kerajaan di pulau-pulau itu dapat dikuasai dan diintegrasikan ke dalam wilayah administrasi Hindia Belanda. Berturut-turut kerajaan-kerajaan yang masih merdeka dikuasai, baik se-

cara kekerasan senjata dan militer maupun secara diplomatis dan damai. Kerajaan-kerajaan yang dapat dikuasai ialah Karangasem dan Lombok pada tahun 1894, Gianyar pada tahun 1900, Badung dan Tabanan pada tahun 1906, akhirnya Bangli dan Klungkung pada tahun 1908.

Penataan tanah terutama pajak tanah dan proses perubahan sebagai dampak politik kolonial Belanda di Bali, yang pada mulanya terbatas di Bali Utara pada tahun 1882, kemudian meluas ke Bali Selatan pada tahun 1907, maka akhirnya seluruh pulau menjadi wilayah administrasi birokrasi kolonial. Momen-momen itu menjadi dasar-dasar pemikiran para birokrat Belanda untuk membuat reorganisasi pajak tanah pada tahun 1922 yang berlaku di daerah keresidenan. Reorganisasi yang dimaksud mengacu kepada penyeragaman sistem perpajakan, terutama Pajak tanah di tingkat bawah seperti *onderafdeeling*, distrik dan desa.

Reorganisasi pajak tanah meliputi pajak tanah basah atau sawah dan pajak tanah kering atau *tegalan*. Praktek sistem pajak tanah membawa pula perubahan seperti rodi, kolonisasi, pembukaan kawasan hutan, pembangunan jaringan jalan ekonomi, munculnya lembaga perkreditan, konflik dan gerakan protes, pendeknya perubahan ekonomi dan sosial. Pajak tanah dan perubahan sosial yang terjadi ditempatkan pada setting waktu untuk memberi bentuk bahwa penulisan makalah mengutamakan aspek historisnya.

Dengan latar belakang kondisi demikian, maka dapat dirumuskan dua masalah, yaitu (1) dampak politik kolonial terhadap sistem pajak tanah dan perubahan agraria di Bali; (2) Hubungan apa yang tampak antara reorganisasi pajak tanah dengan perubahan sosial dan perubahan ekonomi yang terjadi?

Untuk menjelaskan fenomena sejarah dengan pusat perhatian pada dampak politik kolonial terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Bali diperlukan cara pendekatan dengan beberapa teori yang relevan. Berbeda dengan sejarah jenis

lainnya, rupanya sejarah ekonomi lebih banyak memerlukan penggunaan teori, modal pendekatan, dan konsep-konsep ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi sendiri. Dinamika pertumbuhan ekonomi agraris yang terjadi di Bali pada periode kolonial diusahakan model pendekatan dengan menggunakan teori transpormasi pertanian di dunia ketiga, seperti yang dikembangkan oleh Michael P. Todaro.⁸

Untuk menjelaskan klas-klas sosial dan stratifikasi dalam masyarakat agraris di negara-negara sedang berkembang, yang terkait juga pada aspek-aspek ekonomi, budaya, politik dan sejarah digunakan teori yang dikembangkan oleh R. Stavenhagen. Hubungan antara stratifikasi sosial dan struktur klas menghasilkan sistem-sistem, seperti kasta, ras dan minoritas. Kasta, ras dan minoritas sebagai klas-klas sosial telah diubah oleh kolonialisme yang memasukkan sistem produksi dan pertanian kapitalis. Proses perubahan yang terjadi pada stratifikasi dan struktur klas pada dasarnya ditentukan oleh enam kondisi yaitu: (1) introduksi ekonomi uang, (2) introduksi hak milik tanah individu dan tanaman kemersial, (3) migrasi para pekerja dan penduduk pedesaan, (4) urbanisasi, (5) industrialisasi, dan (6) integrasi nasional di negara-negara sedang berkembang.⁹

Enam kondisi yang dapat mengubah stratifikasi dan struktur sosial hanya bisa didekati melalui kerangka historis setempat. Oleh karena itu, cara analisis klas-klas sosial yang umum berlaku dalam masyarakat industrialis maju.¹⁰ Analisis klas-klas sosial dan stratifikasi yang dikembangkan oleh R. Stavenhagen, coba digunakan untuk menganalisis struktur masyarakat agraris Bali seperti yang dikenal stratifikasi sosial kasta. Dengan melihat antar hubungan kasta dan struktur masyarakat agraris, maka tampak lebih jelas gambaran tentang praktek sistem pajak tanah dan perubahan sosial ekonomi dalam sejarah sosial ekonomi di Bali.

1.3. Sumber yang digunakan

Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan makalah ini terdiri dari dua kelompok sumber, yaitu: (1) kelompok sumber tradisional pribumi berupa naskah-naskah seperti *awig-awig* atau *paswara-paswara*, (2) kelompok sumber asing, baik yang primer maupun sekunder. Kedua kelompok sumber ini diperoleh dari arsip nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, dan perpustakaan-perpustakaan yang ada di kota-kota seperti Singaraja, Denpasar, Yogyakarta dan Jakarta.

Awig-awig atau *paswara-paswara* yang relevan dengan masalah-masalah adat seperti sistem kasta, hak-hak atas tanah, hubungan antara warga masyarakat, perkawinan, hak waris, pengerahan tenaga, pengairan dan pajak tanah telah dikumpulkan dan diterbitkan oleh KITLV sejak tahun 1911 dalam *Adat-rechtbundal* (AB), seri U.

Sumber-sumber asing berupa: (i) laporan-laporan sejamin dari pejabat setempat seperti residen Bali dan Lombok, kontroir ditiap-tiap *landschap* di seluruh Bali, (2) perjanjian-perjanjian antara kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok dengan pemerintah Hindia Belanda tahun 1841 sampai tahun 1938 sudah diterbitkan oleh ANRI Jakarta, 1964 (3) majalah-majalah sejamin seperti *IG*, *KT*, *KV*, *TBB*, *TNI*, (4) laporan-laporan perjalanan, (5) buku-buku.

Petunjuk yang paling berharga terutama daftar buku dan majalah disertai pandangan ringkas mengenai pelbagai masalah di Bali dan Lombok telah dikumpulkan oleh C. Lekerkerker dalam bukunya, *Bali en Lombok: Overzicht der Literatuur Ontrent tot Einde 1919*, terbit tahun 1920. Tinjauan dari sudut hukum adat, sangat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hukum tanah dan hukum pengairan secara adat, stratifikasi sosial kasta serta dampak kekuasaan kolonial di Bali terutama sistem pajak tanah. Seluruhnya dijelaskan oleh V.E. Korn dalam bukunya *Het Adatrecht van Bali*, yang terbit pada tahun 1932.

Kedua kelompok sumber sejarah yang telah disebutkan di atas diharapkan mampu memberi gambaran yang jelas mengenai masalah-masalah disekitar pajak tanah dan perubahan sosial di Bali. Sumber-sumber ini pula digunakan untuk mendukung kerangka teoritis mengenai sistem pajak tanah dan perubahan sosial ekonomi. Sumber-sumber dan referensi lainnya secara lengkap dan terperinci tercantum di dalam catatan.

2. Reorganisasi Pajak Tanah Tahun 1922

2.1. Pajak Tanah Basah atau Sawah

Setelah penaklukan kerajaan-kerajaan pribumi di Bali Selatan (1906 dan 1908), di kalangan pejabat-pejabat kolonial timbul anggapan bahwa daerah itu diliputi oleh suatu keadaan yang sangat kacau. Pegawai-pegawai Belanda yang pertama di sana beranggapan dimana-mana dilakukan penindasan. Keadaan pemerintahan yang buruk dan tidak teratur menyebabkan perlunya diadakan pembinaan para pegawai dengan menciptakan keadaan baru yang teratur. Perlu penataan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang perpajakan. Pelbagai pajak dikenakan kepada penduduk, terutama pajak tanah menempati posisi penting dan sangat menyentuh kehidupan individu atau kelompok wajib pajak hingga ke pelosok pedesaan.

Sejak tahun-tahun pertama sesudah penaklukan, dilakukan pengaturan kembali atau reorganisasi oleh pemerintah kolonial di bidang administrasi dan wilayah pemerintahan. Pengaturan yang menyentuh sendi-sendi kehidupan yang paling mendasar bagi masyarakat Bali pada waktu itu ialah aturan-aturan yang menyangkut stratifikasi sosial kasta.

Reorganisasi yang menyangkut aspek-aspek sosial mengacu kepada posisi "kasta antara" (*tusschenkaste*) yaitu kasta yang dianggap berada diantara kasta *ksatria* dan *wesya*. Reorganisasi serupa ini dapat diwujudkan karena mendapat bantuan para pendeta dan para kepala distrik. Posisi "kasta antara" sangat diperlukan untuk menentukan kewajiban rodi dan peraturan perkawinan di antara kasta-kasta. Di situ diatur bahwa kaum

bangsawan dan kaum *brahmana* sebagai elite tradisional memperoleh wajib rodi yang lebih ringan daripada kaum sudra dan kaum "kasta antara" (*si, pande, bendesa, dan wargi*).¹¹ Jika ditarik perbandingan maka golongan *triwangsa*, yang di dalamnya terdapat elite tradisional, jauh; lebih sedikit jumlahnya daripada golongan *jaba* atau *sudra*. Menurut catatan, sampai bulan Nopember 1920, golongan *triwangsa* berjumlah 58.560 orang (6,4%) dan golongan *kaba* atau *sudra* berjumlah 858.440 orang (93,6%), seluruh orang-orang Bali Hindu di Bali pada waktu itu berjumlah 917.000 orang (100%).¹²

Setelah pengaturan wajib rodi, reorganisasi juga berlaku dalam bidang pemilikan tanah, agraria dan pajak tanah. Pada waktu itu, pemerintah kolonial mewarisi keadaan dan aturan-aturan perpajakan tanah yang sudah ada dari kerajaan, desa-desa adat dan lembaga-lembaga tradisional lainnya. Rupanya setelah penaklukan, terjadilah pertikaian antara pemilik tanah dengan penggarap, setelah penguasa-penguasa pribumi ditugaskan kembali di wilayahnya. Keadaan yang kacau ini memerlukan tindakan pemerintah untuk mengatasinya. Tanah-tanah sawah di Bali Selatan terbagi atas *sawah pengayah* dan sawah *kesugihan*. Sawah *pengayah* (*druwe dalem*) semula bagi penggarap hanya boleh digadaikan dengan ijin raja. Akan tetapi setelah kerajaan dikalahkan, hak gadai menjadi kabur serta menambah rumitnya penguasaan tanah dan pengaturan pajaknya. Setelah penyelidikan pengukuran secara potografis di Bali dilakukan dimulai pada tahun 1912 dan berakhir tahun 1920 — maka reorganisasi pajak tanah dibuat pada tahun 1922. Pelaksananya untuk karesidenan Bali dan Lombok dimulai pada tahun 1923.¹³

Reorganisasi pajak tanah tahun 1922 dibuat berdasarkan contoh yang ada di Bali Utara tahun 1882, Buleleng dan Lombok tahun 1907 dan 1908. Selain itu pencatatan jumlah wilayah pengairan atau *subak* pada tahun 1917 juga digunakan sebagai bahan untuk membuat klasifikasi berdasarkan kualitas dan produktivitas tanah basah atau sawah. Berdasarkan jumlah

subak yang dicatat, diketahui pula luas sawah. Akhirnya ditentukan besar kecilnya beban pajak tanah. (lihat Tabel 1).

Reorganisasi pajak tanah tahun 1922 meliputi juga reorganisasi para aparat pemungut pauak tanah, terutama aparat di tingkat *onderafdeeling* ke bawah yaitu, aparat pemungut pajak di bawah *sedahan agung*. Di Bali Selatan para *sedahan agung* menggantikan nama-nama *penyarikan gede*, *sedahan gede*, *kliyang gede*, bekas pegawai pemungut pajak kerajaan sebelumnya. Sejak itu, *sedahan agung* merangkap sebagai kepala tertinggi badan pengairan dalam satu *onderafdeeling* disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administrasi perpajakan. Keadaan ini menuntut para pegawai stafnya yang berpendidikan administrasi atau orang-orang yang pernah bekerja di kantor-kantor pajak tanah. Begitulah sering terjadi untuk pimpinan wilayah pengairan yang besar (*sedahan*) yang dibuat oleh jawatan pajak tanah dikepalai oleh bekas guru desa, mantri candu dan pegawai-pegawai juru ukur. Para *sedahan agung* dijadikan kepala-kepala kantor pajak tanah setempat.¹⁴ Sekarang *sedahan agung* dan *sedahan* diangkat oleh residen setelah para *pekaseh* menyatakan pilihannya.

**Tabel 1 JUMLAH SUBAK DAN LUAS SAWAH TAHUN 1917
DAN SETELAH TAHUN 1922**

Onderafdeeling	1917*		Setelah reorganisasi**	
	Jml Subak	Luas sawah (Bau)	Jml Subak	Luas Sawah
Buleleng	271	14.905	274	13.212
Jembrana	62	3.410	67	4.765
Karangasem	168	—	137	8.143
Klungkung	48	4.800	45	4.834
Bangli	63	3.150	46	3.328
Tahanan	199	23.880	180	16.966
Gianyar	447	15.645	319	22.519
Badung	226	22.600	146	19.366

Sumber : * AB, XV, 1918, hal. 309; 325-334.

** V.E. Korn, *Het Adatrecht Van Bali*. (s-Gravenhage : G. Naeff, 1932), hal. 317.

Akibat reorganisasi dalam personalia ialah pemegang wilayah pengairan di bawah *sedahan agung* yaitu *sedahan* mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah jumlahnya mengalami penambahan atau pengurangan di tiap-tiap *onderafdeeling* di seluruh Bali. Dari 74 *sedahan* pada tahun 1917 menjadi berjumlah 63 *sedahan* setelah reorganisasi, sampai tahun 1937. (lihat tabel 2). *Onderafdeeling* yang mengalami jumlah menaik dan ialah Tabanan dan jembrana. Di Tabanan paling banyak mengalami penambahan jumlah, dari 5 *sedahan* pada tahun 1917 menjadi 13 *sedahan* pada tahun 1937 *Onderafdeeling* lainnya seperti Buleleng, Karangasem, Bangli, Gianyar dan Badung, semuanya mengalami perubahan berkurang.

Tabel 2 PERUBAHAN JUMLAH SEDAHAN DI SELURUH BALI

Onderafdeeling	Tahun	
	1917*	Setelah Reorganisasi sampai 1937**
Buleleng	14	10
Jembrana	5	6
Karangasem	17	10
Klungkung	6	5
Bangli	5	3
Tabanan	5	13
Gianyar	11	10
Badung	11	6
Jumlah	74	63

Sumber : * AB, XV, 1918, hal. 309-341

** *Nota v. T.* di Onderafdeeling-onderafdeeling yang disebut dalam Tabel.

Pada tahun 1934 sawah-sawah yang dikenai pajak diukur lagi dan dibuat klasifikasi berupa grup-grup yang disesuaikan dengan kualitas dan produktivitas tanahnya. Di Karangasem, sawah-sawah dibagi atas 8 grup 1 berproduksi 46 kwintal per hektar, grup 2 : 42 kwintal, grup 3 : 35 kwintal, grup 4 : 32 kwintal, grup 5 : 30 kwintal, grup 6 : 25 kwintal, grup 7 : 20 kwintal grup 8: 11 kwintal. Luas sawah seluruhnya 7.707 Ha.¹⁵ pajak tanah yang dipungut pada tahun 1930 untuk tanah sawah berjumlah 82.894,10 *gulden*. Pada masa krisis (1933-1935). pemasukan pajak tanah berkurang mencapai 67.045 gulden pada tahun 1933.¹⁶

Aparat pengumpul pajak di bawah *sedehan agung*, yaitu *sedahan* memperoleh imbalan 6% dan para *klian subak* atau

pekaseh memperoleh 4% dari hasil pemungutan.¹⁷ Kepada para pendeta resmi (*pendeta*) diberikan kebebasan setinggi-tingginya tas pajak tanah dan bahkan diberikan imbalan 24 pikul padi per tahun, disebut *bendeng sengker*.¹⁸

Sawah-sawah di Klungkung, terbagi atas 8 grup tetapi produktivitasnya berbeda dengan di Karangasem. Grup 1 berproduksi 58 kwintal per hektar, grup 2 : 53 kwintal, grup 3 : 45 kwintal, grup 4: 39 kwintal, grup 5: 37 kwintal, grup 6: 31 kwintal, grup 7: 28 kwintal, grup 8: 20 kwintal. Luas sawah seluruhnya 4.865 Ha.¹⁹ Pajak tanah sawah yang dipungut pada tahun 1930 berjumlah 64.454,78 *gulden*. Pada masa krisis (1933-1935), pemasukan pajak tanah sawah mengalami penurunan sampai 30% terutama pada tahun 1934 jumlah pajak tanah mencapai 52.651 *gulden*.²⁰

Imbalan yang diterima para petugas pemungut pajak tanah adalah 10% dari hasil pemungutan. Kemudian dibagi tiga, 5% untuk *penglurah* atau *sedahan*, 3% untuk *klian subak*, 2% untuk *klian tempek*.²¹

Di Bangli, pembagian grup sama seperti di Klungkung, hanya saja grup 1 dan grup 2 tidak terdapat di Bangli, sedangkan grup 3 sampai grup 8 terdapat dengan luasnya yang berbeda-beda. Produktivitasnya sama seperti produksi sawah di Klungkung, yaitu dari 45 kwintal pada grup 3 dan 20 kwintal pada grup 8. Luasnya sawah seluruhnya 3.251 Ha.²² Imbalan bagi petugas pemungut pajak, sama seperti di Klungkung yaitu 10% dari hasil pemungutan dibagi tiga. Diberikan kepada *penglurah* atau *sedahan* 5%, untuk *subak* 3%, dan untuk *klian tempek* 2%.

Penerimaan pajak tanah sawah pada tahun 1930, berjumlah 40.591,28 *gulden*. Pada masa krisis (1933-1935) terjadi penurunan 20%, sampai tampak pada tahun 1934, penerimaan pajak tanah sawah berjumlah 29.903,19 *gulden*.²³

Di Tabanan, untuk tanah sawah wajib pajak, pembagian grup terbagi atas 6. grup 1 berproduksi 45 kwintal perhektar, grup 2 : 40 kwintal, grup 3 : 35 kwintal, grup 4: 30 kwintal

grup 5 : 25 kwintal, dan grup 6 : 20 kwintal. Luas sawah seluruhnya ialah 24.027 Ha.²⁴ Penerimaan pajak tanah sawah pada tahun 1930, berjumlah 277.185,88 *gulden*. Pada tahun 1933, pada masa krisis, penerimaan untuk tanah sawah berjumlah 218.189,15 *gulden*.²⁵

Di Gianyar, untuk sawah wajib pajak terbagi atas 6 grup. Grup 1 berproduksi 45 kwintal perhektar, grup 2 : 39 kwintal, grup 3 : 35 kwintal, grup 4 : 31 kwintal, grup 5 : 27 kwintal dan grup 6: 20 kwintal. Luas sawah seluruhnya adalah 15.790 Ha²⁶ Penerimaan pajak tanah sawah pada tahun 1930, berjumlah 179.169,50 *gulden*. Pada masa krisis (1933-1935) terjadi penurunan sampai 30%. Pada waktu itu penerimaan pajak tanah sawah berjumlah 135.196,59 *gulden* dan 125.075,98 *gulden*.²⁷ Pada waktu perbaikan yang diadakan tahun 1935, penerimaan pajak tanah sawah berjumlah 130.333 *gulden*, dengan harga dasar 3 *gulden* untuk satu kwintal padi.

Imbalan yang diterima oleh *penghurah* 5% dari jumlah pungutan, *pekaseh* menerima 3%, *dak klian* tempek menerima 2% dari jumlah pungutan.²⁸

Di Badung, sawah terbagi atas 7 grup. Grup 1 berproduksi 47 kwintal perhektar, grup 2 : 43 kwintal, grup 3: 39 kwintal, grup4: 36 kwintal, grup 5: 34 kwintal, grup6: 30 kwintal, dan grup 7: 23 kwintal. Luas sawah seluruhnya 19.157 Ha.²⁹ Penerimaan pajak tanah sawa pada tahun 1930 berjumlah 403.796,14 *gulden*. Pada masa krisis tahun 1933, penerimaan menurun hingga berjumlah 331.547,61 *gulden*.

Di Jembrana, penerimaan pajak tanah sawah sebelum masa krisis, berjumlah 90.000 *gulden*.³⁰ Imbalan yang diterima seorang *sedahan* tembuku, berjumlah sekitar 1.25 *gulden* setahun atau 94 *gulden* sebulan. Akan tetapi pada masa krisis, *sedahan* tembuku menerima 75 *gulden* per bulan.

2.2. Pajak Tanah Kering atau Tegalan

Secara ekologis, pengolahan dan pemanfaatan tanah kering (bhs Bali: *abian*, *tegal*) merupakan tambahan bagi pengolahan

tanah basah atau sawah. Sebagian besar tanah tegalan terletak di pegunungan yang kadang-kadang letaknya sangat miring. Untuk menjaga agar tanah terhindar dari bahaya erosi, petani di Bali membuat pematang penahan air dan membuat kebunnya bertingkat. Cara penahan serupa dibuat juga untuk tanah sawah.³¹ Luas tegalan, menurut catatan pada akhir tahun 1932, ialah 253.100 Ha;³² dan menurut catatan pada akhir tahun 1941, ialah 262.461 Ha.³³

Meskipun pengolahan tanah kering atau tegalan hanya tambahan bagi pengolahan sawah, yang lebih penting adalah peranannya untuk ikut mengisi kas pemerintah dari hasil pemungutan pajak tanah. Pajak tanah yang dipungut dari tanah tegalan cukup besar pula, seperti yang tampak pada pemungutan di beberapa *onderafdeeling* di Bali. Klasifikasi berdasarkan kualitas tanah dan produktivitasnya juga dilakukan menurut reorganisasi pajak tanah tahun 1922, tetapi tidak di seluruh *onderafdeeling*. Di Karangasem sebagai contoh, klasifikasi tanah kering tegalan tidak pernah dilakukan. Meskipun demikian, pajak tanah tegalan berjumlah 95.840,43 *gulden*. Apabila dibandingkan dengan pajak tanah sawah pada waktu yang bersamaan (82.894,10 *gulden*), menunjukkan jumlah lebih besar. Pada masa krisis, terutama tahun 1933, pemasukan pajak tanah tegalan ikut berkurang, hingga berjumlah 76.675,18 *gulden*,³⁴ (sawah: 67.045 *gulden*).

Tanah kering tegalan di Klungkung terbagi atas 7 klas, terdapat di tiga distrik: Dawan, Klungkung, dan Banjarangkan, sedangkan di distrik Nusa Penida, tanah tegalan terbagi atas 3 klas. Jenis tanaman di tanah tegalan ialah kelapa, alang-alang, buah-buahan, jagung, kacang-kacangan, ketela rambat. Luas tanah tegalan seluruhnya 19.727 Ha.³⁵ Pajak tanah yang dipungut pada tahun 1930, berjumlah 1.263,04 *gulden*. Jumlah ini sangat berkurang, karena bebas pajak pada waktu itu mencapai 88%, dibandingkan dengan pemasukan pada masa krisis (1933-1935). Pada tahun 1934, pemasukan pajak tanah tegal-

an berjumlah 5.203,47 *gulden*, karena pembebasan hanya 50%.³⁶ Imbalan yang diterima para petugas pajak, masing-masing seperti yang berlaku pada tanah sawah.

Di Bangli tanah kering tegalan hanya termasuk dari klas 3 sampai klas 8, tidak terdapat klas 1 dan klas 2. Jenis tanaman yang diusahakan biasanya padi gaga, jagung, dan tembakau.³⁷ Oleh karena termasuk daerah pegunungan, maka tanaman kopi juga diusahakan di Bangli terutama jenis arabica. Pada tahun 1925, luas penanaman 3.159 Ha kemudian menjadi 1.669 Ha tahun 1935. Luas tanah kering tegalan seluruhnya 31.756 Ha. Tanaman lainnya ialah jeruk, kelapa, dan bambu. Pemasukan pajak tanah kering tegalan pada tahun 1930, berjumlah 59.176,47 *gulden*. Pada masa krisis (1933-1935), terjadi penurunan 30%, pemasukan pajak pada tahun 1934 berjumlah 39.341,38 *gulden*.³⁸

Di Tabanan, tidak diadakan klasifikasi terhadap tanah tegalan seperti di Karangasem. Jenis tanaman yang diusahakan ialah kelapa di bagian selatan. Terdapat 260.000 pohon, berproduksi 13.000.000 butir kelapa tiap tahun. Kelapa dijadikan kopra untuk dijual ke pabrik-pabrik minyak di kapal dan Denpasar. Kopi juga diusahakan, terutama dari jenis arabica di daerah daerah pegunungan, di batukau, Pupuan, Wangaya, dan Baturiti. Di Selemadeg dicoba menanam jenis robusta. Luas seluruhnya penanaman 3.939 Ha. Jenis tanaman lainnya ialah tembakau, kentang, dan sayuran. Luas tanah tegalan seluruhnya 44.662 Ha.³⁹ Penerimaan pajak tanah tegalan pada tahun 1930, berjumlah 103.507,64 *gulden*. Pada tahun 1935, pemasukan pajak menurun hingga berjumlah 79.092,99 *gulden*.

Di Gianyar, seperti juga di Tabanan dan Karangasem, tidak diadakan klasifikasi tanah tegalan. Jenis tanaman yang diusahakan ialah kelapa. Pemborongan dan pengolahan kebanyakan dipegang oleh orang-orang Cina seperti di Tabanan, tetapi fungsi itu semakin bergeser kepada orang-orang pribumi. Kopi hanya sedikit, hanya ditanami di daerah pegunungan dan Tegallalang, beberapa hektar ditanami dengan jenis robusta. Di

Payangan juga terdapat tanaman leci yang hasilnya dijual dengan harga tinggi kepada orang-orang Cina. Kebanyakan tanah kering tegalan terletak di daerah pegunungan. Jenis tanaman lainnya ialah padi gaga, jagung, ketela rambat, dan tembakau. Luas tanah tegalan seluruhnya 15.790 Ha.⁴⁰

Tanaman penting untuk kebutuhan penduduk atau bangunan di kuil. Atap alang-alang lebih mahal dibandingkan dengan atap genting.

Di Badung, tanah kering tegalan terbagi atas 8 klas. Di bagian selatan, Bukit dan Kuta, Kesiman ditanami kelapa. Pada tahun 1936, komoditi kelapa sangat penting peranannya. Kopra banyak dibeli oleh orang-orang Cina pemilik pabrik minyak di Kapal dan Kopra banyak juga yang diekspor. Kebun-kebun yang berisi tanaman campuran juga diusahakan. Jenis tanamannya ialah buah-buahan, kelapa, pinang, aren, bambu, sirih yang menempel di pohon dadap.

Perkebunan kopi terdapat di desa Abiansema, jenis arabica dan robusta. Pohon kopi ditanam di jurang-jurang untuk mencegah tanah longsor. Pada tahun 1936, luas tanaman kopi 1.027 Ha, dengan produksi jenis arabica 1,5 kwintal per hektar dan jenis robusta 6 kwintal per hektar. Harga kopi pada tahun 1936, tercatat untuk arabica 30 *gulden* per kwintal dan robusta 12 *gulden* per kwintal.⁴¹ Produksi kopi hanya untuk konsumsi sendiri dan tidak di ekspor. Jumlah rata-rata produksi untuk jenis robusta dan arabica pada tahun 1936 ialah 3.851,25 kwintal. Luas tanah tegalan kering tegalan seluruhnya 20.586 Ha. Penerimaan pajak dari tanah kering tegalan pada tahun 1930, berjumlah 7.205,10 *gulden*. Pada masa krisis, tahun 1933 penerimaan menurun hingga mencapai jumlah 2.058,60 *gulden*.⁴²

Di Jembrana, seperti di Tabanan, Karangasem dan Gianyar, tidak dilakukan klasifikasi tanah kering tegalan. Luas tanah kering tegalan (*abian* dan tegal) seluruhnya 20.800 Ha. Penerimaan pajak tanah kering tegalan pada tahun 1930, berjumlah 47.000 *gulden*.⁴³

3. Perubahan Sosial

3.1. Perubahan Ekonomi

Dampak reorganisasi pajak tanah tahun 1922 serta reorganisasi-reorganisasi sebelumnya dalam bidang pemerintahan dan *subak*, telah menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Perubahan dalam bidang ekonomi meliputi perubahan dari ekonomi subsisten ke arah ekonomi produksi yang berorientasi pasar dan berbasiskan ekonomi uang; dan berkembangnya jenis tanaman komersial. Komersialisasi tanah di satu pihak ditandai oleh jual beli dan pajak tanah dengan uang; dan di lain pihak komersialisasi produktivitas tanah berkembangnya jenis tanaman komersial seperti kopi, tembakau dan kelapa.⁴⁴

Komersialisasi tanah dan produktivitasnya mengakibatkan munculnya jenis-jenis pajak baru selain pajak tanah, dibangunnya jalan-jalan penghubung perekonomian, munculnya lembaga-lembaga perkreditan dan jasa. Munculnya bank-bank dan asuransi atau kantor-kantor pegadaian, berkembangnya pasar, pengaturan anggaran pendapatan dan belanja dari masing-masing *landschap* adalah bukti terjadinya komersialisasi dan monetisasi.

Pajak yang terpenting adalah pajak tanah atau *landrente*. Selain itu, akibat dari brokratisasi pemerintahan dan komersialisasi tanah maka muncul pula jenis-jenis pajak baru. Jenis-jenis pajak yang muncul ialah pajak perorangan dan pajak kekayaan, pajak upah, pajak pemotongan hewan, pajak kendaraan, pajak pasar, pajak tebusan dan pembelian rodi. Di antara jenis pajak ini, beberapa jenis pajak menduduki posisi penting dalam sistem ekonomi pemerintah seperti pajak pemotongan hewan, pajak pasar, dan pajak tebusan wajib rodi.

Hewan-hewan terutama sapi dan babi yang dipotong dikenakan pajak potong. Pajak potong untuk seekor babi betina adalah 1 *gulden*, pada tahun 1937 dihapus, sedangkan untuk seekor babi jantan besarnya pajak potong adalah 2,50 *gulden* dan kemudian diturunkan menjadi 1 *gulden*. Untuk pemotongan sapi dikenakan pajak 3 *gulden* per ekor. Penerimaan pajak

potong hewan pada tahun 1934, berjumlah 35.969,10 *gulden* atau 3,40% dari jumlah penerimaan pajak tanah, berjumlah 1.055.040 *gulden* pada tahun yang sama.

Pajak yang berasal dari tebusan wajib rodi sebagai pengganti kerja rodi yang sudah dihapus pada tahun 1919 adalah gejala monetisasi. Penerimaan tebusan rodi menunjukkan jumlah yang cukup berarti untuk membiayai pembangunan dan perawatan jaringan jalan dan jembatan untuk memperlancar kepentingan ekonomi pemerintah gubernemen. Wajib rodi pada mulanya dikenakan kepada kepala-kepala keluarga, dengan cara melaksanakan rodi selama 30 hari kerja dalam setahun. Pada tahun 1925 diadakan perubahan, untuk 30 hari kerja bisa diganti dengan uang sebesar 5 *gulden*. Pada masa krisis (1933-1935), jumlah hari kerja dikurangi menjadi 25 hari kerja atau ekwivalen dengan uang sejumlah 3 *gulden*.⁴⁵ Perbandingan antara jumlah wajib rodi dengan jumlah seluruh penduduk di Bali menunjukkan bahwa, seperdelapan dari seluruh penduduk dikenal wajib rodi. Pada tahun 1935, penduduk wajib rodi berjumlah 138.428 orang (12,07%) atau seperdelapan dari jumlah seluruh penduduk pulau Bali pada waktu itu yaitu 1.146.639 jiwa.⁴⁶

Masuknya uang ke dalam kerja ditandai dengan jumlah hari kerja dengan uang. Akibatnya, pemerintah memperoleh sejumlah uang dari pajak tebusan wajib rodi. Perubahan jumlah penerimaan uang tebusan wajib rodi tampak jelas pada masa sebelum krisis dan pada masa krisis. Penerimaan uang tebusan rodi pada tahun 1931, sebelum masa krisis, berjumlah 324.239,80 *gulden* menjadi 19.663,67 *gulden* atau 1,69% dari jumlah penerimaan pajak tanah pada tahun yang sama.

Pajak pasar, dipungut dari iuran pada pedagang di pasar-pasar. Selain pasar barang-barang komsomsi untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari, maka dibangun pula pasar-pasar hewan. Pasar-pasar barang konsumsi dibeberapa *land-schap* diadakan tiga hari sekali menurut perhitungan hari-hari pasaran orang Bali yang disebut *pasah*, *beteng*, dan *ke-*

jang.⁴⁷ Kecuali Badung, di Bali Selatan, *landschap-landschap* lainnya ialah Tabanan, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem memiliki hari pasaran tiga hari sekali. Pemasaran pedagang wanita Bali cukup penting dalam aktivitas pasar, setelah pedagang-pedagang Cina atau Arab.

Selain pusat pasar di kota, maka di setiap desa juga terdapat pasar-pasar desa. Dibeberapa tempat masih berlaku sistem tukar menukar barang dalam aktivitas pasar seperti terjadi di Nusa Penida (Klungkung). Di Karangasem terdapat 10 pasar desa dan satu pasar kota.⁴⁸ Di Gianyar terdapat pasar-pasar utama seperti Gianyar, Blahbatuh, Tampaksiring dan Sukawati. Pasar-pasar lainnya terdapat di Tegallalang, Ubud, Payangan, Pujung, Taro, Kengetan dan Bedulu.⁴⁹

Pasar-pasar hewan dibangun dibeberapa *landschap*, seperti di Buleleng, Jembrana, Badung dan Karangasem. Jenis hewan yang dijual belikan adalah terutama sapi. Penerimaan dari pajak pasar cukup penting sebagai pendukung penerimaan dari pajak tanah. Penerimaan dari pajak pasar-pasar dan pasar hewan pada tahun 1937, berjumlah 68.548,88 *gulden*⁵⁰ kemudian pada tahun 1940, berjumlah 81.546,51 *gulden*.⁵¹ Selama empat tahun mengalami kenaikan sebesar 12.997,63 *gulden* atau 18,96%.

Penerimaan dari pajak-pajak lainnya tidak begitu penting untuk mengisi kas pemerintah sehingga tidak banyak diperoleh data tentang besarnya jumlah penerimaan dari jenis-jenis pajak ini. Pajak-pajak yang dimaksud meliputi pajak penghasilan, pajak perorangan, pajak barang, pajak perseroan, pajak kendaraan bermotor, pajak kekayaan, pajak impor dan ekspor.⁵² Meskipun tidak diperoleh data yang pasti, tetapi dari pelbagai jenis pajak yang muncul dapat dianggap sebagai salah satu indikator perubahan yang telah terjadi dalam bidang ekonomi.

Tidak hanya pemasukan yang ke kas pemerintah melalui penarikan pajak, tetapi terjadi pula sebaliknya. Uang yang telah terkumpul ke kas pemerintah kemudian dipinjamkan kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga perkreditan

modern. Pada tahun 1925, Bank Rakyat Bali membuka lebih banyak agen-agensya. Kantor pusat di Singaraja memiliki dua agen. Kantor perwakilan di Denpasar, yang meliputi Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Karangasem dibuka 4 agen. Pada akhir tahun 1928, di Buleleng dan Jembrana sudah ada 5 agen. Di Kantor perwakilan Denpasar yang meliputi Badung, Klungkung, dan Gianyar terdapat 10 agen. Di Karangasem menjadi kantor perwakilan tersendiri memiliki 4 agen. Seluruhnya berjumlah 19 agen.

Pada akhir Desember 1925, tercatat jumlah pinjaman 600.024 *gulden* dan pada akhir Desember 1928, pinjaman mengalami peningkatan hingga berjumlah 1.005.842,50 *gulden*. Sementara itu, sisa pinjaman pada akhir Desember 1925, berjumlah 647.595,35 *gulden* dan pada akhir Desember 1928 sisa pinjaman, berjumlah 1.221.019,70 *gulden*.⁵³ Sisa pinjaman atau tunggakan yang bertambah besar, akibat dari merosotnya harga kopi, kelapa dan ternak. Pinjaman sebagai pemilik kebun kopi dan kelapa tidak berani menjual kopi dan kopra mereka karena harga merosot, sedangkan mereka wajib membayar kredit Bank. Tunggakan yang paling tinggi terjadi di Singaraja pada akhir Desember 1929, berjumlah 19.099,02 *gulden*. Akan tetapi, berkat tindakan pegawai bank, maka pada akhir tahun 1930, tunggakan bisa ditekan menjadi 12.996 *gulden*.⁵⁴

Bank Rakyat Bali telah memperluas bidang usaha kreditnya dengan jalan mendorong berdirinya bank-bank desa. Dorongan diberikan pula melalui pemberian pinjaman uang modal bagi bank-bank desa. Akibatnya, muncullah bank-bank desa di Bali Utara dan pada tahun 1927, bank-bank desa di Bali Selatan mulai mendesak bank-bank distrik yang sudah ada sebelumnya. Pada tahun 1927, di Bali Utara terdapat 44 buah bank desa, dan di Bali Selatan terdapat 17 buah bank desa. Kemampuan mengelola uang tiap-tiap bank desa di Buleleng ialah 100.000 *gulden*.⁵⁵ Pada tahun 1940 jumlah bank desa berkurang, menjadi 54 buah. Selain bank-bank desa, pedagang-pedagang Bali juga mendirikan perseroan-perseroan dagang, se-

perti "Sri Sedana" dan "Soerya Sedana" di Buleleng; "Soerya Merta Sedana" di Gianyar; "Ekadnjana" di Bajra (Tabanan). Semacam perkumpulan asuransi kebakaran dan kecelakaan "Santa Laksana" didirikan pula di Kerambitan (Tabanan).⁵⁶

Sirkulasi uang terjadi pula melalui dinas-dinas pegadaian pemerintah. Pada tahun 1927 terdapat 2 rumah gadai yaitu di Singaraja dan Denpasar, kemudian pada tahun 1928, bertambah lagi 4 buah, masing-masing di Karangasem, Klungkung, Jembrana dan Ampenan (Lombok).⁵⁷ Barang-barang jaminan yang disimpan di gadai, berjumlah 46.534 buah, di antaranya terdapat 1.861 buah jaminan pinjaman di atas 25 *gulden*. Pada tahun 1930, barang-barang jaminan meningkat jumlahnya menjadi 118.025 buah, di antaranya terdapat 5.141 buah jaminan pinjaman di atas 25 *gulden*. Besar uang pinjaman seluruhnya, berjumlah 1.007.568,10 *gulden* pada tahun 1930.⁵⁸ Barang-barang jaminan yang digadaikan berupa perhiasan emas dan perak, pakaian, kain tenunan. Jika terjadi pelelangan barang-barang jaminan, sebagian besar dilakukan oleh orang-orang Cina dan Arab. Mereka lebih suka melelang pakaian dan kain tenunan daripada barang perhiasan emas dan perak, karena harga emas dan perak pada waktu itu sangat merosot akibat terjadinya *malaise* dunia.⁵⁹

Pengaturan pendapatan dan belanja di tiap-tiap *landechap* adalah salah satu indikator perubahan dalam bidang ekonomi. Bagi kepala-kepala pemerintahan *landeschap* berarti tugas dan kewajiban baru untuk membuat pertanggung jawaban keuangan *landechap*. Pertanggung jawaban tiap-tiap *landechap* dibuat sejak tahun 1930. Penerimaan uang sangat tergantung pada naik turunnya harga barang-barang ekspor seperti kopra, sapi, babi, tetapi penerimaan dari pos-pos lain sangat membantu pula, seperti dari pajak pasar, pajak pasar hewan dan pajak potong serta pajak tanah. Belanja pemerintah meliputi gaji pegawai, keperluan administrasi.

Jaringan jalan ekonomi segera dibangun untuk melancarkan arus barang-barang hasil bumi dari daerah terpencil. Pada

tahun 1931, dibuat jalan Rendang – Besakih diharapkan dapat membuka usaha-usaha pertanian di sebelah selatan gunung Agung untuk pengembangan kebun kopi. Pengangkutan dari daerah ini juga menuju jalan utama Karangasem – Selat – Klungkung; dan dari Selat – Rendang – Besakih – Penelokan sampai di Buleleng.⁶⁰ Jaringan jalan ekonomi yang kedua, ialah jalan pupuan – Pulukan sepanjang 35 kilometer. Jalan yang menghubungkan Buleleng dan Jembrana sangat penting untuk melancarkan pengangkutan hasil kopi robusta. Jaringan jalan ekonomi yang ketiga, ialah jalan buatan Tejakula – Kubu – Karangasem, yang berfungsi untuk melancarkan angkutan ternak atau buah-buahan yang akan diekspor seperti jeruk dan mangga.⁶¹

3.2. Perubahan Sosial

Perubahan sosial meliputi mobilitas sosial secara vertikal, kepadatan penduduk dan kondisi ekologis, dan konflik sosial. Faktor-faktor ini saling terkait satu dengan lainnya. Dasarnya dapat dilacak pada praktek-praktek sistem pajak tanah dan wajib rodi, status tanah *pecatu* (tanah jawatan) dan tanah di Candi Kusuma. Perubahan terjadi akibat proses birokratisasi dan kelancaran transportasi. Kondisi ekologis yang tidak menguntungkan di daerah asal mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial secara horisontal atau mobilitas geografis penduduk ke tempat-tempat yang jarang penduduknya.

Mobilitas sosial secara vertikal semula, selama abad ke-19, sangat sulit terjadi karena ketatnya batas-batas kasta dalam stratifikasi sosial kasta di Bali.⁶² Akan tetapi kemudian, pada dekade kedua abad ke-20, setelah reorganisasi pajak tanah serta intensifnya pelaksanaan wajib rodi di kalangan penduduk; maka muncul kecenderungan yang menggoyahkan batas-batas dalam stratifikasi sosial kasta. Keinginan untuk diakui sebagai golongan kasta yang lebih tinggi dari kata sudra atau *jaba* muncul, terutama di kalangan penduduk yang tergolong *prabali* (*Pande dan Sengguhu*) agar diakui sebagai kata *wesya* pada

tahun 1928 dan 1929 di Gianyar. Pernyataan serupa, sebagai bukti dari kecenderungan terjadinya mobilitas vertikal, terjadi juga di Mengwi.⁶³ Pergeseran status dalam struktur pemerintahan di Gianyar, terjadi dengan munculnya jabatan *patih* pada tahun 1929, sebagai pengganti jabatan *pemade* pada masa kerajaan tradisional sebelumnya.

Di luar stratifikasi sosial kasta, muncul golongan baru dari etnik Timur Asing, orang-orang Cina dan Arab yang statusnya lebih rendah dari pada status orang-orang Eropa. Orang-orang Cina dan Arab menyadari bahwa, tidak mungkin menembus stratifikasi sosial kasta di Bali. Oleh karena itu, mereka lebih menggiatkan diri dalam usaha perdagangan. Mereka diberikan hak sebagai golongan penduduk merdeka di bawah hukum barat dan kekuasaan pengadilan kolonial, terlepas dari ikatan hukum adat. Di situ muncul sistem status baru berdasarkan atas ras, serupa dengan yang terbentuk di Jawa sejak abad ke-17 dan ke-18.⁶⁴ Perbedaannya ialah, status baru atas dasar ras dan etnik bagi orang-orang Cina dan Arab sebagai golongan minoritas, hanya berada di periferi dari stratifikasi sosial kasta yang masih kuat dianut orang-orang Bali sebagai golongan mayoritas.

Mobilitas secara horisontal atau mobilitas geografis, erat kaitannya dengan kepadatan penduduk yang tidak merata dan perbedaan kondisi ekologis daerah-daerah di Bali. Selain itu, faktor-faktor kemajuan sistem komunikasi dan faktor ekonomi juga ikut mempengaruhi terjadinya mobilitas geografis atau migrasi.⁶⁵ Pada tahun 1930, kepadatan penduduk di Bali Selatan adalah 248 jiwa per km² sedangkan di Bali Utara adalah 94 jiwa per km². Pada tahun 1937, penduduk di Bali Selatan mencapai tingkat kepadatan penduduk di setiap *landchap* tidak merata. Setelah itu, faktor kondisi ekologis yang berbeda-beda mempengaruhi pula terjadinya mobilitas geografis.

Keadaan ekologis Nusa Penida (Klungkung) atau Kubu dan Seraya (Karangasem) yang sangat kering tanahnya, berkapur dan kurus mendorong penduduk untuk migrasi ke tempat-tem-

pat pemukiman baru yang tanahnya baik dan subur seperti pembukaan hutan di Jembrana.⁶⁶ Faktor ekonomi, sebagai pendorong penduduk untuk migrasi, berasal dari daerah Mengwi (Badung) dan Gianyar, adalah *landchap-landchap* yang paling padat penduduknya di Bali. Selain itu, rata-rata kepemilikan tanah garapan sangat rendah, 0,45 Ha sawah dan 0,52 Ha tegalan di Badung atau 0,48 Ha sawah dan 0,45 tegalan di Gianyar.

Kemajuan komunikasi, makin lancarnya transportasi karena pembangunan jembatan dan jaringan jalan aspal, adanya angkutan truk mengakibatkan truk mengakibatkan jarak antara tempat-tempat asal migran ke tempat tujuan makin cepat ditempuh. Sejak dekade pertama abad ke-20 migrasi telah dilakukan oleh pembuka tanah-tanah hutan, yang kemudian dijadikan petak-petak sawah dan pembentukan *subak-subak* baru. Pada dekade ketiga abad ke 20, pada tahun 1934, migrasi ke Jembrana menjadi salah satu faktor penting dalam proses perubahan sosial di Bali. Tempat-tempat tujuan para migran pada waktu itu ialah komplek hutan Asah Duren, Badingkayu dan Nusa Mara.⁶⁷ Tempat-tempat tujuan lainnya, ialah Blimbingsari, Pale-sari, dan Nusasari di Jembrana Barat, dan Candikuning.⁶⁸ Daerah asal para migran, ialah Karangasem: 1000 orang, Nusa Penida (Klungkung), berjumlah 300 orang; seluruhnya berjumlah 1.300 orang pada tahun 1937.⁶⁹

Konflik sosial sebagai salah satu indikator perubahan sosial. Jika mobilitas sosial – vertikal dan horisontal – dapat dipandang sebagai perubahan dengan dasar stabilitas, maka konflik sosial dapat dipandang sebagai perubahan struktur di setiap masyarakat. Konflik sosial ada dan senantiasa terjadi di setiap masyarakat, karena setiap unsur di dalamnya senantiasa berubah.⁷⁰ Dasar-dasar konflik sosial dalam masyarakat dengan ekotipe sawah di Bali, terletak pada pemberian kosensi dengan cara penyewaan tanah di Candi Kusuma (Jembrana), beban pajak tanah dan beban wajib rodi, tanah-tanah *pecatu* (jabatan).

Keresahan dan konflik antara penduduk, penyewa dan pemilik di Candi Kusuma, berlangsung sejak tahun 1860 sampai

tahun 1915, setelah sistem *erfpacht* dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena ketatnya kontrol pemerintah kolonial Belanda di Bali, keresahan dan konflik yang terjadi di Candi Kusuma dapat diatasi.

Beban pajak tanah dan beban wajib rodi adalah penyebab munculnya konflik sosial, berupa protes dari golongan tertentu. Dari protes-protes yang muncul dapat dibuat pembagian seperti, keinginan untuk diakui sebagai kasta yang lebih tinggi, keinginan supaya beban wajib rodi disamakan terhadap keempat kasta, keinginan mempertahankan peraturan-peraturan sebelumnya.

Pengurangan tanah-tanah *pecatu* atau tanah jabatan yang dimiliki perangkat desa oleh pemerintah telah mengakibatkan protes keras. Protes dilakukan oleh para *perbekel* dan *kliyang banjar* di Gianyar, dengan mengajukan permohonan bersama untuk berhenti dari jabatan mereka. Keresahan karena tanah *pecatu* di Gianyar dapat diatasi pada tahun 1930, setelah masalah itu dibawa dan dibicarakan di forum *volksraad* oleh Tjokorda soekawati, seorang anggota dewan pada waktu itu. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi perangkat desa sekaligus mengembalikan hak-hak *pecatu* mereka.⁷¹

4. Kesimpulan.

Dampak politik kolonial di bidang pertanahan telah membawa perubahan sistem pajak tanah dan agraria di Bali, meskipun tidak secara cepat dan menyeluruh. Penetrasi dan dampaknya lebih mengacu kepada perubahan-perubahan yang bersifat sektoral dan pertikal. Akibatnya terjadi perbedaan intensitas perubahan pada skala mikro, di tingkat atas dan menengah di satu pihak; dan di tingkat terendah, desa, di lain pihak, ditinjau dari unit sejarah nasional.

Sistem yang paling menonjol dari praktek politik kolonial di Bali ialah sistem pajak tanah atau *landrente*. Selain itu, dampaknya sampai juga kepada sistem pemungutan pajak lainnya dan akhirnya sistem perpajakan menjadi semakin rumit.

Pajak-pajak yang masuk ke kas pemerintah, sebagian digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial. Dari sudut pandangan Indonesia sentris, perubahan yang terjadi menjadi akar dinamika pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia di tingkat mikro pada periode kolonial.

Sistem pajak tanah atau *landrente* sebagai lembaga pemerintah kolonial memberatkan pihak para pendeta dari golongan *brahmana*, sewaktu *privilege* mereka dilanggar. Sebaliknya, pihak golongan *jaba* atau *sudra* (para *pasek* dan *pande*) sebagai kasta terendah dalam stratifikasi sosial kasta, lebih tertekan beban yang lebih berat lagi, setelah beban kerja dihapus dan diganti dengan uang dalam wajib rodi.

Golongan *brahmana* dan para birokrat sebagai tenaga administrasi pemerintah kolonial dalam batas-batas tertentu, dapat menikmati keuntungan dalam perubahan-perubahan itu seperti, pembebasan pajak tanah, pembebasan wajib rodi dan bahkan mereka memperoleh pula tanah-tanah jabatan (*pecatu*). Sistem pajak tanah atau *landrente* yang diterapkan rupanya tidak senantiasa memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat, karena perbedaan beban telah menimbulkan reaksi dan protes. Di satu muncul konflik antara yang memperoleh keuntungan dengan golongan yang dirugikan atau antara golongan yang dirugikan dengan pemerintah sendiri.

Sementara perubahan dan dinamika sosio ekonomis telah terjadi pada tingkat atas dan menengah (*landchap* dan distrik), maka penetrasi politik kolonial tidak mampu mengubah secara mendasar dan menyeluruh struktur sosial masyarakat. Di tingkat desa, penetrasi politik kolonial sehubungan dengan tanah tidak mampu mengubah secara mendasar. Secara institusional, perubahan hanya terbatas pada institusi-institusi sosial ekonomi pemerintah di tingkat atas atau *landchap* sampai tingkat menengah atau distrik, sedangkan di tingkat desa, pengaruh itu belum mampu menciptakan perubahan besar dan mendasar. Kondisi itu disebabkan oleh kuatnya ikatan tradisional institusi desa

atau perkumpulan (seheke), dalam hal ini berpangkal pada *subak* atau desa adat, yang mampu mempertanahkan aturan-aturan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah.

Perubahan-perubahan secara struktural dan mendasar baru bisa terwujud setelah periode revolusi atau perang kemerdekaan, setelah desa dalam struktur masyarakat Bali ikut terlibat. Revolusi atau perang kemerdekaan ikut merombak ikatan tradisional sosio ekonomis, yaitu ikatan pemilikan dan penguasaan tanah oleh desa, yang sangat penting sebagai indikator perubahan agraria di Bali dalam konteks dinamika pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

DAFTAR CATATAN

1. Karl J. Pelzer, *Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra 1863 – 1947*. (s-Gravenhage, 1978).
2. Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*. Terj. Peorodisastra, dari karangan penulis yang tersebar. (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), terutama Bab II dan Bab V; Werner Roll, *Struktur pemilikan tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng*. Terj. Nyonya Jane Tjan. 'Jakarta: Rajawali, 1983).
3. Kuntowijoyo, "Social Change in An Agrarian Society: Madura 1850 – 1950". Ph. D. *Disertation*, Columbia University, 1980, tidak diterbitkan.
4. *Ibid.*, hal. 31-34.
5. Sediono M.P. Tjondronegoro & Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), hal. 286; Colin Mac Andres & Soeri Soeroto, *Land Affairs in Indonesia: An Annotated Bibliography*. (Yogyakarta : CRRRS Gadjah Mada University, 1979), hal. ii-iii.

6. Soediono M.P. Tjondronegoro & Gunawan Wiradi, *op.cit.*, hal., 287.
7. E. Utrecht, *Sejarah Hukum International di Bali dan Lombok*. (Bandung: Sumur Bandung, 1962), hal., 216-224.
8. Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, I. Alih bahasa Aminuddin & Mursid. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal., 10.
9. R. Stavenhagen, *Social Classes in Agrarian Societies*. (New York: Anchor Books, 1975), hal., 40-63.
10. *Ibid.*
11. *AB*, XXXVII, 1934, hal., 394-396; cf. R. Stavenhagen, *loc. cit.*
12. C. Lekkerkerker, *BK I*, 79, 1923, hal., 11.
13. *Staatblad van NI* 1923, No. 509.
14. *Staatblad van NI* 1928, No. 260.
15. *Nota v.T. Karangasem*, tth, hal., 16-17.
16. *Ibid.*, hal., 40.
17. *AB*, XV, 1918, hal., 332.
18. *Nota v.T. Karangasem tth*, hal., 39
19. *Nota v.T. Kloengkoeng*, tth, hal., 12
20. *Ibid.*, hal., 22-23.
21. *Ibid.* hal., 18.
22. *Nota v.T. Bangli*, tth, hal., 7-8.
23. *Ibid.*, hal., 16.
24. *Nota v.T. Tabanan*, tth, hal., 9-10.
25. *Ibid.*
26. *Nota v.T. Gianyar*, tth, hal., 11.
27. *Ibid.*, hal., 13; 11.

28. *Ibid.*, hal., 13; 28.
29. Nota v.T. Badoeng, tth., hal., 20-21.
30. Nota v.T. Djembrana, tth, hal., 49.
31. A.A.B. Wirawan, "Tanah Perubahan Sosial di Bali 1882-1942". Tesis S2, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1985, tidak diterbitkan, hal., 55.
32. H. Beeukes, *MvO Bali an Lombok*, 1932, hal., 174.
33. H.J.E. Moll, *MvO Bali en Lombok*, 1941, hal., 26.
34. *Nota v.T. Karangasem*, tth, hal., 40.
35. *Nota v.T. Kloengkoeng*, tth, hal., 14-15.
36. *Ibid.*, 22-23.
37. *Nota v.T. Bangli*, tth, hal., 7-8.
38. *Ibid.*, hal., 16.
39. *Nota v.T. Tabanan*, tth, hal., 9-11.
40. *Nota v.T. Gianyar*, tth, hal., 13; 11.
41. *Nota v.T. Badoeng*, tth, hal., 26.
42. *Ibid.*, hal., 55-56.
43. *Nota v.T. Djembrana*, tth, hal., 49-50.
44. W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. ('s-Gravenhage: W. van Hoeve, 1959), hal., 93-107; cf. Thomas C. Smith, *The Agrarian Origins Japan*. (California: Stanford Univ. Press, 1959), hal., 67-86; Michael P. Todaro, *op. cit.* hal., 401-411.
45. V.E. Korn, *Het Adatrecht van Bali*. ('s-Gravenhage: G. Naeff, 1932), hal., 330; *Nota v.T. Gianyar*, tth, hal., 45.
46. H.J.E. Mell, *op. cit.*, hal., 26.
47. *Nota v.T. Gianyar*, tth, hal., 40.
48. *Nota v.T. Karangasem*, tth, hal., 28.

49. Nota v.T. Gianyar, tth, hal., 41.
50. Nota v.T. Seluruh *landchap* di Bali
51. H.J.E. Moll, *op. cit.*, hal., 36.
52. H. Beeuwkes, *op. cit.*, hal., 40-50.
53. L.J.J. Caron, *MvO Bali en Lombok*, 1929, hal., 62-63.
54. *Jaarverslag Balische Volkasbank*, Singaraja, 1930, hal., 8.
55. H. Beeuwkes, *op. cit.*, hal., 133-136.
56. V.E. Korn, *op. cit.*, hal., 124-125.
57. L.J.J. Caron, *op. cit.*, 44.
58. *Jaarverslag Balische Volksbank*, Singaraja, 1930, hal., 17.
59. *Ibid.*, hal., 18.
60. H. Beeuwkes, *op. cit.*, hal., 183.
61. *Ibid.*, hal., 184.
62. R. Stavenhagen, *op. cit.*, 46-47.
63. V.E. Korn, *op. cit.*, 176.
64. W.F. Wertheim, *op. cit.*, hal., 136-141.
65. Michael P. Todaro, *op. cit.*, hal., 353; Richard P. Appelbaum, *Theories of Social Change*. (Chicago: Markham Publishing Co., 1970), hal., 67.
66. Nota v.T. Kloengkoeng, tth, hal., 14-15; Nota v.T. Karangasem, tth, hal., 19.
67. Nota v.T. Djembrana, tth, hal., 25-26.
68. H.J.E. Mell, *op. cit.*, hal., 94.
69. Nota v.T. Djembrana, tth, hal., 26-27.
70. Richard P. Appelbaum, *op. cit.*, 81; 94.
71. V.E. Korn, *op. cit.*, hal., 314.

PASIFIKASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI ACEH

(oleh Rusdi Sufi)

I

Pada awal abad ke XX, pemerintah Hindia Belanda untuk kesekian kalinya merubah lagi kebijaksanaan dalam mengamankan Aceh¹. Karena hingga saat itu mereka belum berhasil menaklukkan Aceh. Untuk itu mereka mencoba melaksanakan suatu kebijaksanaan baru yang disebut politik pasifikasi, lanjutan dari gagasan yang dikemukakan C. Snouck Hurgronje. Suatu politik yang menunjukkan sikap damai melalui berbagai usaha yang mengacu ke arah itu. Dengan politik ini pihak Belanda mulai memperlihatkan sikap lunak kepada masyarakat Aceh. Untuk mengamankan Aceh, mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi juga dengan usaha-usaha lain yang dapat menimbulkan simpati rakyat. Para pemimpin adat (*uleebalang*) dan rakyat yang bersedia menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri kepada Belanda diperlakukan secara baik dan dibantu untuk memperoleh kehidupan yang wajar kembali². Mereka yang hendak mengusahakan pertaniannya atau yang mau melakukan usaha perkebunan diberi modal dan dilindungi oleh pemerintah Belanda³.

Dalam rangka politik pasifikasi ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa usaha. Di antaranya dengan jalan meningkatkan kecerdasan rakyat, terutama anak-anak *ulee-balang* dengan memberikan pendidikan Barat. Memperbaiki kesehatan rakyat dengan sistim pengobatan moderen; pembuatan jalan-jalan raya, jalan kereta api dan pelabuhan-pelabuhan; serta yang paling menonjol adalah memajukan perkembangan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat, baik melalui cara dalam bentuk eksploitasi maupun dengan membangun berbagai prasarana yang menyangkut kepentingan rakyat.

Pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa jika ekonomi daerah dan ekonomi rakyat maju, maka penghidupan rakyat akan menjadi lebih baik dan lebih makmur, sehingga ketentraman dan ketertiban daerah akan lebih terjamin. Dengan demikian diharapkan rakyat Aceh tidak lagi memusuhi atau memerangi Belanda dan rakyat akan dapat melupakan penderitaan-penderitaan yang mereka alami akibat berperang dengan Belanda dalam waktu yang lama⁴. Dan pada akhirnya diharapkan rakyat Aceh akan menyerah secara definitif kepada Belanda. Karena mereka harus menyadari bahwa tidak ada jalan lain kecuali bekerja sama, serta menghargai usaha-usaha pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan menegakkan kepastian hukum serta memajukan ekonomi⁵.

Tanggapan masyarakat Aceh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda tersebut, pada mulanya berbeda-beda. Para pemimpin adat (kelompok *uleebalang*) ada yang menuruti kehendak Belanda, di samping juga ada yang masih terus melakukan perlawanan. Para pemimpin agama (ulama) ada yang berdiam diri saja, ada pula yang mengikuti *uleebalang* bekerja pada pemerintah Hindia Belanda dan juga yang terus mengangkat senjata⁶. Demikian pula dengan kelompok rakyat, ada yang mengikuti ajakan pemerintah dan ada pula yang terus mengadakan perlawanan bersama pemimpin-pemimpin mereka yang masih tetap melan-

jutkan perlawanan. Namun ketika politik pasifikasi dilaksanakan secara lebih intensif, sebagian besar *uleebalang* dari jumlah sekitar 100 orang, telah berdamai dengan Belanda dan bersedia menanda tangani perjanjian singkat yang antara lain berisi pernyataan tunduk serta mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah mereka. Demikian pula perlawanan rakyat menjadi semakin mengendor, sehingga perlawanan-perlawanan dalam bentuk perang gerilya sudah terjadi. Selanjutnya mulai terlihat perubahan sikap rakyat ke arah menerima dan pasrah terhadap hal-hal yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Para *uleebalang* yang telah tunduk, dilibatkan bekerja pada struktur birokrasi Belanda dengan diangkat secara resmi sebagai *zelfbestuurder* dari *landschan* atau kenegerian masing-masing, dan diberi gaji tetap oleh pemerintah⁷.

Perintisan ke arah perbaikan ekonomi dalam rangka politik pasifikasi di Aceh; sebenarnya sudah dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Sipil dan Militer Van Heutsz (1898–1904), berbarengan dengan politik "keras" yang dilaksanakannya. Tetapi intensifikasinya baru dijalankan di bawah pemerintahan gubernur H.N.A. Swart (1908–1918). Swart, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukannya berhasil meletakkan dasar bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi di Aceh. Politik "keras" yang dianut oleh penguasa-penguasa sebelumnya (Van Heutsz, Van der Wijk dan Van Daalen), mulai di kesampingkan. Ia berusaha untuk mendekati rakyat dengan memperlihatkan sikap damai dan bijaksana. Berkat uang dan tindakan-tindakan yang bersahabat dalam bentuk pemberian hadiah-hadiah, tunjangan-tunjangan dan bintang-bintang jasa kepada sejumlah *uleebalang*, Swart berhasil meyakinkan dan mengikut sertakan mereka untuk bekeja sama dalam membangun ekonomi di Aceh.

Oleh karena jasa-jasanya dalam "mengamankan" dan keberhasilan-keberhasilan memajukan pendidikan dan perekonomian. Swart kemudian digelar sebagai "Pacificator van Atjeh"⁸.

Selain itu ia juga mendapat penghargaan dari sejumlah *uleebalang* pada saat ulang tahunnya yang ke 70 (dalam tahun 1933). Para *uleebalang* ini mengirim surat ucapan selamat ulang tahun disertai seperangkat hadiah kepada Swart. Dalam surat tersebut mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Swart yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan ekonomi di Aceh, sehingga daerah Aceh pada waktu itu tidak ketinggalan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatra dan wilayah Hindia Belanda lainnya⁹. Isi surat yang berkenaan dengan hal tersebut, antara lain sebagai berikut:

"Kami sekalian tidak loepa, tetapi selaloe ingat sekalian djasa serta kebaikan dari jang moelia toean Besar jang doeloe-doeloe kepada kami sekalian dan begitoe djoega oentoe tanah Atjeh, tanah tempat toempah darah kami, jang moelia senang dan aman dan dapat kemakmoeran serta mendapat sekolah-sekolah (onderwijs) jang seke-darnja, jang mendjadi tiang atas ketjerdasan sesoeatoe negeri, ialah moelai semendjak didalam pemerintahan jang moelia toean Besar Gouverneur "H.N.A. SWART" ditanah Atjeh, moelai dari tahoen 1980 sampai 1918 dan seteroesnja sampai sekarang ini, itoe semoea kami pendoedoe tanah Atjeh tidak dapat meloepakan, jang tentoe djoega kami berasa, pada pehak jang moelia toean Besar tidak meloepakan, tetapi selaloe mendjadi peringatan dan kenang-kenangan djoega, bagi tanah tempat toempah darah kami (tanah Atjeh) jang doeloe oleh jang moelia toean Besar soedah beroesaha boeat mema-djoekannja sampai mendjadi soeatoe negeri jang aman dan makmoer seperi sekarang ini, jang tidak kalah kalau dibandingkan dengan bagian (gewest) lain dalam bagian Nederlandsche India"¹⁰.

Pengganti-penggati Swart, Van Siuys (1918–1923), Hans (1923–1926), Goedhart (1926–1930), Philips (1930–1933), Van Aken (1933–1936), Jongejans (1936–1940), dan yang terakhir J. Pauw (1940–1942) tetap melaksanakan tindakan-tindakan yang mengarah ke politik pasifikasi. Politik yang semula dimaksudkan untuk dapat menundukkan Aceh, namun secara tidak langsung telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Aceh.

II

Sejalan dengan tujuan politik pasifikasi maka semenjak awal abad ke XX, pemerintah Hindia Belanda di Aceh mulai melakukan beberapa usaha yang menjurus ke arah politik itu. Di antaranya usaha untuk perbaikan ekonomi rakyat dan ekonomi daerah dengan melakukan pembangunan-pembangunan dalam bidang pertanian, perhubungan dan pertambangan.

Perhatian pemerintah untuk meningkatkan ekonomi mulai tampak pada tahun 1901, ketika Van Heutsz (selaku Gubernur sipil dan Militer di Aceh) meminta kepada dinas topografi membuat sebuah peta ikhtisar Aceh dan daerah takluknya¹¹. Sesudah pembuatan peta ini, beberapa tempat/kawasan dalam wilayah Aceh mulai dieksplorasi dan dieksploitasi. Perkebunan-perkebunan swasta/pemerintah dan pertambangan-pertambangan mulai dibuka dan yang sudah ada pengusahaannya lebih ditingkatkan. Prasarana-prasarana ekonomi seperti jalan (jalan darat dan jalan kereta api) jembatan-jembatan dan pelabuhan-pelabuhan baru juga mulai dibangun. Khusus di bidang pertanian rakyat diusahakan peningkatan hasil produksi.

Usaha pertanian, khususnya bersawah merupakan mata pencaharian pokok rakyat. Hal ini tercermin dalam sebuah peribahasa Aceh, *pangulee hareukat meugoe* (pertanian bersawah adalah usaha yang utama). Akibat keadaan politik menjelang akhir abad ke XIX (disebabkan peperangan yang terus-menerus) yang melibatkan sebagian besar penduduk, maka usaha pertanian rakyat mengalami kemunduran. Sesuai dengan politik pasifikasi maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk menggalakkan dan meningkatkan hasil produksi pertanian rakyat kembali. Untuk tujuan ini pemerintah menempuh beberapa cara. Di antaranya dengan memberikan bantuan modal kepada rakyat dan *uleebalang* yang tidak lagi melawan Belanda. Dalam hubungan ini pemerintah mendirikan bank seperti di wilayah Aceh Besar yang diberi nama *de Groot Atjehsche Afdeeling-bank*. Rakyat yang menginginkan bantuan kredit untuk mem-

buka kembali atau memperluas kebun-kebun dan sawah-sawah mereka dapat meminjam modal dari bank tersebut, tanpa dikenakan bunga^{1 2}. Selain itu juga dengan mendatangkan petani-petani dari pulau Jawa (orang-orang Sunda) untuk memperkenalkan cara-cara bertani seperti di Jawa. Di Aceh, mereka mendemonstrasikan cara-cara mengolah tanah dengan menggunakan bajak Hindustan dan cara-cara menanam padi yang lebih baik^{1 3}. Pemerintah juga memperkenalkan varietas bibit yang lebih baik yang cocok untuk daerah Aceh; membangun irigasi-irigasi moderen, serta juga membentuk sebuah badan yang bertugas memberikan penerangan atau penyuluhan di bidang pertanian kepada rakyat. Badan ini disebut *landbouwvoorlichtingsdienst* (dinas penyuluhan pertanian)^{1 4}.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk memperbaharui dan meningkatkan sistem pertanian rakyat ini, dalam perkembangannya cukup berhasil. Pada beberapa wilayah seperti di Aceh Utara dan Aceh Timur, dari tahun ke tahun areal persawahan rakyat terus meningkat. Menurut catatan dari *landbouwvoorlichtingsdienst*, dinas penyuluhan pertanian, jumlah areal persawahan di Aceh pada tahun 1928, adalah 130.000 Ha; pada tahun 1932 sudah meningkat 132.000 Ha.^{1 5}, dan dalam tahun 1936 meningkat lagi menjadi 140.500 Ha^{1 6}. Demikian pula dengan hasil produksinya, jika pada tahun-tahun permulaan abad ke XX hasil padi daerah Aceh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka pada tahun 1932 Aceh telah surplus beras, dan oleh pemerintah telah diusahakan untuk diekspor ke daerah Sumatra Timur untuk konsumsi karyawan-karyawan pada perkebunan yang berada di sana^{1 7}. Dalam tahun 1939 daerah Aceh telah surplus beras sebanyak 5.600 ton, dan sebagian besar di antaranya di ekspor ke daerah Sumatra Timur. Tahun 1940 dan 1941 surplus beras ini naik lagi menjadi 24.000 dan 36.000 ton; sedang pada tahun 1942 (akhir masa pendudukan Belanda) daerah Aceh telah mengekspor beras ke daerah Sumatra Timur dan juga ke daerah Sumatra Barat tidak kurang dari 45.000 ton^{1 8}. Ekspor beras

untuk Sumatra Timur terutama berasal dari wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Gayo dan tanah Alas yang diangkut ke daerah itu dengan menggunakan kereta api dan auto barang. Sedangkan yang di ekspor ke Sumatra Barat, beras yang berasal dari wilayah Aceh Barat yang diangkut ke sana dengan menggunakan kapal laut^{1 9}.

Selain berusaha meningkatkan hasil produksi bersawah yang merupakan sumber penghasilan rakyat yang utama, pemerintah juga mengusahakan perbaikan-perbaikan pada usaha-usaha pertanian rakyat lainnya. Sehubungan dengan hal ini, semenjak awal abad ke XX pemerintah telah menganjurkan kepada rakyat agar mengusahakan kembali dan meremajakan pohon-pohon kelapa, pinang dan lada pada kebun-kebun mereka. Untuk menunjang usaha ini pemerintah juga memberikan pinjaman modal kepada rakyat yang menginginkannya tanpa dikenakan bunga^{2 0}.

Sama halnya seperti pada tanaman padi rakyat, untuk meningkatkan produksi lada juga diusahakan untuk memasukkan berbagai varietas bibit yang baik berasal dari Bangka dan Lampung^{2 1}. Pemerintah juga memberikan bantuan kredit tanpa bunga kepada rakyat yang memerlukannya, melalui bank-bank kecil yang khusus didirikan untuk menunjang usaha-usaha pertanian rakyat. Di wilayah Aceh Besar dalam tahun 1916 telah didirikan 5 buah bank kecil ini, sementara di Aceh Utara (Lhok Seumawe) dan Aceh Timur (Langsa) sejak tahun 1913 juga telah didirikan masing-masing satu buah. Dalam tahun 1918 jumlah bank yang didirikan telah meningkat menjadi 29 buah^{2 2}.

Usaha pemerintah untuk menggalakkan penanaman lada kembali, nampaknya cukup berhasil. Karena pada tahun 1914 daerah Aceh telah dapat mengekspor 3.303.000 kg. lada hitam dan 1.000.000 kg. lada putih. Pada tahun 1915 naik menjadi 4.046.000 kg. lada hitam dan lada putih tetap 1.000.000 kg.^{2 3} Turunnya harga lada di pasaran dunia (karena macetnya pelayaran akibat perang dunia pertama) telah mengakibatkan penanaman lada menjadi mundur, sehingga produksinya juga tidak

dapat dipertahankan. Jika pada tahun 1919 ekspor lada (lada hitam dan lada putih) masih sebanyak 4.340.000 kg., maka pada tahun 1920 merosot menjadi 2.658.000 kg.²⁴.

Meskipun pada tahun dua puluhan penanaman lada rakyat mengalami kemunduran, tetapi usaha penanaman pinang menjadi bertambah maju. Pada beberapa wilayah (Aceh Besar, Aceh Utara dan Aceh Timur) kebun-kebun pinang semakin bertambah. Ekspor pinang Aceh dipasarkan pada pusat-pusat pemasaran pinang terkenal, pinang dan Calcutta (India). Dalam tahun 1937 eksportnya berjumlah 27.000 ton²⁵, dan tahun 1939 sekitar 25.000 ton dengan harga jual f 5 per 100 kg.²⁶.

Penanaman kelapa juga mendapat perhatian pemerintah. Sehubungan dengan hal ini pada awal abad ke XX, pemerintah telah menganjurkan kepada penduduk untuk meremajakan pohon-pohon kelapa pada kebun-kebun mereka²⁷. Untuk menggalakkan penanaman tanaman ini, pemerintah juga memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan. Daerah yang banyak menarik perhatian melakukan penanaman kelapa pada mulanya adalah daerah Aceh Besar dan pulau Weh. Selanjutnya merembes ke beberapa tempat di wilayah pantai Barat Aceh, seperti Calang, Meulaboh dan Singkel. Di tempat-tempat ini penanaman kelapa dilakukan secara besar-besaran. Keseluruhan areal perkebunan kelapa di daerah Aceh meliputi 1.000 Ha.²⁸.

Kelapa setelah dijadikan kopra kebanyakan diekspor ke Penang/Semenanjung Tanah Melayu dan Eropah. Ekspor kopra Aceh pada tahun 1919 berjumlah 6.000 ton, dan pada tahun 1920 turun menjadi 4.000 ton²⁹. Turunnya ekspor kopra ini berkaitan dengan situasi harga pada waktu itu, yang sedang mengalami kemerosotan. Dalam tahun 1939 ekspor kopra Aceh hanya mencapai 12.150 ton, dengan harga jual f 3.50/100 Kg.³⁰.

Selain mengusahakan peningkatan hasil produksi pertanian rakyat, pemerintah Hindia Belanda juga menginginkan hasil dari usaha pertanian budidaya. Dalam hubungan ini peme-

rintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan-perusahaan perkebunan swasta Eropah yang disebut *ondernemingslandbouw*, untuk menanam modalnya dalam usaha pertanian/perkebunan di daerah Aceh. Untuk menggalakkannya, dalam tahun 1907 pemerintah memberikan tanah-tanah konsesi pertanian/perkebunan seluas 16.700 Ha, sedang jumlah konsisi untuk membuka hutan sebanyak 21 buah yang tersebar di seluruh Aceh³¹. Untuk memperkenalkan cara-cara perkebunan yang moderen, sebagai contoh, pemerintah mendirikan pula sebuah perkebunan karet pemerintah di Langsa (Aceh Timur)³².

Pada mulanya perkembangan perusahaan perkebunan swasta ini berkaitan erat dengan situasi keamanan pada masa itu. Di daerah-daerah yang relatif telah aman, usaha-usaha ini dapat berjalan lancar, sementara pada daerah-daerah yang belum aman tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh daerah Gayo dan tanah Alas, baru dibuka untuk perusahaan perkebunan setelah ditaklukkan. Daerah yang paling banyak dibuka untuk usaha ini yaitu daerah pantai timur Aceh. Beberapa perusahaan perkebunan besar yang terdapat di wilayah itu antara lain:

1. De Bajan Sumatra Rubber Maatschappij. Didirikan pada bulan Mei 1911, dengan modal f. 1.000.000; luas 1700 Ha.
2. Naamlooze Vennootschap Langsar-Landsyndicaat. Didirikan pada bulan Agustus 1910, modal f 500.000; luas 5460 Ha.
3. Langsar Sumatra Rubber Maatschappij. Didirikan pada bulan Juni 1910, modal f 1.500.000.
4. Rubber Cultuur Maatschappij Soengey Raja. Didirikan pada bulan Oktober 1909, modal f 2.000.000; luas 14.184 Ha.
5. Batang Ara Cultuur Mij. Didirikan pada bulan Januari 1911, modal f 500.000.—
6. Soengei-Lipoet Cultuur Maatschappij. Didirikan pada bulan Februari 1908, modal f 750.000; luas 1500 Ha.
7. Tamiang Rubber estates Limited. Didirikan pada bulan September 1909, modal f 120.000, luas 4752 Ha.³³.

Pada tahun 1923 jumlah perkebunan ada sekitar 20 buah; 12 di antaranya adalah kebun karet, 7 kebun kelapa sawit dan 1 kebun kelapa. Selain itu terdapat juga sebuah perkebunan milik Perancis dan Belgia, *Soc Fin* (Societe Financiere des Caoutchoucs), lokasinya di daerah Tamiang dekat perbatasan dengan Sumatra Timur. Perkebunan ini mulai dibuka pada 26 Pebruari 1908, dengan areal seluas 30 Ha., dan pada tahun 1922 telah berkembang menjadi 5751 Ha, dengan jumlah pekerja sebanyak 3600 orang. Selain diperuntukkan untuk penanaman karet, perkebunan ini juga untuk penanaman kopi dan kelapa sawit³⁴.

Di wilayah pantai Barat juga didirikan beberapa *ondernemingslandbouw*, yang mengusahakan perkebunan karet dan kelapa sawit. Di daerah Meulaboh dan sekitarnya pada tahun 1934 terdapat 400.000 batang karet yang telah disadap getahnya³⁵. Usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah ini dilaksanakan oleh N.V. *Handelscereeniging Amsterdam dan Societe Financiere des Caoutschoucs*. Pada tahun 1937 areal perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut meliputi 11.325 Ha., dengan produksi 8.835,5 ton³⁶.

Setelah daerah Gayo berhasil ditaklukkan (1908), beberapa perusahaan swasta kecil dan menengah mulai melakukan penanaman kopi di daerah itu. Adapun jenis kopi pertama yang ditanam adalah *robusta*. Lokasi penanaman kopi yang terkenal di daerah Gayo adalah Lampahan dengan areal tanah yang ditanami lebih kurang 100 Ha dan jumlah produksi sebanyak 75 ton pertahun. Produksi ini kemudian terus meningkat menjadi 225 ton. Pada tahun 1937 produksi daerah Gayo meningkat menjadi 589 ton dari luas areal 2.400 Ha.³⁷. Daerah Alas yang tanahnya juga cocok untuk tanaman kopi beberapa perusahaan perkebunan telah pula dimanfaatkan untuk membuka perkebunan kopi. Hasil kopi dari seluruh Aceh terutama dipergunakan untuk konsumsi daerah Sumatra dan selebihnya di ekspor ke Eropah. Selain kopi di daerah Gayo juga diusahakan perke-

bunan pohon tusam (pinus merkusi) yang luas arealnya mencapai 70.000 Ha³⁸.

Pada akhir tahun 1939 di seluruh Aceh terdapat tidak kurang dari 133 buah usaha perkebunan budidaya, dengan luasnya masing-masing 2.000 Ha atau lebih. Luas areal tanah yang ditanami menurut jenis di antaranya, karet 34.060 Ha., kelapa sawit 11.325 Ha., kopi 2.745 Ha., teh 850 Ha., dan pohon tusam (pinus merkusi) 70.000 Ha³⁹.

Masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta Eropa ke daerah Aceh, secara tidak langsung telah membawa pengaruh pada sistem pertanian tradisional penduduk. Penanaman karet yang dipelopori oleh perusahaan-perusahaan tersebut seperti di daerah-daerah pantai Timur dan pantai Barat Aceh, telah menyebabkan rakyat juga menanam karet pada kebun-kebun milik mereka sendiri⁴⁰. Dengan adanya *landbouwwoorlichtingsdienst* yang memberi penyuluhan tentang pertanian moderen kepada rakyat dan keberhasilan badan ini dalam membuat *proeftuin* (kebun percontohan)⁴¹, juga telah menarik perhatian rakyat. Berhasilnya dengan baik kebun percontohan tanaman kopi di daerah Tangse (Pidie), telah membawa pengaruh kepada rakyat di daerah tersebut dan sekitarnya. Mereka mulai tergugah untuk menanam kopi pada tanah-tanah milik mereka. Tanaman kopi yang diusahakan rakyat ini rupa-rupanya dapat berkembang di wilayah itu, lebih-lebih dengan mendapat dukungan dari *uleebalang* setempat. Selanjutnya penanaman kopi oleh rakyat ini diikuti pula oleh daerah-daerah lain di sekitarnya⁴².

Diketemukannya sumber minyak bumi di wilayah pantai Timur dan pantai Utara Aceh menyebabkan daerah-daerah itu dibuka untuk kegiatan pertambangan. Pemboran pertama dimulai di daerah Peurelak pada tahun 1900, kemudian pada tahun 1902 dan tahun 1903 masing-masing di daerah Langsa, Peudada, Idi, Julok Rayeuk dan Cunda⁴³. Dengan demikian di daerah-daerah itu muncul beberapa maskapai perminyakan seperti *Holland Perlak Maatschappij*, *Bataafsche Petroleum*

Maatschappij (BPM), *Perlak Petroleum Maatschappij*, *Petroleum Mij Zuid Perlak* dan *Nederland Koningklijk Petroleum Maatschappij* (NKPM). Di antara Maskapai paling banyak melakukan kegiatan adalah BPM. Maskapai ini memperoleh konsisi terbanyak meliputi beberapa petak wilayah, yaitu: petak Aceh Timur, petak Tamiang, petak Aceh Utara dan petak Jambo Aye. Konsesi ini diperoleh dari Gubernur Jendral pada tahun 1927, dan karena majunya usaha-usaha yang dilakukan BPM, pada bulan September 1930 mendapatkan lagi tambahan konsesi yang diberikan oleh Gubernur Aceh dan daerah-daerah takluknya^{4 4}.

Dimilikinya daerah konsesi petak Tamiang dengan umur Rantau oleh BPM, telah memberikan keuntungan besar bagi perusahaan itu. Karena Petak itu merupakan pusat penghasil minyak bumi yang paling produktif di wilayah kepulauan Indonesia, dengan produksi rata-rata 1.700 ton perhari^{4 5}. Selain itu juga, jika sumur-sumur minyak lainnya di Indonesia pemboran paling kurang untuk menghasilkan minyak harus mencapai kedalaman 600 meter, maka di petak Tamiang dengan sumur Rantau cukup hanya pada kedalaman 350 meter^{4 6}.

Adapun jumlah produksi minyak BPM di daerah Tamiang dan Langsa pada tahun 1929 sebanyak 61.698 M³; dan pada tahun 1933 (hingga bulan Agustus) 727.267 M³. Semua minyak yang dihasilkan dari daerah Aceh ini, baik dari Perlak, Langsa maupun Tamiang selanjutnya dialirkan melalui sebuah pipa panjangnya 120 Km. ke tempat penyulingan di Pangkalan Brandan (wilayah Sumatra Timur)^{4 8}.

Dengan adanya hasil minyak ini, selain memberi keuntungan bagi pemerintah, juga bagi daerah-daerah di mana minyak dihasilkan. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Aceh dan Daerah Takluknya No. 9097/LK., tanggal 7 Juli 1934, ditetapkan bahwa daerah-daerah kenegerian yang ada usaha pertambangan minyak, berhak mendapatkan pemasukan dari usaha pertambangan itu^{4 9}. Dengan demikian maka daerah-daerah Tamiang, Langsa, Idi dan Peurelak memperoleh penghasilan dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di wilayah-

nya, sehingga daerah-daerah ini merupakan yang terkaya di daerah Aceh pada waktu itu.

Pembangunan jalan-jalan termasuk jalan kereta api yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda di Aceh, pada mulanya semata-mata untuk kepentingan politis⁵⁰. Jaringan jalan yang pertama dibangun adalah di wilayah Aceh Besar. Pada saat Belanda masuk, daerah ini hanya memiliki 3 buah jalan yang berarti, selebihnya adalah jalan-jalan setapak yang menghubungkan antar kampung di wilayah Aceh Besar⁵¹. Untuk kepentingan militer, dalam rangka penaklukan, Belanda terpaksa membangun jalan-jalan baru, jembatan-jembatan dan jalan-jalan kereta api yang kesemuanya dilakukan oleh zenī militer. Pada tahun 1904 sejumlah jalan-jalan yang telah dibangun ini diperbaiki dan jembatan-jembatannya dibuat yang permanen⁵².

Setelah Aceh Besar, perhatian berikutnya ditujukan ke daerah-daerah lain di luar Aceh Besar. Pembangunan jalan kereta api secara bertahap diteruskan ke wilayah Pidie; selanjutnya sepanjang pantai Aceh Utara, Aceh Timur hingga ke Besitang (perbatasan dengan Sumatra Timur). Di sini kereta ini (Atjeh-Tram) dihubungkan dengan kereta api milik DSM (*Deli Spoorweg-Maatschappij*), yang peresmianya dilakukan pada 29 Desember 1919⁵³.

Daerah Gayo setelah ditundukkan (1908) diusahakan agar tidak terisolir lagi. Untuk ini pemerintah membangun sebuah jalan yang dapat membuka dan menghubungkan daerah ini dengan daerah-daerah lain di tepi pantai. Panjang jalan yang dibangun sekitar 125 Km., mulai dari kota Bireun (Aceh Utara) hingga kota Takengon (Gayo, Aceh Tengah). Dalam tahun 1914 pembangunan jalan ini selesai dengan menelan biaya 1½ juta gulden⁵⁴.

Masa antara tahun 1915 – 1918 pembuatan jalan di Aceh semakin meningkat. Jalan-jalan raya yang telah ada diperbaiki dan diperpanjang juga dibangun jalan-jalan baru terutama untuk keperluan mobil yang mulai digunakan di Aceh. Dalam tahun 1918 sudah ada 154 buah mobil, 10 sepeda motor dan ribuan

buah sepeda^{5 5}. Selain itu juga dibangun sejumlah jalan kecil yang hanya dapat dilewati gerobak. Gunanya untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan daerah-daerah yang sudah "terbuka". Misalnya jalan-jalan yang menghubungkan Aceh Timur dengan negeri Alas. Karena mendesak untuk kepentingan keamanan, beberapa jalan dibangun dengan bantuan militer, seperti jalan Blangkejeren dengan Kuta Cane dan jalan antara Seulimun dengan Padang Tiji.

Tahun dua puluhan dan tiga puluhan, pembangunan jalan terus mengalami peningkatan. Karena rupa-rupanya pembangunan ini mendapat prioritas dari pemerintah^{5 6}, yang menganggapnya sebagai salah satu alat untuk mencapai sasaran politik pasifikasi^{5 7}.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka politik pasifikasi dapat dikatakan cukup berhasil. Keadaan ekonomi dan politik di daerah Aceh menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda menjadi bertambah baik. Keamanan daerah semakin lebih mantap; rakyat mulai percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kehidupan ekonomi yang sebelumnya mengalami kemunduran akibat perang dengan Belanda, juga menjadi semakin meningkat; terutama jika dilihat dari segi hasil-hasil produksi dan ekspor beberapa jenis hasil pertanian. Sehingga daerah Aceh pada waktu itu telah sejajar dengan daerah-daerah lain dalam wilayah Hindia Belanda^{5 8}.

Di lain segi, adanya berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan politik pasifikasi, telah menyebabkan timbulnya beberapa perubahan dalam masyarakat Aceh. Rakyat Aceh mulai mengenal sistem pertanian baru dan daerah Aceh makin terbuka bagi pendatang-pendatang dari luar. Posisi politik dan kedudukan ekonomi para *pelembak* dari luar. Posisi politik dan kedudukan ekonomi para *uleebalang* menjadi berubah^{5 9}. Dan Aceh mulai terkait pada politik kolonial, ekonominya berubah wajah menjadi ekonomi kolonial dalam bentuk-bentuk eksploitasi.

Tujuan pemerintah Hindia Belanda untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian di Aceh, tidak terlepas dari kepentingan politis. Pembangunan sarana-sarana perhubungan (jalan-jalan raya dan jalan kereta api) lebih ditekankan pada kepentingan politis dari pada kepentingan ekonomis⁶⁰. Pembuatan jalan dimaksudkan sebagai usaha untuk membebaskan daerah-daerah yang terisolir. Karena dengan adanya jalan-jalan itu memungkinkan penduduk melakukan kontak yang terus-menerus dengandunia luar, sehingga mentalitas mereka di daerah-daerah yang telah terbuka itu akan mengalami perubahan dan dengan demikian akan membuat keadaan politik menjadi lebih baik. Begitu pula dengan pembangunan beberapa irigasi besar, meskipun biaya untuk itu sangat besar jumlahnya bila dibandingkan dengan kepentingan ekonomis, tetapi tetap dilaksanakan. Karena dalam hal ini pemerintah telah menempatkan keuntungan politik di atas kepentingan ekonomi⁶¹.

Meskipun dalam beberapa hal politik pasifikasi ini dapat dikatakan berhasil, tetapi apakah pihak Belanda benar-benar telah berhasil menaklukkan Aceh?. Karena menurut kenyataan, Belanda tidak pernah mengalami masa damai yang sesungguhnya di daerah Aceh.

DAFTAR CATATAN

1. Beberapa kebijaksanaan yang telah ditempuh Belanda untuk mengamankan Aceh, dapat dilihat misalnya dalam T. Ibrahim Alfian, "Perang Di Jalan Allah, Aceh 1873–1912". Disertasi yang belum diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1981) hal. 83–130. Lihat juga dalam J.C.A. Bannink, "De Verovering En Pacificatie van Atjeh, Vergeleken Met De Geschiedenis Van Britsch Birma", *De Indische Gids*, (Amsterdam: J.H. De Bussy, 1913) hal. 146–151.
2. Memorie van Overgave van Atjeh en Onderhoorigheden van H.N.A. Swart, 30 Agustus 1918. *Mailr.* 2398/18.
3. *Ibid.*
4. *Ibid.*
5. A.J. Piekaar, *Atjeh en De Oorlog met Japan*, (The Hague: Van Hoeve, 1949), hal. 2.
6. Lihat T. Ibrahim Alfian, "Sejarah Singkat Perang Di Aceh" dalam Sartono Kartodirdjo (ed) *Sejarah perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme*. (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1973), hal. 261.

7. Tentang sistim pengajian *uleebalang*, lihat J. Kreemer, "De Inkomsten van het Landschan-bestuur in het Gewest Atjeh en Onderhoorigheden", *De Indische Gids* 42, I, (1920), hal. 123–148.
8. M.H. Du Croo, *Generaal Swart Pacificator Van Atjeh*. (Maastricht: N.V. Leiter – Nypels, 1943), hal. 165–166.
9. *Ibid.* Lihat pula dalam J.R.C. Gonggrijp, *Overzicht van de Economische Ontwikkeling van Atjeh Sedert De Pacificatie*. (Den Haag: W.P. Van Stoekum & Zoon, 1944), hal. 6.
10. M.H. Du Croo, *Loc. cit.*
11. J. Langhout, *Economische Staatskunde in Atjeh*. (Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon, 1923), hal. 84.
12. *Ibid.*, hal. 91.
13. *Koloniaal Verslag* (1907), hal. 18. Lihat juga J. Langhout, *on cit.*, hal. 89–90.
14. J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*. (Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939), hal. 187.
15. Memorie van Overgave van Atjeh en Onderhoorigheden van A.H. Philips, 31 Mei 1932. *Mailr.* 1624–'32. hal. 46–47.
16. J.R.C. Gonggrijp, *on.cit.*, hal. 7.
17. *De Deli Courant, Medan*, 12–6–1933.
18. A.J. Piekaar, *on.cit.*, hal. 24.
19. *Ibid.*, hal. 25.
20. *Koloniaal Verslag* (1905), hal. 21.
21. J. Langhout, *on.cit.*, hal. 171.
22. *Ibid.*, hal. 110.
23. K.A. James, "De Pepercultuur ter Oostkust van Atjeh", *Koloniale Studien*. (Weltevreden: G. Koeff & Co, 1922), hal. 375.
24. J. Langhout, *on.cit.*, hal. 120.
25. *Ibid.*, hal. 127.
26. A.J. Piekaar, *on.cit.*, hal. 26.
27. *Koloniaal Verslag* (1905), hal. 21.
28. J. Jongejans, *on.cit.*, hal. 158.

29. J. Langhout, *on.cit.*, hal. 120.
30. A.J. Piekaar, *loc.cit.*
31. J. Langhout, *on.cit.*, hal. 90.
32. *Ibid.*
33. Van Eijbergen, "Atjeh" up to Date", *Tijdschrift Voor Het Binnenlandsch Bestuur*. (Batavia: G. Kolff & Co, 1914), hal. 13-16.
34. J. Langhout, *on.cit.*, hal. 188.
35. A. Th. Smeets, Memorie van Overgave van Onderafdeeling Meulaboh, 9 Mei 1934.
36. J. Jongejans, *on.cit.*, hal. 162.
37. *Ibid.*, hal. 164.
38. A.J. Piekaar, *loc.cit.*
39. *Ibid.*, hal. 27.
40. J. Jongejans, *on.cit.*, hal. 188.
41. *Ibid.*
42. P. Schtolten, Memorie van Overgave van Onderafdeeling Lameulo, 5 Desember 1933.
43. J. Jongejans, *on.cit.*, 201. Lihat juga J. Langhout, *on.cit.*, hal. 85.
44. Th. O.B. Gunther, Memorie van Overgave van den Controleur van Tamiang, 1 Nopember 1933.
45. J. Jongejans, *on.cit.*, hal. 201.
46. K.H. de Boer, Bestuurs-memore tevens Memorie van Overgave van Onderafdeeling Langsa, 10 Juli 1927.
47. *Ibid.*
48. R. Broersma, *Atjeh Als Land voor Hadel en Bedrijf* (Utrecht: Gebrs. Cohen, 1925), hal. 34.
49. O. Treffers, Bestuursmemorie tevens Memorie van Overgave van der Controleur der Onderafdeeling Langsa, 7 November 1934.
50. Lihat D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*. (Djakarta: Pradnya Paramita, 1970), hal. 140. Terjemahan Prajudi Atmosudirdjo.

51. J.C.A. Bannink, *on.cit.*, 146.
52. *Koloniaal Verslag* (1905), hal. 21.
53. G.P.J. Caspersz, *De Atjehtram. hare geschiedenis; haar aandel in onderwerping en pacificatie van Atjeh; technische bijzonderheden*. ('s-Gravenhage: F.J. Belinfante, Voorh. A.D. Schinkel, 1927), hal. 29–30.
54. C.L., "De Gayoweg", TBB (Batavia: G. Kolff & Co, 1915), hal. 299.
55. J. Langhout, *on.cit.*, hal. 112.
56. A.J. Piekaar, *op.cit.*, hal. 28.
57. *Mailr.* 1624 – '32.
58. M.H. Du Croo, *loc.cit.*, lihat pula J.H.C. Gonggrip, *loc.cit.*
59. Lihat J. Kreemer, "De Inkomsten van het Landschapbestuur in het Gewest Atjeh en Onderhooridheden", *De Indische Gids* 42, I, (1920), hal. 123–148.
60. *Mailr.* 1624 – '32. Lihat juga A.J. Piekaar. *on.cit.*, hal. 28., dan D.H. Burger, *loc.cit.*
61. A.J. Piekaar, *loc.cit.*

SINGARAJA: KOTA PERDAGANGAN PADA BELAHAN KEDUA ABAD XIX

(oleh Cokorda Istri Suryawati)

I

Penulis memilih Singaraja sebagai Kota Perdagangan tidak berarti mengurangi peranan kota-kota dagang lainnya di Bali, melainkan dengan maksud menyumbang untuk melengkapi dan menyempurnakan penyusunan Sejarah Bali. Ditinjau dari lingkup tempat Singaraja merupakan lokal yang lebih kecil, merupakan kota perdagangan, juga sebagai kota pelabuhan dari Kerajaan Buleleng. Dengan kata lain penulis bermaksud mengentengahkan Singaraja sebagai Kota Perdagangan Pada Belahan Abad XIX, sebagai Sejarah Lokal untuk melengkapi Sejarah Bali sebagai lokal yang lebih luas dalam lingkup waktu sekitar pertengahan abad XIX sampai akhir abad XIX. Dalam penger-

jaan studi dan penulisan Singaraja: Kota Perdagangan Pada Belahan Kedua Abad XIX, penulis menyadari bahwa studi dan penulisan sejarah lokal yang dikait-kaitkan dengan usaha menyumbang bagi sejarah nasional akan menemui kesulitan metodologi.¹ Apabila kemudian Singaraja sebagai Kota Perdagangan dianggap penting dan dapat mendukung penyempurnaan penulisan sejarah nasional, maka dengan sendirinya penulisan ini dipersembahkan untuk kepentingan sejarah nasional.

Masalah Singaraja sebagai Kota Perdagangan pada abad XIX belum pernah ada yang mengungkap secara khusus. Oleh karena itu untuk mewujudkan hasil karya yang baik perlu melalui suatu proses pengujian dari hasil karya penelitian serta data yang didapat ditingkat lokal. Singaraja sangat menarik sebagai pusat perhatian studi, karena letaknya yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan pada abad XIX. Dalam hal ini perlu dikemukakan mengapa penulis mengambil skup temporal dari pertengahan abad XIX sampai akhir abad XIX. Dari beberapa sumber yang digunakan di dalam menggarap tulisan ini, penulis banyak melihat bahwa sejak pertengahan abad XIX perdagangan di Singaraja maju dengan pesat. Lebih-lebih dengan jatuhnya Buleleng ke tangan orang Belanda pada tahun 1849, ini berarti Buleleng dengan kotanya Singaraja mutlak dikuasai oleh Belanda.

II

Dengan berkuasanya Belanda di Singaraja tahun 1849 maka dibangunlah suatu pelabuhan yang disebut Pabean Buleleng. Tempat perdagangan yang sebelumnya berpusat di Pelabuhan Kuta yaitu di daerah Badung bagian selatan, akhirnya pindah ke Singaraja.² Pada pertengahan abad XIX Singaraja semakin meningkat peranan dan kedudukannya dalam dunia perniagaan dan Pabean Buleleng sebagai basis pelayaran sangat

strategis,³ Hubungan dagang dilakukan oleh orang-orang Bugis, Cina dan orang-orang Timur Asing lainnya. Mengingat bahwa fokus pembicaraan dalam tulisan ini lebih mengacu kepada kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, maka perlu diulas konsep kota. Kalau definisi tentang kota ini berdasarkan pada segi ekonomi, maka kota ini merupakan suatu tempat tinggal yang penduduknya terutama hidup dari perniagaan dan perusahaan, bukan dari pertanian. Dalam pengertian sehari-hari kota adalah lokalitas yang luas.⁴ Menurut Max Weber kota adalah menyangkut aktifitas ekonomi dalam pengertian luas. Arti kota kecuali lokalitas yang dikuasai oleh perdagangan secara umum, disitu bercokol berbagai aspek seperti: politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.

Jadi pengertian kota perdagangan (market city) sebagai tempat kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih. Dengan kata lain dapat pula dianggap sebagai pusat kegiatan ekonomi disuatu lokasi tertentu.⁵ Oleh karena itu faktor ekonomi merupakan unsur pokok yang mendasari tumbuh dan berkembangnya kota serta kontak-kontak sosial budaya dari berbagai golongan etnik.⁶ Bila dilihat dari skop speisialnya, studi tentang Singaraja sebagai Kota Perdagangan dapat dikatakan sebagai obyek studi yang bersifat lokal dalam wilayah Bali. Ada pendapat bahwa penulisan Sejarah Lokal adalah langkah strategis menuju penulisan sejarah nasional. Maka dengan demikian perlu mengerti sejarah lokal.

Sebagaimana telah disebutkan di atas orang-orang asing yang ikut berperan aktif di dalam perniagaan ialah orang-orang Bugis, Cina dan Arab. Kontak Orang-orang Bugis dan Cina ke Bali sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-17, walaupun belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Menurut de Graaf, pada pertengahan abad ke-17 yaitu tahun 1651 sudah ada perdagangan di Singaraja lewat perantara orang-orang Cina dan Bugis. Syang belum diketahui dengan jelas perdagangan apa yang menonjol pada waktu itu yang diperankan oleh orang-

orang Bugis dan Cina tersebut. Munculnya pedagang-pedagang asing di Singaraja lebih mempercepat kemajuan dalam bidang perdagangan, namun bukan berarti penduduk pribumi tidak ikut aktif dalam bidang ekonomi khususnya dalam perdagangan. Sebenarnya penduduk pribumi jauh sebelum kedatangan pedagang-pedagang asing. Pada masa Prakolonial perdagangan masih bersifat tradisional artinya belum mengenal alat-alat teknologi modern dalam perdagangan, komunikasi/hubungan masih tertutup, belum mengadakan kontak dengan lain daerah. Faktor inilah yang mencerminkan kelambanan dalam bidang perekonomian di Singaraja. Keadaan masyarakat Bali pada awal abad XIX sangat membantu masuk dan berkembangnya orang-orang asing tersebut. Menurut sumber Belanda, bahwa orang Bali hanya sedikit memiliki kapal atau perahu dagang, sehingga perkembangan ekonomi berjalan sangat lambat.⁷ Hal ini rupanya menjadi perhatian orang-orang asing dan mereka terutama berusaha dalam kegiatan perdagangan dan menjual jasa di laut. Keadaan seperti ini memungkinkan lebih mudahnya orang-orang asing mengembangkan usahanya, karena tidak ada saingan dari penduduk setempat. Dengan demikian kedatangan orang-orang Bugis di Bali sebagai kelompok sosial yang baru tidak dianggap sebagai penghalang, tetapi merupakan keuntungan bagi penguasa dan juga masyarakat Bali lainnya. Dengan majunya perdagangan raja dapat pula menikmati keuntungan secara langsung.

Berpijak dari gambaran situasi dan kondisi di atas dapat dikemukakan permasalahan pokok yang perlu dijawab seperti:

- (1) mengapa kota Singaraja berhasil menjadi kota perdagangan;
- (2) golongan mana saja yang berperan aktif di dalamnya;
- (3) apa saja yang menjadi bahan perdagangan. Untuk memberi jawaban atas permasalahan ini penulis akan mencoba untuk menengahkan dalam uraian berikutnya.

Perlu diketahui bahwa di dalam penulisan ini digunakan perpaduan dari sumber asing berbahasa Belanda dan dibantu dengan beberapa sumber lokal atau daerah. Perpaduan dari

sumber-sumber dimaksudkan agar diperoleh informasi yang saling melengkapi sehingga dapat memecahkan permasalahan yang akan dibahas.

III

Berbicara masalah Singaraja sebagai Kota Perdagangan, kiranya lebih baik kalau diulas sedikit masalah asal-usul nama Singaraja. Mengulas mengenai asal-usul suatu kota, bukan berarti hanya menonjolkan satu segi saja melainkan berbagai unsur atau komponen yang ada hubungannya dengan studi tersebut perlu juga ditonjolkan. Kota merupakan masalah yang kompleks, maka itu perlu ditinjau dari berbagai segi. Pada masa pemerintahan Belanda kota Singaraja pernah menjadi ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok. Ditinjau dari etimologi nama Singaraja erat hubungannya dengan riwayat perjuangan seorang tokoh yaitu Raja Pandji Sakti.⁸ Pandji Sakti adalah salah seorang putra raja di Kerajaan Gelgel (Klungkung) yang sebelumnya bernama I Barak Pandji. I Barak Pandji adalah masih keturunan Dalem Segening (Raja Gelgel), dari hasil perkawinannya dengan Si Luh Pandji dari Denbukit.

Sebagai realisasinya Raja Pandji berhasil memerankan tokoh yang termasyur dan tersohor karena kesaktian serta semangat juang yang membara. Kalau disinggung tentang riwayat perjuangannya, kiranya tidak perlu terlalu panjang lebar penulis ungkapkan tetapi cukup singkat saja. Sebagai awal riwayat perjuangannya, I Barak Pandji dikirim ke Denbukit di daerah Bali Utara yaitu di desa tempat asal ibunya, dengan tujuan untuk merahasiakan agar I Barak Pandji tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya masih keturunan Dalem Segening. Hal ini dirahasiakan karena sejak masih dalam kandungan, I Barak Pandji sudah diserahkan Patih Jelantik untuk merawatnya. Setelah dewasa I Barak Pandji muncul menjadi orang besar yang terkenal karena

kesaktiannya. Ia berhasil menaklukkan beberapa daerah/kerajaan di bawah kekuasaannya. Sampai akhirnya berhasil menjadi raja Kerajaan Buleleng bergelar I Gusti Ngurah Pandji Sakti. Keberwiraan dan kegagahan seseorang dalam berjuang dapat mencerminkan jiwa kepahlawanan yang besar. Seperti halnya Raja Pandji Sakti berjuang pantang menyerah bagaikan singa. Sehingga dari asal kata ini lahirlah nama Singaraja.

Di samping mengulas asal-usul nama Singaraja, perlu juga disinggung mengenai keadaan Geografi dan Letak daerah Singaraja.

Singaraja termasuk wilayah kerajaan Buleleng yang terletak di wilayah Bali Utara. Perbukitan yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur pulau Bali, secara alamiah telah membagi pulau ini menjadi dua bagian yaitu daerah bagian Bali Utara dan Bali Selatan. Daerah bagian Bali Utara biasa juga disebut dengan *Denbukit* yang berarti: dan artinya utara dan bukit berarti gunung. Dengan demikian *Denbukit* dapat diartikan sebagai daerah yang berada di sebelah utara gunung. Berkaitan dengan keadaan di atas, kerajaan Buleleng termasuk wilayah Bali Utara, sedangkan kerajaan-kerajaan lainnya seperti kerajaan Badung, Mengwi, Tabanan, Klungkung, Gianyar, Karangasem dan Jembrana termasuk dalam belahan Bali Selatan. Ketika terjadi ekspedisi militer Belanda ke Bali, kerajaan Buleleng yang terletak di wilayah Bali Utara mendapat sasaran paling awal dan setelah mengadakan perlawanan selama beberapa tahun kerajaan Buleleng akhirnya jatuh ketangan Belanda pada tanggal 16 April 1849.⁹

Dengan jatuhnya benteng Jagaraga ketangan pemerintah Belanda, secara politis kerajaan Buleleng berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada waktu Buleleng masih ditempatkan di bawah kekuasaan raja Bangli sekitar tahun 1849, Buleleng terbagi atas tiga bagian, yaitu Buleleng Barat, Buleleng Tengah dan Buleleng Timur.¹⁰

Masing-masing bagian diperintah oleh seorang punggawa.¹¹ Berdasarkan atas pembagian wilayah di atas, Singaraja termasuk

wilayah Buleleng Tengah. Sebenarnya untuk menentukan secara tegas mengenai pembatasan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang ada di wilayah Buleleng cukup sulit, sebab di antara wilayah itu belum pernah diadakan perjanjian perbatasan. Oleh karena itu geografis seperti sungai, punggung bukit, hutan-hutan kecil dan kelompok persawahan sering dipakai sebagai batas pemisah antara dua buah daerah, baik itu berupa perbatasan desa maupun perbatasan antara dua buah kerajaan. Melihat begitu kaburnya perbatasan satu wilayah dengan wilayah lainnya, maka masalah tapal batas dan pelanggaran sering menjadi salah satu permasalahan politik bagi kerajaan di Bali.^{1 2} Walaupun telah dinyatakan bahwa untuk menentukan batas-batas suatu daerah secara tegas adalah cukup sulit, namun secara umum batas-batas wilayah Buleleng dapat disebutkan sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Buleleng Tengah, dibagian selatan membentang daerah perbukitan yang termasuk kekuasaan Kerajaan Tabanan dan Mengwi. Sedangkan dibagian baratnya berbatasan dengan daerah Jembrana. Demikianlah gambaran umum mengenai batas-batas wilayah Buleleng, di mana Singaraja sudah termasuk di dalamnya.

IV

Singaraja merupakan kota yang terletak di daerah pantai, karena itu keadaannya lebih cenderung berusaha dalam bidang perdagangan. Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa kedatangan orang-orang asing antara lain orang Bugis, Cina dan Arab sebagai kelompok sosial yang baru tidak merugikan bahkan dapat memberikan keuntungan bagi penguasa.

Pada pertengahan abad ke-19 pedagang-pedagang asing sudah mempunyai kedudukan yang tetap di Bali, dengan mengambil pekerjaan sebagai pedagang, dan juga beberapa usaha kerajinan tangan dan industri kecil-kecilan.^{1 3} Bahkan di antara mereka ada yang menduduki jabatan sebagai syahbandar, tetapi sebagian besar lebih banyak sebagai pedagang antar pulau. Jadi

dengan demikian dapat dikatakan, kedatangan orang-orang asing di Bali lebih bermotifkan ekonomi.

Secara garis besar terdapat tiga jalur perdagangan yang ditempuh melalui Bali.¹⁴ Pertama, perdagangan yang terdiri atas kapal-kapal orang Eropa dengan membawa barang-barang dagangan dalam jumlah besar, dari Lombok menuju Bali, Manila, Cina, Singapura dan Benggala. Jalur kedua digunakan oleh pedagang musiman (pedagang-pedagang Cina dan Bugis) dengan menggunakan perahu-perahu dagang dari Lombok, Bali, Jawa, Riau, Kalimantan dan Singapura. Jalur ketiga adalah melalui pulau Bali, Sumba, Timor dan Alor. Dengan adanya tiga jalur perdagangan tersebut di atas lebih memudahkan hubungan pedagang-pedagang disatu daerah dengan daerah lainnya yang melakukan aktifitas perdagangan di Singaraja, sehingga keadaan ekonomi di Singaraja lebih meningkat dengan adanya campur tangan pedagang-pedagang asing tersebut.

Hubungan ataupun kontak perdagangan antara pedagang-pedagang asing dengan para pengusaha atau raja-raja di Bali telah dikenal jauh sebelum orang-orang Eropa mengadakan aktifitas perdagangan di Bali. Data mengenai perdagangan kuna menunjukkan bahwa pulau Bali dan pulau-pulau lainnya di kawasan Nusa Tenggara mendapat banyak kunjungan dari pedagang-pedagang yang akan berlayar menuju kepulauan Maluku ataupun yang kembali dari kepulauan itu. Produksi Bali, khususnya Singaraja seperti kain tenun dan hasil hutan lainnya cukup menarik perhatian para pedagang luar.

Dalam hubungan ini pedagang-pedagang Jawa banyak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka banyak membawa barang-barang dagangan untuk dijual di Bali seperti barang-barang perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, obat-obatan, ikan asin, menyan dan porselin. Di Bali mereka membeli kain tenun produksi penduduk setempat untuk kemudian dijual di daerah-daerah lain seperti di Maluku, Banda, Batavia, Ambon dan Banten, Bali khususnya daerah Singaraja memang sejak dulu telah mengadakan hubungan da-

gang dengan beberapa daerah di Nusantara ini seperti keAmbon, Maluku, Banda, Jawa, Sunda dan Sumatera.¹⁵

Sejalan dengan perkembangan perdagangan di atas, maka pada permulaan abad XIX perdagangan di Bali tampak semakin ramai. Dari pelabuhan-pelabuhan Bali banyak kapal dan perahu berlayar menuju bandar-bandar perdagangan di seluruh kawasan Nusantara. Dari pelabuhan Temukus, Sangsit dan Pabean Buleleng yang merupakan pelabuhan milik Kerajaan Buleleng. Perahu-perahu dan kapal-kapal dagang mengangkut barang-barang seperti, beras, tembakau, kedelai, minyak kelapa, kapas, kopi, sapi, babi, dendeng (daging yang dikeringkan), garam dan juga para budak laki mau pun perempuan. Adapun barang-barang yang dimasukkan ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Singaraja berupa candu, besi, gambir, bahan-bahan kain, benang sutra, barang pecah belah, dan beberapa jenis barang Cina.¹⁶ Di antara sekian banyak barang-barang yang diperdagangkan dari Bali yang paling banyak memberikan keuntungan adalah perdagangan budak, sekaligus merupakan pendapatan utama bagi para raja Bali.¹⁷ Untuk memudahkan pelaksanaan dalam bidang perdagangan raja mengangkat seorang petugas pelabuhan yang di Bali dikenal dengan nama *subandar* atau *syahbandar*.¹⁸

Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Bloemen Waanders di daerah Singaraja seluruhnya terdapat tujuh perdagangan dan semuanya berada di tangan orang-orang Cina. Ketujuh daerah perdagangan itu terletak di daerah-daerah pantai yaitu, di Panestulan, Temukus, Buleleng, Hanturan, Sangsit, Kubuklod dan Lirang.

Di tiap-tiap pusat perdagangan itu ditempatkan seorang subandar yang oleh raja diberikan hak penuh untuk menentukan serta mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang-barang dagangan di pelabuhan. Di samping itu *subandar* juga diberikan hak oleh raja untuk menentukan dan memungut besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap pedagang yang berlabuh. Sebagai imbalannya para *subandr* diwajibkan untuk menyerahkan upeti kepada raja setiap tahun sekali.¹⁹

Telah diketahui bahwa setiap perahu atau kapal-kapal dagang yang membuang jangkarnya di salah satu daerah pelabuhan yang telah disebutkan di atas dikenakan pembayaran sebagai berikut. Untuk kapal layar tiga tiang dan kapal layar dua tiang dikenakan cukai sebesar *tiga peku*, untuk kapal layar sedang dikenakan *dua peku*, sedang kapal-kapal layar milik pribumi dikenakan pungutan pajak sebesar satu atak.^{2 0}

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dengan jelas dapat diketahui bahwa segala aktifitas perdagangan di Singaraja banyak dimonopoli oleh raja, sedangkan *subandar* lebih merupakan alat raja untuk melaksanakan beberapa kewajiban yang telah diberikan kepadanya seperti yang telah dikemukakan di atas.^{2 1}

Di daerah Buleleng sarana pengangkutan dari tempat penimbunan hasil bumi ke salah satu pelabuhan yang ada di Buleleng dilakukan dengan truk (mobil pengangkut barang), sedangkan tempat-tempat yang tidak mungkin bisa dijangkau dengan mobil, pengangkutan dilakukan dengan cicar gerobak yang ditarik oleh kuda.^{2 2} Pengangkutan semacam ini dilakukan antara kota-kota pelabuhan yang ada di sekitar Buleleng dengan daerah-daerah atau desa-desa yang berdekatan. Dari desa-desa yang letaknya agak jauh di pedalaman, jalan-jalan yang menuju pasar atau kesalah satu pelabuhan sebagai tempat untuk menjual hasil bumi dihubungkan dengan jalan-jalan tanah yang sangat sederhana. Penduduk bumi putra yang ingin menjual hasil buminya harus berjalan kaki menempuh jalan kecil jauhnya beberapa kilometer untuk mencapai pasar. Pada pasar-pasar itulah hasil bumi dikumpulkan oleh para saudagar, terutama oleh orang-orang Cina dan diteruskan pengangkutannya ke pelabuhan Buleleng, Sangsit untuk selanjutnya dikirim ke luar Bali. Jalan setapak yang sempit mengikuti alur lembah, meniti arah punggung bukit kadangkala memotong dan menuruni jurang, mendaki lereng merupakan salah satu gambaran lalu lintas penduduk desa pegunungan di Buleleng sekitar abad XIX.^{2 3} Pada pusat perdagangan kondisi jalan tampaknya lebih baik

dan telah dikeraskan dengan batu-batu kali, bahkan pada pusat pemerintahan di Singaraja beberapa jalan telah dikeraskan dengan diaspal secara sederhana. Di pelabuhan Buleleng keadaan pantainya cukup baik, sehingga memungkinkan bagi kapal kapal atau perahu-perahu dagang untuk berlabuh dengan aman, dan pelabuhan di Buleleng pada saat itu dilengkapi dan diawasi secara ketat oleh para syahbandar, yang sebelumnya sudah mendapat restu dari raja Buleleng sebagai penguasa daerah Buleleng secara keseluruhan.

V

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yang penting sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang telah dikemukakan di atas.

Singaraja sebagai kota perdagangan (market city) banyak menarik perhatian bagi dunia luar, terutama bangsa asing yang mengetahui potensi kekayaan alam Bali dan Singaraja khususnya. Tempat ini semula merupakan pusat persilangan jalan lalu lintas perdagangan atau angkutan, yang memungkinkan tumbuhnya tempat pemberhentian, pasar, pemukiman dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kiranya cukup banyak bukti untuk menunjukkan bahwa orang Bali telah lama terlibat dalam dunia pelayaran dan perdagangan. G.P. Rouffaer, J.W. I. Zerman, dan P.L. van Bloemen Waanders, misalnya banyak mengungkapkan tentang peran pedagang orang-orang Bali dalam lalu lintas perdagangan di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara, terutama pada abad XIX. Secara singkat dapat dikatakan bahwa setelah merosotnya perdagangan di Kuta-Badung, maka tumbuhlah pusat-pusat perdagangan di Pantai bagian utara pulau Bali sebagai penimbun barang-barang dagangan dan sekaligus sebagai tempat untuk mengirim dan melakukan transaksi jual beli barang-barang dagangan.

Kota-kota dagang yang tumbuh di Singaraja itu sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu kota dagang dan pelabuhan bagi kapal-kapal yang akan berlabuh di pantai Bali. Di kota ini pula bertumpu basis kekuatan Kerajaan Buleleng. Kota perdagangan yang utama di sini ialah Pabean Buleleng, Sangsit, Temukus, sedangkan Labuhanhaji dan Celukanbawang menduduki tempat kemudian.

Peran kota-kota di pantai utara pulau Bali, yang tumbuh berkembang menjadi kota-kota pelabuhan sebagai matarantai di sekitar kawasan selat Bali dan Lombok inilah yang akhirnya cukup banyak memberikan andil bagi perkembangan pemerintahan di Singaraja.

Dari pelabuhan-pelabuhan seperti yang telah dikemukakan di atas banyak kapal dan perahu dagang berlayar menuju bandar-bandar perdagangan di seluruh kawasan Nusantara. Kapal-kapal dagang itu mengangkut barang-barang seperti beras, tembakau, kedelai, minyak kelapa, kapas, kopi, babi, sapi, dendeng (daging yang dikeringkan), garam dan juga tidak ketinggalan barang dagangan yang dimasukkan ke Singaraja seperti Candu, besi, gambir bahan-bahan kain, benang sutera, barang pecah belah dan beberapa jenis barang Cina.

Semua kota di atas pada umumnya lebih bersifat kosmopolitan dibanding dengan kota-kota di pedalaman. Pedagang asing dan pengrajin mewakili sebagian besar penduduk kota, dan mereka tinggal mengelompok di bawah kepala masing-masing menurut asal kebangsaannya. Orang-orang asing yang dimaksudkan ini adalah orang Bugis, Cina dan Arab. Mereka inilah yang mempunyai peranan cukup penting, terutama dalam hal perdagangan, baik sebagai pedagang perantara maupun sebagai penyalur tunggal di wilayah Singaraja.

Pada awal kehadiran bangsa Barat di Singaraja, dan di Bali umumnya ditandai dengan usaha untuk membangun jaringan kota yang ditujukan untuk menguasai perdagangan di daerah yang ada di bawah pengaruhnya. Keadaan ini berubah dengan cepat pada abad XIX, yaitu kebutuhan pasar dan bahan-bahan

mentah bagi industri yang sedang tumbuh cepat di Eropa Barat menyebabkan timbulnya kebutuhan akan pelabuhan dan jaringan komunikasi yang menghubungkan pelabuhan dan daerah pedalaman yang menghasilkan produksi tropis. Jaringan administrasi di lain pihak juga diperlukan untuk melancarkan pengawasan politik kepada penduduk pribumi. Dengan demikian kota Singaraja akhirnya muncul sebagai pelabuhan dan pasaran industri serta sekaligus juga sebagai pusat pemerintahan kolonial, sekitar tahun 1882, dengan menempatkan seorang residen sebagai penguasa daerah Bali dan Lombok.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa Singaraja sebagai kota kolonial, terdapat perbedaan status yang didasarkan diskriminasi ras, segregasi etnis dan munculnya "budaya kota" baru yang merupakan campuran dua elemen Barat dan bumi-putra. Ciri membengkaknya kota menjadi besar, merupakan ciri dari Singaraja sebagai kota kolonial, yang akhirnya fungsi kota Singaraja menjadi serba guna. Selain sebagai pusat ekonomi yang utama, kota ini juga berfungsi sebagai pusat jaringan eksploitasi kolonial terhadap daerah-daerah lainnya di Bali. Proses birokratisasi yang dilancarkan pemerintah kolonial Belanda pada abad XIX, diikuti dengan penyusunan kembali wilayah pemerintahan beserta pengangkatan pejabat pemerintah daerah yang tersebar di Bali. Bersama ini pula lokasi pusat pemerintahannya ditentukan. Lokasi pusat pemerintahan ini berinti pada tempat pemerintah daerah, yang diikuti sebagai pusat pemukiman para pejabat dan pegawainya. Tempat-tempat ini lambat laun berubah menjadi kota kecil setelah diikuti oleh pertumbuhan pasar dan warung atau toko-toko kecil, dengan penduduk setempat yang semula kebanyakan telah ada sebelumnya, dan ibu kota pemerintahan itu diambil dari salah satu desa atau kota yang telah ada.

Perlu juga disadari bahwa di samping banyaknya unsur yang dibawa oleh perkembangan kota Singaraja, masih tampak adanya kekuatan budaya lokal, dalam hal ini budaya Bali, masih lestari mempengaruhi perkembangan barunya terutama yang

dilandasi oleh kebudayaan Hindu, Gaya hidup golongan bangsawan Bali pada dasarnya merupakan salah satu gaya hidup bagi golongan elite Bali pada masa kolonial. Corak kedesaan yang mewarnai dalam berbagai tingkat kota menandakan masih kuatnya sifat pedesaan dan tingkat hidup subsistensinya.

Singaraja sebagai pusat perdagangan di Bali sekitar abad XIX, cukup menarik karena letaknya yang strategis, kota ini terletak di tengah-tengah jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Bali dengan Batavia, dan juga kapal-kapal yang berlayar menuju Lombok atau ke Australia.

Kecuali tempat yang strategis, Singaraja sebagai kota perdagangan juga menduduki posisi sentral baik bagi kapal-japal yang berlayar dari timur maupun dari barat, juga mempunyai letak yang cukup sentral antara kota perdagangan yang penting seperti Batavia, Surabaya, Maluku dan Makassar. Berdasarkan hal itulah, maka Singaraja banyak mempunyai potensi sebagai kota dagang internasional.

Memperhatikan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa berkat aktifitas perdagangan orang asing di Singaraja, ternyata dapat mempercepat proses kemajuan terutama dalam bidang perdagangan. Seperti telah diketahui, bahwa penduduk Bali pada abad XIX terutama di daerah pantai merupakan masyarakat campuran dari berbagai suku bangsa seperti Bugis, Cina dan Arab. Masuknya orang-orang asing ke Bali telah menyebabkan terjadinya suatu kontak sosial dan mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Kedua motif ini terjadi karena adanya hambatan-hambatan di dalam perkembangan dari kelompok-kelompok sosial itu sendiri.

Manusia sebagai makhluk sosial sesungguhnya tidak bisa hidup menyendiri, tetapi dilingkungi oleh komunitasnya, masyarakatnya dan alam sekitarnya. Mereka tergantung dalam segala aspek kehidupan kepada sesama, karenanya ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik de-

ngan sesamanya. Sebagaimana halnya dengan pedagang-pedagang asing, mereka sangat aktif dalam dunia perdagangan dan pelayaran. Untuk lebih mempercepat proses kemajuan dalam bidang perdagangan, mereka mengadakan kerjasama dan membantu para penguasa atau raja dalam segala kegiatannya.

Suatu masyarakat tidak merupakan kelompok sosial yang statis tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktifitas maupun bentuknya. Demikian pula kelompok-kelompok orang asing seperti tersebut di atas yaitu orang Bugis, Cina dan Arab di Bali selalu berkembang. Setelah mereka membentuk komunitas di beberapa tempat di Bali seperti daerah Sangsit, Temukus dan Pabean Buleleng, mereka tetap memelihara hubungan baik dengan para penguasa maupun masyarakat terutama dengan partner dagang.

Di kerajaan Buleleng khususnya Singaraja hubungan baik antara pedagang asing dengan raja tetap terpelihara. Para pedagang asing itu sering memberikan hadiah kepada raja setelah mereka berlayar, dengan demikian mereka dapat berdagang dengan bebas di pelabuhan Buleleng. Pada prinsipnya para pedagang tersebut tidak hanya mementingkan perdagangan saja, tetapi jauh ingin mengadakan hubungan baik dengan semua kerajaan pantai yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian akan terjadi proses integrasi sosial dengan masyarakat setempat.

Terbentuknya kelompok sosial dalam artian komunitas asing adalah karena dorongan atau adanya kepentingan bersama. Jadi adanya kepentingan bersama menjadi pengikat terbentuknya kelompok sosial. Dalam hal ini masyarakat orang asing di Bali sebagian besar adalah pedagang.

Bali dalam skup lokalnya yaitu Singaraja dapat menduduki posisi sebagai pusat perdagangan di kawasan Bali dan Lombok. Boleh dikatakan hubungan perdagangan di Singaraja semakin meluas sampai ke Singapura, Australia, Benggala dan daerah-daerah lainnya yang ada di kawasan Nusantara. Dengan

demikian, Singaraja merupakan salah satu kota perdagangan yang cukup ramai mendapat kunjungan dari pedagang-pedagang asing pada pertengahan abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20.

DAFTAR CATATAN

1. Lihat Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta) : Gajah Mada University Press, 1979, pp. 9-15.
2. Lihat Lekkerkerker, C., "Het Voorspel der Vestiging van de Nederlandsch Macht op Bali en Lombok" dalam BKI deel 79, 1923 p. 212 Cf. Henk Schkte Nordholt, *The Lange Connection a Danish Trader op Bali in the Middle of the 19th Century: Broker and Buffer*. (Amsterdam, Seminar Sejarah Indonesia – Belanda III, 1981), p. 24.
3. J.H. Graaf "I Gusti Ngurah Pandji Sakti, vorst van Boe-leng" dalam *Tijdschrijf van het Bataviaasch Genootschap*, deel 83, 1949.
4. Kuntowijoyo, *Kota Sebagai Bidang Kajian Sejarah*. (Den-pasar: IDSN, 1983), p.4. Kota dapat diartikan sebagai pusat kegiatan ekonomi perkembangan administrasi dan se-

bagai tempat yang dikenal dengan kedatangan orang-orang asing pada jaman penjajahan. Lihat juga A.M. Djulianti Suroyo, *Dari Subsistensi ke Perdagangan*. (Denpasar: IDSN, 1983), pp. 4-5.

5. Sartono Kartodirdjo (ed), *Masyarakat Kuno dan kelompok-Kelompok Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor, 1977), p.13 Singaraja Sebagai Kota dagang, dimana munculnya tempat-tempat perdagangan dengan hasil-hasil yang diperdagangkan atau bahan-bahan ekspor dan impor, serta dilakukan pula pemungutan pajak sehubungan dengan perdagangan itu. Lihat juga J.J. de Hollander *Handleiding bij de Beoefening der Land en Volkunde Oost Indie* (Breda: Van Broese & Compagnie, 1898), p. 682.
6. Sebagai referensi, lihat Djoko Suryo, *Kota dan Pembauran Sosio Kultural dalam Sejarah Indonesia*, (Dep. P & K Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984). p.2.
7. G. Lauts, *Het Eiland Bali en de Balinezen*. (Amsterdam: G.J. A. Beijeinck, 1848), p.88.
8. Worsley, *Babad Buleleng A Balinese Dynastic Genealogy*. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1972), p.2.
9. Ulasan mengenai jatuhnya Kerajaan Buleleng ke tangan Belanda lihat tulisan I Ketut Ginarsa, "Sedjarah Buleleng", dalam majalah *Bahasa dan Budaya, tahun III, no. 6*. (Djakarta Lembaga Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1955), p.9. cf. A.J.A. Gerlach, *Fastes Militaires des Indes-Orientales Nederlandaises*. (Zalt Bommel: Jean Noman & Fils, 1859), p. 597.
10. Lihat E. Utrecht, *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. (Bandung: sumur Bandung, 1962), pp. 216-222.
11. Punggawa merupakan kepala pemerintahan dalam wilayah kedistrikan, yang sekarang kedudukannya setingkat dengan camat.

12. Mengenai masalah perbatasan antara satu desa dengan desa lainnya telah diuraikan dengan panjang lebar oleh J.H. Boeke *De Grenzen van het Indonesische Dorp*, *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, III, 1937, pp. 797-819.
13. Industri kecil-kecilan seperti menenun kain, anyaman dari bambu, lihat Van den Broek "Verslaf Nopens Het Eiland Bali" dalam *De Oosterling Tijdschrift van Oost Indie I*, 1835, p.226.
14. Mengenai tiga jalur perdagangan di atas secara singkat diulas oleh Henk Schult Nordholt.
15. Mengenai kontak perdagangan Bali dengan pulau-pulau lain di kawasan Nusantara, lihat G.P. Rouffaer & J.W. Ijzerman, *De Eerste Scheepvaart der Nederlanders naar Oost Indie Onder Cornelis de Houtman, 1595-1597 I*. ('s-Gravenhage: tanpa penerbit, 1915), p.190.
16. P.L. van Bloemen Waanders, *A anteekeningen Omstrent de Ze den en Gebruiken der Balinezen Inzorderheid die van Boeileleng*. Batavia: Lange & Co, 1859), p.81. Lihat juga J.J. de Hollander, *Handleiding bij de Boefening der Land en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie*. (Breda: van Broese & Compagnie. 1898), pp. 710-711.
17. Tentang perbudakan dapat dibaca tulisan A.K. Nielsen, *Leven en Avonturen van een Oostinjevaarder op Bali*. Amsterdam: Em Querido's, 1928, pp. 49-61 Cf. Anak Agung Gde Putra Agung, "Masalah Perdagangan Budak Bali", dalam majalah *Basis*, Nopember 1971 XXI-2. (Yogyakarta: Jajasan B.P. Basis, 1971) pp. 38-47. P.L. van Bloemen Waanders, *op.cit.*
18. *Ibid.*, p.78. Cf. Ve Korn, *Balische Overeenkomsten*. 'S-Gravenhage: The Hague, 1932.
19. Masalah fungsi dan kedudukan seorang *subandar* di Kerajaan Buleleng, banyak diulas oleh P.L. van Bloemen Waanders, *loc.cit.*
20. Satu *atak* nilainya sama dengan 200 kepeng. Sedang satu

peku nilainya sama dengan satu ringgit atau Rp. 2,50,— Untuk jelasnya lihat J.J. de Hollander, *op. cit.*, p.710. Cf. *Gegevens Beterffende de Zelfstandige Rijks op Bali, op.cit.* p.13.

21. Lihat kembali Bloemen Waanders, *loc.cit*, Cf Anak Agung Gde Putra Agung, "Peranan Syahbandar di Lombok: Pada Pertengahan Abad XIX", dalam majalah Basis, Djuli 1972 — XIX - 10. (Jogjakarta: Jajasan B.P. Basis, 1972), pp.309-315.
22. Lihat *Gegevens Betreffende Zelfstandige Rijks op Bali, op.cit.*, p.3.
23. Untuk memperoleh gambaran secara lebih lengkap tentang keadaan alam di desa-desa Buleleng dapat dilihat dalam bendel *Jaarlijksch Politiek over de Lanschappen Boeileleng an Djambrana, Diensjaar 1868*. Koleksi Arsip Nasional RI, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Gde Putra Agung, "Masalah Perdagangan Budak Bali", dalam majalah Basis Nopember 1971 — XXI — 2. Jogjakarta: Jajasan B.P. Basis, 1971, pp. 38-47.
- , "Peranan Syahbandar di Lombok", Pada pertengahan abad XIX dalam majalah Basis, Djuli 1972-XXI-10. Jogjakarta. Jajasan B.P. Baisi, 1972, pp. 309-315.
- Bloemen Waanders, P.L. van, *Aanteekeningen Omtrent de Zeden en Gebruiken der Balinezen, Inzonderheid die van Boeileleng*. Batavia: Lange & Co, 1859.
- Boeke, J.H., "De Grenzen van het Indonesische Dorp", dalam *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundige Venootschap, III*, 1973.
- Broek, van den "Berslah Nopens Het Eiland Bali", dalam *De Oosterling Tijdschrift van Oost Indie I*, 1835.
- Gegevens Betreffende de Zelfstandige Rijks op Bali*. Batavia: Landsdrukkerij, 1906.
- Gerlack, A.J.A. *Fastes Militaire des Indes-Orientales Neerlandaises*. Zalt Bommel: Jean Noman & Fils, 1859.
- Graaf, H.J., "I Gusti Ngurah Pandji Sakti, vorst van Boeileleng"

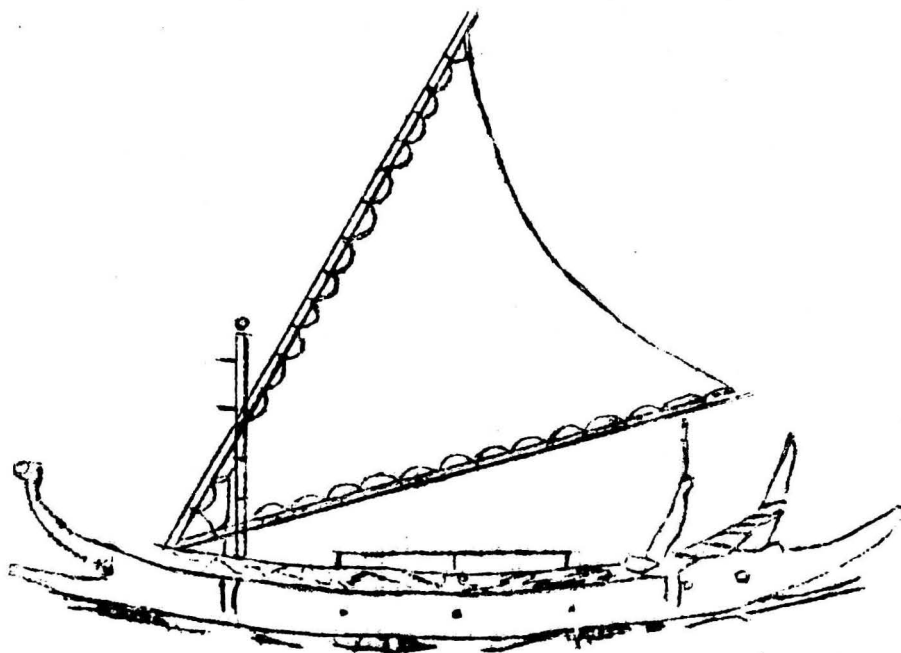
- dalam *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*, deel 83, 1949.
- Hollander, J.J. de, *Handleiding bij de Boeefening der Land en Volkenkunde Oost Indie*. Breda: can Broese & Compagnie, 1898.
- I Ketut Ginarsa, "Sejarah Buleleng", dalam Majalah *Bahasa dan Budaya*, tahun III no. 6. Djakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1955.
- Jaarlijch Politiek Verslag Over de Landschappen Boeileleng an Djambrana*, Dienjaar, 1868.
- Korn, VE. *Balische Overeenkomsten*. 'S-Gravenhage: The Hague, 1932.
- Kuntowijoyo, *Kota Sebagai Bidang Kajian Sejarah*. Denpasar: IDSN, 1983.
- Lauts, G. *Eiland Bali en de Balinezen*. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1848.
- Lekkerkerker, C. "Het Voorspel der Vestiging van de Nederlandsch Macht op Bali en Lombok", dalam *BKI* deel 79, 1923.
- Nielsen, A.K. *Leven en Avonturen van een Oostinjevaarder op Bali*. Amsterdam: Em Querido's 1928.
- Nordhol Henk Schulte, *The Lange Connection a Danish Trader op Bali in the Middle of the 19th Century: Broker and Buffer*. Amsterdam, Seminar Sejarah Indonesia-Belanda III, 1981.
- Rouffaer G.P. & Ijzerman J.W., *De Eerste Scheepvaart der Nederlanders naar Oost-Indie Onder Cornelis de Houtman, 1595-1597*, 'S-Gravenhage: tanpa penerbit, 1977.
- Sartono Katodirdjo (ed), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor, 1977.
- Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Di Indonesia*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.
- Utecht, E. *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, Bandung: Sumur Bandung, 1962.
- Worsley, *Babad Buleleng A Balinese Dynastic Genealogy*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1972.

Lampiran 1

JUKUNG PENELON¹

Panjang : 7 depa + e jengkal

Lebar : 4 jengkal



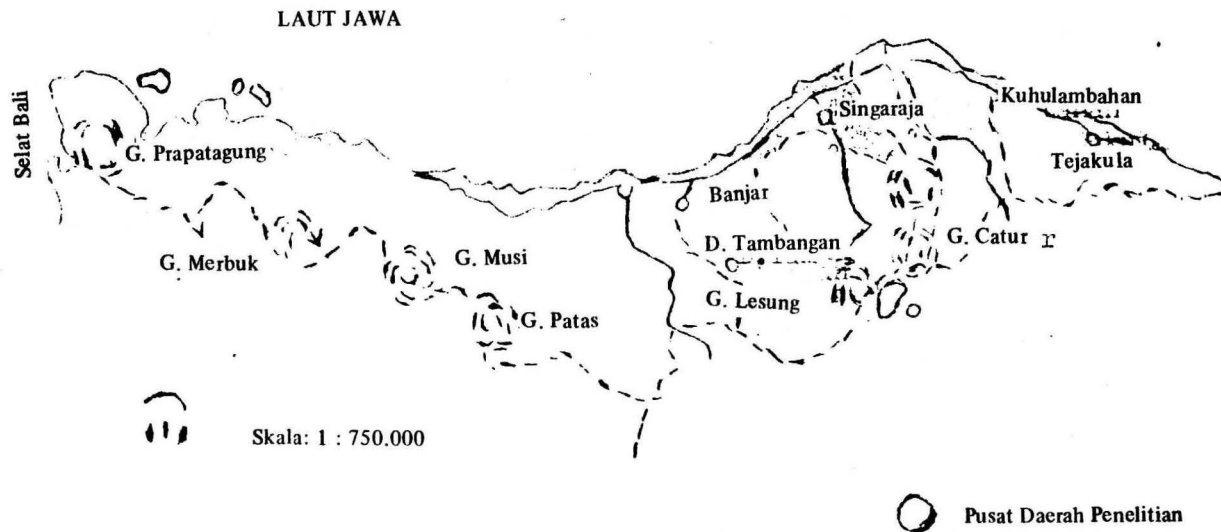
TAMPAK SAMPING 1 : 100

Jukung Penelon: sebagai salah satu sarana pengangkutan pada perdagangan di Bali Utara.

¹Dikutip dari W.O.J. Nieuwenkamp, *Bali En Lombok*, vol. II, III. (Edam: De Zwerver, 1906-1910), p.136, p.168.

LAMPIRAN: A PETA WILAYAH BALI UTARA.¹ LAMPIRAN : 1

1



TRUMON DAN BARUS: DUA PUSAT PERDAGANGAN DI PANTAI BARAT SUMATERA PADA AWAL ABAD KE-19

(oleh Muhammad Gade Ismail)

I

Paper ini berusaha untuk membicarakan tentang kegiatan perdagangan yang berlangsung di dua pusat perdagangan muara sungai, Trumon dan Barus, di pantai Barat Sumatera pada awal abad ke-19.

Kedua pusat perdagangan yang disebutkan adalah pusat-pusat perdagangan yang dibangun oleh para pendatang pada muara sungai. Di daerah pedalaman terdapat penduduk Alas atau Tapanuli yang berbeda etnis dengan penduduk pesisir yang kebanyakannya adalah para pendatang dari daerah Aceh Besar.¹

Sebagai pusat perdagangan pada muara sungai, kehidupan mereka sangat tergantung dari hasil perdagangan dari dan ke pedalaman. Barang-barang yang berasal dari pedalaman diangkat

dengan perahu-perahu ke daerah pesisir dan dari sana baru diangkut ke Luar negeri atau diperdagangkan kepada pedagang-pedagang asing yang datang ke sana.

Anthony Reid,² yang membahas tentang perkembangan perdagangan dan kekuasaan negara di Aceh, masa prekolonial, membagi masa perkembangan Kerajaan Aceh atas tiga periode. Periode terakhir dari pembahasannya adalah masa melemahnya kekuasaan pusat yang absolut dan pusat pemerintahan berpindah ke daerah pedalaman yang tidak lagi menggantungkan kehidupan kerajaan pada kegiatan perdagangan.

Dibandingkan dengan masa pemerintahan pusat yang kuat, maka periode ketiga ini merupakan suatu masa di mana daerah-daerah yang berada di luar daerah pusat mengalami suatu masa bebas untuk berdagang tanpa campurtangan yang berarti dari kekuasaan pusat. Dengan terdapatnya kelonggaran dalam melakukan perdagangan secara sendiri-sendiri di luar kontrol pemerintah pusat, sudah barang tentu masing-masing daerah mengalami perkembangannya masing-masing pula.

Daerah-daerah yang terletak di pantai Barat Pulau Sumatera sejak jaman pemerintahan Iskandar Muda merupakan daerah yang potensial dalam lapangan perdagangan. Hal ini disebabkan mereka merupakan daerah penghasil lada untuk Kerajaan Aceh, di samping pantai Timur. Besarnya jumlah produksi barang-barang setempat seperti lada dan juga minyak nilam dan kapur Barus sudah barang tentu merupakan faktor yang penting yang dapat menarik banyak para pedagang asing datang berdagang dengan daerah ini.³

Pemilihan periode pembahasan paper ini sekitar awal abad ke-19 di dasarkan kepada kenyataan bahwa pada periode tersebut daerah-daerah di pantai Barat Sumatera yang pada masa kejayaan kerajaan Aceh berada di bawah kontrolnya, pada masa itu memperoleh kebebasan dalam menjalankan perdagangannya. Periode pembahasan ini juga ditandai oleh kenyataan belum masuknya kekuasaan Belanda ke sana.⁴

Berhubung barang-barang yang diperdagangkan oleh para penguasa muara sungai Trumon dan Barus adalah barang-barang yang berasal dari pedalaman dan juga barang-barang yang berasal dari luar diperdagangkan ke pedalaman, maka dalam paper ini pertama akan dibicarakan bagaimana hubungan perdagangan antara pesisir dengan pedalaman berlangsung. Hal ini dipandang perlu mendapat penjelasan seperlunya karena daerah pedalaman; pusat penghasil barang-barang tersebut dan juga daerah pemasaran barang-barang yang berasal dari luar tidak tunduk kepada kekuasaan pesisir. Kedua juga diterangkan tentang perdagangan yang terjadi dengan para pedagang asing.

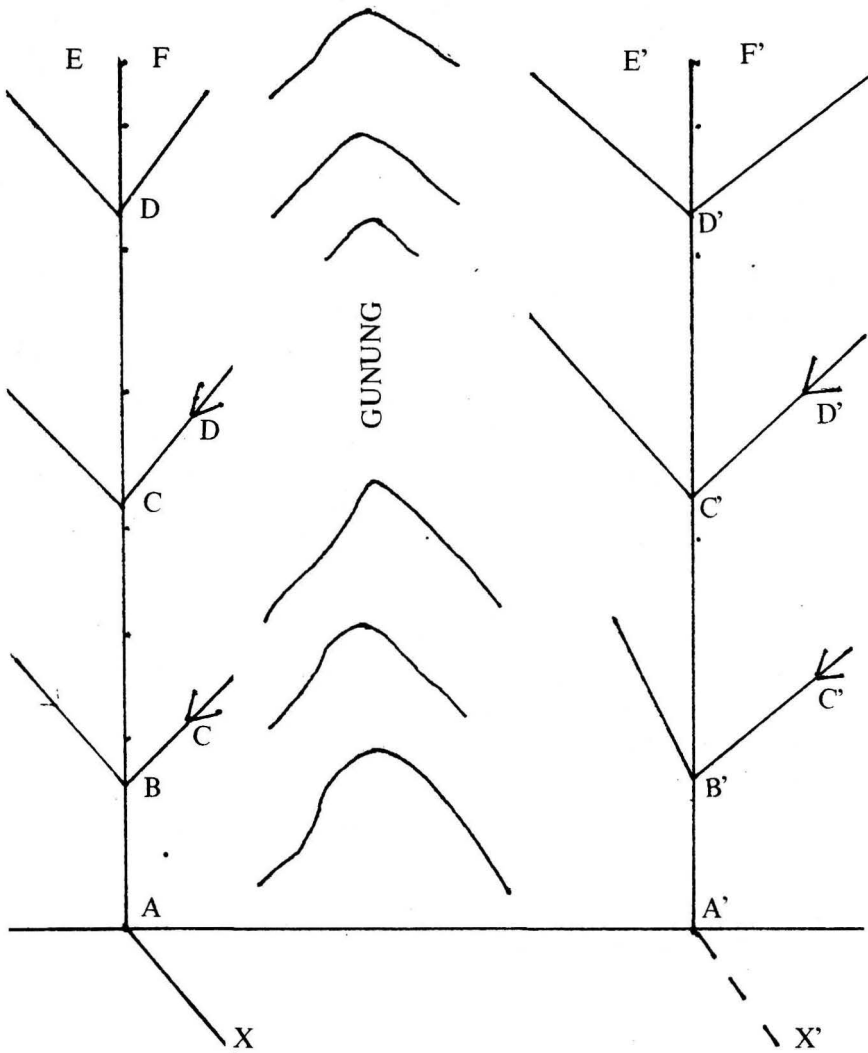
Untuk menerangkan tentang hubungan perdagangan antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman di pantai Barat Pulau Sumatera ini dipergunakan Shema Bennet Bronson.⁵

Schema ini telah dipergunakan oleh Kenneth R Hall pada waktu ia membicarakan tentang dinamika kerajaan-kerajaan yang terletak di pantai utara Pulau Sumatera pada masa sebelum kedatangan para pedagang Barat.⁶

Keterangan :

- A Pusat Kesultanan pada muara sungai
- B & C Pusat kedua dan ketiga yang terletak agak ke hulu pada cabang pertama atau kedua sungai.
Ia juga merupakan pusat-pusat yang berada di bawah pengaruh A.
- D Titik permulaan pengumpulan barang-barang yang berasal dari daerah sekitarnya yang jauh dari aliran sungai. D sendiri merupakan pusat yang terletak jauh di hulu sungai tetapi termasuk ke dalam sistim pertukaran yang berpusat di A.
- E & F Penghasil utama barang-barang dan mungkin adalah pusat-pusat sistim pertukaran yang bukan didasarkan pada sistim pasar. Sebahagian barang-barangnya diangkut ke A dan dari sana pula mereka memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

Skema Bennet Bronson



X

Pusat perdagangan di seberang lautan tempat penjualan barang-barang yang diangkut dari A. Dari X pula barang-barang yang dibutuhkan A dimasukkan.

- A¹ Pusat lain pada pantai yang sama dengan A yang juga melakukan kontrol terhadap pedalaman, sama halnya dengan A.
- X¹ Pusat perdagangan lain di seberang lautan.

II

Trumon

Trumon terbentuk dari gabungan kerajaan-kerajaan kecil seperti: Bakongan, Pulau Samad, Singkil dan Trumon, dengan ibukotanya adalah Trumon.⁷

Penguasa yang memerintahkan kerajaan Trumon ini sebenarnya bukanlah penduduk asli daerah ini. Mereka adalah para pendatang dari Susoh yang pindah ke daerah ini. *Baba Datu Sibuyung* dan *haji Leubei Dapha*, disertai oleh para pengikutnya membuka tanah dan mendirikan tempat tinggal yang baru di Trumon.

Dari Trumon, Haji Dapha melakukan perdagangan dan kemudian menetap di Singkil sampai ia menjadi kaya raya dari hasil perdagangan. Ia kemudian kawin dengan puteri Raja Singkil. Setelah raja tersebut meninggal dunia, ia diangkat menjadi raja di Singkil.

Berhubung kekuasaan Sultan Aceh terhadap Singkil cukup kuat, ia pindah ke Trumon. Ia berhasil mengusir adiknya sendiri dari Trumon dan karena itu ia menjadi penguasa Trumon. Setelah ia meninggal maka puteranya yang bernama Raja Bujang menggantikan kedudukannya sebagai raja di Trumon. Saudara-saudara Raja Bujang yang lain berkuasa di Singkil, Pulau Samad dan Bakongan.⁸

Raja Bujang yang mempunyai kapal sendiri melakukan perdagangan luar negeri sampai ke Benggala dan Pulau Pinang.⁹ Ia meninggal dunia pada tahun 1835 dan digantikan oleh pute-

ranya yang belum dewasa yang bernama Nya' Bata. Oleh karena raja ini belum dewasa maka ia berada di bawah perwalian yang dijalankan oleh suatu dewan perwalian yang diketuai oleh Mohd. Arif (Raja Singkil) dengan beberapa orang anggotanya yaitu: T. Haji Kota, T. Murami (Daud), T. Meulaboh, T. Haji Mahiddin dan T. Lam Sampo.

Untuk mengurus perdagangan di daerah pelabuhan diangkat seorang Syahbandar; yang pada masa pemerintahan Raja Bujang bernama Teuku Leube Dien.

Kekuasaan Belanda mulai memasuki daerah Trumon ini pada masa pemerintahan Nyak Batu. Segera setelah terjadinya timbang terima daerah Bengkulen dan beberapa pelabuhan di pantai Barat Sumatera pada tahun 1825, dari Inggris, Belanda segera berusaha untuk dapat Trumon. Dalam tahun 1830 Belanda mulai mencoba mencopot Trumon dari Aceh. Di bawah pimpinan Residen Sumatera Barat (Mc Gillavry), Belanda mengadakan intimidasi ke sana dengan mengajukan perjanjian yang harus ditandatangani Raja Trumon. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa sejak saat itu Trumon lepas dari Aceh dan berada di bawah kekuasaan Belanda. Meskipun telah adanya persetujuan yang disebutkan di atas ternyata daerah ini tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda, misalnya dengan memberikan bantuan kepada para pejuang Paderi di Minangkabau.¹¹

Perdagangan Trumon

Daerah pedalaman Trumon setiap tahun menghasilkan 10.000 sampai 12.000 pikul lada.¹² Barang-barang yang berasal dari pedalaman ini oleh kapal-kapal milik raja sendiri diangkut ke luar negeri, atau dijual kepada para pedagang asing yang mendatangi pusat perdagangan ini. Para pedagang Eropah yang banyak mendatangi pelabuhan ini adalah orang-orang Inggris dan Amerika.

Orang-orang Trumon lebih senang berhubungan dagang dengan orang-orang Amerika dibandingkan dengan para pedagang Belanda di sebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan. Barang-barang hasil daerah ini seperti lada misalnya dibeli oleh pedagang Amerika dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga penawaran orang-orang Belanda. Selain itu, barang-barang yang dimasukkan oleh pedagang Amerika, seperti kain misalnya dapat dibeli oleh orang-orang Trumon dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang ditawarkan Belanda.^{1 3}

Di daerah pedalaman Trumon berdiam orang-orang Alas yang tidak tunduk kepada kekuasaan Trumon. Mereka mempunyai kepala-kepala sendiri. Antara pusat pemerintah Trumon yang terletak pada muara sungai dengan daerah pedalaman dihubungkan oleh aliran sungai.

Barang-barang yang dihasilkan di daerah pedalaman diangkut dengan perahu-perahu ke daerah pesisir. Barang yang berasal dari pedalaman antara lain lada, kapur barus, sarang burung dan karet. Barang-barang yang dibutuhkan penduduk pedalaman yang tidak mereka hasilkan sendiri seperti: kain, tembakau, garam dan besi dimasukkan oleh para penguasa dari luar negeri dan juga dengan mempergunakan perahu-perahu diangkut ke pedalaman. Barang-barang yang berasal dari pedalaman tersebut ada yang langsung dijual kepada para pedagang asing yang mengunjungi daerah ini dan sebagian yang lain diangkut oleh kapal-kapal raja ke pusat-pusat perdagangan di luar negeri seperti: Benggala, Pulau Pinang dan Singapura.^{1 4}

Pedagang-pedagang asing yang mengunjungi pelabuhan ini hanya dibenarkan untuk berdagang dengan para penguasa saja. Perdagangan sepenuhnya berada dalam tangan para penguasa. Raja dan keluarganya melakukan perdagangan dengan penduduk pedalaman dan mereka pulalah yang melakukan transaksi perdagangan dengan para pedagang asing.^{1 5}

Meskipun para penduduk pedalaman tidak terikat kepada kekuasaan penguasa di daerah pesisir, mereka terpaksa harus

melakukan perdagangan dengan para penguasa Trumon disebabkan faktor topografi daerah tersebut. Penduduk pedalaman tidak mungkin dapat berhubungan dengan pedagang-pedagang asing untuk menjual barant-barang yang mereka produksi dan membeli barang-barang kebutuhannya karena mereka berada di daerah pedalaman. Satu-satunya jalan yang dapat dipergunakan untuk melakukan hubungan demikian adalah melalui jalur sungai. Akan tetapi berhubung daerah muara sungai berada di bawah kekuasaan penguasa Trumon, maka dalam bidang perdagangan ini mereka terpaksa harus tunduk kepada pengaturan yang dilakukan penguasa Trumon.

Berhubung kedudukan penguasa yang strategis pada muara sungai dan menguasai lalulintas perdagangan itu, maka mereka menikmati keuntungan yang besar dalam bidang perdagangan dengan daerah pedalaman.

Barus

Daerah. Barus ini sebenarnya termasuk ke dalam wilayah Minangkabau yang sejak abad ke-14, terkenal sebagai pusat perdagangan kapur barus. Sejalan dengan perluasan daerah kekuasaan Aceh, daerah ini sejak tahun 1613 masuk ke dalam wilayah kekuasaan Aceh.¹⁶

Semenjak Sultan Iskandar Muda meninggal, kekuasaan VOC sangat menaruh minat untuk dapat menguasai daerah di pantai barat ini. Beberapa kali VOC melakukan perjanjian perdagangan dan persahabatan dengan Barus, akan tetapi pada tahun 1778, mereka terpaksa meninggalkan daerah ini karena tidak menguntungkan.¹⁷

Setelah pemerintah Belanda kembali berkuasa di Indonesia selepas penjajahan Inggris pada tahun 1816, mereka kembali menaruh minat yang besar terhadap Barus. Berhubung Pemerintah Belanda sibuk menghadapi perlawanan kaum Paderi di Minangkabau, maka terpaksa minat tersebut tidak dapat di-

laksanakan. Baru setelah perlawanan Paderi berakhir, usaha Belanda untuk menguasai Barus diteruskan.

Dalam tahun 1839, pemerintah Belanda menyerang ke Barus, tetapi serangan ini mengalami kegagalan dan bahkan benteng Belanda di daerah Tapanuli berhasil direbut orang-orang Aceh. Setelah kekalahan itu pemerintah Belanda mendatangkan pasukan yang lebih kuat lagi dan dalam tahun itu juga Barus berhasil diduduki Belanda dengan mengusir orang-orang Aceh di sana.¹⁸

Sampai kembalinya Pemerintah Belanda ke Indonesia pada tahun 1816, keadaan pemerintahan di Barus tidak banyak mengalami perubahan. Daerah Barus ini terbagi atas dua buah kampung, yaitu Kampung Mudik dan Kampung Hilir. Tiap-tiap kampung itu mempunyai pemerintahan masing-masing dan tidak saling campurtangan dalam pemerintahan di tiap-tiap kampung yang lain. Pada awal abad ke-19, antara kedua pemerintahan tersebut tidak terjadi pertentangan.

Pemerintahan pada Kampung Mudik sebenarnya pada masa-masa yang lebih dahulu merupakan pemerintah yang sesungguhnya atas kedua kampung di Barus; sedangkan pemerintahan di Kampung Hilir merupakan pemerintahan Bendahara.¹⁹

Sejak masuknya kekuasaan Aceh ke Barus, pemerintahan penguasa di Kampung Hilir didampingi oleh sebuah badan penasihat yang berada dalam tangan sebuah keluarga Aceh. Pemerintahan yang sesungguhnya di Kampung Hilir dijalankan oleh orang-orang Aceh tersebut.²⁰)

Belanda berhasil menduduki Barus pada tahun 1831 dengan mengusir kekuatan orang-orang Aceh yang menguasai kampung Hilir dan mengadakan perjanjian dengan para penguasa di Kampung Mudik.²¹)

Perdagangan di Barus

Di daerah pedalaman Barus terdapat empat kelompok orang-orang Batak yang memiliki kepala-kepalanya sendiri. Mereka tidak tunduk kepada kekuasaan pesisir Barus.²²)

Orang-orang Batak di daerah pedalaman menghasilkan barang-barang yang laku untuk perdagangan luar negeri, seperti: kapur barus, amber, sarang burung, karet. Di daerah yang agak ke pesisir di daerah ini banyak ditanami lada.²³⁾

Barang-barang yang dihasilkan daerah pedalaman dikumpulkan oleh para penguasa, terutama penguasa dari kampung Hilir untuk dijual kepada para pedagang asing. Barang-barang kebutuhan penduduk pedalaman yang berasal dari luar negeri seperti: garam, kain kasar, tembakau, candu dan besi diangkut oleh para penguasa ke pedalaman untuk ditukarkan dengan barang-barang produksi daerah pedalaman.

Garam yang diangkut ke Barus kebanyakan adalah garam yang berasal dari Malabar. Sebenarnya daerah Aceh juga menghasilkan garam, akan tetapi garam Aceh kurang disenangi penduduk pedalaman daerah ini. Selain garam dari Malabar, garam dari Jawa juga dimasukkan ke daerah ini. Setiap tahun Barus membutuhkan 200 koyan garam. Garam merupakan salah satu komoditi perdagangan yang menguntungkan di daerah ini, terbukti bahwa meskipun daerah ini kemudian diduduki oleh Belanda, orang-orang Aceh masih saja berusaha memasukkan garam ke daerah ini.²⁴⁾

Kapal-kapal berasal dari Malabar setiap tahun tidak kurang dari lama sampai enam buah yang melakukan perdagangan langsung dengan Barus.²⁵⁾

Kain kasar yang dimasukkan ke Barus terutama berasal dari Pulau Pinang, Singapura dan Malabar. Kapal-kapal dari Inggris, Perancis dan Amerika yang berdagang dengan daerah ini juga membawa kain-kain kasar untuk ditukarkan dengan barang-barang hasil daerah ini.

Khusus mengenai tembakau, meskipun produksi daerah Aceh cukup banyak, akan tetapi penduduk pedalaman lebih menyukai tembakau yang didatangkan dari pulau Jawa.

Berbeda dengan Trumon, para penguasa Barus tidak memiliki kapal-kapal sendiri untuk mengangkut barang-barangnya

ke luar negeri. Barang-barang hasil daerah ini diperdagangkan kepada pedagang-pedagang asing yang mengunjungi daerah ini.

Sama halnya dengan yang terjadi di Trumon, orang-orang Batak yang berdiam di daerah pedalaman terpaksa harus berhubungan dagang dengan para penguasa muara sungai di daerah pesisir disebabkan faktor keadaan alam yang tidak memungkinkan mereka mengadakan hubungan langsung dengan para pedagang yang mengunjungi pelabuhan tersebut.

Hubungan antara daerah pesisir dengan pedalaman sepenuhnya berada dalam tangan para penguasa. Dengan demikian para penguasa yang berdiam di muara sungai dapat menikmati keuntungan yang besar dari perdagangan dengan daerah pedalaman.

Dua pusat perdagangan di pantai Barat Sumatera yaitu Trumon dan Barus, pada waktu jayanya kekuasaan Kerajaan Aceh adalah pusat-pusat perdagangan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Mereka harus tunduk kepada pengaturan perdagangan yang ditetapkan Kerajaan Aceh. Meskipun daerah pedalaman mereka menghasilkan banyak barang-barang perdagangan, para penguasa setempat kurang dapat menikmati keuntungan perdagangan. Hal ini disebabkan karena barang-barang yang mereka hasilkan harus dibawa ke pusat Kesultanan Aceh, untuk kemudian baru dijual kepada pedagang asing. Perdagangan itu sendiri berada sepenuhnya dalam tangan para penguasa Aceh.

Pada waktu kekuasaan pusat Kerajaan Aceh mengalami kemunduran, pusat-pusat yang terletak di pantai barat Sumatera ini dapat melakukan perdagangan langsung dengan para pedagang asing yang mengunjungi daerah mereka, atau mereka sendiri dapat mengangkut barang-barang dari daerah pedalaman mereka ke pusat-pusat perdagangan luar negeri.

Barang-barang yang mereka angkut ke luar negeri atau yang oleh para pedagang asing sebenarnya adalah barang-barang yang dihasilkan oleh penduduk pedalaman yang secara politik tidak tunduk kepada kekuasaan mereka. Penduduk pedalaman yang berbeda etnis dengan mereka itu terpaksa harus mengadakan hubungan perdagangan seperti yang diatur oleh penguasa muara sungai disebabkan karena mereka terisolir di pedalaman. Satu-satunya jalan yang dapat menghubungkan mereka dengan dunia luar adalah melalui sungai dan karena sungai tersebut berada dalam kontrol penguasa muara dalam tangan penguasa muara sungai.

DAFTAR CATATAN

- 1) Laporan Michielse tentang Aceh: 6 Februari 1832, *AR-SIPNAS RI : Aceh* 4 – 2.
- 2) Anthony Reid, "Trade and the Problem of Royal Power in Aceh, Three Stages : c. 1550 – 1700", dalam: Anthony Reid and Lance Castles, "Pre Colonial State System in Southeast Asia", *MMBRAS*, No. 6. 1975.
- 3) Produksi lada saja untuk seluruh daerah pantai barat Aceh pertahun berkisar antara 150.000 – 200.000 pikul dan diangkut oleh berbagai kapal dari berbagai negara, Lihat, E.S. De Klerck, *De Aceh-Oorlog*, jilid I, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912, hlm. 157.
- 4) Pemerintah Belanda baru masuk ke Trumon dan Barus setelah mereka mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Inggris, masing-masing pada tahun 1830 dan 1839. Lihat, Mohd. Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, Jilid I, penerbit pengarang sendiri, 1961, hlm. 266.
- 5) Bennet Bronson, "Exchange at the Upstream and Downstream Ends: Notes toward a functional model of the

- Coastal state in Southeast Asia", dalam : Karl L. Hutterer (ed.), *Economic Exchange and Social Inter-action in Southeast Asia: Perspective from pre History, History and Ethnography*, Michigan Papers on South and Southeast Asia, No. 13: The University of Michigan, 1977.
- 7) Laporan W.H.R. van Loon yang memimpin komisi ke Aceh pada tahun 1837. Padang: 18 Mei 1837, *ARNAS RI : Atjeh* 4 – 2.
 - 8) *Ibid.*
 - 9) *Ibid.*
 - 10) Mohd. Said, *loc. cit*
 - 11) *Ibid.*
 - 12) W.H.R. van Loon, *loc. cit.*
 - 13) *Ibid.* Lihat juga, John Bastin, *The Changing Balance of the Early Southeast Asian Pepper Trade*, Kuala Lumpur: Paper on Southeast Asian Studies, No. 1.
 - 14) W.H.R. van Loon, *loc. cit.*
 - 15) *Ibid.*
 - 16) J, Kathirithamby-Wells, "Achehnese Control Over West Sumatra up to the Treaty of Painan 1663", *JSAH*, December 1969, Vol. X. No. 3. hlm. 453.
 - 17) *Ibid.*
 - 18) E.S. de Klerck, *op. cit.*, hlm. 61; lihat juga Joh Bastin, *op cit*, hlm. 164.
 - 19) *Ibid.*
 - 20) L.W. Alders, *Internationale Rechtspraak Tussen Indonésische Rijken en de VOC tot 1700*, Nijmegen: Centrale Drukkerij, hlm. 91.
 - 21) *Ibid.* Lihat juga, Mohd. Said, *op. cit.*, hlm 270.
 - 22) L.W. Alders, *op. cit.*, hlm 113

- 23) Laporan Michielse, *loc. cit.*
- 24) W.H.R. van Loon, *Loc. cit.*
- 25) *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Alders, L.W., *Internationale Rechtspraak Tussen Indonesische Rijken en de VOC tot 1700*, Nijmegen: Centrale Drukkerij.
- Bastin, John, *The Changing Balance of the Early Southeast Asian Pepper Trade*, Kuala Lumpur: Paper on Southeast Asian Studies, No. 1, 1960.
- Bronson, Bennet, "Exchange at the Upstream and Downstream Ends: Notes Toward a Functional Model of the Coastal State in Southeast Asia", dalam: Karl L. Hutterer, (ed.), *Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia: Perspective from Pre History, History and Ethnography*, Michigan University of Michigan, 1977.
- Hall, Kenneth R., "Trade and Statecraft in the Western Archipelago at the Dawn of European Age", *JMBRAS*, (54), bagian pertama, No. 239.
- Kathirithamby-Wells, "Achehnese Control Over West Sumatra up to the Treaty of Painan 1663", *JSAH*, Desember 1969, Vol. X, No. 3.

- Klerck, E.S. de, *De Atjeh-Oorlog*, Jilid I, 's-Gravenhage : Martinus Nijhpff, 1912.
- Loon, W.H.R. van, "Laporan tentang komisi yang dipimpinnya ke Aceh pada tahun 1837" Padang 18 Mei 1837", *ARNAS RI : Atjeh* 4-2.
- Michielse, "Laporan tentang Keadaan Aceh pada tanggal 6 Februari 1832", *ARNAS RI : Atjeh* 4-2.
- Reid, Anthony, "Trade and the Problem of Royal in Aceh, Three Stages: c. 1550 — 1700", Dalam : Anthony Reid dan Lance Castles, (ed.), "Pre Colonial State Systems in Southeast Asia", *MMBRAS*, No. 6. 1975.
- Said, Mohd., *Atjeh Sepanjang Abad*, Jilid I, 1961.

PEREKONOMIAN MAKASSAR PADA 1847 – 1866

(Oleh Daud Limbu Gau)

I

Makassar yang ditelaah dalam tulisan ini terdiri atas sejumlah distrik yang pernah dipegang langsung oleh pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan perjanjian Bungaya yang diperbaiki pada tahun 1824 dan telah ditetapkan dalam staatsblad tahun 1824 nomor 31 a.¹ Pemerintahannya berpusat di Makassar yang wilayahnya meliputi: distrik Makassar, distrik utara ibu negerinya Maros, distrik selatan ibu negerinya Takalar, distrik timur ibu negerinya Sinjai dan distrik Selayar.

Letak Makasar berada pada kaki barat pulau Sulawesi atau merupakan bahagian dari daerah tingkat I propinsi Sulawesi Selatan sekarang. Pada masa pemerintahan Tomaparasi Kalonna raja Gowa ke-9 (1510 – 1546) Makassar mulai dibangun menjadi bandar utama dikawasan Indonesia Timur di samping sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian kerajaan Gowa. Di awal abad ke-17 bandar Makassar mengalami puncak kejayaannya yang saat itu kerajaan Gowa dibawah kekuasaan Sultan Alauddin raja Gowa ke-14 (1593-1639).² Sultan menjadikan kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang kuat dikawasan

ini serta merupakan pusat pengembangan dan perdagangan Islam. Kapal-kapal dagang asing dari periode ke periode semakin ramai mengunjungi Makassar. Di samping transit para pedagang membongkar dan memuat barang serta mengisi kapalnya dengan bahan bakar kemudian mereka meneruskan perjalanannya ke pulau rempah (Maluku) atau kembali ke negara asalnya.

Letak Makassar yang strategis bagi lalu lintas perdagangan internasional pada masa itu, mendorong VOC merebut Makassar dari tangan kekuasaan Sultan Hasanuddin raja Gowa ke-16 (1653-1669). Puncak ketegangan antara kerajaan Gowa dan VOC diakhiri dengan penandatanganan naskah perjanjian Bungaya tanggal 18 Nopember 1667 yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam penanda tanganan ini pihak kerajaan Gowa diwakili oleh Sultan Hasanuddin, sedangkan di pihak VOC oleh Spelman.³ Berdasarkan naskah perjanjian ini, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan Belanda di Sulawesi dimulai saat itu.

Ketika VOC mengalami kemerosotan pada akhir abad ke-18, segera terbentuk Pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil alih seluruh kekuasaan VOC di Indonsia. Pada dasarnya raja-raja di Sulawesi Selatan tidak menerima lagi kehadiran Belanda setelah berakhirnya kekuasaan VOC itu. Sekalipun demikian pihak Belanda tetap berkeras dengan berbagai cara untuk menguasai Makassar sebagai bekas kekuasaan VOC dan seluruh Sulawesi yang masih dibawah kekuasaan penguasa pribumi.

Pada bulan Juni 1824 Van der Capellen tiba di Makassar guna memperbaiki situasi buruk yang yang menimpa pihak pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan. Usaha Van der Capellen ini ternyata bisa mempengaruhi para raja di daerah ini untuk melakukan suatu perjanjian tanggal 9 Agustus 1824. Perjanjian tersebut lazim dikenal sebagai "Perjanjian Pembaharuan Atas Perjanjian Bungaya tahun 1667", atau biasa pula disebut perjanjian Bungaya yang diperbaiki tahun 1824. Berdasarkan perjanjian itu, maka mulailah Pemerintah Hindia Belanda menem-

pakan diri sebagai "pembela dan pelindung" bagi segenap raja-raja beserta rakyatnya di Sulawesi Selatan.⁴

Makassar dan daerah sekitarnya segera ditata pemerintahannya sesuai dengan pola kolonial. Nampaknya dalam menata pemerintahan ini, kolonial berorientasi pada bidang perekonomian guna menutupi utang sebagai akibat perang melawan serbuan Diponegoro perang Paderi dan perang Belgia.⁴

VOC dimasa kekuasaannya tidak mencampuri langsung pelaksanaan maupun penataan pemerintahan di daerah-daerah. Para penguasa pribumi tetap berwenang mengatur pemerintahan, dan perekonomian di daerahnya masing-masing. Namun para petani wajib menyetorkan 10 persen dari jumlah penghasilannya kepada VOC. Perhatian utama bagi VOC adalah membuat Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan lebih penting lagi sebagai bandar transito.

Masuknya Pemerintah Hindia Belanda segera terjadi perubahan besar terutama dalam bidang penataan pemerintahan yang disesuaikan dengan pola kolonial. Malah perekonomian merupakan masalah pokok seperti yang tercermin di dalam struktur birokrasi kolonial. Penguasa pribumi menduduki jenjang terendah dalam struktur birokrasi kolonial dengan jabatan sebagai *regent* atau kepala distrik. Mereka dibawah langsung oleh *asisten resident* atau *controleuur* yang dijabat oleh bangsa Eropa.

Regent dalam menjalankan tugasnya diberi gaji oleh pemerintah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Misalnya gaji *Regent* Sinjai memperoleh gaji F. 600 setahun, regent Bulu-bulu (Sinjai) F. 1560 setahun, regent Pata Bangun (Selayar) f. 480 setahun.

Di samping gaji para *regent* masih memperoleh tambahan pendapatan 3 persen dari jumlah pajak yang dimasukkan ke pemerintah dan hasil tanah *kalompoang*.⁵

Penempatan para penguasa pribumi ditingkat *regent* ini diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan. Pengendalian ekonomi masih sangat membutuhkan pengaruh dari pihak feo-

dal dan tradisional sebagaimana sebelum masuknya pemerintahan kolonial . Sekalipun peranan serta wewenang yang diberikan itu cukup luas serta gaji tetap, nampaknya *regent* menghadapi suatu dilema. *Regent* sebagai pemimpin tertinggi pribumi ia harus mampu membiayai upacara keagamaan seperti upacara turun ke sawah (appalili) dan upacara panen (bangka sampa). Di lain pihak terhadap atasannya *regent* harus pula menunjukkan kesetiaan, kejujuran, kerajinan dan kesetiaan supaya selalu disenangi. Kedua tuntutan ini merupakan problem berat bagi seorang *regent*. Pendapatan para *regent* dalam masa sistem tradisional ternyata mengalami penurunan yang sangat menyolok dalam masa kolonial. Oleh karena itu di masa kolonial tuntutan tradisional bagi seorang pemimpin pribumi sering tidak dapat dipenuhi. Ini berarti rakyat kurang kepercayaan terhadap pemimpinnya. Terhadap atasannya *regent* harus berlaku jujur melaksanakan tugasnya agar disenangi atasannya.

Tulisan ini mengambil tema "Perekonomian Makassar 1847-1866" di masa pemerintahan kolonial. Berdasarkan data kuantitatif yang ada diharapkan akan dapat diungkapkan berbagai kegiatan ekonomi di daerah ini. Sudah barang tentu pula tulisan ini akan berusaha menjelaskan sejauh mana pengaruh perekonomian kolonial terhadap kehidupan masyarakat.

Guna peningkatan ekonomi, pemerintah kolonial memberi prioritas utama mengenai prasarana dan sarana perekonomian. Jalan-jalan penghubung poros pedalaman dan kota Makassar memperoleh perbaikan di samping pembukaan jalan-jalan baru. Prioritas berikutnya pengadaan lokasi pasar Parang Loe, pasar Pamanjangan di daerah Tello sebelah utara kota Makassar. Selain itu lokasi pasar terdapat dua buah dalam kota Makassar yaitu pasar kampung Baru dan pasar kampung Melayu. Pasar-pasar ini berfungsi dengan baik para petani dari pedalaman dapat menjual hasil-hasil produksinya di pasar-pasar yang telah disediakan.⁶ Pasar-pasar ini dipenuhi dengan hasil-hasil seperti: tembakau, gambir, gula, dan beras.

Di sektor pertanian tanaman komoditi yang digiatkan oleh pemerintah antara lain: kopi, gula, kapas, tembakau dan nila. Lokasi penanaman kopi didistrik utara, dan distrik selatan telah memproduksi 7000 pikul dalam tahun 1847, dan 34000 pikul dalam tahun 1857.⁷ Peningkatan produksi kopi ini nampak dalam tahun 1865 dapat mencapai 50.000 pikul.⁸ Gula tercatat produksinya 2000 pikul dalam tahun 1865, yang penanamannya berlokasi di distrik utara dan distrik selatan. Selayar dan Toratea merupakan lokasi penanaman kapas, telah memproduksi dalam tahun 1865 sebanyak 370 pikul.⁹ Tembakau yang lokasi penanamannya dipusatkan di pulau Selayar dalam tahun 1854 menghasilkan 997 pikul dan dalam tahun 1855, 557 pikul.¹⁰

Di samping tanaman yang tergolong bahan komoditi tersebut dijumpai juga beberapa jenis tanaman lainnya yang tidak kurang pentingnya bagi penerimaan pemerintah yakni: padi dan kelapa yang tersebar di seluruh distrik. Produksi padi dapat dilihat dalam penerimaan padi pemerintah dari tahun 1865 sampai dengan tahun 1860 yang jumlahnya f. 583.112,35. Selain penerimaan yang ditarik melalui pajak pemerintah masih memperoleh 119.980 ikat padi sebagai sewa tanah pemerintah yang digarap oleh petani dari tahun 1865 sampai tahun 1860.¹¹ Dalam tahun 1865 pemerintah telah mengeksport beras dengan nilai f. 450.000.¹²

Kelapa yang ditanam di pulau Selayar telah memproduksi sampai 350.000 biji. Setelah diolah menjadi minyak goreng mencapai berat sebanyak 606 pikul.¹³

Dari sektor kehutanan pengelolaannya dipusatkan di hutan Jampea Selayar, yang dapat menghasilkan kayu eksport. Hutan ini dikontrakkan kepada dua orang pengusaha Cina masing-masing Ong Im dan Coa de sang berdasarkan kontrak tanggal 27 Juni 1861 no. 56.¹⁴

Di bidang perikanan tercatat dalam tahun 1857 telah melibatkan sebanyak 113 buah perahu nelayan dan dari hasil penangkapan ikan laut diperoleh nilai jual f. 9532. Khusus penang-

kapas ikan teripang telah dikerahkan 20 buah perahu sampai ke kepulauan Aru dengan hasil 6119 pikul yang nilai jualnya sebesar f. 217.939, dalam tahun 1856.¹⁵ Agar-agar yang diperoleh dari pulau Sabutung, pulau Salemo, pulau Satando dan Saugie dalam tahun 1857 mencapai hasil 4326 pikul dengan nilai jual f. 12.930.¹⁶

Dalam tahun 1857 tercatat pula beberapa jenis hewan yang menunjang bidang peternakan di daerah ini. Jenis-jenis hewan yang tergolong hewan ternak yakni: Sapi, Kerbau dan kuda.¹⁷

Kerbau diberitakan sangat mencukupi untuk keperluan pertanian. Harga kerbau pada masa ini mencapai f. 20 sampai f. 25 seekor. Menurut laporan pemerintah Sulawesi bahwa jumlah kuda yang dipergunakan militer di daerah ini tercatat 106 ekor. Selain itu, tercatat 502 ekor kuda yang diekspor ke Jawa dengan harga f. 39.431.¹⁸

Sumber-sumber ekonomi lainnya yang belum disebutkan dan penting artinya buat penerimaan pemerintah yakni: garam, industri rakyat (perahu, tekstil, benang kasar dan kapur untuk bahan bangunan). Dalam tahun 1865-1866, produksi garam memperoleh nilai jual f. 1307,75 yang asalnya dari Takalar.¹⁹

Tanah-tanah yang termasuk milik pemerintah dipersewakan kepada pihak swasta. Tanah-tanah ini terdapat di Bontain sebanyak 60 bau, disewakan berdasarkan surat Gubernur tanggal 22 Oktober 1865 no. 12, di afdeling utara (Maros) sebanyak 200 bau disewakan sesuai dengan surat Gubernur tanggal 18 Mei 1864 no. 31, dan di afdeling Makassar terdapat 49 bau dengan surat Gubernur tanggal 5 Januari 1865.²⁰ Sewa tanah tersebut berjumlah f. 344.958,10 untuk tahun 1865-1866.²¹

Di sektor perpajakan dalam tahun 1866 tercatat beberapa jenis pajak yaitu bea cukai, pajak tanah, pajak kepala, pajak kendaraan (kuda), materai, rumah gadai, pajak balik nama, lelang dan lain-lain.²² Dengan kerja keras terutama para *regent* pajak-pajak yang dimasukkan agaknya mendapat sukses. Misalnya bea cukai dari afdeling Bontain dan Takalar diperoleh f. 18.866,13 untuk tahun 1858-1860.²³ Untuk pajak tanah

mencapai jumlah f. 9647,62 dalam tahun 1860, sedangkan pajak kepala dari Selayar diperoleh jumlah f. 54.904 dalam tahun 1865-1866.²⁴ Penerimaan pajak kendaraan, bea balik nama dan lain-lain mencapai jumlah f. 640.399,74 untuk tahun 1865-1866.²⁵

Untuk tahun 1860 tercatat selain pajak padi seperti yang telah disebutkan masih dikenal sebuah pajak yaitu pajak tebu. Menurut *aanslag* tahun 1859-1860 pajak tebu dari afdeling Selatan berjumlah f. 3532,70, dari afdeling Makassar mencapai jumlah f. 3510,31.²⁶ untuk tahun 1858-1859.

Bidang perdagangan dalam tahun 1847-1866 nilai ekspor mencapai f. 100.213,211 sedangkan nilai impor berjumlah f. 106.553.777.²⁷ Dalam tahun yang sama kapal dagang yang masuk ke pelabuhan Makassar berjumlah 2674 buah, sedangkan yang berangkat 2810 buah. Demikian pula perahu layar yang masuk ke pelabuhan Makassar sebanyak 26.324 buah, sedangkan yang bertolak meninggalkan pelabuhan sebanyak 30.390 buah.²⁸ Karena pelabuhan Makassar merupakan pelabuhan transito, maka nampaknya barang impor dengan barang yang diekspor hampir sama jenisnya. Misalnya barang yang diimpor adalah beras, kopi, tembakau, dan lain-lain, maka barang-barang ini juga diekspor ke negara-negara Eropa, Cina, Singapur, Marege, Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Sumbawa, Timor dan Maluku. Dari negara-negara ini juga diimpor barang-barang (lihat lampiran IV).²⁹ Dalam tahun 1860 tiba di pelabuhan Makassar sembilan buah kapal dari Eropa dan enam buah dari Cina, sedangkan yang bertolak meninggalkan pelabuhan Makassar menuju Eropa dua buah kapal, ke Cina 20 buah kapal, membawa barang-barang ekspor.³⁰ Guna menampung barang-barang sebelum dibuat, dibangun tiga buah gudang yang masing-masing terletak di kampung Butung sebuah, dan di pusat kota dua buah.

Kuda merupakan alat transportasi di darat yang amat penting, sedangkan perhubungan melalui laut dan sungai menggunakan perahu layar. Dengan demikian fungsi kuda dan perahu sebagai alat transportasi pada masa itu sangat penting. :³¹

Apabila kita amati gambaran perekonomian Makassar pada masa ini pada dasarnya masih menunjukkan sistem *exploitation* suatu tradisi yang telah dipraktekkan oleh VOC secara ketat di masa kekuasaannya. Fakta yang diungkapkan dalam tulisan ini memberi penjelasan kepada kita bahwa sumber-sumber kekayaan daerah Sulawesi Selatan telah dikuras oleh kolonial untuk kepentingan kesejahteraan bangsa Belanda sendiri.³²

Pelaksana ekonomi di daerah-daerah sepenuhnya di tangan pengusaha pribumi. Pemerintah Belanda telah memastikan kegagalan yang akan mereka alami apabila tidak memanfaatkan ikatan feodal dan tradisional, antara rakyat dan penguasanya.³³ Dengan demikian para penguasa pribumi yang diangkat sebagai *regent* oleh pemerintah Belanda akan diharapkan dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Para *regent* tugas pokoknya adalah sebagai penghubung antara kolonial dan rakyat, menyampaikan dan memerintahkan kepada rakyatnya segala instruksi, peraturan-peraturan dari Kolonial.

Penguasa pribumi yang ditetapkan statusnya sebagai *regent* oleh kolonial, padanya terdapat fungsi pemimpin duniawi dan fungsi pemimpin rohaniyah. Bagi masyarakat Makassar pemimpin yang baik akan memiliki pengikut yang baik, dan pemimpin yang jelek akan memiliki pula pengikut yang jelek. Maksudnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat melakukan fungsi kepemimpinannya secara seimbang yaitu keseimbangan antara duniawi dan rohaniyah. Fungsi kepemimpinan rohaniyah terlihat dalam kemampuannya menyelenggarakan upacara-upacara ritual yang sudah sangat sulit dilaksanakan oleh penguasa pribumi (*regent*) di masa kolonial ini. Tidak seperti di masa kekuasaan tradisional tuntutan masyarakat dengan sangat mudah dipenuhi karena penguasa di samping memiliki hak-hak istimewa ia juga dengan bebas mengatur rumah tangganya sendiri.

Setelah kekuasaan hampir seluruhnya berada di tangan kolonial, maka dengan sendirinya merusak kebiasaan-kebiasaan mereka baik itu penguasa pribumi maupun penduduk secara

keseluruhan. Bagi kolonial terhadap penguasa ataupun pemuka pribumi mereka hormati, tetapi di lain pihak penguasa dan pemuda pribumi hanya pelaksana-pelaksana tugas yang dipaksakan dari atas.

Dalam keadaan itu tidak jarang para asisten Residen menarik kepatuhan dan ketergantungan mutlak para regen. Asisten Residen dengan kebijaksanaannya ia memberikan hak-hak istimewa kepada regen. Sebagai contoh, pemberian sebidang tanah kepada regen Tanralili untuk dimiliki karena diragukan bisa membahayakan pengaruhnya yang sangat luas di kalangan penduduknya. Atas pemberian ini regen Tanralili senantiasa menampakkan kesetiaan, kejujuran, kerajinan dan kecakapannya di hadapan asisten residennya. Bahkan dalam banyak hal regen Tanrelili dan keturunannya rela mengorbankan kepentingannya di atas kepentingan asisten residen sebagai atasan langsungnya.

Tingkat pusat kelemahan ini pun segera diketahui sehingga para pejabat Eropa dan regen di daerah-daerah memperoleh tambahan pendapatan yang di pulau Jawa dikenal *cultuur procenten*. Mereka mendapat 10 persen dari jumlah pajak ataupun hasil lainnya yang merupakan kelebihan dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun cara ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat sebagai akibat pengaruh negatifnya. Para asisten residen dan regen jelas tidak akan terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang melekat pada sistem ini. Misalnya tekanan-tekanan mau pun permintaan-permintaan yang tidak mengindahkan keluhan rakyat petani karena adanya kecenderungan untuk melampaui target.

Di segi kesehatan nampak ada usaha pemerintah kolonial sampai ke tingkat pedesaan. Aparat kesehatan pada onderafdeling-onderafdeling dilengkapi dengan fasilitas sehingga mudah melakukan tugas dengan tepat dan cepat.³³

Dalam laporan pemerintah tahun 1855 tercatat penduduk sebanyak 236.361 jiwa, sedangkan pada tahun 1866 terdapat 325.535 jiwa. Angka ini menunjukkan kenaikan atau ketambahan penduduk setiap tahun 11.000 jiwa, atau rata-rata 4% se-

tahun. Pertumbuhan penduduk ini sangat menggembarakan, meskipun dilihat dari segi lain tetap menguntungkan pihak pemerintah jika dikaitkan dengan perekonomian. Tidak dihindari-nya masalah pertumbuhan penduduk pada masa ini karena tenaga manusia pengganti tenaga mesin memerlukan jumlah yang memadai. Banyak proyek pemerintah yang memerlukan tenaga kerja dengan jumlah yang tak terbatas di saat ini. Kesemuanya itu hanya untuk meningkatkan taraf perekonomian kolonial demi kesejahteraan bangsa Eropa sendiri.

III.

Aktivitas perekonomian kolonial di Makassar seperti yang telah diuraikan oleh penulis pada halaman depan dalam tulisan ini dapat memberikan gambaran mengenai sistem yang diterapkan. Sistem eksploitasi dan monopoli yang digiatkan oleh VOC di masa kekuasaannya masih tetap dipertahankan oleh pemerintah Belanda satu-satunya sistem terbaik, yang dapat mendorong perekonomian serta memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Birokrasi kolonial yang melibatkan sejumlah penguasa dan pemuka pribumi diberikan kedudukan tertinggi di daerahnya, sedangkan di pihak lain ia menempati kedudukan terendah dalam struktur birokrasi kolonial sebagai *regent*. Sekalipun para regent sebagai penguasa tertinggi di daerahnya tetapi di sisi Belanda tak ubahnya sebagai petugas biasa yang langsung kepada masyarakat. Mereka secara ketat diawasi oleh Belanda dalam menjalankan tugasnya. Hal ini salah satu unsur tindakan atau tingkah laku dalam sistem eksploitasi.

Sumber-sumber ekonomi di daerah ini nampaknya tidak seperti yang telah diberitakan oleh beberapa penulis sejarah yang menyatakan bahwa Makassar sebenarnya tidak memiliki bahan komoditi kecuali beras. Berdasarkan fakta yang disajikan dalam tulisan ini, maka pernyataan itu sesungguhnya kurang tepat. Di samping Jawa, Sumatera dan Maluku sebagaimana yang dikenal atau lebih populer dalam catatan sejarah,

Sulawesi Selatan pun yang mengambil pusat Makassar sebagai pintu gerbang ekonominya tidaklah kurang pentingnya dalam neraca perekonomian Belanda mau pun sebagai penghasil bahan-bahan perdagangan. Bukan hanya letaknya yang strategis yang biasanya lebih dibesar-besarkan dalam peta sejarah Makassar, akan tetapi hasil-hasilnya pun yang mungkin tidak lebih rendah nilainya apabila dibandingkan dengan hasil daerah lainnya di Indonesia pada masa itu. Misalnya industri rakyat yang menghasilkan antara lain perahu dan tekstil. Perahu pada periode ini termasuk alat transportasi yang sangat efektif dan efisien baik di lautan maupun di sungai-sungai. Perahu produksi orang Bugis-Makassar telah menembus belahan bumi ini, tentunya memiliki kemampuan berlayar karena ditunjang oleh kualitas yang tinggi pula. Teknik pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan semuanya dirancang oleh ahli-ahli perahu orang Bugis-Makassar. Bukti lain mengenai kekayaan orang barang dagangan Sulawesi Selatan ialah tersebarnya keramik asing di seluruh daerah Sulawesi Selatan meliputi segala macam jenis seperti yang ditemukan pada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Di kantor Suaka Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan tercatat 13 jenis keramik asing dan 14611 buah keramik asing sedang tersimpan di kantor ini. Di antaranya keramik Cina termasuk jumlah yang besar berasal dari dinasti Tang, Sung, Ming, di samping keramik dari Korea, Anam, Siam, Jepang, Eropa dan lain-lain.³⁴

Peta Sejarah Makassar selalu dikaitkan dengan keunggulannya di lautan melayarkan perahunya ke mana-mana tanpa terdengar berita adanya kecelakaan yang menimpa mereka di tengah lautan. Kenyataan dapat menguatkan dugaan bahwa perahu buatan Bugis-Makassar berkwalitas tinggi sebagai alat transportasi. Dengan itu produksi perahu layar Makassar dengan sendirinya memiliki pasaran yang luas.

Mengenal jenis-jenis tanaman komoditi merupakan hal yang positif bagi penduduk pribumi. Mulai dari seleksi bibit, penanaman, perawatan, dan panen secara teratur diajarkan oleh

para petugas kolonial kepada seluruh petani. Dalam tahun 1866 di Makassar telah dicetak penyuluh pertanian sebanyak 66 orang. Di samping itu beberapa pemuka masyarakat diberikan pelajaran bahasa Belanda yang akan digunakan terutama di bidang penyuluhan.³⁵ Dalam hal transportasi khususnya pengangkutan barang dagangan baik yang datang maupun yang berangkat di pelabuhan Makassar dengan menuju negara-negara pengimpor banyak menggunakan perahu layar yang dikemudikan langsung oleh bangsa pribumi. Perahu-perahu mereka menjelajah sampai ke Marege, Australia, Singapur, antara pulau dalam wilayah nusantara, sehingga para pelayar ini pengalamannya semakin luas.

Di samping pengaruh positifnya perekonomian kolonial terhadap penduduk pribumi, juga tidak sedikit segi-segi negatifnya. Malahan segi yang terakhir ini lebih berkesan di hati penduduk karena ternyata Belanda tidak memberi kesejahteraan bagi mereka. Pengaruh ekonomi kolonial ini telah menimbulkan disintegrasi struktur sosial masyarakat terutama semakin memasyarakatnya ekonomi pasar dan lalu lintas uang yang sebelumnya tidak dikenal dalam masyarakat. Masyarakat daerah ini masih dalam taraf kebudayaan yang mitis³⁶ tertutup terhadap pembaharuan, karena mereka lebih terikat kepada kekuatan-kekuatan gaib, karena itu masih tergolong dalam masyarakat "*gemeenschap*". Dikatakan oleh Boeke . . . "pembebasan ekonomi modern barat yang menitik beratkan pada sistem produksi yang berorientasi secara nasional, terhadap negara-negara di mana mayoritas penduduknya terlibat dalam pertanian yang ekonominya masih berorientasi pada konsumerisme, mengakibatkan hancurnya satuan sosial dan politik organis yang merupakan dasar masyarakat-masyarakat *gemeenschap*. Suatu masyarakat dan ekonomi yang rangkap mengakibatkan hal-hal tersebut di atas menjadi lebih besar serta tradisi yang lebih lemah pada akhirnya kehilangan kemampuannya untuk memenuhi berbagai fungsi yang telah dipegang sebelum perubahan-perubahan datang dari luar. Dominasi kolonial atau usaha-usaha

pribumi ke arah industrialisasi dengan membawa nilai-nilai barat, akan merusak manfaat sosial (*sosial utility*) berbagai lembaga tradisional di dalam masyarakat.

Banyak adat-adat yang ditinggalkan, munculnya kekuatan-kekuatan anti sosial akan mempercepat terjadinya desintegrasi dari solidaritas organis. Menurut pandangan ini, usaha-usaha penguasa bangsa-bangsa tersebut untuk mengontrol kelompok anti sosial ini melalui kepala suku atau penguasa lokal lainnya, atau dengan menegakkan aturan pemerintah modern, gagal untuk mengadakan suatu integrasi sosial atau prinsip pengorganisasian yang diharapkan. Maka kedua bentuk dari masyarakat "rangkap" ini berjalan tidak efisien.³⁷ Masyarakat Makassar yang masih dalam taraf menutup diri (khususnya bagian pedalaman) terhadap pembaharuan di luar, mereka harus menghadapi kenyataan seperti yang digambarkan oleh Boeke tersebut. Ekonomi modern barat yang dipaksakan di atas ekonomi tradisional akan mengakibatkan suatu perubahan yang menimbulkan keresahan sosial.

Sumber-sumber perekonomian pada periode 1847-1866 di Sulawesi Selatan dengan pusat pengelolaannya Makassar dapat membuka jalan pemikiran bagi pembangunan di masa kini. Sistem pengelolaan pertanian yang teratur dan terkontrol bisa memberi hasil yang memadai pula. Dari semua sektor ekonomi bisa dibenahi asal saja dilakukan dengan sungguh-sungguh, para petugas memiliki tanggungjawab yang tinggi seperti yang diterapkan para *regent* di masa kolonial. Penduduk pedesaan atau petani memerlukan bimbingan sepenuhnya, informasi yang tegas dan jelas, sehingga wibawa para aparat tidak terseret ke dalam situasi tidak percaya dari rakyat. Di samping meningkatkan sumber-sumber ekonomi tadi, segera diusahakan pemasarannya, karena hal ini akan sangat membantu dalam mendorong usaha rakyat pedesaan meningkatkan dan mengembangkan ekonominya. Nampak dalam data, bahwa pemerintah Belanda sangat jauh mencari relasi atau hubungan dagang dalam usaha memakmurkan perekonomiannya. Dalam kaitannya dengan pe-

ningkatan dan pengembangan perekonomian baik masa kini mau pun di masa yang akan datang perlu menengok di masa lampau mengenai posisi pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan transito dan pelabuhan internasional. Pelabuhan yang cukup strategis di masa lampau memiliki jasa yang tidak ternilai tingginya terhadap Belanda. Oleh karena itu mungkin juga pelabuhan Makassar di masa kini dapat memberi jasa yang besar terhadap pembangunan Nasional apabila pelabuhan ini difungsikan sesuai dengan letak geografisnya.

Beberapa buku sejarah mencatat mengenai kedatangan Belanda di wilayah-wilayah luar Jawa, misalnya Belanda yang ke Makassar yang pada umumnya menekankan bahwa kedatangan Belanda di sini karena didorong oleh nafsu ekspansinya. Apabila dihubungkan dengan kegiatan Belanda di Makassar seperti yang dikemukakan pada halaman sebelumnya dalam tulisan ini agaknya kurang tepat. Belanda lebih banyak kegiatannya di bidang perekonomian sehingga masalah sosial dan politik mendapat perhatian. Masalah politik memang sewaktu-waktu muncul, akan tetapi hanya untuk mengamankan jalannya perekonomian. Maka yang mendapat perhatian ialah apakah kedatangan Belanda di luar Jawa ada sangkut pautnya dengan pengembangan sistem tanam paksa seperti di Jawa. Pertanyaan ini timbul karena ditemukan dalam beberapa tulisan sejarah bahwa tanam paksa tidak berlaku di luar pulau Jawa.

DAFTAR CATATAN

1. Lihat *List der Landen en Filanden behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden over 1849*. Arsip Nasional R.I. Bundel Makassar no. 362/4.
2. Lihat van der Broeke, *Peter van der Broeke in Asia*, ed. W. PH. Coolhaas IV., 's-Gravenhage Nijhoff 1960, hal. 58.
3. H.J. De Graaf, *Geschiedenis van Indonesie*, 's-Gravenhage/Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1949, hal. 200. Buku yang secara khusus membicarakan Perjanjian Bungaya lihat F.W. Stapel, *Het Bongais Verdrag*. Groningen, 1922.
4. Lihat perjanjian Bungaya yang diperbaharui 1824, af'schrijf verslagen J.D. Schelle, J.H. Tobias, tahun 1825 B. Bischof, dan copia secreete, dalam bundel Makassar nomor 350, Arsip Nasional R.I.
5. J. Sibenius Trip, *Staasbladen van Nederlandsch Indie*. Batavia: Javansch Boehandel & Dikkerij, 1897, hal. 211. Tanah Kalompoang atau Tanah Kebesaran, Tanah Jalan-tan.

6. *Lihat Algemeen Administrasi verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het jaar 1857.* Arsip Nasional R.I., bundel Makassar nomor 8/7.
7. *Algemeen Administrasi verslag.* op. cit.
8. *Kultuur Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over 1865.* Arsip Nasional R.I., bundel Makassar no. 9/10.
9. *Ibid.*
10. *Kort Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over 1858.* Arsip Nasional R.I., bundel Makassar no. 11/6.
11. *Kultuur Verslag* op. cit.
12. *Ibid.*
13. *Kultuur Verslag* op. cit.
14. *Ibid.*
15. *Algemeen Administratief verslag* op. cit.
16. *Ibid.*
17. *Ibid.*
18. *Ibid.*
19. *Administratief Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het 1866.* Arsip Nasional R.I., bundel Makassar no. 9/13.
20. *Kultuur Verslag* op. cit.
21. *Administratief Verslag . . . 1866* op. cit.
22. *Ibid.*
23. *Administratief Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het 1866.* Arsip Nasional R.I., bundel Makassar no. 9/2.
24. *Administratief Verslag 1866* op. cit.

25. Administratief Verslag 1866 op. cit.
26. Administratief Verslag 1860 op. cit.
27. *Kort Verslag Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden Januari 1858*. Arsip Nasional R.I., bundel Makassar no. 11/6; *Administratief Verslag 1866 op. cit.*; *Administratief Verslag . . . 1866 Ibid.*
28. *Administratief Verslag 1860 Ibid.*
29. *Administratief Verslag 1860 op. cit.*
30. Ibid.
31. *Algemeene Administratief Verslag . . . 1857 op. cit.*
32. Bandingkan dengan Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional* jilid IV, Jakarta: P dan K, 1977, hal. 96.
32. Bandingkan dengan Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional* jilid IV, Jakarta: P dan K, 1977, hal. 96.
33. Lihat Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* hal. 97.
34. Lihat *Regeringsalmanak Voor Nederlandsch Idie 1860* hal. 131-132.
35. Lihat Hadimuljono, *Sumbangan Keramik Asing Bagi Penelitian Arkeologi di Daerah Sulawesi Selatan*. Paper pada loka karya arkeologi proyek penelitian dan penggalian Purbakala, Yogyakarta, 21 – 26 Pebruari 1978.
36. Lihat *Administratief Verslag 1866 op. cit.*
37. Lihat C.A. van Peursen, "Cultuur in Stroomversneling een geheel bewerkte uitgave van Strategie Van De Cultuur, Elsevier". Diterjemahkan oleh Dick Hartoko, *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta-Jakarta: Kanisus, BPK Gunung Mulia, 1974, hal. 18.
38. Lihat Boeke, "Dualistische Economic" dalam Neil J. Smelser "Social Structure and Mobility in Economic Development" di-indonesiakan oleh Khairuddin, *Struktur Sosial*

Dan Mobilitas Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta,
Nur Cahaya, 1984, hal. 23.

DAFTAR PUSTAKA

Algemeen Administratief Verslag van het Gouvernement Celebes Onderhoorigheden. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 8/7 tahun 1857.

Administratief Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het jaar 1860. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar, no. 9/2.

Administratief Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het jaar 1866. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar, no. 9/13.

Arsip Nasional R.I., Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848. Jakarta 1973.

Broeke der van, *Piter van der Broeke in Asia.* ed. W. PH. Coolhas IV., 's-Gravenhage Nijhoff, 1960.

Graaf de H.J., *Geschiedenis van Indonesie.* 's-Gravenhage/Bandung N.V. Uitgeverij W/van Hoeve, 1949.

Hadimuljono, Drs. *Sumbangan Keramik Asing Bagi Penelitian Arkeologi Di Sulawesi Selatan.* Kantor Suaka Sejarah dan Purbakala wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, 1978.

Kartodirdjo Sartono, Dr. Prof., *Sejarah Nasional Indonesia IV* Jakarta: Departemen P & K, 1977.

Koert Verslag Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden January over het 1858. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 11/6.

Koentjaraningrat, Dr. Prof., *Rintangan-Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.* Lembaga Research Kebudayaan Nasional Terbitan Takberkala LIPI., Jakarta Bharata, 1969 Seri 12.

Kultuur Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het jaar 1865. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 9/10.

Lijst der Landen en Eilanden behoorende tot Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden over 1849. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 362/4.

Peursen van C.A., Dr. Prof., "Cultuur In Stroomversneling een geheel bewerke uitgave van Strategie van De Cultuur, Elsevier" diindonesiakan oleh Dick Hartoko, *Strategi Kebudayaan* Yogyakarta – Jakarta; Kanisus–BPK Gunung Mulia, 1984.

Regeringsalmanak Voor Nederlandsch Indie 1860.

Smelser J. Neil, "Social Structure an Mobility in Economic Development" diindonesiakan oleh Drs. Khairuddin, *Struktur Sosial Dan Mobilitas Dalam Pembangunan Ekonomi.* Yogyakarta: Nurcahaya, 1984.

Trip Sibenius J. *Staasbladen van Nederlandsch Indie.* Batavia: Javansch Boehandel & Drukkerij, 1897.

Lampiran 1

DAFTAR JENIS-JENIS PAJAK TAHUN 1862 – 1866

Jenis Pajak	T a h u n				
	1862	1863	1864	1865	1866
Successie regt	f. 140	f. 300	f. 145	f. 756	f.
Paarden wagen belasting	f. 1665	f. 1834	f. 1996	f. 1703	f. 1674
Klein Zegelregt	f. 11222	f. 12051	f. 10061	f. 12734	f. 14827
Venduregten	f. 3672	f. 5100	f. 2916	f. 3512	f. 16155
Posterigen	f. 6101	f. 5414	f. 6040	f. 6503	f. 6304
Heren geregtigheid	f. 4485	f. 7919	f. 6612	f. 7326	f. 9058
Registerregt pandelingen	f. 1777	f. 2088	f. 1021	f. 625	f. 433
Boeten	f. 3013	f. 3885	f. 5758	f. 2004	f. 3698
Lands drukkerij	f. 269	f. 3323	f. 2213	f. 217	f. 226
Schoolgeld	f. 3467	f. 3225	f. 3412	f. 3476	f. 3283

Daftar ini berdasarkan *Administratief Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het 1866*. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 9/13.

Lampiran 2

DAFTAR IMPOR EKSPOR TAHUN 1847-1866

Tahun	Impor	Ekspor
1847	f. 2658195	f. 1958585
1848	f. 2884769	f. 2184294
1849	f. 2663749	f. 3356186
1850	f. 3635675	f. 2587116
1851	f. 4216272	f. 3962698
1852	f. 5674856	f. 3926579
1853	f. 3966938	f. 6957863
1854	f. 4140554	f. 3600725
1855	f. 3805574	f. 7669820
1856	f. 4517130	f. 6230403
1857	f. 4697811	f. 6529556
1858	f. 4967566	f. 5241460
1859	f. 6346943	f. 6713892
1860	f. 8736008	f. 6161899
1861	f. 7500000	f. 6500000
1862	f. 7000000	f. 6000000
1863	f. 6000000	f. 5300000
1864	f. 7200000	f. 4000000
1865	f. 7500000	f. 7300000
1866	f. 7612000	f. 6100641

Daftar ini berdasarkan *Kort Verslag Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden over het 1858* bundel Makassar no. 11/6; *Administratief Verslag van Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 9/2; *Administratief Verslag 1866*. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 9/13.

Lampiran 3

**DAFTAR KAPAL DAN PERAHU YANG TIBA DAN
BERANGKAT DI PELABUHAN MAKASSAR 1847-1866**

Tahun	K a p a l		P e r a h u	
	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat
1847	52	49	1559	1525
1848	55	50	3025	3186
1849	99	86	2327	2545
1850	84	83	2158	2416
1851	113	113	741	871
1852	166	164	867	1853
1853	153	149	774	946
1854	95	101	800	1851
1855	111	116	776	1139
1856	106	186	812	1131
1857	186	189	1848	1237
1858	172	163	1668	1369
1859	266	267	802	1224
1860	213	210	1045	1292
1861	161	171	784	1382
1862	178	177	1030	1417
1863	159	172	942	1241
1864	176	161	1902	2203
1865	180	186	1975	1987
1866	193	186	1289	1545

Daftar ini berdasarkan *Administratief Verslag* 1860 Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 9/2; *Kort Verslag* 1858 Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 11/6; *Administratief Verslag* 1866 Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 9/13

Lampiran 4

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR EKSPOR
1854 dan 1855

Benaming der Artikelen	Invoer		Uitvoer	
	1854	1855	1854	1855
Gambir	f. 110422	f. 103716	f. 48873	f. 32275
Karetten	f. 29750	f. 37528	f. 53496	f. 45741
Rotting	f. 33237	f. 23061	f. 71536	f. 51204
R y s t	f. 108702	f. 80154	f. 181483	f. 169312
Koffy	f. 272622	f. 236306	f. 437974	f. 478320
Kacang	f. 6617	f. 8828	f. 9345	f. 15089
Agar-agar	f. 2205	f. 120	f. 7979	f. 4449
Paarmoer	f. 123105	f. 112450	f. 123383	f. 80409
Amfioen	f. 242300	f. 249530	f. 247117	f. 134653
Wapen en Amunisi	f. 46259	f. 50402	f. 35368	f. 41348
Koperwerken	f. 20135	f. 22404	f. 6403	f. 10880
Wollen	f. 68240	f. 144379	f. 61314	f. 60071
Tripang	f. 14 62	f. 100306	f. 198026	f. 121445
Tobak	f. 72415	f. 75592	f. 21475	f. 12810
Vogelnestjes	f. 21625	f. 4805	f. 18700	f. 8037
Was	f. 285055	f. 186194	f. 205191	f. 256484

Data ini berdasarkan *Algemeen Administratief Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden van het jaar 1855*. Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 8/5.

Lampiran 5**Daftar Penerimaan Pajak Hasil Panen Padi
tahun 1856 – 1860**

Tahun	Penerimaan
1856	f. 45.680,56
1857	f. 128.338,83
1858	f. 147.225,45
1859	f. 123.237,70
1860	f. 128.530,64

Data ini diperoleh dari *Administratief Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden tahun 1860* (Bahan Arsip Nasional R.I. bundel Makassar no. 9/2).

Tabel B

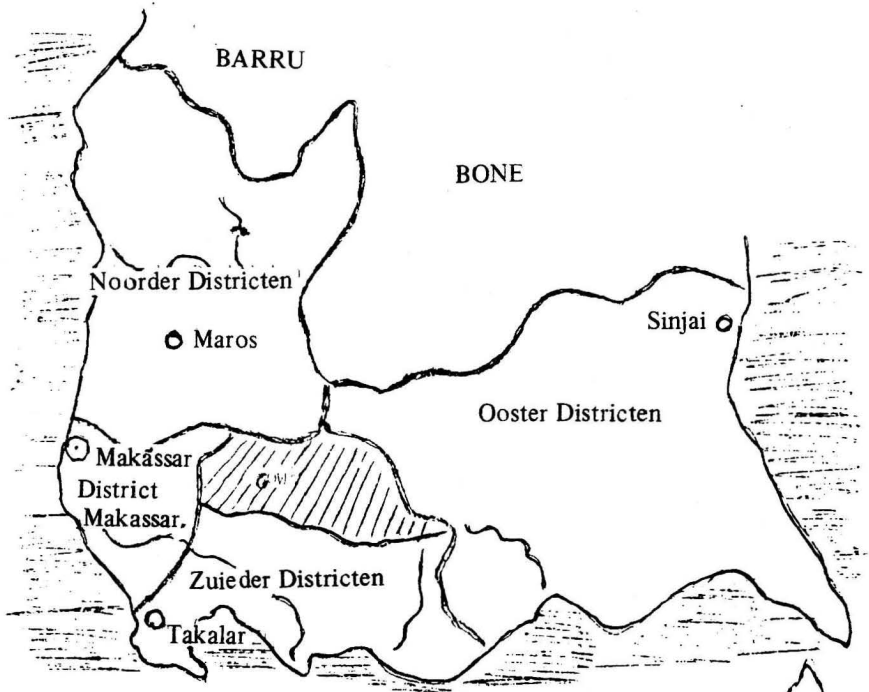
Daftar Jumlah Penduduk Tahun 1855 – 1866

Tahun	Eropa	Cina	Arab	Pribumi	Jumlah
1855	1051	1920	76	235.314	236.361
1856	1093	2105	39	241.837	245.074
1857	1103	2217	32	245.593	248.945
1858	1086	3327	34	210.321	214.754
1860	1147	3330	25	268.553	273.024
1863	1199	4822	45	288.347	294.413
1864	1176	4385	42	301.498	307.101
1865	1140	4318	36	292.401	297.895
1866	1268	4325	45	319.897	325.535

Data ini diperoleh dari *Administratief Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden* (bahan Arsip Nasional bundel Makassar tahun 1860 no. 9/2; bundel Makassar tahun 1866, no. 9/13).

Lampiran 6

WILAYAH YANG DIPERINTAH LANGSUNG HINDIA BELANDA.



* Disalin dari gambar Sutherland
(Second Indonesian Dutch Historical
Conference 26 to 30 Juni 1978).

Keterangan :



Batas afdeling
Pusat pemerintahan
Kota afdeling

Wilayah Kerajaan Gowa dalam perjanjian
Bungaya 1824 dinyatakan sebagai kerajaan
yang merdeka.

GOLONGAN ETNIS CINA SEBAGAI PEDAGANG PERANTARA DI INDONESIA (1870 – 1930)

oleh : Tri Wahyuning M. Irsyam

Pendahuluan

Perkembangan studi Sejarah modern tentang Indonesia telah berkembang sedemikian pesatnya memasuki hampir semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi garapan dari studi sejarah Indonesia Modern ialah golongan etnis Cina sebagai golongan minoritas di Indonesia dalam pelbagai bentuk ragamnya. Sejak Victor Purcell membukukan hasil penelitiannya "The Chinese in Southeast Asia" ternyata karya ini mampu mengilhami lahirnya karya-karya baru dalam studi Indonesia Modern. Studi tentang golongan etnis Cina ternyata telah menghasilkan sejumlah ilmiawan seperti Mely G. Tan, Leo Suryadinata dan lain-lain.

Golongan etnis Cina seringkali diidentikkan sebagai golongan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari adanya kenyataan bahwa mereka telah mulai merintis usaha-usaha di bidang perekonomian sejak dulu, dan keberhasilan mereka ditunjang oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari berbagai pi-

hak, baik pihak mereka sendiri, pihak pemerintah Hindia Belanda maupun dari pihak pribumi Indonesia.

Bila kita telusuri sejarah perkembangan mereka di bidang perekonomian, maka kita harus melihat kenyataan bahwa bangsa Cina telah mengadakan hubungan dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak zaman dinasti Han berkuasa di daratan Cina (206 SM – 221 M). Yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan bangsa Indonesia ini diduga adalah rombongan pedagang. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan antara lain adanya patung-patung batu yang diketemukan di Pasemah, Sumatera Selatan yang mirip dengan patung-patung batu yang terdapat pada kuburan Jenderal Huo K'iu-ping di provinsi Shenshi, yang bertandakan tahun 117 SM. Di samping itu juga banyak diketemukan barang-barang keramik di Sumatera, Jawa dan Kalimantan yang bertandakan tahun 45 SM.¹ menurut para ahli, diduga masa tersebut merupakan masa awal hubungan Cina – Indonesia.

Hubungan berikutnya adalah datangnya seorang musafir Cina yang beragama Budha ke Indonesia. Fa-Hsien datang ke Jawa pada tahun 413 M. Dari catatan sejarah dinasti Sung (420 – 479) dan dinasti Liang (502 – 527) dapat diketahui bahwa ada utusan dari negara-negara di Asia Tenggara yang datang ke Cina. Selain utusan yang datang ke Cina, Cina sendiri pada zaman dinasti T'ang (618 – 907) pernah mengirim utusan ke Selatan untuk membuka hubungan dagang. Pada tahun 756 – 779, pernah datang tiga utusan dari Jawa ke Cina. Dengan adanya pengiriman utusan, baik dari Jawa ke Cina atau sebaliknya, maka hubungan dagang Utara – Selatan menjadi semakin lancar.

Pada zaman pemerintahan dinasti Yuan (1280 – 1368) Kublai Khan pernah mengirimkan ekspedisi militernya ke Singasari pada tahun 1292, tetapi ekspedisi ini mengalami kegagalan.

Ketika Sriwijaya runtuh, kota Palembang jatuh ke tangan golongan etnis Cina dan merupakan tempat pemukiman etnis Cina pertama di Asia Tenggara. Mereka mempunyai pemerintah-

an sendiri dan pernah mengirim utusan ke Kwangtung (Cina Selatan) pada tahun 1377.²

Pada masa pemerintahan dinasti Ming (1368 – 1644), salah seorang kaisar Ming pernah mengirim ekspedisi militer di bawah pimpinan Cheng Ho ke daerah-daerah di Selatan Cina antara tahun 1405 – 1431. Selain mengunjungi daerah-daerah Asia Tenggara, ekspedisi ini juga sampai ke Ceylon dan Calicut. Peninggalan daripada ekspedisi ini adalah kota Semarang, yang menurut sejarahnya kota Semarang didirikan oleh salah seorang jurumudi Cheng Ho.³ Dari catatan ekspedisi ini juga disebutkan bahwa Tuban dan Surabaya adalah merupakan kota yang banyak penduduk etnis Cinanya.⁴

Setelah dinasti Qing berkuasa di Cina (1644 – 1911) hubungan dagang dengan Barat mulai dibuka. Pelabuhan mereka yang pertama adalah Amoy, Kwangtung dan Fukien. Meskipun hubungan dengan bangsa Barat telah dimulai sejak tahun 1644, namun baru tahun 1786 penduduk setempat menyadari bahwa yang banyak mendapatkan keuntungan adalah bangsa Barat. Hal ini mendorong mereka untuk mengadakan migrasi ke tanah jajahan Barat, apalagi mereka mendengar bahwa di Semenanjung Malaya orang bisa mendapatkan mata pencaharian dengan upah yang lumayan.

Migrasi etnis Cina terjadi secara besar-besaran setelah terjadinya Perang Candu (1839 – 1842), yang mengakibatkan dibukanya negara Cina oleh Inggris; dan setelah terjadinya pemberontakan Tai Ping (1851 – 1865), yang mengakibatkan hancurnya perekonomian di Cina Selatan. Dengan hancurnya perekonomian di Cina Selatan maka banyak orang "terpaksa" meninggalkan kampung halamannya untuk memperoleh/mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

Perkembangan migrasi etnis Cina ke Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1 INDONESIA: POPULASI PENDUDUK DALAM BERBAGAI TAHUN
(dalam ribuan)

Tahun	Indonesia	Eropa	Cina	Arab	Asia Lain	Jumlah
1860	—	44	221	9	—	—
1870	—	49	260	12	—	—
1880	—	60	344	16	—	—
1890	—	74	461	22	—	—
1900	—	91	537	27	—	—
1905	37.348	95	563	30	—	—
1920	48.300	168	809	45	22	49.344
1930	59.138	240	1.233	71	45	60.727

Sumber: Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, 1965 hal. 386.

Dari data-data statistik yang dibuat setelah sensus penduduk tahun 1930 ternyata menunjukkan bahwa pada tahun 1860 jumlah penduduk etnis di Indonesia adalah 221.000 jiwa, tahun 1900: 537.000 jiwa, tahun 1920: 809.000 jiwa dan tahun 1930: 1.233.000 jiwa. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam waktu 70 tahun, yaitu antara tahun 1860 – 1930, jumlah penduduk etnis Cina di Indonesia meningkat lima kali lipat. Hal ini antara lain disebabkan dibukanya perkebunan dan pertambangan di Sumatera, yang membutuhkan tenaga pekerja, sehingga Belanda merasa perlu untuk mendatangkan buruh yang banyak dan murah.

Profil Cina Totok dan Cina Peranakan

Menurut beberapa ahli, golongan etnis Cina Peranakan mempunyai satu karakter tersendiri. Skinner, misalnya, berpendapat bahwa ada satu karakter yang menonjol dari golongan etnis Cina Peranakan yaitu mereka menekankan sistim nilai yang mementingkan kerajinan, kehematan, pengendalian pada diri sendiri, semangat berusaha dan ketrampilan.⁵

Istilah Cina Peranakan dan Cina Totok sebenarnya baru dikenal di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Istilah itu dipakai untuk membedakan dua ciri golongan Cina perantauan yang ada di Indonesia. Golongan Cina Peranakan dianggap yang paling tua kehadirannya di Indonesia, dengan ciri-ciri penggunaan bahasa penduduk asli setempat untuk tujuan komunikasi sehari-hari serta memiliki watak dan kebudayaan yang agak berbeda dengan Cina Totok, sehingga mereka pada umumnya dianggap bukan sebagai Cina dan bukan Indonesia. Sebaliknya Cina Totok adalah mereka yang baru datang dan menetap di Indonesia, masih berdarah Cina murni, tetap menggunakan bahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari dan masih mempertahankan kebudayaan Cina atau berorientasi ke tanah asal leluhur mereka.

Menurut Charles K Coppel dan Leo Suryadinata, kedua istilah tersebut pemakaiannya tidak selalu konsisten dan diguna-

kan dalam tiga cara yang berbeda. *Pertama*: istilah Peranakan termasuk dalam pengertian keturunan campuran ras, digunakan untuk menunjukkan perbedaan yang kontras dengan Cina Totok, yang memiliki darah Cina murni. *Kedua*, istilah Peranakan dipakai untuk membedakan orang Cina kelahiran Indonesia dari Totok yang lahir di negeri Cina dan istilah ini juga untuk menunjukkan imigran Cina yang khusus berkembang di pulau Jawa. *Ketiga*, istilah Peranakan untuk menunjukkan masyarakat dan kebudayaan Cina yang berkembang di antara imigran-imigran baru, yang telah dipengaruhi oleh nasionalisme abad ke-20, yang menarik perhatian sejumlah besar orang-orang Cina kelahiran Indonesia.⁶

Berbeda dengan Skinner, Mely G. Tan membedakan antara Cina Peranakan dan Cina Totok dalam bidang pemilihan bidang pekerjaan (lihat tabel 2) yang ternyata pemilihan tersebut mencerminkan perbedaan yang menyolok dalam orientasi nilai. Kalangan Cina Totok lebih menghargai kekayaan, kehematan, kerja, kepercayaan pada diri sendiri dan "keberanian" dari pada kaum Peranakan yang lebih menghargai penikmatan hidup, waktu senggang, kedudukan sosial dan perasaan terjamin.⁷

Tabel 2 PEMBAGIAN PEKERJAAN CINA TOTOK DAN PERANAKAN DI JAWA TAHUN 1930

(dalam %)

Pekerjaan	Totok	Peranakan
Produksi bahan mentah	1,13	14,87
Industri	27,10	16,27
Transportasi	0,97	4,16
Perdagangan	65,02	52,41
Swasta	2,43	1,87
Pegawai Negeri	0,11	0,86
Lain-lain	3,24	9,56
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesiaans The Chinese Minority and China*, hal. 80.

Karakter yang menonjol ini baik menurut Skinner maupun Mely G. Tan agaknya terbentuk di perantauan. Situasi yang mereka hadapi sesampainya di perantauan mengakibatkan mereka harus mengambil sikap agar mereka tetap *survive*. Misalnya saja pengendalian pada diri sendiri, ketika mereka tiba di tempat yang baru, mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka adalah sebagai "tamu". Karenanya mereka tidak terlalu mengharapkan kerjasama yang baik dengan pribumi setempat. Begitu pula dengan adanya perbedaan karakter Totok dan Peranakan yang dikemukakan oleh Mely G. Tan, di mana ketika Cina Totok tiba di Indonesia, Cina Peranakan sudah mempunyai kedudukan yang "established", dan banyak di antara mereka yang sudah berasimilasi dengan penduduk setempat. Keadaan ini tidak dialami oleh Cina Totok. Mereka tiba sebagai "orang baru", dan di pihak Cina Peranakan sendiri mereka dianggap sebagai saingan.

Persaingan itu pada hakekatnya memperkuat pelembagaan nilai-nilai tersebut di atas, sehingga dalam kehidupan sehari-hari para pedagang Cina menampilkan citranya sebagai pedagang yang rajin, ulet dan mempunyai kepercayaan diri yang besar.

Faktor-faktor yang mendorong golongan etnis Cina menjadi pedagang antara lain adalah adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang pada prinsipnya menghalang-halangi kontak antar masyarakat Cina dan memusatkan mereka di daerah-daerah tertentu. Pada waktu itu orang-orang Cina diharuskan untuk memperoleh surat jalan dari Gubernemen apabila mereka ingin bepergian keluar kota dan aturan-aturan Gubernemen yang memaksa mereka untuk bertempat tinggal di markas-markas khusus di kota-kota.⁸ Dalam kenyataannya daerah pemukiman mereka di Jawa disebut "Pecinan". Daerah pemukiman itu kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi pasar.

Walaupun kehidupan golongan etnis Cina dipusatkan atau dilokalisir di kota-kota, tidak berarti bahwa ruang lingkup dan peranan serta pengaruh pedagang perantara Cina yang dikenal

dengan sebutan "tauke" atau "babah" terbatas hanya di kota-kota saja. Peranan dan pengaruhnya juga memasuki jaringan hubungan perekonomian kota dengan desa-desa di sekitarnya. Arus barang perdagangan dari kota ke desa atau sebaliknya dari desa ke kota, dapat dikatakan dikuasai oleh para pedagang perantara Cina ini. Pedagang-pedagang pasar di desa biasanya mengambil barang-barang dagangannya dari pedagang-pedagang perantara Cina di kota tersebut. Bahkan menurut hemat penulis konsentrasi tempat tinggal itu tidak berarti menutup kemungkinan bagi mobilitas para pedagang Cina untuk beroperasi langsung ke pasar-pasar desa sebagai supplier jadi bukan pedagang yang langsung berhadapan dengan konsumen lokal. Sebaliknya dalam arus barang perdagangan dari desa ke kota pun peranan para pedagang perantara Cina pun cukup besar untuk diperhitungkan, terutama hasil-hasil pertanian ekspor seperti tembakau, cengkeh, dan lada. Dalam banyak hal hubungan antara pedagang perantara Cina dengan para petani tersebut melahirkan sistim ijon yang dikenal sampai sekarang ini.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda juga mengeluarkan Peraturan Pemilikan Tanah yang melarang pemilikan tanah oleh orang asing. Selanjutnya, bagi mereka tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menduduki jabatan-jabatan dalam aparat pemerintah kolonial.⁹

Faktor-faktor tersebut di atas ternyata secara tidak langsung mendorong mereka untuk mencari pekerjaan di bidang yang memungkinkan mereka untuk mencari basis-basis pekerjaan yang dapat memberikan prospek yang baik, yang menjamin ketenangan hidup dan rasa aman. Lapangan membuka pintu bagi tuntutan yang mendesak dari kalangan etnis Cina tersebut. Apalagi persaingan di lapangan perdagangan relatif kecil, sebab pedagang-pedagang pribumi yang bermunculan pada abad 16 — 17 mulai menyusut peranannya bahkan menjelang permulaan abad ke-20 peranan itu hampir lenyap sama sekali. Tabel di bawah ini menjelaskan bahwa kondisi ekonomi pada awal abad

Tabel 3

DISTRIBUSI BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN DI INDONESIA PADA TAHUN 1930

Mata pencaharian	Eropa		Cina		Pribumi	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Produksi bahan mentah	18.800	22,03	144.488	30,83	14.193.158	69,99
Industri	4.676	5,48	93.988	20,00	2.105.129	10,38
Transportasi	10.985	12,88	12.754	2,72	290.740	1,43
Perdagangan	11.415	13,38	171.979	36,60	1.090.868	5,33
Swasta	11.290	13,23	7.161	1,52	150.227	0,74
Pegawai Negeri	20.731	24,30	3.039	0,65	491.911	2,43
Lain-lain	7.424	8,70	36.126	7,68	1.957.609	9,65
Jumlah	85.321	100,00	469.935	100,00	20.279.642	100,00

Sumber: Leo Suryadinata, *op.cit.*, hal. 78

ke-20 ditandai oleh besarnya dominasi etnis Cina dalam dunia perdagangan dan kecilnya peranan pribumi di sektor tersebut.

Di lain pihak, tabel tersebut juga memperlihatkan perlunya peranan pedagang perantara, yang menghubungkan antara produsen bahan mentah dan industri dengan konsumen. Dengan demikian sebagian besar produsen bahan mentah yang terdiri dari pedagang pribumi (69,99%) memang memerlukan jasa dari kalangan para pedagang perantara untuk memasarkan hasil produksinya baik langsung ke konsumen maupun ke kalangan industri yang sebagian besar dikuasai oleh golongan etnis Cina (20,00%). Sama halnya bagi kalangan industri yang sebagian besar terdiri dari golongan etnis Cina memerlukan jasa dari pedagang perantara, apalagi saingan terbesar di bidang industri ini datang dari kalangan industrialis pribumi (10,38%). Dari gambaran sederhana ini dapat ditarik suatu kesimpulan akan besarnya peranan etnis Cina dalam perekonomian waktu itu, dan kuatnya posisi pedagang perantara Cina dalam struktur perekonomian yang berorientasi kepada pasar bebas atau perekonomian liberalisme.

Peranan Pedagang Perantara Cina

Setelah berakhirnya masa Tanam Paksa di Hindia Belanda tahun 1830 – 1870, maka dimulailah satu era baru yang dikenal dengan masa Liberalisme. Ciri utama dari jaman ini adalah digantikannya fungsi pemerintah Hindia Belanda di bidang perekonomian oleh modal-modal swasta. Mereka secara khusus bekerja sebagai pengumpul pajak, mengusahakan pegadaian, memonopoli garam dan perdagangan candu atas nama pemerintah Belanda. Dari posisi kunci ini mereka dapat memperluas jaringan kontak-kontak perdagangannya, lebih jauh ke arah peminjaman uang, perdagangan besar-besaran dan pembelian bahan-bahan pokok untuk pemasaran ekspor, meskipun mereka hanya berhasil mendapat sedikit jalan ke arah sektor-sektor kehidupan ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang Belanda, misalnya perkebunan, import-ekspor, perdagangan secara besar-besaran dan perbankan, sampai masa berakhirnya penjajah-

an.¹⁰ Di samping pekerjaan tersebut di atas, golongan etnis Cina mampu memainkan peranannya sebagai golongan menengah dalam struktur perekonomian kolonial Belanda, di mana peranan pedagang perantara ternyata mempunyai peranan penting di dalamnya (lihat tabel 3).

Pada masa itu perdagangan dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu perdagangan besar yang pada umumnya dikuasai oleh perusahaan swasta Belanda, perdagangan kecil yang pada umumnya dikuasai oleh pedagang pribumi dan perdagangan perantara sebagai penghubung antara perdagangan besar dan perdagangan kecil yang pada umumnya dikuasai oleh golongan Timur Asing dan pribumi.

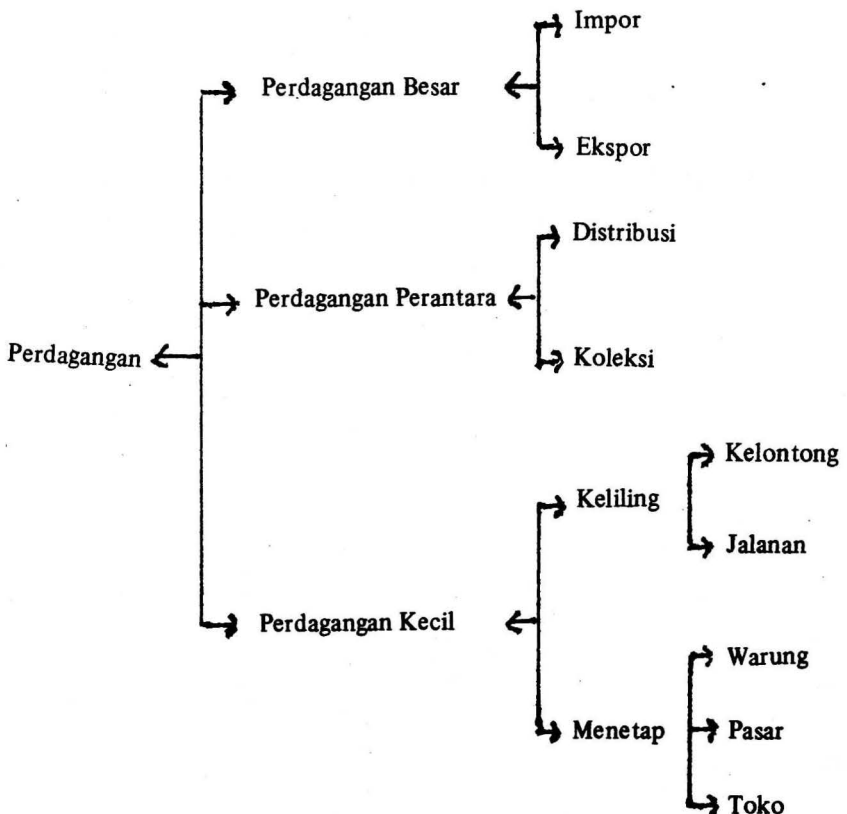
Perdagangan besar adalah suatu cabang perdagangan yang mengurus ekspor-import; perdagangan kecil adalah suatu cabang perdagangan yang membeli barang dagangan dari tangan kedua atau ketiga untuk kemudian dijual langsung ke tangan konsumen. Perdagangan perantara mempunyai dua fungsi, yaitu perdagangan distribusi dan perdagangan koleksi. Perdagangan distribusi terutama menyebarkan barang-barang konsumsi yang diimport dari luar negeri. Perdagangan koleksi terutama bertugas untuk mengumpulkan hasil-hasil tanaman dagang dari petani, langsung atau melalui pedagang kecil untuk diteruskan kepada pedagang besar. Perdagangan kecil sendiri dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu perdagangan keliling dan perdagangan menetap. Perdagangan keliling juga dapat dibagi dalam dua bagian yaitu perdagangan kelontong yang pada umumnya dikuasai oleh pedagang etnis Cina, dan perdagangan jalanan yang pada umumnya dikuasai oleh pedagang pribumi. Perdagangan menetap dibagi dalam tiga jenis yaitu warung, pasar dan toko.¹¹

Perdagangan distribusi terutama menjual barang-barang seperti tekstil, makanan dan minuman, barang-barang kelontong, beras, gula dan juga hasil produksi dalam negeri. Perdagangan koleksi terutama membeli hasil kerajinan tangan rumah tangga, hasil-hasil tanaman dagang seperti kopra, kapok, singkong, jagung, beras dan kulit. Perdagangan kelontong terutama menjual barang-barang keperluan sehari-hari seperti kaca, hasil

kerajinan tangan yang diimport dari Cina, atau benang. Perdagangan jalanan terutama menjual kebutuhan pangan penduduk seperti daging atau ikan.

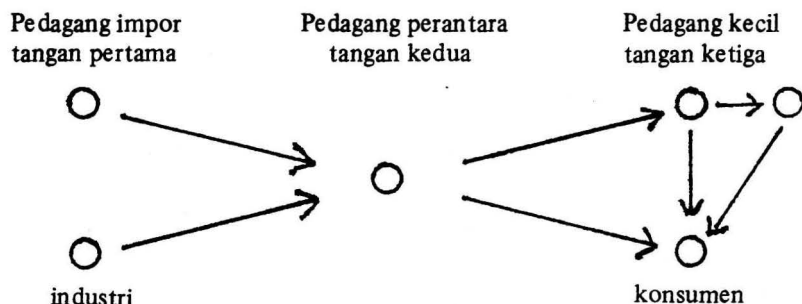
Pedagang-pedagang kelontong ini biasanya menjajakan barang-barang jadi dan barang-barang klontongan. Mereka tidak hanya berkeliling di kota-kota saja, tetapi sering pula ke desa-desa dan kampung-kampung untuk menawarkan barang-barangnya kepada penduduk. Kadang-kadang mereka menyewa kuli pribumi untuk memikul barang-barang mereka dengan pikulan.

Secara garis besar perdagangan pada waktu itu dapat digambarkan dalam skema berikut:

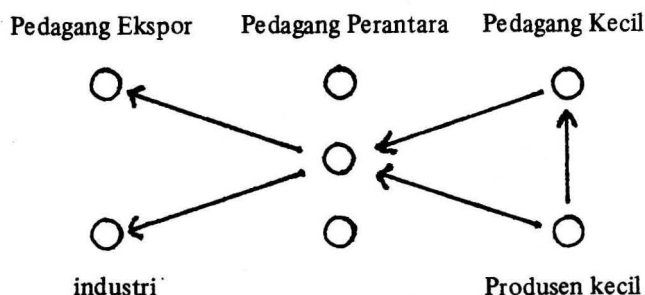


Sedangkan fungsi dari perdagangan distribusi dan perdagangan koleksi dapat digambarkan sebagai berikut:

Perdagangan Distribusi



Perdagangan Koleksi



Seperti telah disebutkan di atas, perdagangan perantara pada umumnya dikuasai oleh golongan Timur Asing dan pribumi, namun dalam hal ini yang paling dominan adalah dari golongan etnis Cina. Mengapa perdagangan perantara didominasi oleh golongan etnis Cina? Kalau kita lihat, pada kenyataannya orang Indonesia pada umumnya, khususnya orang Jawa, memiliki sedikit saja jiwa dagang. Pernitzsch menjelaskan sebagai berikut: "Orang Jawa misalnya, terutama sekali adalah petani. Kebutuhannya yang tidak seberapa besar itu dicukupinya sejauh

mungkin dengan usaha sendiri sehingga hampir-hampir tidak berkembang suatu golongan pedagang".¹²

Orang Minangkabau di pantai Barat Sumatera dan orang Melayu di Sumatera Selatan, serta beberapa suku lainnya, dalam hal ini bisa dikecualikan karena suku-suku ini terkenal dengan bakat dagang mereka. Dengan demikian di daerah-daerah tersebut peranan orang Cina relatif tidak menonjol.

Pedagang-pedagang Cina, selain menjadi penyalur barang-barang yang diimport oleh perusahaan Belanda, mereka juga mengimport barang-barang kerajinan dari Siam. Import beras dari Siam dan barang-barang kerajinan dari Cina terutama dilakukan oleh pedagang-pedagang besar yang membuka beberapa cabang di luar negeri. Barang-barang yang diimport kemudian disalurkan kepada rakyat melalui agen penyalur perusahaan mereka sendiri, atau melalui langganan tetap mereka.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pedagang etnis Cina

Golongan etnis Cina pada dasarnya bukanlah golongan pedagang, tetapi banyak faktor yang mereka temui di perantauan yang mendorong mereka untuk menjadi pedagang. Mereka yang datang ke Indonesia banyak pula yang hanya mengandalkan kemahiran dalam bidang pertukangan atau hanya bermodalan kemauan untuk berusaha, akhirnya justru menjadi pedagang besar yang sukses misalnya Tjan San Go dan Oei Tjie Sien.¹³

Tentunya timbul pertanyaan mengapa pedagang etnis Cina tersebut kebanyakan mencapai sukses di perantauan khususnya di Indonesia? Di bawah ini akan ditinjau beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi keberhasilan yang telah dicapai oleh pedagang perantara tersebut.

Pertama, tumbuhnya mobilitas idealisme dalam bentuk untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada yang mereka peroleh selama ini. Tampaknya ini berlaku baik pada yang baru datang dari negeri leluhur maupun yang sudah cukup lama menetap di Indonesia. Di daerah asal, di negeri leluhur yang agraris (Fukien dan Hokian) ancaman bencana alam ter-

utama banjir sulit untuk mengandalkan kehidupan dari sektor pertanian, dan pertambahan penduduk pun mengancam semakin sempitnya pemilikan tanah. Bagi yang sudah lama menetap (peranakan) mempertahankan dan mengembangkan bidang pekerjaan yang nampaknya adalah satu-satunya pilihan, di mana dipertaruhkan soal hidup dan mati. Dengan demikian idealisme itu dapat ditransfer ke dalam bentuk yang lebih konkrit yaitu tantangan.

Kedua, untuk menjawab tantangan itu, ajaran itu, ajaran Konfusianisme memberikan saluran guna merumuskan pandangan-pandangannya tentang dunia (*world view*) sebab pada dasarnya ajaran Konfusianisme lebih banyak mengatur hubungan horisontal dan memberikan landasan moral bagi lembaga horisontal tersebut.

Ketiga, *world view* tersebut ternyata memberikan peluang bagi munculnya ethos kerja seperti keuletan mereka dalam berusaha, rajin, tekun, dan giat bekerja.

Keempat, adanya modal yang cukup dan juga disebabkan karena faktor-faktor lain yang berasal dari pihak pribumi dan pemerintah Hindia Belanda. Dari pihak pribumi misalnya saja kurangnya modal pedagang pribumi sehingga mereka sukar bersaing dengan pedagang etnis Cina.

Kelima, pedagang-pedagang Cina hanya dapat mengembangkan usahanya di daerah-daerah yang penduduknya lebih condong untuk bercocok tanam. Di daerah-daerah yang penduduknya ulet dalam bidang perdagangan, mereka tidak dapat berkembang, misalnya di Sumatera Barat.

Keenam, faktor dari pemerintah Hindia Belanda antara lain adalah memberi kedudukan lebih tinggi kepada golongan non pribumi (Cina) daripada golongan pribumi. Undang-Undang catatan sipil kolonial menggolongkan penduduk Hindia Belanda dalam kelompok "Europeanen" (golongan Eropa), "Vreemde Oosterling" (golongan Timur Asing) dan "Inlander" (golongan pribumi). Kedudukan tersebut secara sadar menghasilkan perbedaan antara pri dan non pri yang berlanjut hingga sekarang.

Dan kedudukan istimewa bagi golongan Cina juga mengakibatkan orientasi pengabdian mereka tertuju kepada pihak penguasa dan sering berlawanan dengan kepentingan pribumi. Pemerintah Belanda juga memberikan tempat pemukiman tersendiri bagi mereka, di mana dalam pemukiman tersebut diberi pemimpin-pemimpin sendiri dengan julukan pangkat opsir seperti Kapten dan Mayor, yang sesungguhnya kepangkatan tersebut tidak ada hubungannya dengan ketentaraan kolonial. Opsir-opsir Cina tersebut menjadi perantara antara pemerintah kolonial dalam memperoleh manfaat ekonomi yang diperoleh dari golongan pribumi. Pemerintah Belanda memberikan hak-hak tertentu kepada para opsir ini seperti hak monopoli menjual candu, pengangkutan, pengambilan sumber-sumber daya alam (sarang burung, garam, dan lain-lain), hak menarik pajak, bea cukai dan lain-lain. Sistem memberi monopoli dan hak menarik pungutan ini dikenal dengan *sistim pacht*.

Di samping pemerintah Belanda memberikan kedudukan yang lebih tinggi bagi orang-orang Cina dan adanya penjualan beberapa hak monopoli pemerintah pada mereka, faktor tidak adanya hubungan langsung antara penjajah dan yang dijajah juga merupakan salah satu sebab fungsi pedagang perantara Cina menjadi semakin penting. Seperti yang dikatakan oleh Mac Nair: "Mereka adalah pemimpin dalam usaha di Hindia Belanda; mereka memegang monopoli atas perdagangan kecil, dan bertindak sebagai perantara antara importir dan eksportir Belanda dan produsen serta konsumen pribumi". Pernitzsch juga menyatakan bahwa: "Peranan orang Cina yang paling penting ialah dalam perdagangan perantara (dengan ini diartikan juga perdagangan kecil) dan kerajinan tangan: mereka tidak bisa tidak harus ada".¹⁴

Pengaruh dalam masyarakat Indonesia

Bagaimanapun pedagang-pedagang etnis Cina itu beroperasi di dalam masyarakat Indonesia yang berada di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga timbul pertanyaan sejauh

mana kehadiran pedagang-pedagang Cina menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat Indonesia pada waktu itu. Pengaruh tersebut dapat ditelusuri melalui kebijaksanaan ekonomi dan politik dari pemerintah Hindia Belanda dan kemudian memusatkan perhatian terhadap akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Kebijaksanaan ekonomi pemerintah Hindia Belanda di satu pihak mendukung masuknya modal-modal swasta Belanda di bidang perkebunan, pertambangan, transportasi, industri, sedang di pihak lain menjadikan pedagang-pedagang etnis Cina sebagai sarana untuk melakukan penetrasi ke dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pada daerah-daerah di mana dibuka perkebunan dan pertambangan baru, pedagang-pedagang Cina mendapatkan dukungan dari pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan dan menguasai sektor perdagangan. Sejak dibukanya perkebunan di sekitar Medan dan pertambangan minyak di sekitar Pakanbaru dan Palembang, menurut Mochtar Naim, perdagangan dikuasai oleh golongan etnis Cina yang mendapatkan saingan dari pedagang-pedagang Minangkabau dan Melayu.¹⁵ Begitu pula halnya yang terjadi di pulau Jawa ketika dibukanya perkebunan dan pabrik-pabrik gula, kina, dan kopi. Di Jawa relatif pedagang etnis Cina tidak mendapatkan saingan yang berarti dalam bidang usahanya. Tetapi justru di pulau Jawa lah pedagang-pedagang etnis Cina itu memperoleh perlawanan politis.

Penetrasi dengan memakai pedagang golongan etnis Cina itu, tampaknya bertujuan untuk melumpuhkan basis perekonomian sebagai sarana mobilitas vertikal dari masyarakat Indonesia terutama di Jawa. Perdagangan sebagai basis mobilitas memungkinkan timbulnya kelas menengah yang mempunyai kesempatan untuk mengadakan pembaharuan atau perubahan sosial politik menggantikan struktur sosial yang monolitik, — priyayi dan wong cilik.¹⁶ Dari kenyataan yang ditemukan, kelas pedagang dari kalangan pribumi itu kebanyakan berasal dari kalangan Islam yang tersebar di sepanjang pantai pulau Jawa. Dengan demikian gerakan-gerakan politik Islam di Jawa akan ke-

hilangan sumber-sumber dukungan politik. Di sinilah dapat dipahami pertautan antara kebijaksanaan politik dan ekonomi pemerintah Hindia Belanda.

Ternyata reaksi terorganisir yang keras terhadap dominasi etnis Cina di dunia perdagangan itu muncul dari golongan Islam. Sarekat Dagang Islam, yang dengan tegas menempatkan pedagang etnis Cina sebagai lawan utamanya. Walaupun Sarekat Dagang Islam kemudian berubah menjadi Sarekat Islam, sikap anti pedagang Cina itu masih kuat. Huru-hara anti Cina yang dimotori Sarekat Islam muncul di Kudus pada bulan Oktober 1918 dipimpin oleh Hadji Djoepri yang menghancurkan 50 buah rumah milik Cina dan 8 orang Cina dibunuh, sebagian besar di antaranya mati dibakar, dan sekitar 2.000 orang Cina melarikan diri ke Semarang.¹⁶

Dalam proses perkembangan selanjutnya pedagang etnis Cina ini menanamkan pengaruhnya ke kalangan atas masyarakat Indonesia yaitu kalangan pangreh praja, sebuah sarana dari pemerintah Hindia Belanda untuk memerintah secara tidak langsung. Para bupati sering kemudian menjadi tergantung kepada rentenir, biasanya Cina, atau jatuh ke dalam hutang yang besar, sehingga pangreh praja itu tergelincir dalam pelbagai bentuk pemerasan yang oleh orang-orang Belanda dinamakan korupsi.¹⁷

Dengan demikian pengaruh pedagang Cina itu hampir dapat dikatakan meluas ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari lapisan bawah sampai ke lapisan atas. Perbedaan ekonomi dan kultural antara kedua belah pihak nampaknya merupakan faktor yang berperan dalam melahirkan pembagian dan sentimen ras, pribumi dan non pribumi.

Penutup

Keberhasilan pedagang Cina sebagai pedagang perantara di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keuletan mereka dalam berusaha saja, melainkan ditunjang oleh berbagai hal antara lain adanya kesempatan yang dapat mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kesempatan tersebut dapat mereka manfaat-

kan karena adanya modal yang cukup. Kesempatan tersebut mereka dapatkan akibat kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pengaruh mereka pun dalam perkembangan selanjutnya meluas ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari lapisan bawah sampai ke lapisan atas.

DAFTAR CATATAN

1. Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, hal. 11.
2. *Ibid.*, hal. 15 – 16.
3. Donald Willmott, *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia*, hal. 1 – 2.
4. Purcell, *op. cit.*, hal. 24.
5. Mely G. Tan, (ed.), *Golongan etnis Tionghoa di Indonesia* hal. 2.
6. Coppel dan Leo Suryadinata, "An Historical Survey" dalam majalah *Far Eastern History*, no. 2, September 1970.
7. Mely G. Tan, *op. cit.*, hal. 11.
8. Tan Giok Lan, *The Chinese of Sukabumi*, hal. 4 – 11.
9. Mely G. Tan, *op. cit.*, hal. 30.
10. Purcell, *op. cit.*, hal. 47.
11. Liem Twan Djie, *De Distribueerende Tusschenhandel der Chinezen op Java*, hal. 4 – 11.
12. Mely G. Tan, *op. cit.*, hal. 36.

13. Willmott, *op. cit.*, hal. 47 – 50.
14. Mely G. Tan, *op. cit.*, hal. 36.
15. Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi suku Minangkabau*, hal. 102 – 105.
16. Lance Castles, *Tingkah laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, hal. 103.
17. Heather Sutherland, *Terbentuknya sebuah Elite Birokrasi*, hal. 63.

DAFTAR PUSTAKA

1. Castles, Lance, *Tingkah laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa : Industri Rokok Kudus*, Jakarta, Sinar Harapan, 1982.
2. *Far Eastern History*, no. 2, September 1970.
3. Liem Twan Djie, *De Distribueerende Tusschenhandel der Chineezzen op Java*, 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1947.
4. Mely G. Tan, (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1979.
5. Naim, Mochtar, Dr., *Merantau : Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1979.
6. Purcell, Victor, *The Chinese in Southeast Asia*, London, Oxford University Press, 1951.
7. Suryadinata, Leo, *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*, Kuala Lumpur, Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1978.

8. Sutherland, Heather, *Terbentuknya sebuah elite birokrasi*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.
9. Tan Giok lan, *The Chinese of Sukabumi*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1963.
10. Willmott, Donald E., *The Chinese of Semarang : A Changing Minority Community in Indonesia*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1960.

BEBERAPA FAKTOR KESEJARAHAN SEBAGAI PENYE- BAB "MOBILITAS EKONOMI" MASYARAKAT CINA DAN PENGARUHNYA BAGI ORANG MELAYU : SUATU STUDI KASUS DI SUMATRA TIMUR PADA PERTENGAHAN ABAD KE 19 SAMPAI PEREMPATAN AWAL ABAD KE - 20

Oleh : Azhar Djohan

Keberhasilan yang dicapai masyarakat Cina dewasa ini dalam lapangan ekonomi, tentu saja disebabkan oleh multi faktor alasannya. Diantara sekian banyak motif yang memungkinkan terjadinya "mobilitas ekonomi" itu adalah dikarenakan faktor Sejarah. Dalam tulisan makalah ini akan diketengahkan gambaran sejarah orang-orang Cina yang berada di daerah Sumatera Timur (bahagian wilayah Sumatera Utara sekarang), terutama kelompok imigrannya yang hadir ke daerah itu sekitar pertengahan abad ke 19 sampai perempatan awal abad ke 20.

Sesungguhnya kesuksesan orang-orang Cina dalam bidang telah dimulai jauh sebelum kehadiran pemerintahan Kolonial Belanda ke daerah Sumatera Timur. Atas keberhasilan dan Kemauan yang keras sehingga mereka berhasil dalam sektor perdagangan di Asia Tenggara atau sebagai "The trading minorities", maka dianggap oleh Wertheim ia sejajar dengan posisi

orang-orang Yahudi di Eropa ataupun sepadan dengan orang-orang Armenia dan Turki dalam abad ke 19.

Selain dari pada itu yang paling urgen disorot dalam makalah ini adalah karena disamping kesuksesan yang dialami oleh sebahagian orang-orang Cina di daerah Sumatera Timur sebelum kedatangan Belanda, namun sesudah kedatangan kolonial Belanda terdapat pula disana mobilitas ekonomi mereka termasuk kelompok orang Cina yang berada pada lapisan sosial yang paling bawah (lower class) dalam strata ekonomi yaitu kelompok masyarakat atau golongan orang Cina yang berasal dari kaum buruh. Memang tidaklah semua dari mereka sanggup menerobos untuk naik ke tangga kelas elite ekonomi, namun paling sedikit dengan adanya beberapa tokoh elite ekonomi seperti Tiong A Fie, Tan Tek Hong dan sebagainya mewakili (yang berasal) dari kaum buruh,² memberikan petunjuk adanya mobilitas ekonomi pada sebahagian orang-orang Cina dari lapisan bawah di daerah Sumatera Timur. Berdasarkan fakta yang dilacak dapatlah diajukan bahwa bolehlah dikatakan ia merupakan suatu fenomena yang unik lagi kompleks baik dalam sejarah lokal Sumatera Timur maupun di dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu perlu diketengahkan pula kiranya untuk meninjau faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi mobilitas ekonominya.

Berdasarkan sumber historis yang ditemukan, maka dapatlah disajikan faktor-faktor penyebabnya. Adapun alasan yang mendorong mobilitas tersebut adalah antara lain: kegigihan dan ketekunan kerja, pengaruh kebijaksanaan Belanda, sistem kekerabatan dan filsafat hidup masyarakat Cina sendiri. Semua komponen-komponen yang diajukan itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, ia saling kait-berkait atau jalin-menjalin yang membentuk suatu kesatuan yang dapat mendorong kenaikan tangga di sektor ekonomi.

Tidak dapat disangkal lagi karena memang sudah menjadi gejala yang bersifat universal, bahwa bila seseorang ingin memperoleh suatu keberhasilan yang diidam-idamkan diperlukan

suatu perjuangan yang gigih tekun lagi ulet. Oleh karena sifat gejalanya sudah berlaku di mana-mana, maka itu pulalah sebabnya dianjurkan pada setiap manusia untuk berusaha lebih rajin agar memperoleh keberhasilan. Walaupun demikian kondisi pada setiap individu maupun kelompok tidaklah sama tingkat atau derajat kerajinannya, dalam arti ia sangat dipengaruhi oleh faktor nilai budaya yang dianut serta lingkungan mana mereka berada.

Suatu hal yang cukup menguntungkan bagi kaum imigran Cina yang berada di daerah Sumatera Timur ketika mereka tiba, terdapatnya *"occupational gap"* dalam bidang perdagangan perantara.³ Sebelum kehadiran Belanda dan imigran Cina ke daerah itu, fungsi pedagang perantara juga dilakukan oleh para pedagang Melayu terutama kaum bangsawannya. Namun kemudian jabatan ini secara perlahan-lahan mulai beralih kepada para pedagang Cina. Peralihannya salah satu penyebab adalah karena kurang mampu para pedagang Melayu dalam berkontes dengan kaum pedagang Cina. Akibat disaingi oleh pedagang-pedagang Asing terutama pedagang Cina, maka para pedagang Melayu yang sudah berkembangpun mulai memudar.

Dengan semakin berkurang jumlah orang-orang Melayu yang melibatkan diri mereka di sektor perdagangan perantara, maka semakin banyak pula orang-orang Cina menggantikan, sehingga pada akhirnya kedudukan itu dikuasai oleh orang-orang Cina. Tugas pedagang perantara adalah menyalurkan barang-barang antara pihak pribumi dengan pedagang Belanda atau pedagang besar asing lainnya. Pedagang-pedagang besar pada mulanya hanya dikuasai orang-orang Belanda tetapi kemudian kedudukan ini juga dipegang orang-orang Cina. Akibat kekosongan atau kurang diisinya fungsi pedagang menengah (perantara) oleh pihak Belanda, adalah karena mereka pada umumnya menguasai dan berperan pada perdagangan besar dan lembaga-lembaga administrasi negara pemerintahan kolonial Belanda. Selain dari pada itu keengganan orang bumi putera (Melayu)

melibatkan diri mereka bekerja sebagai pedagang, karena menurut anggapan mereka jabatan pedagang, seyogyanya hanya pantas dilakukan oleh kaum bangsawan ataupun golongan aristokrat.⁴ Kedua golongan ini (para bangsawan dan aristokrat), memang kurang melibatkan diri mereka dalam kegiatan perdagangan, oleh karena ia lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada urusan-urusan birokrasi. Selain dari pada itu, kurangnya minat mereka terhadap kegiatan perdagangan disebabkan karena ia telah banyak mendapat hadiah atau upeti sebagai pengabdian rakyat terhadap mereka. Hadiah yang lainnya juga ia dapati dari pemerintahan kolonial Belanda berupa bonus dari hasil penyewaan tanah. Faktor menyebabkan keengganan lain yang tidak dapat diungkiri adalah karena pada umumnya orang-orang Melayu lebih senang bekerja sebagai penggarap untuk pertanian. Alasan ini memang logis sebab areal tanah untuk pertanian cukup banyak walaupun tidak dapat dikatakan berlimpah-limpah.

Bertalian dengan hal yang dikemukakan di atas dapatlah disebutkan bahwa keadaan lingkungan (daerah Sumatera Timur) yang didatangi kaum imigran Cina, memberikan peluang yang cukup baik dalam mendorong mereka memilih pekerjaan sebagai pedagang dalam kehidupannya. Dengan demikian mereka yang akan datang ke daerah Sumatera Timur yang bukan kuli kontrak memilih kehidupan bisnis sebagai mata pencahariannya. Sedangkan kaum buruh atau kuli kontrak Cina pada umumnya baru terjun ke lapangan perdagangan setelah ikatan atau janji kontrak usai.

Dengan digunakannya orang-orang Cina sebagai pedagang perantara, maka ini merupakan jalan yang cukup efektif bagi usaha pengembangan aktivitas bisnis mereka.⁵ Keefektifannya lebih mantap lagi karena ada keselarasan antara aktivitas atau kegiatan kerja yang cukup tangguh dalam berusaha — dalam pengertian secara makro, sebab ada juga orang-orang Cina yang kurang gesit dalam bekerja — yang dimiliki oleh orang Cina sendiri dengan beberapa kebijaksanaan politik kolonial Be-

landa yang memberikan angin segar bagi perkembangan ekonomi orang-orang Cina di daerah Sumatera Timur. Menurut Stephen Enke dalam bukunya *Economics for Development* (1963), memang ada korelasi yang cukup erat antara perkembangan ekonomi yang semakin sehat (berkembang dan mantap) dengan kebijaksanaan atau kemauan politik pemerintah, dalam hal ini penguasa.⁶ Hal semacam ini, namun tidak sepenuhnya berlaku tetapi sekurang-kurangnya terpotret dari beberapa kebijaksanaan Belanda terhadap masyarakat Cina. Diantara beberapa kebijaksanaan pemerintahan Belanda yang telah memberikan keuntungan pada orang-orang Cina adalah sistem Diskriminasi rasial antara orang Barat, Timur asing dan masyarakat bumi putera. Sistem diskriminasi rasial oleh Wertheim lebih populer dengan sebutan *colonial caste structure* (struktur kasta penjajah).⁷ Pelapisan masyarakat Indonesia pada waktu itu didasarkan kepada sistem pelapisan ras. Lapisan yang pertama pada tingkat atas adalah orang-orang Belanda dan orang-orang Barat lainnya, yang kedua semua golongan Timur asing termasuk orang-orang Cina, sedangkan masyarakat pribumi berada pada anak tangga yang paling bawah dalam struktur masyarakat.

Pembedaan masyarakat Indonesia berdasarkan diskriminasi rasial seperti yang diajukan di atas, secara tidak langsung telah memberikan sumbangan terhadap masyarakat Cina, termasuk di bidang perdagangan. Pengaruh yang positif bagi masyarakat Cina juga dirasakan oleh anggota mereka yang mendiami daerah Sumatera Timur. Dengan diberikan atau digunakannya orang-orang Cina sebagai pedagang perantara oleh pemerintahan Belanda, maka mereka telah pula menerima fasilitas khusus seperti penerimaan dana berupa uang, izin berdagang terutama candu, bahkan memberikan fasilitas untuk kegiatan urusan bisnis sampai ke Penang, Singapura dan Hongkong.⁸ Di sisi yang lain (bagi para pedagang Melayu) kurang mendapat fasilitas dari pemerintah kolonial Belanda, sehingga dengan demikian mengakibatkan melemahnya mereka dalam bersaing dengan para pedagang Cina.

Adapun usaha yang lainnya dilakukan pemerintahan kolonial Belanda dalam membina ekonomi perdagangan bagi orang Cina khususnya para buruh, adalah anjuran pemerintahan Belanda melalui tuan-tuan kebun agar supaya kepala koordinato buruh Cina (tandil) untuk membuka kedai. Selain itu para buruh diwajibkan pula berbelanja di tempat itu walaupun dengan harga yang cukup tinggi.⁹

Kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda di tingkat pusat yang telah memberikan pengaruh yang cukup positif bagi ekonomi perdagangan orang-orang Cina adalah undang-undang agraria di tahun 1870. Sebenarnya undang-undang ini ditujukan untuk membatasi pemilikan tanah oleh orang asing termasuk orang Cina. Dengan perkataan lain ia bertujuan untuk melindungi hak milik tanah para petani terhadap penguasanya oleh penduduk yang bukan pribumi. Dengan batasan pemilikan tanah di luar kota bagi orang Cina, memberikan efek terpusatnya mereka tinggal di daerah perkotaan. Penyebaran penduduk Cina di daerah Sumatera Timur, kebanyakan mereka bermukim di kota-kota besar seperti Medan, Tanjung Balai, Pematang Siantar dan lain-lainnya. Konsentrasi semacam ini terutama terjadi ketika kaum imigran Cina menyelesaikan masa kontraknya, selain itu juga ada orang Cina yang tiba ke daerah itu secara bebas untuk mencari lapangan pekerjaan baru.

Faktor lain yang dapat mengakibatkan terputusnya warga Cina di daerah perkotaan adalah disebabkan adanya hambatan yang dikenakan bagi mereka. Hambatan-hambatannya tercermin pada kesukaran mereka dalam menguruskan surat administratif menyewa tanah, yang mana ia harus mempunyai uang jaminan harta ataupun sesuatu yang dapat digaransikan untuk mendapatkan tanah, bahkan itu pun diizinkan hanya sebagai hak pakai saja.

Sebagai akibat pemusatan golongan orang Cina bermukim di kota-kota, maka terbuka kesempatan bagi mereka untuk memilih diferensiasi kerja yang bersifat kekotaan yaitu di lapangan

perdagangan dan kepegawaian. Oleh karena mereka pada umumnya kurang memperoleh pendidikan yang memadai, maka hanya terbuka satu jalur lapangan kerja yaitu di bidang perdagangan.

Di kota-kota Sumatera Timur seperti Medan, Tanjung Balai dan Pematang Siantar tampak di jalan-jalan utamanya ditemukan toko-toko yang dimiliki orang-orang Cina. Di kota Bengkalis, didapati pula para pedagang Cina banyak memainkan peranan di sektor perdagangan kayu. Pabrik atau perusahaan industri yang didapati di kota-kota itu juga kebanyakan dimiliki oleh orang Cina.¹⁰ Efek konsentrasi pola pemukiman orang-orang Cina di daerah perkotaan, dapat memberikan peluang emas bagi pelebaran jaringan perdagangan antara kota yang satu dengan yang lainnya. Pengaruh dari kerja sama yang harmonis dan solidaritas yang mendalam dengan semangat tolong-menolong sesama mereka merupakan nilai yang berharga untuk mempercepat mobilitas kegiatan bisnis perdagangannya. Usaha-usaha kerja sama dalam kegiatan bisnis sampai ke Singapura, Penang dan Hongkong yang dilakukan oleh A Fie, Tan Tek Hong dan Seng Hap sedikit banyaknya merupakan manifestasi dari kuatnya ikatan kekerabatannya. Memang seperti yang sudah pernah diungkapkan oleh Olga Lang bahwa sistem kekerabatan masyarakat Cina sangat mempengaruhi berbagai aktivitas serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik atau kebudayaan pada keseluruhannya.¹¹ Di sini tentu saja tidak disorot interelasi antara sistem kekerabatan dengan kehidupan sosial politik, karena ia bukanlah titik sorotan pembahasan dalam studi ini.

Adanya korelasi antara sistem kekerabatan dengan tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari terpantul pada hubungan yang cukup intim dalam perkongsian. Perlu diutarakan, bahwa kongsi bukanlah kesatuan kekerabatan, tetapi ia (perkongsian) sangat mencerminkan pola kesatuan kekerabatan, yang mana dalam suatu kongsi anggota-anggotanya berdasarkan ikatan kekerabatan. Karenanya tidaklah mengheran-

kan mengapa perkongsian orang-orang Cina ini dalam hubungan kerjanya sangat intim dan bersifat eksklusif. Memang, perkongsian untuk yang pertama kalinya dibentuk di negeri Cina sana, didasari atas rasa kebersamaan dalam kelompok kekerabatan mereka. Bentuk unit perkongsian yang paling kecil kadang kala hanya terdiri dari satu keluarga saja, misalnya keluarga petani, pertukangan dan saudagar-saudagar kecil, yang merupakan unit produksi dalam keluarga, kongsi kecil ini yang membentuk toko-toko kecil, dikepalai oleh sang ayah ataupun kakeknya, sedangkan anak maupun cucunya bekerja sebagai stafnya.¹² Rasa kebersamaan dan tolong menolong merupakan landasan inti dari lahirnya suatu perkongsian. Pada mulanya perkongsian hanya berkisar dalam hal mengumpulkan dana uang yang mereka pada bank industri kecil dan kemudian dapat pula dibagikan saudaranya yang sangat membutuhkan.

Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perkongsian telah meliputi berbagai aktivitas perdagangan. Badan perkongsian yang pertama di tanah Deli, mulanya bergerak hanya bertujuan untuk menampung keluh kesah ataupun derita yang dialami kaum buruh atas perlakuan yang kurang baik dari pihak majikan. Selain dari pada itu ia berusaha juga untuk memenuhi kepentingan para buruh seperti penyimpanan uang bagi kepentingan dana penjemputan keluarganya. Di lain pihak perkongsian tersebut berfungsi sebagai tempat simpanan uang bagi kepentingan pembentukan modal di kemudian hari.

Tujuan yang lainnya dari manfaat perkongsian adalah untuk melindungi usaha-usaha kegiatan perdagangan mereka terhadap saingan-saingannya, sehingga dengan demikian perkongsian semakin berkembang lagi mantap dan bergerak secara lebih leluasa. Kerja sama yang harmonis bukan hanya di lingkungan kota-kota Sumatera Timur, tetapi malahan juga menjangkau ke daerah yang lebih luas, yaitu dengan para pedagang emas dan perak di kota Penang, Singapura dan Hongkong. Pembinaan jaringan perdagangan yang lebih luas, di samping disebabkan oleh bermacam faktor misalnya motif-motif yang bersifat ko-

mersial, tetapi juga tidak dapat dilupakan karena ingin membantu sanak saudara yang seetnisnya dan handai tolan sekera-batnya. Fenomena semacam ini dibuktikan dengan adanya perusahaan-perusahaan perdagangan yang menampakkan rasa solidaritas kesukumannya, dengan menampilkan nama suku mereka, misalnya perkongsian yang bergerak dalam bidang keuangan yaitu bank Hokkian, Bank Hakka dan sebagainya. Adapun kongsi-kongsi lainnya yang cukup terkenal di daerah Sumatera Timur adalah kongsi Hwa yang Direktornya Lim Kim Sui, kongsi Lauw A Kong, yang bergerak di bidang perhotelan dan kongsi Sin Tiong Hin yang membuka cabang-cabangnya di Pematang Siantar, Tanjung Balai dan kota-kota yang lainnya.

Selain dari pada itu, di Sumatera Timur dijumpai pula suatu bentuk perkongsian Cina yang membuat nama pengenal perusahaan (kongsi), mereka ambil dari nama turunan ayah dan daerah asalnya. Nama itu berdasarkan tradisi legendaris garis patrilineal dari semua Tan's, Oei's dan seterusnya. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan di sini nama perusahaan keluarga Tan's yang bernama Intjoan yaitu nama yang diambil berdasarkan sejarah nama dari Propinsi Fuhkien (Hokkian). Tujuan pemberian nama perusahaan yang seragam, berdasarkan nama turunan ayah dan daerah asal mereka adalah untuk memudahkannya (orang Cina) dapat membantu sanak keluarga mereka.^{1 3}

Perlu diutarakan lagi di sini, bahwa sistem kerja dari suatu perkongsian didasarkan kepada suatu organisasi rahasia. Inilah salah satu faktor yang tidak dapat dilupakan mengapa perkongsian atau perusahaan perdagangannya berhasil dan berkembang dengan baik. Untuk menjaga kerahasiaan perusahaan Cina ini para-para anggotanya bersumpah setia tidak akan membuka atau menceritakan kepada orang lain hal-hal yang bersifat rahasia perkongsian mereka. Sifat kerahasiaannya terutama mengenai teknik kerja, yang mana ia bergerak semacam mafia, sehingga sulit untuk menelusuri bagaimana sesungguhnya aktivitas dagang yang mereka tempuh dalam memperoleh keberhasilan. Dengan demikian dapatlah kiranya dikatakan, bahwa sikap soli-

daritas serta kesanggupan merahasiakannya adalah alat penunjang untuk mencapai kesuksesannya bagi kongsi orang Cina. Kerahasiaan itu jugalah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan yang lainnya sulit menyaingi atau mematahkan aktivitas bisnis perusahaan Cina yang bercorakan mafia tadi.

Di sini patut pula diberikan contoh badan perkongsian yang bergerak semacam mafia di Daerah Sumatera Timur (di Deli dan Karimun) seperti telah diamati oleh Grafland. Dalam pengamatannya dia sungguh kagum menyaksikan betapa hebatnya kerja sama yang dijalin dengan penuh kekeluargaan sesama para anggota perkongsian itu. Akibat keintimannya dalam menjalankan suatu kongsi yang mana hanya terdiri dari beberapa keluarga, ia sanggup membendung tekanan perusahaan yang lebih besar.

Memang sukar untuk mengetahui bagaimana cara keberhasilan yang dicapai oleh kongsi Cina ini, yang jelas kesuksesan dengan bermacam cara, misalnya menentukan harga pasaran bersama, berusaha membantu sesama famili mereka terutama keluarganya yang miskin dalam memperjuangkan nasibnya. Selain itu usaha menghindari kebocoran mengenai data perusahaan yang bersifat dokumen seperti misalnya surat-surat perjanjian dagang dan lain sebagainya orang-orang Cina tidak melakukan komunikasi tulisan dalam kegiatan bisnisnya melainkan ia lakukan dengan cara lisan. Bilamana suatu perkongsian sering menjalankan usahanya hanya berdasarkan perjanjian lisan tanpa suatu ikatan yang tertulis tanpa akte, maka bentuk perkongsian semacam itu lebih populer dinamakan dengan kongsi mulut.

Data-data hasil dari suatu penelitian yang dikemukakan ini, memberikan suatu indikator bahwa orang-orang Cina di daerah Sumatera Timur sebagai perantau, memiliki sifat ketangguhan yang melebihi penduduk asli secara umum, (karena ada juga orang Melayu yang giat, misalnya Hang Tuah) sehingga memungkinkan mereka lebih berhasil di sektor perdagangan. Lain halnya dengan orang-orang Melayu yang kurang menghadapi tantangan, oleh karena memiliki tanah, tempat tinggal serta

lapangan pekerjaan sendiri yaitu paling tidak tanah garapannya. Oleh karena kurang menghadapi tantangan mereka, dapat memberikan efek menurunnya inisiatif kerja, dengan demikian merendahkan intensitas penghasilan yang dicapai bila dibandingkan dengan orang-orang Cina. Kekurang dinamisan orang Melayu dapat dilihat berdasarkan keengganan mereka untuk bekerja di perkebunan-perkebunan sebagai kerja sampingan. Untuk menunjukkan kekurang gesitan orang Melayu dapat disajikan seperti kutipan di bawah ini:

. . . . De Maleier wordt over 't geheel beschreven als vriendelijk van aard, in zijn manieren beleefd en ongedwongen De Maleier is in omgang niet onderdanig, tegenover vreemdelingen iets terughoudend en wantrauwend, hoewel hij dat niet doet uitkomen. Hij is moedig en betrouwbaar in het uitvoeren van en taak, maar daarnaast verkwistend, leent gaarne geld en is laksch in het terugbetalen De Maleier ter Ooskust zijn niet dom, maar wel vadsig en verwaand 14A

Walaupun demikian tidaklah semua dari orang Melayu dapat dikategorikan sebagai pemalas karena ada juga di antara mereka yang rajin seperti yang ditunjukkan oleh Said Husen Al atas.^{14 b} Namun karena di daerah mereka sedikit-tidaknya mempunyai sedikit fasilitas, maka akibatnya ia kurang lincah atau gesit dalam berusaha. Gejala ini merupakan faktor penghambat baginya untuk mencapai keberhasilan dalam membina modal. Alasan ini disebabkan karena pengumpulan modal memerlukan inisiatif kerja yang rajin, tekun dan hemat.

Perlu kiranya disampaikan di sini, bahwa sifat rajin yang dimiliki oleh orang-orang Cina di daerah Sumatera Timur telah pula diberitakan dalam surat kabar *Pewartu Deli*. Tujuan pemberitaannya digunakan sebagai cambuk atau cemeti bagi masyarakat bumi putera (termasuk orang Melayu) agar supaya sifat baik dalam hal ini kerja rajin perlu diteladani untuk mencapai keberhasilan di masa depan:

. . . Orang Tjina datang ke tanah air kita dengan kain sepersalin sadja, sesampai di sini dengan tiada maloe, ada jang berdjadja kadtang goreng, ada jang mendjoel-djoel botol kosong, ada poela jang berdjadja sajoer majoer dan lain-lain. Dengan djalan demikian ia dapat poela mengoempeelkan oeang jang diperolehnja ditanah air kita ini djoega, tiada beberapa lama dia soedah dapat memboeka kedai ketjil, lama kelamaan soedah makin bertambah-tambah, ke-soedahannja sehingga mendjadi radja orang,”¹⁵

Para buruh Cina yang bekerja di perkebunan-perkebunan juga menunjukkan kerajinannya. Di samping tugas utamanya sebagai tenaga kerja perkebunan, tidak lupa ia menyambil kerja tambahan misalnya memelihara ternak babi dan menanam sayur-sayuran. Pekerjaan sambilan seperti ini bukan hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja, malahan juga dilakukan (dikerjakan) kaum wanita.

Adanya inisiatif kerja yang dimiliki orang-orang Cina di daerah Sumatera Timur dapat diamati lagi dari berbagai aktivitas yang ia lakukan, misalnya aktif terlibatnya mereka sebagai pedagang perantara, dibukanya kedai-kedai sebagai kerja sambilan di samping kerja utamanya sebagai buruh pada perkebunan, adalah merupakan indikator-indikator bahwa orang Cina mempunyai sifat kerja yang gigih, tekun dan ulet dalam berusaha.

Tentu saja dalam hubungan keberhasilan yang dicapai oleh orang Cina, kita tidaklah dapat melupakan bahwa ada suatu motor penggerak yang menyebabkan kerajinan atau motif berusaha yang dimilikinya. Di samping semua faktor yang telah diungkapkan pada halaman-halaman yang lampau, di sini perlu kiranya ditonjolkan bahwa bermigrasi dengan alasan ekonomi memang dapat menciptakan semangat rajin yang lebih kuat dalam berusaha.

Bertalian dengan hal yang dikemukakan di atas, memang salah satu faktor kehadiran orang-orang Cina ke daerah Sumatera Timur adalah bermotifkan ekonomi. Keadaan negeri luhurnya sebelum mereka datang, sering sekali terjadi pemberon-

takan dan peperangan. Di antara pemberontakan yang cukup dikenal adalah perang Candu (1839–1842), pemberontakan Ta'iping (1851–1864), dan pemberontakan Boxer yang berlangsung pada 1899–1900.¹⁷ Kesemua pemberontakan ini dapat menimbulkan kegoncangan atau ketidak-stabilan politik dalam negara itu, bahkan ikut pula mengundang keparahan kondisi ekonominya. Dengan merusaknya sendi-sendi ekonomi penduduk, atau parahnya kondisi ekonomi yang melanda negeri Cina, maka ini merupakan salah satu faktor pendorong yang cukup potensial untuk bermigrasinya orang-orang Cina ke daerah Sumatera Timur.

Semangat merantau dapat membina mental perjuangan yang gigih dan merupakan modal yang cukup penting juga untuk mencapai kesuksesan termasuk di sektor ekonomi. Ketidadaan harta, mendorong orang Cina berusaha lebih rajin, karena ia berpendapat, bila tidak berusaha rajin bukannya tidak mungkin akan mengalami kesengsaraan di perantauan. Oleh karena itulah kelihatannya mereka kurang mengenal apa yang disebutkan dengan "jiwa pasrah" dalam menghadapi tantangan hidup.

Sebenarnya memang filsafat hidup orang-orang Cina sendiri sangat mementingkan kehidupan duniawi semata-mata. Selain dari pada itu ajaran hidupnya mengutamakan atau menganjurkan agar setiap manusia berusaha keras demi mencapai keberhasilan. Hal itu telah diungkapkan dari hasil study Harry T. Oshima seorang ahli ekonomi Cina berkebangsaan Jepang. Adapun pendapatnya itu seperti tertera pada kutipan di bawah ini:

... Confucianism contained a system of ethics which emphasized the duties and obligation of rulers and ruled, of members of families, of appropriate behavior in life on earth . . . Confucius stress on hard work . . .¹⁸

Memang ajaran Confucius bukanlah suatu agama melainkan suatu filsafat sosial yang meliputi atau berhubungan dengan moral, kekeluargaan dan secara lebih luas mengatur masalah-

masalah ketatanegaraan.¹⁹ Jadi dengan demikian filsafat hidup orang Cina telah mendukung mentalitas berusaha secara lebih tangguh, di mana hal semacam ini sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

Suatu hal yang sangat menguntungkan bagi orang Cina yang berada di daerah Sumatera Timur adalah mereka lebih dapat memusatkan perhatiannya kepada kegiatan bisnis dan pekerjaan buruh semata-mata, sedangkan bagi sahabat-sahabat mereka di negara leluhur sana, perhatiannya tidak semata-mata dicurahkan kepada kepentingan ekonomi perdagangannya saja malahan ditambah lagi dengan berbagai aktivitas tugas-tugas yang bersifat kenegaraan.

Selain dari pada itu nilai filsafat hidup mereka yang memberikan manfaat terhadap tingkah laku ekonomi, khususnya lagi di bidang perdagangan adalah kecintaan mereka terhadap tanah airnya. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Cina adalah satu kekeluargaan, atau dia juga berpendapat negeri leluhur Cina merupakan pusat peradaban dunia.²⁰ Kecintaan terhadap nenek moyangnya bolehlah dikatakan satu faktor yang dapat mengikat orang-orang Cina di perantauan, walaupun mereka bukanlah satu etnis, bahkan ada yang bukan warga negara langsung (kelahiran di perantauan) tanah leluhurnya. Nilai kecintaan terhadap negeri leluhurnya berdasarkan ajaran Confucius yang mengajarkan azas familisme bagi keseluruhan dunia di mana negeri Cina merupakan titik sentrumnya. Ikatan kekeluargaan besar yang mewadahi suatu persaudaraan orang-orang Cina di kawasan politik kolonial Belanda, ataupun orang Cina yang berada di seberang lautan (the Chinese overseas) adalah terhimpun dalam suatu organisasi besar bernama Tiong Hoa Hwe Koan. Organisasi perkumpulan Cina ini didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1900.²¹ Dengan adanya organisasi orang-orang Cina itu menambah sentimen nasionalnya sehingga memperkuat rasa solidaritas mereka. Tentu saja rasa persatuan sesama mereka, ada pengaruh yang lainnya ikut memperkuat rasa loyalitas dan integritas terhadap bangsanya misal-

nya peraturan-peraturan pemerintahan kolonial Belanda yang menggolongkan kedudukan orang-orang Cina di bawah orang kulit putih merupakan penghinaan terhadap mereka. Selain dari pada itu peraturan yang membatasi pemilikan tanah dan ruang gerak untuk bepergian keluar kota yang mana mereka diharuskan tinggal di perkotaan saja, adalah merupakan hambatan-hambatan juga baginya. Semua hambatan dan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda, merupakan tekanan terhadap kepentingan orang-orang Cina. Akibat tekanan dan keluhannya dapat mempererat rasa persatuan sesama mereka. Hal ini memang diperlukan demi memperjuangkan kepentingan dan tekanan yang menimpanya.

Rasa kecintaan yang mendalam terhadap tanah leluhurnya memberikan pengaruh pula atas kerinduannya untuk pulang kembali ke tanah tumpah darahnya bagi orang-orang Cina perantauan, khususnya bagi kaum buruh Cina yang berada di daerah Sumatera Timur. Rasa rindu untuk kembali ke tempat asal ini pulalah merupakan motif pendorong mereka untuk berusaha rajin dalam bekerja untuk memperoleh penghasilan dengan maksud dibawa pulang demi pengabdian kepada sanak keluarga dan ke ibu pertiwinya. Dengan terpupuknya semangat loyalitas terhadap bangsanya (Cina) serta terbina pula sifat kerajinan merupakan modal yang cukup berarti untuk mencapai keberhasilan bagi kepentingan perdagangan mereka di hari kemudian. Oleh karenanya dia merupakan juga salah satu kondisi yang sangat dibutuhkan bagi keberhasilannya.

Dari uraian yang dikemukakan di atas dapatlah dikatakan bahwa adanya mobilitas ekonomi vertikal pada orang Cina di Sumatera Timur bukanlah hanya terletak pada satu faktor intern saja seperti filsafat hidup, sistem kekerabatan, tetapi juga meliputi atau melibatkan faktor-faktor ekstern seperti pengaruh beberapa kebijaksanaan politik kolonial Belanda dan lain sebagainya. Begitu pulalah halnya dengan kurang dinamisasi dalam mobilitas vertikal di sektor ekonomi pada orang-orang Melayu, juga disebabkan pelbagai faktor baik yang berasal pada

orang-orang Melayu sendiri (kurang gesit dalam berusaha, pengaruh endapan nilai kepercayaan lama dan lain sebagainya) maupun faktor eksterennya.

DAFTAR CATATAN

1. Secara panjang lebar mengenai keberhasilan orang-orang Cina dalam lapangan ekonomi/perdagangan di Asia Tenggara lihat W.F. Wertheim, *The trading minorities in South East Asia* yang dimuat dalam *East-West Parallel: Socio logical Approaches to Modern Asia* (W. van Hoeve Ltd - The Hague, 1964 halaman 39-81).
2. Untuk memperoleh data informasi ini coba baca surat kabar *Andalas*, yang diterbitkan hari Selasa 14 Agustus 1917. Referensi yang lain dapat pula dibandingkan dengan A.G. Bruin, *De Chineezen ter Oostkust Van Sumatra*, (Leiden: Oostkust van Sumatra Institut, 1918), Schadee, *Geschiedenis Van Sumatra's Oostkust*, deel 11, (Amsterdam: Oostkus van Sumatra Institut, 1919) hal. 238-242.
3. W.F. Wertheim, *The Trading minorities in South East Asia*,, halaman 44.
4. *Ibid.*, hlm. 43-44.
5. J.H. Boeke, *The Evolution of the Netherlands Indies Economy*, (New York: Netherlands and Netherlands Indie Council Institute of Pasific Relations, 1946) hlm. 29

- Writser Jans Cator, *The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indie*, (disertasi), (Leiden) Basil Blackwell, 22 Juni 1936) hlm. 20 dan 32.
6. Stephen Enke, *Economics for Development*, (London: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1963) hlm. 6-7 dan 525-546.
 7. J.A.C. Mackie, *The Chinese in Indonesia*, (Kuala Lumpur: Heinemann Educational Book (Asia), Ltd., 1976) hlm. 4. Lihat lagi pada lembaran negara dalam, *Buggelijk Wetboek*, pasal 5 sampai 12 tahun 1838 yang telah dikumpulkan kedalam *Staatblad van Nederlandsch-Indie*, No. 25 (1849), dan Undang-undang tanggal 28 Juli 1850 yang dituangkan juga ke dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 44, (1950).
 8. Kolonial Verslag, 1876, hlm. 18.
 9. H. Van Kol, *Uit Onze Kolonien*, (Leiden: A.N. Sijthoff, 19 . . hlm. 98.
 10. J.L. Vleming Jr, *Het Chineesche Zakenleven in Nederland Indie*, (Weltevreden: Uitgave Volkslectuur, 19 . . .) hlm. 230.
 11. Olga Lang, *Chinese family and Society*, (New York: Yale University Press, 1968) hlm. 3.
 12. Ibid, hlm. 17.
 13. J.L. Vleming Jr. *Het Chineesche Zakenleven in Nederland Indie*, . . . hlm. 301.
 - 14A. Blink en Kielstra, Sumatra's Oostkust in hare Ontwikkeling als economisch gewest, dalam *Tijdschrift voor Economische Geographie* ('s Gravenhage-Mouton & Negende jaargang) hal. 22-3.
 - 14B. Said Husen Al Atas, *The Myth of the Bative* (?)
 15. Baca surat kabar *Pewartar Deli*, hari Senin 12 Nopember 1917.

16. Sebagai studi perbandingan mengenai migrasi dengan alasan ekonomi dapat menciptakan berusaha lebih giat, telah dikaji Muchtar Naim dalam bukunya ''*Merantau: Minangkabau Voluntary Migration*, Terj. disertasi, (Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press, 1979) hlm. 239–256.
17. Paul A Cohen, Ch'ing Cina: Confrontation with the West, 1850–1900, dalam *Modern East Asia*: (New York: Harcourt, Brace; & World Inc., 1970) hlm. 29–60.
18. Harry T. Oshima (Makalah), *Manpower Quality in The Differential Economic Growth Between East and South-east Asia*, Ceramah di IFKNAS–LIPI, (Jakarta: Maret 1981) hlm. 8–16.
19. Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*, (Jakarta, Penerbit Keng Po, 1961), hlm. 43.
20. *Ibid.*, hlm. 23. Lihat pula Hidayat Z.M. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977) hlm. 22–30.
21. Donald E, Wilmott, *The National Status of the Chinese in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1956), hlm. 1–10.

PERANAN ORANG-ORANG PERANTARA DALAM KEHIDUPAN PEREKONOMIAN DI BALI ABAD XIX (oleh I Putu Gde Suwitha)

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan perekonomian di Bali pada abad ke-19, perlu diketahui peranan orang-orang *sunantara* dalam aktifitas perdagangannya di Bali. Yang dimaksud dengan orang-orang *sunantara* adalah orang-orang asing luar Bali,¹ yang terdiri dari orang-orang Bugis, Cina dan sedikit orang Arab. Dalam hal ini orang-orang Bugis adalah orang asing terbanyak di Bali pada abad ke-19.²

Orang-orang Bugis yang terkenal sebagai bangsa pelaut telah lama mengembangkan suatu kebudayaan maritim sejak beberapa abad lamanya. Perahu-perahu layar dari tipe *pinisi* dan *lambo* telah mengarungi seluruh nusantara dan Asia Tenggara.³ Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan orang-orang Bugis termasuk juga di dalamnya orang-orang Makasar dan Mandar.

Kontak perdagangan antara Bali dengan pedagang-pedagang asing lainnya telah dikenal jauh sebelumnya orang-orang Eropah mengadakan aktifitas perdagangan di Bali. Data mengenai perdagangan kuno menunjukkan pulau Bali mendapat kunjungan pedagang-pedagang yang berlayar ke dan dari Maluku. Produksi Bali seperti kain tenun cukup menarik perhatian para pedagang luar.

Sesungguhnya Bali mempunyai potensi yang besar dalam bidang ekonomi, baik karena penduduknya yang padat, keadaan tanah yang subur dan letaknya yang strategis. Letak strategis, karena selat Bali dan selat Lombok merupakan route pelayaran yang ramai dari Singapura, Batavia, Surabaya ke Australia dan sebaliknya. Pada waktu-waktu tertentu, kapal-kapal dari Eropah yang akan bertujuan ke Australia akan masuk melalui selat Bali atau selat Lombok. Lalu lintas laut yang ramai ini memberikan keuntungan, dan kapal-kapal dapat berada cukup lama di pelabuhan untuk menunggu muatan-muatan yang mereka beli.⁴

Dalam hubungan inilah pedagang-pedagang sunantara dapat memanfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya, khususnya pedagang-pedagang Bugis, karena mereka umumnya memiliki armada angkutan kapal. Sedangkan aktifitas perdagangan di "dalam" sepenuhnya dilakukan oleh orang-orang setempat dan sedikit orang Cina.

Orang-orang Bugis meskipun dilihat dari jumlahnya merupakan masyarakat kecil, namun mereka sangat menguasai beberapa sektor kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian, di samping politik dan militer.

Menurut perhitungan Bloemen Waanders, pada pertengahan abad ke-19 penduduk asing di kerajaan Jembrana terdiri dari: 150 kepala keluarga (KK) orang Bugis, 40 KK orang Cina dan beberapa KK orang Arab.⁵

Di pelabuhan Buleleng pada permulaan abad ke-19 bermukim 4000 pedagang asing, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Bugis dan Cina. Demikian juga di pelabuhan Pate-mon, Celukanbawang, juga bermukim orang-orang Bugis, namun tidak diketahui jumlahnya dengan pasti.⁶

Pada tahun 1882 penduduk Bali Utara terdiri dari: 65.306 orang Bali, 1662 orang Bugis, 395 orang Cina, 138 orang Arab, dan 31 orang Eropah.⁷ Di kerajaan Badung pada akhir abad ke-19 bermukim 6000 orang Bugis dan Arab, 5000 orang Islam lainnya, 800 orang Cina, sedangkan penduduk Bali 60.000 orang.⁸

Menurut perhitungan Van Roon, penduduk Bali secara keseluruhan pada akhir abad ke-19 terdiri dari: 770.778 orang Bali Hindu, 13.764 orang Islam lainnya, 13.434 orang Bugis, 5.470 orang Timur Asing. Van Eerde,¹⁰ mencatat bahwa penduduk Bali terdiri dari: 825.000 Bali Hindu, 10.250 Bali Islam, 5.120 orang Cina, 14.640 orang Bugis dan 970 orang Timur Asing lainnya. (selanjutnya lihat tabel I, II).

Di antara sekian banyak barang dagangan dari Bali, yang paling banyak memberikan keuntungan adalah budak, sekaligus merupakan pendapatan utama bari para raja. Sebelum masuknya pengaruh Belanda ke Bali, ekspor utama dari Bali adalah budak, di samping sedikit beras. Periode abad ke-17 – 19 perdagangan budak memberikan keuntungan yang besar. Jika panen padi mengalami kegagalan, volume perdagangan budak meningkat pula.¹¹ Memang benar pendapat Nielsen dalam tulisannya tentang Bali, bahwa dalam abad 17-19 semuanya berkisar pada masalah perbudakan.¹²

Dalam perdagangan budak ini yang beraktifitas adalah pedagang-pedagang Bugis dan sebagian kecil pedagang Cina. Barang-barang ekspor yang dibawa dari Bali selain budak adalah: minyak kelapa, gula merah, dendeng, telur asin, garam, sapi, babi, itik, sarang burung, kain kasar, benang dari kapas, gambir, asam, pinang, malam dan kayu-kayuan. Barang-barang yang masuk: emas, benang emas, perak, tembikar dan barang porselin lainnya, gading, belirang, besi, kain sutera dan candu.¹³

Dari Lombok juga diangkut beras, terutama ke Bali Utara dengan perahu-perahu Bugis.¹⁴ Bali Utara yang daerahnya banyak pegunungan, hasil pertaniannya sering tidak mencukupi, oleh karena itu, terutama beras banyak didatangkan dari Lombok.

Perdagangan budak mulai berkurang setelah 1830,¹⁵ tetapi perdagangan dan pembelian di sana-sini masih dilakukan oleh pedagang-pedagang Bugis. Tiap-tiap perahu biasanya membawa dua budak wanita dan dua budak laki-laki yang diajak berlayar kesana-kemari untuk diperdagangkan dan biasanya laku di

Singapura.¹⁶ Pemerintah Belanda mengalami kesulitan terhadap pedagang-pedagang Bugis, karena mereka tidak terikat dengan perjanjian dan mereka juga pedagang "liar". Di pihak pedagang Bali sendiri, masih juga terdapat penjualan budak untuk ditukarkan dengan beras kepada pedagang-pedagang Bugis, terutama budak laki-laki. Budak laki-laki lebih banyak laku, karena dapat dipekerjakan sebagai kelasi perahu.

Harga budak laki-laki dapat mencapai 50 perak Belanda. Tetapi tidak jarang pedagang Bugis memperoleh budak dengan cara memancing mereka untuk datang ke pantai, kemudian pedagang Bugis menangkap, terus menaikkan ke perahunya dengan paksa.¹⁷

Perdagangan budak di Bali sukar dihapus sama sekali. Menurut pengamatan Bloomen Waanders, sampai tahun 1956 pedagang-pedagang Bugis secara sembunyi-sembunyi masih memperdagangkan budak, terutama dari kerajaan Badung. Budak-budak ini umumnya orang-orang yang diajukan ke pengadilan karena tidak mampu membayar hutang. Sebagai hukuman mereka bebas diperjualbelikan.¹⁸

Selain memperdagangkan budak, pedagang-pedagang Bugis juga memasukkan candu. Di Buleleng saja kurang lebih dari 300 peti candu masuk setiap tahunnya. Hasil yang dapat diperoleh dari perdagangan candu sekitar 15.000 gulden setiap tahun, sedangkan candu yang diselundupkan oleh pedagang-pedagang Bugis setiap tahunnya lebih dari 150 peti, belum termasuk barang dagangan yang lain. Candu langsung didatangkan dari Singapura oleh pedagang-pedagang Bugis. Syahbandar Buleleng yang dijabat oleh seorang Cina tidak dapat mencegah penyelundupan ini dan keluhannya kepada raja tidak pernah dihiraukan. Raja tidak mau mengambil resiko untuk memberantas penyelundup Bugis ini, karena mereka mempunyai kedudukan yang cukup kuat.¹⁹ Di samping itu mereka pintar mengambil hati raja. Raja sering menerima hadiah dari pedagang-pedagang Bugis. Menurut Wikkerman, orang-orang Bugis ini paling pintar menyap raja.²⁰

Orang-orang Bugis juga berperan dalam menyelundupkan senjata api ke Bali. di pelabuhan Buleleng kadang-kadang 500 sampai 600 pedagang Bugis berkumpul untuk melakukan penyelundupan. Wikkerman seorang pejabat militer Belanda pada residen Banyuwangi, melukiskan bahwa Bali akan tetap berbahaya karena orang-orang Bugis ini sering menyokong peralatan perang.²¹ Kerajaan-kerajaan di Bali sudah lama mendapat suplai persenjataan dari pedagang-pedagang Bugis ini.²²

Kuta yang merupakan sebuah pelabuhan dan kota dagang yang ramai di Bali Selatan, sudah lama dipakai sebagai tempat domisili pedagang-pedagang Bugis. Dalam laporannya No. 11/27 Juni 1831, Dubois seorang pejabat militer Belanda yang ditempatkan di Kuta, melukiskan Kuta sebagai berikut:

Koeta is negorij, alwaar meest alle affaires van handels der Zuid Balische propincien worden gedreven. Het light tusschen, doch acliter de twee havens op den weg naar de stad Badong. Het is van Toebean 1 mijl. Van de west-haven 2 en van Badong 5 mijlen afgelegd. Daar worddt dagelijks een tamelijke passar genouden. De populatie bestaat uit een 30 taal Chineezen, meest alle vluchtelingen van onze bezittingen en zicht met den handel bemoeiende, ± 30 Balische moslem en niet van den besten stempel en ook uit geringe speculation levende, en nagenoeg 400 Balische huisgezinnen, waar onder een 100 taal visschers. De endere 300 familien zijn voor het grootste gedeelte vluchtelingen van de naburige vorstendommen, walkena een misdaad te hebben begaan, een schuil plaats aan de Badongche regeering zijn komen verzoeken; ²³.

Pada waktu Dubois mendirikan bangsal 1828 untuk keperluan merekrut calon serdadu, pihak pedagang Bugis yang sudah lama bermukim menunjukkan kekhawatirannya terhadap usaha Belanda ini. Mereka sama sekali tidak menginginkan adanya saingan pedagang-pedagang lain. Ia tetap ingin mempertahankan perdagangan candu, budak dan perdagangan spekulasinya. Meskipun Dubois sudah menjamin melalui raja Badung, bahwa pendirian bangunan bukan untuk kepentingan dagang, tetapi untuk kepentingan militer.²⁴

Dalam laporan lainnya kepada asisten residen di Banyuwangi, Dubois menganjurkan ditingkatkannya perdagangan dengan Bali. Karean Dubois khawatir akan saingan dan dominasi pedagang-pedagang Bugis ini yang menurut pihak Belanda mendapat konotasi "liar".²⁵

Pada waktu van Broek sedang berunding di Buleleng 1817, seorang pedagang Bugis yang membawa beras dari Surabaya ke Karangasem menyebarkan desas-desus bahwa Broek datang ke Bali mempunyai maksud buruk, yakni menguasai Bali. Desas-desus ini sudah tersebar luas di Jembrana, Tabanan, dan Badung.²⁶ Hal ini mungkin berpengaruh juga terhadap usaha Broek sehingga ia selalu gagal dalam setiap perundingannya dengan raja-raja Bali.

Candu yang langsung didatangkan dari Singapura oleh pedagang Bugis, setelah transit beberapa lama di Bali, dikeluarkan lagi sebagai barang selundupan. Sebagai tempat penyimpanan candu sementara ialah pelabuhan Tuban. Penduduk Tuban sebagian besar terdiri dari laki-laki pepadat. Menurut sumber Belanda, perdagangan di Kuta dan Tuban beberapa saat menjadi sepi, setelah gudang tempat penyimpanan candu di Tuban terbakar.²⁷

Pedagang Bugis ini memasukkan hasil-hasil dari Sulawesi Selatan, Maluku dan daerah lainnya di Timur seperti: rempah-rempah, kayu wangi, malam, bahan perekat, rotan, barang-barang yang dikeringkan seperti kulit penyu, tripang, sarang burung dan sebagainya.²⁸ Dari Kuta pedagang-pedagang Bugis mengeluarkan beras yang diperdagangkan ke Banyuwangi, Besuki, Surabaya dan juga kota-kota di Indonesia Timur.²⁹

Setelah berdirinya NHM di Bali 1839, usaha dagang Belanda ini tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Pedagang Bugis dan Cina tidak mau berhubungan dagang dengan Belanda. Ia hanya berhubungan dagang dengan para *gusti*. Sehingga beberapa saat perdagangan barang terutama beras menjadi lamban.³⁰ Di samping itu pedagang Bugis menyampaikan kepada penduduk bahwa usaha Belanda bukanlah untuk melancarkan

kegiatan perdagangan, melainkan untuk menjadikan Kuta pangkalan guna merebut kekuasaan pemerintah setempat.³¹ Belanda masih berpikir dua kali dalam usahanya untuk mendirikan bangunan kantor dagang di Kuta, karena takut akibat rasa iri hati pedagang-pedagang Bugis dan Cina.³²

Di samping itu kemunduran usaha NHM karena sulitnya mendapatkan uang kepeng Cina, selama di Cina terjadi perang. Pada hal mata uang kepeng Cina berlaku untuk jual-beli. Tetapi para pedagang Bugis dan Cina memiliki mata uang ini dalam jumlah yang banyak. Di Cina mereka dapat membeli uang kepeng dengan kurs 1400 : 1 gulden dan di Bali dapat dijual dengan kurs 700 : 1 gulden.³³

Di kerajaan Jembrana peranan orang-orang Bugis dalam dunia niaga sudah berlangsung lama. Perahu dagang Bugis sering dipergunakan oleh kerajaan dalam melaksanakan perekonomian. Karenanya Jembrana menjadi terbuka oleh isolasi alam dengan kerajaan-kerajaan tetangga terutama dengan Buleleng. Perahu-perahu Bugis yang berdomisili di Jembrana aktif dalam perdagangan dengan kota-kota di Jawa Timur dan mempunyai penyeberangan tetap dengan Banyuwangi.³⁴

Pelabuhan Loloan di Jembrana menjadi terkenal dan ramai dikunjungi perahu-perahu dagang karena aktifitas pedagang-pedagang Bugis ini. Bahkan selama tiga tahun, 1805-1808 syahbandar Loloan dijabat oleh Kapten Pattimi seorang saudagar Bugis yang berhasil. Pattimi mengepalai orang-orang Bugis di Jembrana dan di antaranya 1200 orang pasukan bersenjata.³⁵

Baron von Hovell dalam perjalanannya ke Bali 1847 melaporkan bahwa beberapa perahu dagang Bugis dalam pelayaran perdagangannya dari kota-kota di Jawa sedang beristirahat di pelabuhan Loloan. Mereka menunggu beberapa hari sampai datangnya angin baik untuk melanjutkan pelayarannya ke Badung.³⁶

Menurut laporan Van Lier, kapal-kapal dagang Bugis dari Singapura setiap enam bulan sekali datang ke pelabuhan Loloan

untuk menjual dagangannya. Bali pada waktu ini sudah menjadi jalur yang tetap dan ramai bagi lalu lintas perdagangan orang-orang Bugis dari dan ke Singapura. Kapal-kapal dagang mengambil hasil daerah Jembrana seperti beras, kelapa, kopi dan ternak.³⁷

Dapatlah dikatakan bahwa orang-orang Bugis merupakan kelas pedagang yang berhasil karena keuletan dan ketekunannya. Tambahan pula mereka mempunyai perahu sendiri yang memudahkan mereka untuk menambah penghasilan dengan berhubungan dagang. Di samping itu saingan dari orang-orang Bali tidak ada yang memiliki perahu dagang. Orang Bali hanya memiliki perahu-perahu kecil dan jukung atau perahu-perahu getek dari bambu.³⁸

Perahu-perahu Bugis ukurannya besar, diantaranya ada yang mampu menampung muatan sampai 30 ton. Besar kecilnya sebuah perahu diukur dengan jumlah tiangnya. Yang paling kecil biasanya disebut perahu layar, kemudian perahu bertiang satu, bertiang dua dan yang paling besar bertiang tiga. Menurut laporan Zollinger, perahu-perahu besar milik orang Bugis banyak diketemukan di Bali, bahkan di pelabuhan Ampeyan Lombok, ada dijumpai satu kapal api bertiang dua milik orang Bugis.³⁹ Perahu-perahu *paduwakan* biasanya milik Cina tidak begitu besar ukurannya, bentuknya lebih sederhana dan tidak begitu mahal harganya. Perahu-perahu Bugis seluruhnya dibuat dari kayu, diikat dengan pen-pen yang juga dibuat dari kayu, tidak ada bagiannya yang dibuat dari besi. Layarnya dibuat dari batang kayu yang dibelah dan tali-temalnya dari rotan.⁴⁰ Sistem pelayaran masih mengikuti bertiupnya angin musim dan masih pula memperhitungkan bulan gelap dan bulan terang guna mengetahui gelombang pasang-surut air laut. Hal seperti ini masih dijalankan oleh para pelaut Bugis jika mereka berlayar.

Peranan dagang yang dimainkan orang-orang Bugis di Kerajaan Buleleng cukup besar. Pelabuhan Buleleng merupakan pelabuhan utama dan kota dagang terbesar di Bali, yang mem-

punya letak strategis di tengah-tengah jalur perniagaan Nusantara. Hal ini menyebabkan Buleleng ramai dikunjungi kapal-kapal dagang sebagai tempat persinggahan.⁴¹ Pada waktu ini pedagang-pedagang Bugis yang bermukim di Buleleng mengadakan hubungan dagang dengan Makasar, Ceram dan Singapura. Bahkan pada waktu-waktu tertentu berhubungan dengan kapal-kapal dari Mauritius yang datang untuk mengambil budak ke Buleleng.⁴²

Bukan saja raja-raja Bali yang memanfaatkan perahu-perahu Bugis, tetapi juga Belanda sering mempergunakan untuk kepentingan politiknya. Seperti misalnya pada bulan Juli 1844 sebuah perahu Bugis yang berbendera Belanda dirampas di Jembrana.⁴³ Demikian pula ketika Van Broek selesai mengadakan perundingan dengan raja Jembrana tahun 1818, Broek kemudian menyewa tiga buah perahu Bugis. Sebuah perahu membawa ajudannya Roos ke Banyuwangi dan dua buah perahu lagi membawa Broek serta perlengkapannya ke Badung untuk melanjutkan perundingan.⁴⁴

Setelah John Mads Lange berdagang di Kuta 1839, ia masih menjumpai perdagangan musiman orang-orang Bugis dengan route yang tetap antara Kuta dengan Singapura. Candu seharga 250.000 gulden setiap tahunnya ditukar dengan tembakau dan kain Bali.⁴⁵ Jalur perdagangan orang-orang Bugis lainnya yang dijumpai oleh Lange antara lain: dari Lombok menuju kota-kota pantai di Jawa, Makasar, Kalimantan, Riau dan berakhir juga di Singapura. Jalur lainnya dari Kuta menuju Lombok, Bima, Sawu dan kota-kota lainnya di Timur.⁴⁶

Pedagang-pedagang Bugis menjalani route perdagangan yang tetap dengan Singapura, semenjak kota itu didirikan pada permulaan abad ke-19. Dari Singapura pedagang-pedagang Bugis membawa barang-barang seperti: candu, tekstil dijual di pelabuhan-pelabuhan Makasar, Mandar, Bone, Wajo, Kaili dan juga pelabuhan-pelabuhan di Sunda kecil seperti: Sumbawa, Lombok, Bali, Flores, Sumba, Timor, Ceram dan menuju ke Irian, Kalimantan dan kembali lagi ke Singapura.⁴⁷

Hasil-hasil yang didapat di daerah ini dibawa kembali ke Singapura. Misalnya pakaian khas dari Bali dan Sulawesi. Juga hasil-hasil lainnya seperti: minyak, kelapa, beras, kayuwangi, karet, sarang burung, teripang dan sebagainya. Dalam satu kali pelayaran, mereka berangkat biasanya berombongan kadang-kadang sampai mencapai 100 buah perahu.⁴⁸

Dalam hukum pelayaran *amanna gappa*, pasal 21 disebutkan, apabila seorang naik perahu Bugis dari daerah-daerah Pasar dekat Kutai, Kaili (Sulawesi), berlayar dengan tujuan ke Bali, sewanya ditetapkan empat rial sekali berangkat. Apabila naik di Sumbawa dan daerah-daerah sekitarnya menuju Bali, sewanya ditetapkan dua setengah rial. Barang-barang yang membutuhkan ruangan yang luas, dikenakan sewa tambahan sesuai dengan perjanjian.⁴⁹ Jenis barang dagangan yang membutuhkan ruangan yang luas yakni: beras, garam, kapas, rotan, tembakau, bakala (untuk pemakan sirih), gambir, agar-agar, kayu-kayuan dan sebagainya.⁵⁰ Dengan data di atas dapat diketahui bahwa Bali sejak abad ke-17 sudah menjadi jalur perdagangan yang ramai bagi pedagang-pedagang Bugis.

Lange sendiri telah berdagang di Kuta kurang-lebih enam tahun lamanya, bersama-sama dengan para pedagang Bugis dan Cina. Dari Singapura Lange dengan pedagang-pedagang Bugis membawa candu, gambir, tekstil ditukarkan di pasaran Kuta dengan beras, kelapa, minyak dan kemudian dikirim lagi ke Singapura.⁵¹ Dengan demikian pedagang-pedagang Bugis bersama Lange dapat memberikan rangsangan kepada kehidupan ekonomi di Bali.

Di Bali perdagangan orang asing dijalankan secara terpinpin oleh *pembekel* atau *gusti*. Dalam melakukan perdagangan, kontak antara masyarakat pedalaman diatur dalam bentuk peraturan-peraturan. Dari peraturan-peraturan ini dapat dibedakan dengan jelas antara warga masyarakat setempat dengan orang asing yang berasal dari pulau lain yang ikut berdagang. Peraturan-peraturan atau *paswara* ini dipakai untuk mengatur ketertiban dan keamanan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.⁵²

Pusat pengawasan orang asing terletak di tangan syahbandar. Pedagang asing yang baru datang terlebih dahulu harus melaporkan diri dan minta perlindungan dari syahbandar.⁵³ Pedagang-pedagang asing yang melakukan kontak dengan rakyat harus sepengetahuan syahbandar. Maksudnya untuk mengawasi gerak-gerik pedagang asing dan mencegah hubungan langsung dengan penduduk biasa.

Peraturan memang melarang orang asing tinggal di pedalaman,⁵⁴ oleh karena itu mereka tinggal di pantai-pantai saja. Menurut Waanders,⁵⁵ mereka ini hidup berkelompok di kampung-kampung tertentu dan pada umumnya di bawah kepala-kepala mereka sendiri.

Di setiap pelabuhan atau pantai yang dijadikan tempat berlabuh bagi kapal-kapal didirikan *bendera* atau *pabean*, dengan suatu bangunan yang berbentuk bangsal.⁵⁶ Di tempat-tempat semacam inilah para syahbandar (*subandar*) menjalankan tugasnya sehari-hari. Biasanya para syahbandar diberi wewenang penuh untuk memungut cukai di pelabuhan dan sebaliknya diwajibkan menyerahkan upeti kepada raja. Tugas lain syahbandar adalah, menertibkan pelayaran dan perdagangan, bertindak sebagai wakil orang asing, dan dapat juga bertindak sebagai wakil raja.⁵⁷

Biasanya yang ditunjuk menjadi syahbandar adalah orang asing yang mempunyai cukup pengetahuan dalam bidang lalu lintas laut. Pada umumnya saudagar yang paling berwibawa yang menjadi Syahbandar. Dengan demikian pedagang asing merasa lebih tentram, karena kepentingannya diperhatikan oleh pejabat pelabuhan yang berasal dari kalangannya sendiri.⁵⁸ Di Bali dalam kurun abad ke-19 dijumpai tiga orang Bugis yang menduduki jabatan syahbandar. Pattimi menjadi syahbandar di Loloan, Puak Metuwa syahbandar di Srgan dan seorang syahbandar di Tanjung,⁵⁹ yang tidak jelas namanya. Di pelabuhan Buleleng yang menjadi syahbandar adalah orang Cina yang juga diberi pangkat kapiten. Demikian pula syahbandar di pelabuhan Sanur.

Syahbandar dalam bidang perdagangan mempunyai kedudukan yang strategis. Di samping mempunyai tugas seperti disebutkan di depan, ia juga bertindak sebagai kontraktor pelabuhan. Ia bertugas pula untuk menjual hasil bumi kepunyaan kerajaan.⁶⁰

Syahbandar juga merangkap sebagai pemilik kapal yang harus membayar sewa pelabuhan dalam jumlah yang besar. Dengan sendirinya syahbandar mempunyai banyak kesempatan untuk mengelabui raja, berapa pendapatan dan uang masuk, penetapan harga hasil bumi dan sebagainya.⁶¹ Dengan demikian seorang pedagang asing tanpa bantuan atau persetujuan syahbandar akan selalu mengalami kesulitan dan kelambatan dalam usahanya.

Mengenai *matoa* atau *metuwa* dalam fungsinya sebagai syahbandar memang umum pada kurun abad 17-19 seperti di Serangan.⁶² Di Lombok dikenal pula petugas lain dari syahbandar yang disebut *matwan kampung*.⁶³

Raden Sosrowijoyo dalam perjalanannya ke Bali 1871 telah menjumpai orang-orang Bugis yang kaya di Jembrana dan Buleleng. Mereka sudah menempati rumah gedung dengan rumah yang memakai pagar tembok, terutama di Loloan. Di Loloan terdapat pula sebuah mesjid yang besar dan mewah dengan tembok dan atap genteng.⁶⁴ Terdapat pula sebuah pasar yang besar. Orang-orang Bugis memegang peranan sebagai pedagang sapi dari Bali ke Jawa.⁶⁵

Dalam sebuah surat peninggalan, disebutkan seorang Bugis dari Trengganu-Ince Yaqub pada tahun 1848 telah mewakafkan beberapa bidang tanah sawah untuk pembiayaan dan pemeliharaan mesjid di Loloan.⁶⁶ Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada umumnya orang-orang Bugis telah berhasil dalam usahanya dan dapat dimasukkan dalam golongan yang berada.

Ketika orang-orang Cina mulai memasuki masyarakat Bali, mereka memperkenalkan sistem pembayaran dengan uang. Uang kepeng merupakan alat pembayaran yang ber-

pengaruh atas sistem ekonomi masyarakat Bali.⁶⁷

Para pedagang Cina datang ke pedesaan sebagai pedagang klontong dengan membawa keperluan masyarakat pedesaan. Mereka berdagang dari satu desa ke desa yang lainnya. Barang-barang dagangan mereka tukarkan dengan hasil-hasil pertanian. Untuk memudahkan pembayaran, maka mulailah mereka memperkenalkan uang kepeng sebagai alat pembayaran.⁶⁸

Untuk memudahkan uang itu diikat dalam suatu ketentuan yang mempunyai nama tersendiri yaitu: *seatak* merupakan ikatan 200 uang kepeng, *sehunkus* merupakan ikatan 1000 atau gabungan 5 buah *seatak*, dan yang terbesar jumlahnya disebut *sepuku*, adalah ikatan 10.000 uang kepeng atau gabungan 50 *seatak* dan bisa juga gabungan 10 buah *sehunkus*.⁶⁹

Selain uang kepeng berlaku pula uang Spanyol yaitu *piaster* dan mata uang emas dan perak Belanda, meskipun kedua mata uang ini tidak banyak beredar. Mata uang tersebut berlaku dalam transaksi perdagangan yang jumlahnya lebih besar, sedangkan dalam perdagangan kecil-kecilan dipakai uang kepeng. Dalam perbandingan ketiga mata uang ini ternyata uang kepeng mempunyai kurs paling rendah dan *piaster* bernilai paling tinggi. Kurs uang Spanyol bernilai 600-700 kepeng, uang emas Belanda bernilai 200 kepeng, sedangkan uang perak Belanda 50 kepeng. Nilai itu tidak tetap, melainkan tergantung pada banyak sedikitnya uang kepeng beredar. Kalau kepeng itu banyak beredar nilainya rendah, dan sebaliknya kalau uang Belanda atau Spanyol banyak beredar, maka uang kepeng akan tinggi nilainya.⁷⁰

Sistem perdagangan ini kemudian diikuti oleh masyarakat Bali, sehingga terjadilah transaksi dengan uang, sehingga Bali kemudian menjadi tempat persinggahan orang-orang asing untuk membeli perbekalan di samping juga aktif dalam perdagangan.⁷¹ Pada perkembangan kemudian pedagang-pedagang asing memperkenalkan bahan-bahan dagangan yang baru seperti: kain lenen, tembikar, alat-alat, minuman keras dan wol. Demikian juga mereka memperkenalkan sistem pinjam-meminjam uang dengan bunga.

Tampaknya sistem pinjam-meminjam ini berkembang di kalangan masyarakat. Menyadari akan hal ini raja memberikan izin bagi pedagang-pedagang asing untuk mendirikan kantor dagang di pelabuhan. Tentu saja hal ini akan mendatangkan keuntungan bagi raja-raja, di samping mendatangkan perubahan ke arah perkembangan ekonomi antar kerajaan. Dengan demikian peranan pasar semakin meluas sebagai basis ekonomi kerajaan.

Pedagang-pedagang Cina lebih mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat pedesaan. Pada umumnya Cina bukanlah merupakan pedagang musiman yang datang secara berkala, tetapi Cina lebih banyak menetap di pusat-pusat kerajaan. Usaha mereka yang lain adalah menjadi penjaja barang-barang klontong ke desa-desa, sehingga peranan pedagang Cina menjadi sangat penting dalam menghubungkan rakyat di pedesaan dengan kehidupan kota. Boleh dikatakan Cina pula yang merubah struktur masyarakat Bali yang agak tertutup yang hanya mencukupi kebutuhan sendiri, menjadi masyarakat yang lebih terbuka.

Hubungan ini meningkat setelah Cina menetap di pedesaan, sedangkan pedagang-pedagang lain seperti Arab nampak lebih banyak berada di pusat-pusat kerajaan.

Pada permulaan abad ke-19 diperkenalkan juga sistem perdagangan baru yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Dalam hal ini nampak perdagangan hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan dengan mencari keuntungan yang besar. Hubungan dagang ini dimulai dengan adanya kontak-kontak politik, sehingga praktis hubungan ini hanya berada di lapisan atas masyarakat Bali. Lebih-lebih bahan dagangan yang dibawa di luar jangkauan rakyat banyak seperti perhiasan-perhiasan, kain lenen, senjata dan pakaian kebesaran.⁷³ Dengan demikian melalui aktifitas perdagangan antara raja-raja Bali dengan orang *sunantara* dapat dikatakan memberi andil, dapat mempercepat proses dinamika perekonomian Bali.

Sebagai tinjauan akhir dapatlah disebutkan bahwa orang-orang *sunantara* yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Bugis sudah ada di Bali sejak abad ke-17 yang disebutkan dalam sumber-sumber daerah, maupun dalam hukum pelayaran *aman-na gappa* yang telah dibukukan pada abad ke-17.

Bali yang letaknya di tengah-tengah Nusantara merupakan pusat pelayaran dan lalu lintas perahu-perahu dagang. Jarak ke Barat dan ke Timur hampir sama, sehingga merupakan tempat persinggahan yang strategis bagi pedagang-pedagang Bugis dalam pelayarannya ke Asia Tenggara. Lagi pula Bali mempunyai banyak pelabuhan yang aman sepanjang tahun. Dan sangat cocok pula bagi pedagang-pedagang Bugis yang sering berspekulasi dan melakukan penyelundupan.

Di Bali orang-orang Bugis dapat berperan pada kerajaan-kerajaan pantai seperti kerajaan Buleleng, Badung dan Jembrana. Inti dari peranan ini tidak dapat dilepaskan dari bakat dagang dan keberaniannya berpetualangan di laut. Karena reputasi inilah yang memungkinkan mereka dapat memasuki birokrasi tradisional di Bali pada abad ke-19. Demikian juga halnya pedagang Cina.

Reputasi di laut ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh raja-raja pantai di Bali. Di lain pihak orang-orang Bugis ini akan merasa bangga dapat menyumbangkan tenaga, kemampuannya dan dengan sendirinya pula merupakan kewajiban moral bagi penguasa setempat untuk memberikan tanda jasa, sehingga mereka lebih berperan. Sehingga peranannya sebagai pemegang roda perekonomian dalam kerajaan di Bali makin terasa, ditambah dengan tempaan jiwa sebagai perantau, telah membentuk watak keberanian terutama dalam menghadapi kesulitan.

Orang-orang Bugis dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pelaut, sehingga mereka lebih menguasai bidang ini. Menurut anggapan mereka merantau akan mempercepat sukses dalam kehidupan.^{7 3} Merantau merupakan mobilitas sosial-ekonomi untuk memungkinkan perbaikan dalam hidup.

**TABEL 1 KEADAAN PENDUDUK BALI DAN LOMBOK SECARA KESELURUHAN
PADA AKHIR ABAD KE-19*)**

Namen der rijken	B a l i		Kiet In- heemsche Inlander	Chine Zen	Andere Vreemde Ooster- lingen	Total bevolking
	Hindu	Islam				
Buleleng	120.000	3.900	6.600	1.600	300	132.400
Badung	163.000	370	1.100	1.100	100	165.670
Jembrana	22.000	3.000	6.800	220	30	31.000
Bangli dan Klungkung	110.000	800	130	500	—	111.431
Karangasem	156.000	2.000	300	300	40	162.740
Gianyar	124.000	100	140	700	—	124.490
Tabanan	130.000	80	190	700	—	130.950
Bali	825.000	10.250	14.460	5.120	470	859.400
Bali dan Lombok	847.000	10.250	26.460	6.120	970	1.376.150

*)termasuk orang Sasak yang berdiam di Bali dan Lombok

Sumber: J.C. van Berde, *De Volken van Nederlandsch Indie*, deel II (Amsterdam: Elsevier, 1906), p. 154.

TABEL 2

**PENDUDUK BALI SECARA KESELURUHAN
PADA AKHIR ABAD KE-19**

Namen der rijken	B a l i		Niet in heemsche Inlander	Andere Vreemde Oosterlingen	Total volking
	Hindu	Mohamaderen			
Buleleng	113.740	3.708	6.294	1.796	125.538
Jembrana	19.632	2.782	5.730	251	28.395
Badoeng	154.770	304	1.025	1.197	157.296
Tabanan	123.048	64	178	681	123.791
Gianyar	118.317	92	130	684	119.223
Klungkung	92.640	739	118	523	94.020
Karangasem	148.631	5.745	289	338	155.003
Total	770.778	13.764	13.434	5.470	803.446

Sumber: R. van Roon, Aanteekeningen omtrent Bali (Amsterdam: C.P.J. van der Peet, 1906), p. 258.

DAFTAR CATATAN

1. Istilah orang atau *wong sunantara*, *wong duranegara*, *duradesa*, *jabakuta* banyak dijumpai dalam *Babad Dalem*. Lihat *Babad Dalem* (manuskrip), koleksi Perpustakaan Fak. Sastra Unud, No. K. 132 1p. 2a-56b. Lihat juga C.C. Berg, *Kidung Pamancangah: De Geschiedenis van het rijk Gelgel*. Leiden, 1926, *passim*.
2. E. Utrecht, *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Bandung: Sumur-Bandung, 1962, hal. 134.
3. J. Nooduyn, *Islamisasi Makassar, terjemahan*. Jakarta: Bharatara, 1972, hlm. 17, Ph. O.L. Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Ammana Gappa*. Ujung Pandang: YKSS, 1977, hlm. 25.
4. A.K. Nielsen, *Leven en Avonturen van een Oostinjevaarder op Bali* Amsterdam, 1928, hlm. 23-24.
5. P.L. Van Bloemen Waanders, "Aanteekeningen Omtrent de zeden en Gebruiken der Balineezzen in Zonderheid die van Boeileleng", dalam *TBG*. 8, 1859, hlm. 139.
6. G. Lauts, *Het Eiland Bali en de Balienezen*. Amsterdam; Met Eenekraat, 1848, hlm. 119.
7. Lihat Regeering Almanak 1882, hlm. 5.
8. Lihat *De Indische Gids*, 1883, I, hlm. 131.

9. J. Van Roon, *Aanteekeningen Omtrent Bali*. Amsterdam: C.P.J. Van der Peet, 1906, hlm. 258. Lihat juga C. Lekkerker, *Bali en Lombok Overzicht der Literatuur Omtrent deze Eilanden tot Einde 1919*. Riswijk, Blank Waar & Schoonhoven, 1920, hlm. 138.
10. Lauts, *op cit*, hlm 94.
11. Nielsen, *op cit*, hlm. 49. Lihat juga J.K.J. de Jonge, *Opkomst van Nederlandsch Gezag in Oost Indie, deel II*. s'Gravenhage: Marinus Nijhoff, 1864, hlm. 560.
12. Roorda van Eysinga, *De Kleine Soenda Eilanden*. Amsterdam: L. Bookkenus, 1841, hlm. 9. Lihat juga Lekkerker (1920), *op. cit*, hlm. 291-292.
13. De Jonge, *op. cit.*, hlm. 560. Lihat juga A.A. Putra Buyung, "Peranan Syahbandar di Lombok", No. XXII, Juli 1972, hlm. 308.
14. De Jonge, *op. cit.*, hlm. 560, Lihat juga A.A. Putra Agung, "Peranan Syahbandar di Lombok, *Basis*, No. XXII, Juli 1972, hlm. 308.
15. Sesudah berakhirnya perang Jawa 1830, rupanya tidak ada keinginan lagi pemerintah Belanda untuk mengumpulkan budak-budak Bali sebagai calon serdadu. Pada zaman VOC Bali merupakan tempat merekrut calon-calon serdadu yang utama, karena kesetiaannya dan patuh pada pimpinan.
16. C. Lekkerkerker, "Het Voorspel der vestiging van den Nederlandsche Macht op Bali en Lombok", dalam BKI, 79, 1923, hlm 219. Lihat juga A.A. Gde Putra Agung, "Masalah Perdagangan Budak di Bali", *Basis*, No. XX, Nopember 1971, hlm 41-42.
17. Lauts, *op. cit.*, hlm. 90.
18. P.L. van Bloemen Waanders, "Dagverhaal Eene reis over Bali in Juni en Juli 1856, dalam *TNI*, 2, 1870, hlm. 17.
19. Bloemen Waanders (1859), *op. cit.*, hlm. 188.
20. C. Lekkerkerker, "Bali 1800-1814", *BKI*, 82, 1926.
21. *Ibid.*
22. Eysinga, *op. cit.*, hlm 24.

23. Lihat laporan-laporan Dubois dalam Arsip Bali Bundel 4/ No. 11. Lihat pula Nielsen, *op. cit.*, hlm. 51-52.
24. Lekkerkerker (1923), *op. cit.*, hlm. 211.
25. *Ibid.*, hlm. 222-223.
26. P.H. van der Kemp, "Het Verblijf van Commisaris van den Broek" BKI, 50, 1899, hlm. 344-345.
27. Lekkerkerker (1923), *op. cit.*, hlm. 211.
28. Lauts, *op. cit.*, hlm. 86-87.
29. *Ibid.*, hlm. 141.
30. Lekkerkerker (1923), *op. cit.*, hlm. 255.
31. *Ibid.*, hlm. 263.
32. *Ibid.*, hlm. 271.
33. *Ibid.*, hlm. 270. Lihat juga Henk Schulte Nordholt, *The Lange Connection a Danish Trader op Bali in the Middle of the 19th Century: Broker and Buffer*. Kertas kerja, 1980, hlm. 6. Dengan memiliki uang kepeng yang banyak orang-orang Bugis dan Cina dapat leluasa berdagang di Bali, karena uang kepeng adalah alat pembayaran yang syah dan sangat diperlukan sebagai sarana upacara. Lihat P. de Kat Angelino, "De Kepeng op Bali", dalam *KS, I*, 1921, hlm. 68-83.
34. Lauts, *op. cit.*, hlm. 21. Lihat pula Hadji Sirat, *Hikayat Islam di Negeri Djembrana Bali*, 1935, Stensilan, hlm. 2.
35. Van der Kemp, *op. cit.*, hlm. 334, Utrecht, *op. cit.*, hlm. 101, Lauts, *op. cit.*, hlm. 111.
36. W.R. Baron Van Hoevell, *Reis over Java, Madura en Bali 1847*, deel I. Amsterdam 1849, hlm. 213.
37. H.F. Van Lier, "Aanteekeningen Omtrent het rijk Djembrana" dalam *TBG, 15*, 1866, hlm. 277.
38. Lauts, *op. cit.*, hlm. 88.
39. Hennri Zollinger, "Reis Over de Eilanden Bali en Lombok, Mei tot September 1846, dalam *VBG, I*, 22, 1849, hlm. 4, 8, 9.
40. *Lauts, loc. cit.* Untuk lebih jelasnya teknik pembuatan perahu Bugis lihat: Usman Pelly, "Ara Dengan Perahu Bugis-

- nya", dalam *Berita Antropologi*, No. 27. Th. VII, 1976, hlm. 67-75. Perahu-perahu di tempat-tempat perkampungan orang Bugis di seluruh Nusantara biasanya dikerjakan oleh tukang-tukang perahu yang didatangkan dari desa Ara. Sampai sekarang desa Ara yang terletak di kabupaten Bulukumba, 80% penduduknya hidup dari penghasilan membuat perahu.
41. Van den Broek, "Verslag Nopens het Eiland Bali", dalam *De Ooosterling*, I, 1835, hlm 164-165.
 42. J.Z. Johannes Oliver, *Land en Zeetogten in Nederland's Indie en Eenige Britische Etablissement*, I. Amsterdam: C.G. Sulpke, 1930, hlm 62. Lihat juga Lauts, *op. cit.*, hlm. 119.
 43. Laporan No. La.Tt. 29 Agustus 1844, *Geheim*. Lihat juga Arsip Nasional, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848* Jakarta: ANRI, 1973, hlm. 456.
 44. Van der Kemp, *op. cit.*, hlm 345.
 45. Nordholt, *op. cit.*, hlm 5.
 46. *Ibid*, hlm. 4.
 47. Singapura merupakan pusat perniagaan orang-orang Bugis di Asia Tenggara setelah kota itu didirikan oleh Raffles pada permulaan abad ke-19. Pada tahun 1824 penduduk Singapura yang berjumlah 13.740 orang sebagian besar terdiri dari orang-orang Bugis dan Melayu dan orang Bugis pula yang melakukan perniagaan paling banyak. Lihat Oliver, *op. cit.*, hlm. 65.
 48. *Ibid.*, hlm. 42.
 49. Tobing, *op. cit.*, hlm 49.
 50. Uka Tjandrasasmita (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hlm. 50.
 51. Nordholt, *op. cit.*, hlm. 6.
 52. F.A. Liefcrinck, *De Landsverordeningen der Balische Vorsten van Lombok*, I. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915, hlm. 292-298. Lihat juga Utrecht, *op. cit.*, hlm. 70-136.
 53. Liefcrinck, *Ibid*. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 125-131.
 54. V.E. Korn, *Het Adatrecht Van Bali*. s'Gravenhage: C. Naeff,

- 1932, hlm. 171.
55. Bloemen Waanders (1859), *op. cit.*, hlm. 139.
 56. *Ibid*, hlm. 183-184. Lihat pula Korn, *op. cit.*, hlm. 296.
 57. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 119. Putra Agung (1972), *op. cit.*, hlm. 312.
 58. Uka Tjandrasasmita (ed.), *op. cit.*, hlm. 66.
 59. Nielsen, *op. cit.*, hlm. 71. Lekkerkerker (1923), *op. cit.*, hlm. 265-269.
 60. Lauts, *op. cit.*, hlm. 90. Sebagai contoh, sejak 1 Januari 1842 kontrak pelabuhan Kuta telah dicabut dari tangan Mads Lange dan selanjutnya diserahkan kepada agen NHM dengan kontrak sebesar 4000 gulden setahun. Lihat Lekkerkerker (1923), *op. cit.*, hlm. 270.
 61. Lauts, *Ibid*, hlm. 91.
 62. *Matoa* yang berfungsi sebagai syahbandar banyak diketemukan di Nusantara dalam kurun abad 17-19. Lihat Utrecht, *op. cit.*, hlm. 119. Lihat pula Van Vollenhoven, *Het Adatrech van Nederlands Indie, I*, Leiden, 1906, hlm. 469.
 63. Lieftrinck, *op. cit.*, hlm. 20-23. Putra Agung (1972), *op. cit.*, hlm. 313.
 64. Raden Sosrowidjojo, *serat Purwotjarito Bali*. Batavia: Landsdrukkerij, 1875, hlm. 2, 25.
 65. *Ibid*, hlm. 2.
 66. Tulisan yang terdapat dalam mimbar mesjid Loloan-Jembrana.
 67. Nordholt, *op. cit.*, hlm. 28-29.
 68. Lekkerkerker (1923), *op. cit.*, hlm. 229-235.
 69. Lauts, *op. cit.*, hlm. 70-85.
 70. *Ibid.*, hlm. 86-87.
 71. Nielsen, *op. cit.*, hlm. 24.
 72. *Ibid.*
 73. Suhartoko, *Merantau Bagi Orang Wajo: Studi Kasus Tentang Hasrat Merantau Orang Wajo*. Ujung Pandang: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, 1975, hlm. 7.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda 1839-1848*. Jakarta: ANRI, 1973.
- Agung, Anak Agung Gde Putra. "Masalah Perdagangan Budak di Bali", *Basis*, XX, 1971.
- Agung, Anak Agung Gde Putra. "Peranan Syahbandar di Lombok" dalam *Basis*, XXII, 1972.
- Broek, van den. "Verslag Nopens het Eiland Bali" dalam *De Oosterling*, I, 1835.
- Eerde, J.C. van. *De Volken van Nederlandsch Indie, II*. Amsterdam: Elsevier, 1906.
- Eysinga, Rooda van. *De Kleine Soenda Eilanden*. Amsterdam: L. Bookkenus, 1841.
- Hoovell, W.R. Van. Baron. *Reis Over Java, Madura on Bali 1847*, I. Amsterdam 1849.
- Jonge, J.K.J. de. *De Opkomst Van Nederlandsch Gezeg in Oost Indie*, II s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1864.
- Kamp, P.H. van der. "Het Verblijf van Commisaris van den Broek op Bali", dalam *BKI*, 50, 1899.
- Korn, V.E. *Hot Adatrecht Van Bali*. s'Gravenhage: C. Naeff, 1932.

- Lauts, G. *Het Eiland Bali en de Balienezen*. Amsterdam: Met Eenekraat, 1848.
- Lekkerkerker, C. "Bali 1800-1814", *BKI*, 82, 1926.
- Lekkerkerker, C. "Het Voorspal der Vestiging van den Nederlandsche Macht op Bali en Lombok", *BKI*, 79, 1923.
- Lekkerkerker, C. *Bali en Lombok Overzicht der Literatuur Omtrent deze Eilanden tot Einde 1919*. Riswijk, Blank Waar & Schooven, 1920.
- Liefcrick, F.A. *De Land Verordeningen der Balische Vorsten van Lombok I*, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915.
- Lier, H.F. van "Aanteekeningen Omtrent het rijk Djembrana" *TBG*, 15, 1866.
- Nordholt, Henk Schulte. *The Lange Connection A Danish Trader of Bali in the Middle of the 19th Century: Broker and Buffer*.
- Kertas kerja, 1980.
- Nielsen, A.K. *Leven en Avonturen van een Oostinjevaarder op Bali*. Amsterdam, 1928.
- Noorduyn, J. *Islamisasi Makassar*. Terjemahan Seri Bhratara, Jakarta, 1972.
- Oliver, J.Z. Johannes. *Land en Zeetogten in Nederland's Indie en Eenige Britische Etablissement I*, Amsterdam: C.G. Sulpke, 1930.
- Roon, J. Van. *Aanteekeningen Omtrent Bali*. Amsterdam: C.P.J. Van der Peet, 1906.
- Suhartoko. *Merantau Bagi Orang Wajo: Studi Kasus Tentang Hasrat Merantau Bagi Orang Wajo*. Ujung Pandang: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, 1975.
- Sosrowidjojo, Raden. *Serat Purwotjarito Bali*. Batavia: Landsdrukkerij, 1875.
- Tjandrasasmita, Uka (ed.). *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Utrecht, E. *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Bandung: Sumur-Bandung, 1962.

- Tobing, Ph.O.L. *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*. Ujung Pandang: YKSS, 1977.
- Vollenhoven, van. *Het Adatrecht van Nederlands Indie I*. Leiden, 1906.
- Waanders, P.L. Van Bloemen. "Dagverhaal Eenereies over Bali in Juni en Juli 1856, *TNI*, deel 2, 1870.
- Waanders, P.L. Van Bloemen. "Aanteekeningen Omtrent de Zeden en Gebruiken der Balinezen in Zouderheid die van Boeleng," dalam *TBG*, 8, 1859.
- Zollinger, Henri. "Reis Over Eilenden Bali en Lombok, Mei tot September 1846, dalam *VBG*, I, 22, 1849.

**PERANAN SUKU BUGIS—MAKASSAR DALAM AKTIVITAS
PERDAGANGAN DI KERAJAAN GOWA—TALLO
ABAD XVII
(oleh Anwar Thasibo)**

Munculnya Makassar dalam dominasi ekonomi dan politik di Indonesia bagian timur merupakan satu di antara kisah-kisah keberhasilan yang cukup cepat dan spektakuler dalam sejarah Indonesia. Kesuksesan ini dicapai hanya dalam tempo satu abad yaitu sejak adanya tanda-tanda yang dapat disebut sebagai upaya bersama, untuk menggabungkan dua masyarakat dalam satu penguasa (Gowa-Tallo)¹, yang selanjutnya dalam tulisan ini dinamakan Makassar, sampai masa jayanya pada pertengahan abad ke-17. Kesukaran ini juga ditunjang oleh adanya beberapa hal yang menyebabkan perobahan pola dagang Asia Tenggara sekitar awal abad ke-17, yang nampaknya justru menguntungkan Makassar. Portugis kehilangan basis yang paling menentukan di Jawa ketika Balambangan jatuh kepada orang Muslim, yang berarti hilangnya sumber beras utama mereka untuk Malaka dan perdagangan dengan Maluku. Makassar adalah satu alternatif yang logis dan Raja Makassar menyambut baik kedatangan mereka. Kebutuhan Portugis dalam perdagangan di Makassar menjadi makin penting ketika Belanda memperbesar

tekanannya atas mereka di Maluku.² Permusuhan yang sengit yang dilancarkan Belanda atas pedagang-pedagang Eropa utamanya Portugis membuat pedagang Portugis mengalami kesulitan di setiap pelabuhan utama Asia Tenggara tapi demikian halnya di Makassar. Raja Makassar menjaga sekonsisten mungkin kebijaksanaan pintu terbuka bagi semua pedagang dan melarang adanya monopoli.³ Ketika Belanda untuk pertama kalinya melakukan hubungan melalui surat (1607), balasan yang mereka terima bahwa sang Raja menyambut baik kedatangan mereka di Makassar untuk tujuan dagang, tapi tidak boleh melengkapi diri dengan senjata.

Sampai tahun 1620 bangsa Eropa telah mempunyai perwakilan-perwakilan dagang yang tetap di Makassar, seperti Inggris pada tahun 1613, Denmark pada tahun 1618, sementara pedagang Spanyol dan Cina berturut-turut muncul pada tahun 1615 dan 1619.⁴ Selain bangsa asing, suku bangsa sendiri juga telah banyak melakukan perdagangan dengan Makassar, utamanya orang Melayu, orang Jawa, dan pedagang dari Kalimantan serta pulau-pulau di sebelah timur.⁵ Dalam sumber lontara, hubungan dagang semacam ini dikenal dengan sebutan *passaribattangang* (persaudaraan).

Alasan masuknya pedagang-pedagang suku maupun bangsa bukan semata-mata untuk berdagang, tapi juga karena kebebasan dan keamanan mereka dengan harta bendanya. Makassar rupanya menjadi pasar utama di Nusantara untuk rempah-rempah Maluku yang amat berharga khususnya bagi bangsa asing. Pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu dan Makassar yang bertempat tinggal di Makasar menempuh resiko menyusup blokade untuk membeli rempah-rempah dari Maluku, kemudian menjualnya kepada orang asing yang ada di Makassar maupun di tempat-tempat lainnya yang ada di Nusantara.

Munculnya Makassar

Karena tak ada data-data yang dapat diperoleh tentang Makassar dan daerah-daerah sekitar barat daya di tahun-tahun

sebelum tahun 1500, maka makalah ini akan dimulai pada sebuah ceritera dalam lontara yang menceritakan seorang raja Makassar yang mempunyai kekuatan magis, seperti dapat mendengar suara rambut yang dipotong di Jawa, mencium bau bangkai binatang yang mati di Selayar dan dapat melihat burung merpati yang terbang di Bantaeng.⁶ Yang paling menarik buat kita bukan terletak pada kekuatan itu, tapi nama-nama tempat yang disebutkannya. Dalam buku Negara Kertagama yang ditulis pada abad ke-14 juga menyebutkan ketiga tempat itu yaitu Bantayan (Bantaeng), Luwu (Palopo) dan Uda (tidak diketahui). Semuanya merupakan bagian dari sebuah pulau dengan Bantaeng sebagai tempat utamanya. Sebagai tambahan disebutkan pula sejumlah pulau yang terpisah termasuk di dalamnya Selayar, Buton dan Makassar yang baru disebutkan di deretan belakang.⁷ Kemudian nama-nama tempat seperti Surabaya (Takalar), Djipang dan Garasi yang terletak di mulut Sungai Jeneberang. Semuanya adalah nama-nama kota di Jawa Timur yang mungkin pernah mengirimkan pedagang-pedagangnya ke arah ini.⁸

Jelaslah bahwa sebelum kemunculan Makassar, telah ada hubungan dagang dengan orang Jawa di beberapa tempat sepanjang pantai Selatan Sulawesi. Di Selayar ada peninggalan sebuah kapal yang dihiasi ukiran naga bersayap di bagian haluannya dan tulisan "Sultan Malik Tuban" di bawah penyangga kemudi. Tuban adalah pelabuhan Islam di Jawa Timur yang setia pada raja-raja di pedalaman yang beragama Hindu, dan kita bisa menganggap peninggalan ini berasal dari sebuah kapal Jawa dari abad ke-15 dan 16. Tradisi oral dan tertulis menyatakan bahwa Birma yaitu pusat pembuatan kapal di Semenanjung Tenggara Sulawesi Selatan berasal dari suatu kelompok pedagang Jawa kaya yang terdampar.⁹

Selain orang Jawa, Suku Bajau yang sebagian besar hidup mereka dihabiskan di atas perahu dan ketergantungan total pada laut untuk penghidupan mereka, namun mereka tidak diragukan lagi untuk tetap mengabdikan pada raja yang memerintah di masa

itu.¹⁰ Lokasi favorit orang Bajau si pencita laut ini adalah sekelompok pulau karang yang membentang di laut di depan Makassar dan pantai utara yang merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang cukup banyak. Salah satu tugas mereka adalah berkeliling ke seluruh pulau-pulau yang berada jauh di lautan untuk mengumpulkan kulit penyu yang wajib mereka persembahkan pada raja Makassar. Terlebih-lebih lagi mereka harus siap berlayar ke mana saja mereka diperintahkan, yang dari waktu ke waktu raja merasakan adanya perkembangan mereka menjadi abdi raja yang sangat berguna.¹¹ Meskipun demikian penting dicatat bahwa suku Bajau inilah yang pertama kali memperkenalkan daerah Makassar di daerah Melayu. Kecenderungan mereka bertempat tinggal di pulau-pulau membuat kita berpikir bahwa Makassar sendiri adalah sekelompok pulau-pulau seperti yang disebutkan dalam buku Negara Kertagama.

Dari semua keterangan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa suku Makassar di pantai sebelah selatan telah mengadakan kontak dengan pedagang Jawa selama beberapa abad sebelum tahun 1500, dan beberapa kerajaan kecil yang cukup punya arti berada di Bantaeng, Siang dan mungkin di suatu tempat yang lain. Selain di pantai, di sebelah barat Makassar masih terdapat sebuah kerajaan yang ibu kotanya sebuah pelabuhan sungai yang merupakan pusat dari suku Bugis. Menurut dugaan pelabuhan itu berada di daerah Siang (Pangkajene-Maros). Pada saat orang Portugis mengunjungi Siang pada tahun 1540, mereka menjumpai pedagang-pedagang utama yang ada di sana berasal dari Ujung Tanah (Johor), Pahang dan Patani, dan mereka telah berdagang di daerah itu 50 tahun yang lalu.¹² Saudagar-saudagar Muslim dari Melayu yang mungkin dulunya berasal dari Malaka sebelum ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 telah mengikuti rute yang dipelopori orang Bajau menuju Sulawesi Selatan. Mereka nampaknya tidak dalam perdagangan menuju Maluku untuk mencari rempah-rempah seperti pedagang-pedagang dari Jawa yang sering singgah di tempat-tempat sebelah dan tenggara, tetapi mereka mengumpulkan barang-barang

eksport Sulawesi Selatan seperti kayu cendana hasil-hasil laut seperti kulit penyu dan Budak.¹³ Sumber-sumber dari Portugis menceritakan lebih banyak lagi tentang pelabuhan dan ibu kota Siang sebagai pusat komersil terpenting pada tahun 1500 yang telah dikunjungi oleh pedagang-pedagang Melayu,¹⁴ tapi Gowa rupanya memiliki kelebihan militer atas Siang.

Kelompok-kelompok desa kecil di lembah sungai Jeneberang, daerah Bantaeng dan daerah kekuatan armada suku Bajau di pulau-pulau lepas pantai memungkinkan berdirinya kerajaan Gowa. Hal ini mungkin terjadi pada abad ke-15 atau lebih awal lagi, meskipun kita tidak memiliki bukti yang kuat tentang eksistensi Gowa sebagai satu kerajaan yang penting sampai kemudian tiba rejim Tumapparisik Kelloma (1512-1548). Dalam lontara Gowa menyebutkan bahwa raja ini adalah raja yang pertama kali menyusun kode hukum dan cara menyatakan perang, syahbandar raja ini dinamai Daeng Pamatte, dia adalah syahbandar dan sekaligus Tumailalang (penghubung raja dengan Bate Salapang atau Dewan Kerajaan).¹⁵ Penyebutan istilah "Syahbandar" atau pengusaha pelabuhan mempunyai arti bahwa pedagang-pedagang asing dari Persialah yang pertama kali mengadakan hubungan dagang dengan Gowa jaman pemerintahan Tumapparisik Kelloma, kemudian disusul oleh seorang pedagang Portugis bernama Paira, yang memindahkan kapal-kapalnya ke selatan dari pelabuhan resmi Siang¹⁶ ke Gowa, karena kapal-kapal jauh terlindung dari angin, begitupun saudagar-saudagar Muslim Melayu memindahkan pangkalan operasinya ke daerah Gowa jaman pemerintahan Tunipallanggak (1546-1566).¹⁷

Beralihnya pedagang-pedagang Portugis dan orang Melayu dari Siang ke Gowa sehubungan dengan adanya usaha-usaha Portugis dalam mengkristenkan pemimpin Siang yang mana memaksa pedagang Muslim mencari hubungan di tempat lain termasuk daerah Tallo.¹⁸ Tallo rupanya adalah negara maritim sejak berdirinya yang kemungkinan sangat bergantung pada pedagang Melayu, Jawa dan Bajau. Setelah kembali dari Jawa "Karaeng Loe" pengusaha Tallo, segera mendirikan satu kerajaan

an kecil di satu daratan di mulut sungai Tallo yang mengalir ke utara kemudian pindah ke mulut sungai karena ibu kotanya yang semula sudah tidak cocok lagi, karena tidak berada di dekat laut tapi juga di dekat bukit.

Lokasi baru tersebut terlindung secara alamiah dari laut sebelah utara, Sungai sebelah timur dan selatan, dengan tanah datar yang terdampar di sebelah barat. Putera pengganti Karaeng Loe dikatakan pernah berlayar ke barat (Malaka) dan ke timur (Banda). Isteri-isteri pemimpin kedua ini semuanya berasal dari pantai,¹⁹ dari masyarakat dagang Garassi di mulut sungai Jenekberang, dari Siang dan seorang wanita keturunan Jawa dari Surabaya. Penguasa ketiga Tallo Tunipasuruk, dinyatakan pernah berlayar ke Malaka dan Johor di mana dia memiliki hutang yang banyak.²⁰

Tunipasuruk (1547) raja dari Tallo berusia sebaya dengan Tumapparisik Kelloma (1548-1566) raja dari Gowa. Setelah Tunipasuruk gagal membendung ekspansi militer Gowa, maka ia mengundang Tumapparisik Kelloma untuk mengadakan persekutuan dan berakhir bahwa siapa saja yang menginginkan memisahkan Gowa dan Tallo akan dikutuk Tuhan. Ikrar ini sebenarnya hanya merupakan dalih untuk memelihara hubungan antara Gowa dan Tallo seperti buku Sejarah Melayu yang menyatakan pembelaan atas Sultan dan Bendahara sebagai satu penyangga fundamental atas kedaulatan Malaka, dan untuk paper ini tentu saja kedaulatan Makassar. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata penguasa-penguasa dari Tallo yang memainkan peranan penting dalam kerajaan gabungan tersebut sebagaimana disinyalir oleh Anthony Reid.²¹

Perdagangan Laut

Peranan Selat Makassar dalam perdagangan laut tidak dapat dipisahkan dengan jalur besar perdagangan laut yang memanjang dari bagian barat ke bagian timur kepulauan Nusantara. Selat Makassar hanya merupakan jalur simpang dari jalur besar tersebut. Sumber-sumber sejarah cukup menunjukkan

bahwa perdagangan Makassar melalui laut telah berlangsung jauh masa silam. Di pantai barat dan selatan pulau Sulawesi banyak terdapat pelabuhan-pelabuhan perahu yang berperan dalam perdagangan laut, seperti pelabuhan perahu Bantaeng, Pankajenek, Selayar, Bira, Mandar, Luwu dan beberapa lainnya.

Dari sekian banyak pelabuhan perahu di sepanjang pantai barat dan selatan, dalam perkembangan selanjutnya nampak ada beberapa di antaranya yang berkembang menjadi bandar besar. Bandar Selayar, Sombaopu dan Ara karena letaknya yang tepat di jalur-jalur besar perdagangan laut yang menunjang dari Malaka ke Maluku memperoleh kesempatan yang baik untuk berkembang dengan pesat. Ditinjau dari letak geografinya ketiganya merupakan titik-titik pertemuan jalur laut yang menyusuri pantai barat dan selatan di satu pihak dan jalur laut yang memanjang menyusuri pantai utara dan ujung Sulawesi Selatan sampai ke kepulauan Maluku di pihak lain. Ketiga bandar ini juga mempunyai keadaan alam di daerah pedalaman yang sangat subur, cukup banyak membantu bagi perkembangan bandar-bandar tersebut.²² Produksi beras pada setiap musim panen selain untuk konsumsi setempat juga menjadi barang dagangan eksport ke daerah lain yang diangkut dengan perahu buatan daerah Bira.²³

Pada masa ketika jalan-jalan darat yang menghubungkan antar daerah di Makassar masih dalam kondisi yang belum memadai maka jalur sungai merupakan jalur yang lebih mudah untuk dilalui. Kondisi sungai Jeneberang begitu baik dan memungkinkan perahu ukuran sedang dan kecil untuk mengarunginya sepanjang tahun, bahkan dapat dimudikinya jauh ke pedalaman. Sungai Tallo sungai besar kedua yang juga menghubungkan daerah di pedalaman dengan bandar Sombaopu tidak kurang pentingnya untuk lalulintas perdagangan. Lembah sungai Tallo sangat subur. Dalam beberapa hal Sungai Tallo lebih baik keadaannya untuk lalulintas perahu dibanding dengan sungai Jeneberang. Tidak seperti sungai Tallo, pada musim di

tengah-tengah sungai Jeneberang banyak muncul tanah-tanah atau batu-batu padas yang dapat mengganggu lalu lintas perahu. Tanah tepi sungai ini cukup landai dan arus airnya pun deras sehingga cukup menyulitkan untuk di arungi. Letak bandar yang menguntungkan dan daerah pedalaman yang subur memungkinkan Makassar atau bandar Sombaopu berkembang menjadi bandar penting, baik sebagai bandar import maupun sebagai bandar transito. Dalam abad ke-16 kedudukan Makassar semakin menonjol, bahkan dalam abad ke-17 bandar Sombaopu dapat mengatasi kedudukan bandar-bandar tetangganya.²⁴ Perkembangan ini sejajar dengan makin pentingnya kedudukan Makassar di bidang ekonomi dan politik.

Jalur besar perdagangan laut dari Malaka ke Maluku, memanjang dari Malaka ke selatan kemudian membelok ke timur melewati laut Jawa, melewati ujung selatan Pulau Sulawesi ke Laut Banda dan terus ke kepulauan Maluku. Selain itu ada juga jalur lain untuk menuju bagian utara kepulauan Maluku dengan menempuh rute utara setelah mengitari pantai atau selatan pulau Kalimantan dan melintasi jalan dari Laut Jawa melewati Selat Makassar. Jalur besar yang melewati Laut Jawa ke arah timur dapat ditempuh dengan menyusuri pantai utara pulau Jawa, pulau Madura, pulau Selayar dan terus mengarah ke Maluku.²⁵

Bagi pedagang Bugis-Makassar rute yang mula-mula ditempuh ke arah barat dengan menyusuri pantai utara Pulau Jawa terus menuju ke Malaka, setelah jalur ini semakin ramai digunakan oleh kapal-kapal Belanda yang berkedudukan di Batavia, dan perahu-perahu orang Jawa yang berada di Jawa Timur maka rute ini jarang dilalui lagi. Rute yang lain yaitu melalui pantai selatan Pulau Kalimantan atau mengitari pantai utaranya, dan terus menuju ke Malaka merupakan pilihan yang baik bagi pedagang Bugis Makassar²⁶ begitupun orang Portugis yang menghindari pertemuannya dengan kapal-kapal Belanda yang sedang menuju ke Maluku.

Angin barat yang berhembus antara bulan November sampai bulan Maret digunakan oleh pelayar-pelayar pribumi maupun asing yang berada di bagian barat untuk mengunjungi daerah-daerah bagian timur Nusantara. Bagi pedagang Bugis Makassar yang berada di Makassar dalam perlawatannya menuju ke Maluku untuk menjual barang dagangannya atau membeli hasil-hasil daerah itu, utamanya rempah-rempah, mereka mengitari ujung selatan Pulau Sulawesi kemudian singgah di Pulau Butung dan selanjutnya menuju ke Pulau Banda. Dalam perjalanan menuju pulau ini mereka sering bertemu dengan pedagang Jawa atau Madura.

Kota bandar Makassar atau Sombaopu yang termasuk dalam rute jalur besar perdagangan laut menuju ke arah barat dan timur Nusantara, juga merupakan jalur utama perdagangan laut Selat Makassar yang mempunyai peranan penting untuk menghubungkan bandar satu dengan lainnya, baik yang sama terletak di sepanjang Selat Makassar maupun di pulau lain. Pelayaran antar bandar dan pelabuhan perahu sepanjang Selat tersebut dilakukan dalam rangka perdagangan, penangkapan ikan dan juga dalam rangka urusan pemerintahan. Melalui Selat Makassar maka dimungkinkan adanya hubungan dagang di Pulau Kalimantan bagian barat, di Pesisir utara Jawa Timur, Nusa Tenggara dan sebagian besar kepulauan di sebelah timur Pulau Sulawesi, mereka sama mengakui eksistensi Makassar sampai tahun 1660 sebelum kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda.²⁷

Apabila pelayaran dari bandar di pantai barat Pulau Kalimantan dan bandar di Selat Madura dilakukan dengan melintasi Selat Makassar, maka pelayaran dari bandar Sombaopu ke pelabuhan-pelabuhan perahu lainnya di pantai barat dan selatan daratan Sulawesi Selatan dilakukan dengan menyusuri pinggiran pantai. Lama pelayaran sebenarnya tidak dapat dijadikan ukuran secara pasti mengenai jauh jarak tempuh karena cuaca, angin dan gelombang laut dapat memperlambat perjalanan.

an. Di samping itu lama atau tidaknya singgah di daerah yang dilalui juga akan menentukan lamanya pelayaran.

Para pedagang dan nelayan memanfaatkan Selat Makassar dan Teluk Bone baik untuk penangkapan ikan maupun pelayaran ke tempat-tempat pemasarannya di seberang Selat ataupun di daerah-daerah terdekat dari tempat pangkalannya. Dilihat dari segi ini maka Selat Makassar dan Teluk Bone dapat diibaratkan sebagai halaman luas milik bersama antar bandar dan desa pantai, antar pedagang dan nelayan, lautan yang luas dan terbuka bagi siapa saja yang mempunyai keperluan.

Peranan Pedagang Bugis—Makassar

Di samping faktor-faktor alam yang berpengaruh pada perkembangan dan daerah tetangganya terutama yang berada di Selat Makassar, perlu ditinjau seberapa jauh faktor manusia yang berperan di dalamnya. Nampak sekali bahwa pedagang-pedagang suku Bugis-Makassar memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.

Mereka melakukan kegiatan dalam perdagangan laut dan mengadakan perlawanan keliling dengan perahu-perahunya. Dalam menempuh rute barat mereka membawa barang dagangan seperti beras, kayu cendana, garam, rempah-rempah, kulit penyu dan lain-lainnya dengan menyusuri pantai utara Jawa dan pantai selatan Kalimantan, kemudian singgah di bandar-bandar yang dilaluinya untuk mengambil bahan makanan dan air minum. Di Jawa mereka menambah barang dagangan yaitu garam yang banyak dihasilkan di Gresik dan Jaratan²⁸ yang selanjutnya dijual di Banten, kemudian meneruskan perjalanan ke bandar-bandar pantai timur Sumatera seperti Palembang, dan Jambi untuk selanjutnya menuju ke Malaka. Di Kalimantan mereka terlebih dahulu singgah di Donggala mengambil korma dan rotan yang selanjutnya menyeberang ke Samarinda dan beristirahat selama waktu yang diperlukan di Pulau Laut memperbaiki perlengkapan pelayaran dan mengatur barang dagangan. Setelah selesai mereka berlayar menuju Banjarmasin dan

Pontianak dengan menjual barang-barang dagangan yang tidak laku di daerah yang dilaluinya dan selanjutnya menuju ke Malaka.

Pedagang Bugis-Makassar meninggalkan bandar Malaka untuk kembali ke Makassar dengan membawa barang dagangan setempat seperti lada yang banyak dihasilkan di Semenanjung Malaka, maupun barang dagangan lain yang dibeli dari pedagang asing seperti kain sutera, porselin, barang pecah belah dan barang dagangan lainnya, selanjutnya mereka kembali ke tempat asal. Di tempat asal mereka beristirahat untuk beberapa lamanya sambil mempersiapkan barang dagangan yang akan dibawa dengan menempuh rute ke arah timur ke kepulauan Maluku sampai ke Ternate.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa jumlah perahu-perahu dagang semacam ini cukup banyak, karena tiap-tiap perahu hanya dapat mengangkut barang dagangan terbatas. Perdagangan keliling dalam jumlah barang terbatas merupakan sifat perdagangan pada masa lalu. Dengan pengertian ini dapat digambarkan bahwa jalur besar berbagai suku maupun bangsa.

Mereka yang berangkat dari Makassar menuju timur dengan mengambil sisi baratdaya Sulawesi, turun melintasi pulau Selayar dan pulau Tanahjampea, lalu menuju ke tenggara mengitari ujung timur laut pulau Timor. Di pulau Kisar mereka beristirahat mengisi air minum, mengumpulkan rotan dan bambu untuk keperluan penangkapan teripang bagi mereka yang ingin berlayar ke pulau Kei dan pantai utara Australia,²⁹ yang lainnya langsung menuju ke Buton untuk menjual barang yang dibawanya berupa perhiasan, kain Selayar dan alat-alat rumah tangga.

Musim perdagangan pala, bunga pala dan cengkih di Banda sebenarnya jatuh pada bulan Januari dan April,³⁰ namun demikian pedagang-pedagang tidak dapat datang sekehendaknya maka perlu kuasa dagang.³¹ Bagaimana juga perahu layar mereka tidak akan dapat berlayar tanpa angin. Mereka baru me-

ninggalkan Pulau Banda dan pulau lainnya di daerah Maluku pada bulan April atau sesudahnya waktu angin musim membalik menghembus dari timur. Ketergantungan akan angin musim menyebabkan adanya kesibukan pedagang yang berulang tetap dalam setiap tahunnya.

Dalam pelayarannya ke Ambon, mereka membawa juga beras, barang-barang dari porselin, kain dan barang lain. Di Ambon barang itu dijual dengan memperoleh keuntungan. Pelayaran perahu-perahu dari Jawa ke Makassar menuju Maluku cukup ramai, selain Maluku merupakan penghasil rempah juga merupakan pasaran beras dan barang lainnya yang sangat menguntungkan. Transaksi dagang pada waktu itu pada umumnya dilakukan secara barter. Beras dan barang dagangan lainnya yang dibeli di bandar bagian barat oleh pedagang Bugis-Makassar kemudian dijual secara barter dengan rempah-rempah di Maluku. Penukaran secara barter didasarkan pada perbandingan kesatuan yang telah ditetapkan oleh kedua pihak. Sistem penukaran seperti ini berlaku juga bagi barang-barang dagangan yang berasal dari negeri asing, misalnya imbalan pertukaran antara buatan India dalam potong dengan rempah-rempah dalam kesatuan bahar.³² Di Banda selain kain buatan barang dagangan lain seperti sutera, porselin dan barang perkakas juga dapat ditukarkan secara barter dengan rempah. Penukaran barang dagangan ini dapat secara langsung, dalam arti barang yang satu diganti dengan barang yang lain atau dapat juga dengan menggunakan barang lain sebagai alat penukaran.

Rempah-rempah yang diperoleh setelah terjadi transaksi oleh pedagang Bugis-Makassar dibawa ke bandar sebelah barat, seperti Makassar, Banjarmasin, Banten, dan Malaka. Hubungan dagang antara Makassar dan Ternate juga telah ada sejak lama. Raja Ternate yang diketahui telah memeluk agama Islam sudah barang tentu lebih memudahkan pedagang Makassar berhubungan dagang dengan daerah itu. Maluku dan Ternate sangat tergantung akan kebutuhan berasnya pada Makassar. Bandar

Sombaopu yang berada di bawah kekuasaan raja Gowa-Tallo pada sekitar tahun 1600 banyak mengekspor beras, baik ke bandar sebelah barat maupun ke bandar di sebelah timur seperti Maluku, Ambon.³³ Di bandar Sombaopu orang Portugis sering membawa tunai berupa mata uang timah Cina untuk kemudian diserahkan kepada pedagang Bugis-Makassar dan Melayu yang akan pergi ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Para pedagang ini yang menerima semacam uang muka memberi jaminan secara tertulis. Surat tanda terima ini ditulis dalam bahasa Melayu.³⁴

Nampak jelas bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang lazim digunakan di kalangan para pedagang di samping penggunaan bahasa daerah bagi pedagang sesama suku. Mengingat bahwa sejak abad ke-16 pedagang Bugis-Makassar mengadakan kontak dengan pedagang Portugis, maka tidak mengherankan apabila banyak di antara pedagang pemilik modal dan bangsawan cukup mengerti bahasa Portugis.³⁵ Bahasa ini pula yang merupakan bahasa pengantar antara pedagang Belanda dan Syahbandar pada waktu mereka pertama kali bertemu.

Uraian secara khusus tentang peranan pedagang-pedagang Bugis-Makassar dalam perdagangan antar pulau di kawasan Nusantara ini tidak bermaksud mengecilkan peranan dan kegiatan pedagang-pedagang suku bangsa lainnya. Pada dasarnya arah dan tujuan pedagang tersebut bersilangan, meskipun musim pelayaran bersamaan. Terdapatnya perkampungan-perkampungan pedagang dari aneka suku maupun bangsa yang tersebar di bandar-bandar Nusantara menunjukkan adanya dagang silang-menyalang tersebut.

Sumber-sumber banyak menyebutkan bahwa bandar Sombaopu di Makassar begitupun yang berada di sekitar Selat Makassar kerap kali dikunjungi oleh pedagang lain pulau maupun pedagang asing, namun demikian bandar Sombaopu merupakan tempat penimbunan barang dagangan cengkih, pala, beras, dan lainnya dari berbagai penjuru untuk diperjualbeli-

kan di pasar bandar. Sudah barang tentu suasana bandar menjadi ramai pada saat kedatangan perahu-perahu besar jarak jauh. Pelayaran ke pantai yang berdekatan dapat dilakukan setiap saat, namun yang jarak jauh harus menunggu musim tertentu untuk sampai ke Makassar.

Kontak Dengan Pedagang Belanda

Gambaran tentang keadaan bandar Makassar pada akhir abad ke 16 dan permulaan abad ke-17 menjadi jelas setelah pedagang-pedagang Jawa, Melayu dan lainnya datang berdagang di situ. Selain melakukan perdagangan mereka juga membangun dan membuat gudang penimbunan barang dagangan yang mereka beli dan bawa dari beberapa penjuru dan kemudian akan diperjualbelikan di daerah lain. Seperti biasanya perdagangan laut waktu itu, sebagian besar perdagangan dikuasai oleh kaum bangsawan atau saudagar kaya. Penguasa ini mempunyai hak beli lebih dahulu bagi barang dagangan yang datang dan memborong barang dagangan yang tidak terjual dengan harga yang murah. Sebagai kelaziman yang telah lama ada, pedagang asing terlebih dahulu memberikan prioritas kepada penguasa untuk memilih barang dagangan yang baik dengan harga yang rendah dari pembeli lainnya. Hubungan baik dengan penguasa setempat diperlihatkan untuk kelancaran usaha perdagangan mereka.

Meskipun perdagangan laut di Makassar dikuasai oleh kaum bangsawan, namun demikian pengurusan langsung usaha dagang ditangani oleh orang-orang yang mereka percayai. Kaum bangsawan lebih bertindak sebagai penanam modal dalam perdagangan dan pemilik sebagian besar perahu.

Untuk keperluan khusus dengan melalui Syahbandar pedagang-pedagang asing dapat mengadakan kunjungan pada penguasa pantai, seperti untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan mereka di tempat itu. Dalam aktivitas perdagangan ditemukan adanya keterikatan bagi setiap awak perahu pada semacam kode etik pelayaran

yang harus memperhatikan tiga kepentingan. Pemilik perahu, pemilik modal yang membiayai perlawatan dan nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pelayaran. Sebelum pelayaran dimulai, pemilik perahu terlebih dahulu mencari pemilik modal dan seorang nahkoda. Tapi, biasanya pemilik perahu sekaligus pemberi modal, bahkan seringkali menjadi nahkodanya. Tentang nahkoda sendiri logis bila sebagian besar terdiri dari orang Bugis-Makassar, namun pemilik modal atau pemilik perahu ternyata beragam bangsa atau raja dan bangsawan,³⁶ dengan demikian bisa ditarik garis pemisah antara golongan yang melakukan budi daya perdagangan dan penguasa pelayaran.

Ada dua bentuk modal yang diberikan oleh pemilik saham. Modal berupa suplai bahan makanan dan peralatan, serta modal yang berupa utang yang dipinjamkan kepada nahkoda serta awak perahu orang perorang, pengembaliannya dapat berupa upah atau dari hasil penjualan muatan perahu. Menjual barang dagangan adalah hal yang pertama yang dilakukan sekembalinya dari pelayaran, dalam hukum disebutkan bahwa pemilik modal, nahkoda dan awak perahu harus mencapai kesepakatan untuk melakukan penjualan. Jika dua pihak yang disebutkan terakhir "tidak bisa ditemui" barulah pemilik modal melaksanakan sendiri penjualan. Dalam banyak kasus pemilik modal acapkali menjadi pembeli barang yang dimodalinya, atau menjadi calo dengan hak komisi.

Seorang kapten biasanya disebut punggawa atau nahkoda seperti biasa dipakai oleh orang Melayu, sementara para awak disebut sawi. Ada istilah juragan yang agak dikacaukan pengertianannya, tapi fungsinya sama dengan kapten, cuma juragan acapkali diasosiasikan dengan nahkoda sebuah perahu dagang, sementara nahkoda dikaitkan dengan kapten kapal. Ada pula seorang juru mudi dan juru bertugas mengawasi jangkar dan tali temali. Yang disebut pencala adalah petugas di tiang layar, sebagai pengawas lalu lintas laut. Semua perahu yang digunakan nampaknya tidak memiliki model baku. Nama-nama seperti

bago, pinisi, palari termasuk jenis perahu yang berbadan besar dan panjang, sedang labondeng berbadan pendek dan besar. Perahu yang lebih kecil diberi nama lepa-lepa, sande dan pakur yang berfungsi sebagai pengangkut jarak dekat.

Jika satu pusat perdagangan berpindah tempat, maka saudagar yang berjumlah banyak masing-masing membawa barang dagangannya yang berjumlah beberapa pikul sutera, beberapa peti porselin dan beberapa puluh karung rempah. Jadi barang-barang yang didagangkan ini terdiri dari barang mewah yang tinggi harganya. Melihat keadaan barang dan sifat perdagangan laut waktu itu, sudah jelas mengapa pusat-pusat perdagangan di Nusantara bisa berpindah-pindah tempat.³⁷

Perpindahan orang Belanda ke Makassar untuk berdagang sejak tahun 1603 telah menghasilkan banyak keuntungan. Pada tahun 1607 pemimpin ini dipecat karena terlalu banyak melakukan kecurangan yang merugikan VOC.³⁸ Dalam tahun itu juga laksamana Belanda di Banda mengutus Abraham Mathst ke Makassar untuk membicarakan usaha-usaha peningkatan perdagangan yang sudah ada, juga mengusulkan agar Makassar bersama-sama Belanda memerangi Banda, dengan perjanjian bahwa perdagangan rempah yang dikuasainya juga akan memberikan keuntungan bagi perdagangan Makassar, tapi ajakan itu ditolak oleh Sultan.³⁹

Untuk menggantikan Claes Leursen, VOC mengirim Samuel Denis yang tiba di Makassar pada tahun 1611, saat Makassar sibuk melakukan pengislaman terhadap kerajaan sekitarnya. Sebagai akibat dari peperangan ini maka perdagangan di Makassar mengalami kemerosotan, harga beras meningkat dan pengambilan rempah-rempah di Maluku kurang aktif, menyebabkan timbulnya kesulitan Belanda di situ. Karena kesulitan itu Denis gagal memberikan keuntungan dalam usahanya, ia kemudian diganti oleh Abraham Sterck tetapi mengalami nasib yang sama.

Ajakan untuk memerangi Banda, adanya perdagangan bebas dan dukungan Raja atas suplai beras milik Portugis ke

Maluku merupakan hal-hal yang menimbulkan kebencian Belanda terhadap Makassar yang nantinya menimbulkan beberapa kasus menuju perang. Usaha Belanda untuk melaksanakan monopoli perdagangan di Pulau Banda, Ternate dan Kepulauan Maluku yang termasuk dalam jaringan perdagangan Makassar ditentang oleh Raja yang akhirnya timbul beberapa peristiwa yang paling penting dapat disebut sebagai berikut: (1) peristiwa tahun 1636, tatkala Belanda memblokir kota Makassar, diakhiri dengan dicapainya perjanjian perdamaian tahun 1637, (2) perang terbuka pada tahun 1655, ketika Makassar berusaha mengambil Buton dari tangan Belanda, (3) peristiwa tahun 1660, ketika Belanda menyerang Makassar dan menduduki benteng Panakukang, diakhiri dengan perjanjian perdamaian tahun 1660, (4) perang tahun 1666, yang terkenal dengan perang Makassar, diakhiri dengan perdamaian tahun 1667.⁴²

Peristiwa satu, dua dan tiga tidak banyak menggoncangkan Makassar walaupun perjanjian yang dicapai mengandung tuntutan dan tekanan terhadapnya. Peristiwa terakhir yaitu perang Makassar mempunyai akibat yang besar terhadap kedudukan Makassar sebagai satu kekuatan maritim yang banyak menggantungkan kemajuannya di lautan. Problem yang timbul sebagai akibat kekalahan Makassar adalah rasa dendam dan ketidakpuasan atas perjanjian. Banyak bangsawan Bugis-Makassar meninggalkan daerah dengan pengikutnya menuju ke arah barat, Jawa, Sumatera, semenanjung Malaka bahkan sampai ke Thailand.⁴¹ Campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan berakibat sering timbul pertentangan dalam pengangkatan raja-raja. Keadaan yang demikian semakin memperlemah kedudukan Makassar yang sesungguhnya telah lemah oleh lenyapnya sebagian wilayahnya, sumber penghasilannya.

Dua pengganti raja kemudian yaitu Sultan Ali (1674-1677) dan Sultan Abdul Jalil (1677-1709) menuntut agar daerah bekas kekuasaan dan hak untuk memungut pajak ditolak oleh Belanda sehingga sering menimbulkan perang kecil-kecilan.⁴²

Tertutupnya laut sebagai lapangan hidup dan berpindah ke tangan Belanda adalah usaha untuk mencegah orang Bugis-Makassar tampil dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Demikianlah orang Belanda tetap tinggal di Makassar, perdagangan diambil alih, zaman kejayaan Makassar telah sampai pada puncaknya, dan zaman keruntuhan berada di ambang pintu. Organisasi dan struktur pemerintahan dirombak, kebudayaan dipudarkan dan sisa-sisa kebesarannya dipunahkan dalam waktu yang tidak terlalu panjang.

DAFTAR CATATAN

1. Dalam hubungan ini Gowa memberikan andil dengan kekuasaan militernya yang selalu mengalami perkembangan secara efektif sedang Tallo menyumbangkan hubungannya dengan pedagang-pedagang asing dan teknologi mereka yang sudah maju.
2. Usaha mati-matian bangsa Portugis untuk mempertahankan kedudukannya di Maluku melawan Belanda pernah diuraikan oleh: C. Wessel dalam tulisannya "Portugee en en Spanjaarden in Molukken", dalam F.W. Stapel, ed., *Geschiedenis van Nederland Indie*, II, hlm. 218-221.
3. Ketika seorang duta Belanda mencoba bercerita pada orang Makassar bahwa, Belanda telah memonopoli Maluku dan perdagangan dari orang Makassar telah dilarang di sana, dia menerima jawaban dari Raja seperti yang termuat dalam Stapel, *Het Bongaais Verdrag* (Leiden: KITLV, 1922), hlm. 14-15.
4. Anthony Reid, *Great Seventeenth Century Indonesian Family Matoaya and Patingalloang of Makassar* (Jakarta: *Masyarakat Indonesia* 1981), hlm. 10-18.
5. Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, ed. A. Cortesao (London: Hakluyt Society, II, 1944), hlm. 226-227.

6. Wolhoff & Abdurrahim, *Sejarah Gowa* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara), hlm. 11.
7. Pegeud, *Java in the Fourteenth Century a Study in Cultural History* III (The Hague: Nijhoff 1960), hlm. 17.
8. Goudhart, "De Inlandsche rechtsgemeenschappen in de onderafdeling Bonthain" *Adatrechtbundels* 36, 1933, hlm 155-178.
9. Jufriana Rizal, *Kehidupan Wanita Bira* (Ujung Pandang: PLPIIS 1978), hlm 8.
10. Anthony Reid, *The Rise of Makassar* (Canberra: paper in understanding the landforms around Makassar 1981), hlm. 8.
11. Speelman, "Notitie diendende voor eenen Korte Tijd en tot nader last van de Hoge Regering op Batavia voor den onder-coopman Jan van Oppijnen" (Leiden: KITLV 1669), hlm. 43.
12. Wessel, "Wat staat geschiedkundige vast over de Oude Missie in Zuid-Celebes, *Studien* 103, 1925, hlm. 8.
13. Anthony Reid, 1981, *op. cit.*, hlm. 18.
14. Peldras, "Lees Premieres Donees Occidentales Concernant Celebes-sud. *BKI* 133, 1977, hlm. 423-252.
15. Wolhoff & Abdurrahim *op. cit.*, hlm. 18.
16. Schurhammer, *Francis Xavier: His Life, His Time*, trans. Joseph Costellce, II. (Roma: Jesuit Historical Institute 1977), hlm. 528.
17. Anwar Thosibo, *Pelayaran Orang Bugis-Makassar Abad XVII* (Yogyakarta: Tesis Fakultas Sastra UGM 1984), hlm. 74.
18. Anthony Reid, *op. cit.*, hlm 15.
19. Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 5-7.
20. *Ibid.*, hlm. 9.
21. *Ibid.*
22. Maros dan Wajo merupakan gudang beras yang besar di Makassar dan hasilnya berlimpah-limpah, Spelman, *op. cit.*, hlm. 11, Noorduyt, *Een Achttiende-eeuwse Kroniek van Wajif: Buginese Historiografie*, ('S-Gravenhage, 1955), hlm. 259-261.

23. Usman Pelly, *Ara dengan Perahu Bugisnya* (Ujung Pandang: PLPIIS, 1975), hlm 38.
24. Bernard Vleke, *Nusantara Sejarah Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1967), hlm. 128-129.
25. Sutjipto Tjiptoatmodjo, *Kota-kota pantai di sekitar Selat Madura* (Disertasi Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1983), hlm. 73.
26. Sutjipto Tjiptoatmodjo, loc. cit.
27. Lihat peta kerajaan Makassar dan daerah-daerah yang mengakui kekuasaannya sampai tahun 1660, Abdul Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara 1969), hlm. Lmp.: Anthony Reid, *op cit.*, hlm 42.
28. Pengambilan garam di Gresik dan Jaratan oleh perahu yang datang dari beberapa daerah termasuk Makassar termuat dalam *de Jonge, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie*, II, 1962, hlm 409.
29. Mengenai kunjungan perahu penangkap teripang ke Australia telah dibicarakan oleh C.C. Macknight dalam *Hemisphere* 13, 1969, hlm 7-14.
30. J.A. van der Chijs, *De Vestiging van het Nederland gezag over de Banda einlanden*, (Batavia 1886), hlm. 9.
31. Mengenai kuasa dagang di Banda, lihat B. Schrike, *Indonesian Sociological Study I*. (The Hague, 1955), hlm. 68; dan J.C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society*, ('S-Gravenhage, 1960), hlm. 110.
32. Bahar digunakan sebagai kesatuan berat dalam pertukaran dan sering berbeda ukurannya di setiap tempat, seperti bahar Maluku = 600 pun, bahar Malaka = 550 pun, lihat J.C. Van Leur, *op. cit.*, hlm 111.
33. Van der Broeke, *Pieter van der Broeke in Asia*, ed. W.PH. Coolhaas IV ('S-Gravenhage Nijhoff 1960), hlm. 58.
34. B. Schrieke, *op. cit.*, hlm 20, 27.
35. Anthony Reid, *op. cit.*, hlm 20.
36. Jumlah kapal di Makassar makin banyak pada tahun 1625,

- yang bekerja dengan persekot dari saudagar Inggris, Denmark dan Portugis, J/Keuning, op. cit., hlm. 36.
37. D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (Jakarta: Pradnyaparamita, 1956), hlm. 32.
 38. Mattulada, *Menyusuri kehadiran Makassar dalam sejarah* (Ujung Pandang: Bakti Baru 1982), hlm. 49.
 39. Mattulada, loc. cit.
 40. Edwar Poelinggomang, *Perlawanan rakyat Gowa terhadap pendudukan Belanda tahun 1905* (Yogyakarta: Tesis Fakultas Sastra UGM 1980), hlm. 20 Abdul Razak Patunru, op. cit., hlm. 26.
 41. L.Y. Andaya, "De VOC en de Malaise Wereld in de 17 de en 18 de Eeuw, dalam: M.A.P. Meilink-Roelofsz" *De VOC in Asia* (Fbula van Dishoeck, 1976), hlm. 123.
 42. Ligvoet, op. cit., hlm. 113.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulrazak Patunru, *Sejarah Gowa*, Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1969.
2. Andaya L.Y. "De VOC en de Malaise Wereld in de 17 de en 18 de Eeuw, dalam M.A.P. Melink-Roelofs" *De VOC in Asia*, Fibula van Dishoeck, 1976.
3. Anthony Reid, A Great Seventeenth Century Indonesian Family: "Matoaya and Patingalloang of Makassar" *Masyarakat Indonesia* VII, Juni 1981.
4. Bernard Vleke, *Nusantara Sejarah Indonesia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1976.
5. Burger, D.H. *Sejarah Sosiologis Indonesia*, Jakarta: Pradnyaparamita, 1956.
6. Edwar Palinggomang, *Perlawanan, Perlawanan rakyat Gowa terhadap pendudukan Belanda tahun 1905*, Yogyakarta: Tesis Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1980.
7. Goedart, O.M. "De Inlandsche Rechtsgemeenschappen in de onderafdeling Bonthain 1920", *Adatrechtbundels* 36, 1933.
8. Jufriana Rizal, *Kehidupan wanita Bira*, Ujung Pandang: PLPIIS, 1978.

9. Keuning, J. *Sejarah Ambon sampai pada akhir abad ke-17*, Jakarta: Bharatara, 1973.
10. Ligtoet A., Transcriptie van het dagboek der vorsten van Gowa en Tallo, met vertaling en aanteekeningen, *BKI*, 1880.
11. Macknight, dalam *Hemisphere* 131, 1969.
12. Mattulada, *Menelusuri kehadiran Makassar dalam sejarah*, Ujung Pandang: Bakti Baru, 1982.
13. Noordyn J. *Een Achttiende-eeuwse Kroniek van Wajo*, 's-Gravenhage, 1955.
14. Pelras C. "Lees Premires Donees Occidentales Concermant Celebes-sud" *BKI* 133, 1977.
15. Pigeud T.G., *Java in the Fourteenth Century: A study in cultural history*, The Hague Nijhoff, 1960.
16. Schrike B, *Indonesian Sociological Studies*, The Hague Nijhoff, 1955.
17. Schurhammer G, *Francis Xavier: His life, His times*, Rome: Jesuit Historical Institute, 1977.
18. Stapel F.W., *Het Bongaa's Verdrag*, Leiden; 1922.
19. ——— *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*, Amsterdam, 1938.
20. Sutjipto Tjiptoatmodjo, *Kota-kota pantai di sekitar Selat Madura*, Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1983.
21. Spalman, "Notatie diendende voor eenen Korte en tot nader last van de Hoge Regering op Batavia voor den ondercoopman Jan van Oppijnen" Leiden: KITLV, 1969.
22. Tome Pires, *The Suma riental of Tome Pires*, London: Hakluyt Society, 1944.
23. Usman Pelly, *Ara dengan perahu Bugisnya*, Ujung Pandang, PLPIIS, 1975.
24. Van der Broeke, *Pieter van der Broeke in Asia*, 's-Gravenhage Nijhoff, 1960.
25. Vander Chijs J.A., *De vestiging van het Nederlansch gezag over de Banda Einlanden*, Batavia, 1886.

26. Van Leur J.C., *Indonesian Trade and Society*, 's-Gravenhage Nijhoff in Zuid-Celebes".
27. Wessels, "Wat staat geschiedkundige vast over de Oude Missie in Zuid-Celebes" *Studien* 103, 1925.
28. Wolhoff & Abdurrahim, *Sejarah Gowa*, Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1981.

MASYARAKAT JAWA KUNA DAN MASALAH TANAH

(Oleh Edhie Wurjantoro)

I. Masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, sebagian besar hidup dari pertanian. Karena itu tanah memegang peranan penting sebagai faktor produksi, dan untuk pemakaiannya harus diatur sebaik-baiknya. Dalam hal ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Agraria dengan sungguh-sungguh berusaha mengatasi berbagai masalah yang berkenaan dengan penggunaan tanah, pemilikan tanah dan sebagainya. Usaha itu antara lain berupa pengaturan kembali pemilikan tanah (landreform) dan diberikan kepada para petani penggarap, penyelesaian sertifikat hak milik tanah dan pengaturan kembali penggunaan tanah. Tanah-tanah yang ditelantarkan akan dicabut hak pemilikannya, termasuk di dalamnya tanah-tanah perkebunan. Selain itu tanah-tanah pertanian hanya diperuntukkan bagi petani penggarap yang mencangkul, bukan orang-orang kota atau para cukong.

Sekitar lima sampai sepuluh abad yang lalu, pengaturan penggunaan tanah juga sudah dilakukan oleh pemerintah (kerajaan). Hal ini terlihat dari adanya beberapa kitab undang-

undang yang mengatur penggunaan tanah seperti misalnya *Rajapratigundala* dan kitab agama (Slametmuljana, 1967, hal. 37). Di dalam kitab *Negarakertagama* (pupuh 88, 3, 4) Kita memperoleh keterangan adanya perhatian pemerintah atas hak milik tanah dari rakyat. Dalam pupuh itu dikatakan bahwa "para wedana, akuwu dan tetua desa wajib memajukan wilayah desanya masing-masing. Sawah dan ladangnya harus dipelihara agar tetap subur. Tanah Milik rakyat dilindungi agar tidak sampai jatuh ketangan petani besar, sehingga mereka terusir ke desa tetangganya karena tidak mempunyai tanah lagi . . .". Kemudian di dalam pupuh 89, 3, disebutkan bahwa "segala makanan yang akan dimakan harus dimasak pagi-pagi . . . karena kota dan desa seperti halnya singa dan hutan, maka bila ladang rusak, negara akan kekurangan makanan.

Kalau tidak ada tentara, tentulah pulau lain datang menyerang, Karena itu jagallah dan peliharalah kedua-duanya sebaik-baiknya . . .".

Dari penghasilan bahan makanan. Agar petani dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya pada pekerjaan di ladang, maka segala keperluannya untuk makanan siang dan malam hari telah disiapkan sejak pagi hari. Sehingga mereka bisa bekerja dari pagi hingga petang di ladang. Jika desa menghasilkan banyak bahan makanan, tentunya kehidupan petani di desa dan penduduk kota terjamin. Karena itu para petani perlu perlindungan sepenuhnya dari gangguan/ancaman para pejabat. Contohnya di dalam kitab Agama pasal 260 yang menyebutkan bahwa "barang siapa membakar padi di ladang, tidak pandang besar kecilnya, harus membayar kembali lima kali lipat kepada petani pemiliknya, ditambah dengan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa" (Slametmuljana, 1967, 40).

Mengingat bahwa penggarapan tanah merupakan urat nadi perekonomian rakyat dan negara, makin banyak petani yang menggarap tanah tentunya makin banyak yang dihasilkan. Karena itu rakyat tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Membiarkan tanah atau sawahnya terbengkalai merupakan suatu pe-

langgaran dan dikenai denda, seperti yang disebutkan di dalam kitab Agama pasal 259 dan 261 yang berbunyi "Barang siapa minta ijin untuk menggarap sawah, tetapi tidak mengerjakannya, sehingga sawah itu terbengkalai, supaya dituntut untuk membayar utang sebesar nilai padi yang dapat dipungut dari sawah yang kan dikerjakannya itu. Besarnya denda ditetapkan oleh raja yang berkuasa, sama dengan pengrusak makanan. Dan barang siapa mengurangi penghasilan makanan misalnya dengan mempersempit sawah atau membiarkan terbengkalai segala apa yang dapat menghasilkan makanan, atau melalakan binatang peliharaan apapun juga, kemudian hal itu diketahui oleh orang banyak, orang yang demikian itu diperlakukan sebagai pencuri dan dikenakan pidana mati. Sedangkan pasal 262 menyebutkan "barang siapa yang menolak saudaranya untuk mengerjakan sawah/tanah, dikenakan denda *saketi enam laksa* (160.000).¹ Orang yang demikian dikatakan *atulak kadang* warga (menolak sanak keluarga) (Slametmuljana, kys, 39). Isi undang-undang tadi menunjukkan bahwa rakyat tidak dapat membiarkan tanahnya terbengkalai tanpa dikenai denda.

II. Menurut Slametmuljana (1967,40)², tanah adalah raja. Rakyat hanya mempunyai hak untuk menggarap, memungut hasilnya, tetapi tidak berhak untuk memilikinya. Jika ada orang yang gadaikan tanahnya, pada hakekatnya orang itu menggadaikan hak pakai tanah, bukan menggadaikan hak milik atas tanah. Dalam hal jual beli tanah, yang dijual adalah hak pakai atas tanah.

Dari keterangan yang terdapat di dalam sumber prasasti, ternyata pendapat yang dikemukakan oleh Slametmuljana tidak seluruhnya benar. Mungkin untuk wilayah keraton atau *watek i jro turus* (wilayah di dalam lingkungan pagar keraton) adalah kepunyaan dan untuk kepentingan raja. Hal ini seperti pada masa kerajaan Mataram Islam, dimana ada 4 wilayah kerajaan yaitu *Kutanagara* (pusat kerajaan), *negara agung* (daerah lungguh pejabat-pejabat tinggi kerajaan), daerah *mancanegara* dan

daerah *peisir* yang letaknya diluar wilayah negara agung (Soe-tjipto, 1968).

Kemudian tanah-tanah lungguh bisa dianggap sebagai tanah milik raja, karena tanah-tanah itu diberikan oleh raja kepada para kerabatnya. Sedangkan di luar itu adalah milik rakyat, seperti yang tercermin dari keterangan beberapa buah prasasti. Prasasti Lintakan (919 M) misalnya menyebutkan bahwa raja Rakai Layang Dyah Tlodhong harus membeli tanah sawah seluas 1 *tampah*³ seharga 1 *kati* 13 *dharana* dan 6 *masa*⁴ uang perak, dari kepala desa (*rama*) Kasugihan untuk dijadikan *sima*⁵. Kemudian dari prasasti Mamali (878 M) diperoleh keterangan bahwa *rakarayan* i sirikan⁶ membeli tanah kebun dari pejabat desa Mamali seharga 1 *kati* emas untuk dijadikan *sima* bagi bangunan suci di Gunung Hyang.

Selain diperjual belikan tanah dapat juga digadaikan, seperti yang ternyata di dalam prasasti Panggumulan B⁷ (825 m). Di dalam prasasti ini dikatakan bahwa *Rakryan i Wantil pu Palaka* bersama dengan istri dan ketiga anaknya menebus kebun milik para pejabat desa di Panggumulan yang tergadai dan pembelian sawah di Panilman seharga 3 *kati* perak (Titi Surtinastiti, 1981, hal 87). Kemudian dalam prasasti Waharu I (873 M) ada keterangan tentang penghibahan tanah warisan Sang Hadyan Kuluptiru, keponakan *Rakryan Tolobong*, seluas 5 *tampah* untuk kepentingan bangunan suci. Tanah itu diwariskan secara turun temurun sejak buyutnya⁸. Sedangkan di dalam prasasti Tija⁹ disebutkan tentang tanah *sima* diperjual belikan. Dikatakan bahwa buyut Amataki membeli *sima kawajwan* di Tija dan di Haru-haru 28 tahun yang lalu. Dalam jual beli ini ia menerima surat jual beli.

Satu hal yang menarik perhatian dalam jual beli tanah, si pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada pejabat-pejabat desa. Istilahnya di dalam prasasti ialah *pasek-pasek*. Banyak sedikitnya *pasek-pasek* ini tergantung harga pembelian tanah itu. Dalam kasus prasasti Kurungan (885 M), jumlah *pasek-pasek* yang harus dibayar oleh pembeli tanah sebanyak 10

dharana perak, sedangkan harga tanah itu sendiri besarnya 1 kati perak. Kemudian di dalam prasasti Mamali untuk pembelian tanah seharga 1 kati emas pembeli menyerahkan uang sebanyak 13 masa emas, 4 masa perak, 7 *yugala* kain *rangga*¹⁰ dan 4 *yugala* kain putih, sebagai pasek-pasek. Penyerahan uang pasek-pasek ini mengingatkan kita kepada uang "Komisi" yang umum dibayar oleh pembeli tanah pada waktu sekarang kepada pejabat-pejabat desa.

Mengenai harga tanah pada masa dahulu kelihatannya juga bervariasi, tergantung pada jenis tanahnya". Dari sumber prasasti kita mengenal ada beberapa jenis tanah yaitu *Imah alas* (hutan), *Imah sawah* (Sawah), *Imah Kbuan* (kebun), *Imah suket* (padang rumput), *tegal* (tegalan), *gaga* (ladang) *Imah pomahan* (tanah perumahan) dan *renek* (tanah rawa).

Kelihatannya diantara jenis-jenis tanah tadi yang terpenting adalah tanah sawah. Sebab di dalam beberapa prasasti kita memperoleh keterangan mengenai pembuatan sawah baru dari tanah tegalan (Kwak II, Ratawun I), tanah hutan (Ramwi, Kaladi), tanah kebun, ladang, perumahan dan rawa-rawa. Sedangkan perubahan tanah sawah jarang kita temukan, kalau toh ada biasanya untuk keperluan bangunan suci (caitya) seperti yang disebutkan di dalam prasasti Kasugihan (919) dan Taragal (890 M).

Satu hal yang patut dicatat disini ialah dalam jual beli tanah atau pemberian anugerah tanah menjadi suatu sima oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan lainnya, sebagian besar menyebutkan batas-batas tanah yang diperjual belikan. Sebagai contoh, dalam prasasti Mamali disebutkan luas tanah yang dibeli setelah menjadi sawah dari timur ke selatan 146 *dpa*, dari utara ke timur 33 *dpa*, dari barat ke utara 106 *dpa* dan dari selatan ke barat 46 *dpa*, kelilingnya seluas 331 *dpa*.¹² Jika luas tanah tidak disebutkan, di dalam prasasti masih ada penyebutan nama-nama daerah sekeliling tanah yang dijadikan sima atau diperjual belikan. Desa-desa sekelilingnya ini dalam upacara penetapan sima atau jual beli diwakili oleh kepala desa. Mereka ini hadir

sebagai saksi pada upacara penetapan sima. Daerah sekeliling itu selalu disebut dengan istilah *wanua i tpi siring* atau desa-desa yang berbatasan.

Penyebutan batas-batas tanah yang diperjualbelikan atau dijadikan sima perlu ada untuk menghindari sengketa di kemudian hari seperti halnya prasasti Tija dan Bendosari¹³. Penyebutan ini ada di dalam prasasti atau surat jual beli, yang keduanya bisa kita samakan dengan sertifikat tanah pada masa sekarang yang juga memuat luas tanah dengan batas-batasnya.

Dari uraian terdahulu dapat diketahui bahwa keterangan-keterangan yang terdapat pada beberapa prasasti kebanyakan mengacau kepada hak pemilikan tanah. Bahkan di dalam prasasti Bendosari jelas dikatakan bahwa tanah *sima tiga* merupakan hal milik turun temurun dari *mapanji sarana* sejak masa *krpeknnya*¹⁴. Kenyataan ini banyak persamaannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum adat di Indonesia pada masa sekarang, yaitu hak milik tanah memberikan kebebasan penuh kepada pemiliknya selama hal itu tidak mengganggu sesama warga masyarakat. Pemilik tanah bisa melakukan segala macam transaksi seperti menjual tanah, menggadaikan tanah, mewariskan kepada ahli warisnya atau bisa juga dipergunakan untuk melunasi hutang piutang.¹⁵

III. Masih dalam kaitan dengan masalah tanah, beberapa buah prasasti menyebut pejabat kerajaan *wilang wanua* dan *wilang thani*. Menurut arti katanya istilah *wilang wanua* dan *wilang thani* adalah penghitung, penghitung tanah (pertanian). Jadi mungkin ia bisa kita samakan dengan petugas agraria. Tentunya perhitungan tanah pertanian dan desa-desa erat hubungannya dengan masalah perpajakan. Karena kita tahu salah satu penghasilan kerajaan yang terutama ialah pajak. Dengan pajak ini kerajaan dapat membiayai seluruh kegiatannya, termasuk membayar gaji pegawainya¹⁶. Dengan adanya perhitungan tanah dan desa, raja dapat mengetahui dengan tepat berapa jumlah desa, tanah persawahan, tegalan, kebun, hutan perumahan-

an dan rawa yang ada di lingkungan kerajaannya dan jumlah pajak yang akan diperolehnya setiap tahun.

Pajak pertanian biasanya dibayar oleh penduduk setiap habis panen yaitu pada bulan Asuji (September-Oktober) atau bulan *Kartika* (Oktober-November)¹⁷. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh penduduk untuk tanah seluas satu *tampah* sebanyak 6 dharana perak setiap tahunnya seperti yang disebutkan di dalam prasasti Palepangan dari raja Daksa. Kemudian dari prasasti Narasinghanagara dari jaman Wisnuwardhana disebutkan bahwa pajak (*tahil*)¹⁸ dari sawah sebanyak 4 *suwarna* dan 7 masa emas setiap tahunnya.

Hanya sayangnya kita tidak tahu berapa luas tanah yang dikenai pajak sedemikian banyak. Prasasti Narasinghanagara hanya kita temukan satu lempengan saja, jadi keterangan yang kita peroleh juga tidak lengkap. Dari prasasti lainnya kita memperoleh keterangan pajak tanah dibayarkan setiap hari (prasasti Watukura D)¹⁹. Namun ada juga pajak tanah ini dibayarkan dalam bentuk hasil bumi. Istilah yang dipakai di dalam prasasti ialah *turun-turun sagem sarakut*²⁰ dan *pangguhan*²¹. Sedangkan besarnya pajak yang berupa hasil bumi menurut berita Cina dari masa dinasti T'ang (960-1279 M) ialah 10% dari hasil tanah pada waktu panen (Groeneveldt, 1960, 16).

IV. Dari uraian di atas kita dapat memperoleh gambaran bahwa pada jaman dahulu tanah bukan hanya milik raja saja, rakyat bisa juga memiliki tanah entah itu dengan cara membeli atau merupakan warisan secara turun temurun. Mengingat tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting maka kerajaan merasa perlu untuk mengatur penggunaan tanah sebaik-baiknya dengan undang-undang. Sehingga rakyat tidak bisa berbuat sekehendak hatinya atas tanah yang menjadi miliknya. Selain itu rakyat juga harus membayar pajak tanah setiap tahun. Semua ketentuan ini juga berlaku pada masa sekarang ini Indonesia.

DAFTAR CATATAN

1. Denda saketi enam laksa merupakan denda tertinggi menurut undang-undang Agama.
2. Pendapat Slametmuljana ini hanya didasarkan pada undang-undang Agama saja tanpa memperhatikan fakta-fakta yang ada di dalam sumber prasasti.
3. Tampah adalah satuan ukuran untuk luas, terutama tanah. Dari prasasti Palepangan kita menjumpai dua jenis ukuran tampah yaitu tampah (biasa) dan *tampah haji*. Luas tampah haji adalah 100 *dpa sihwa* panjangnya dan 30 *dpa sihwa* lebarnya. Sedangkan tampah biasa tidak diketahui luasnya. Satu tampah sama dengan seperduapuluh lamwit (SNI.II. 143).
4. Kati adalah salah satu ukuran berat untuk mata uang emas maupun perak. Menurut Stutterheim (1940, 31) satu kati = 16 *tahil*. 1 *tahil* = 16 masa. 1 masa = 0.002412 kg. Dalam berita Cina 1 kati = 12 *tail* = 1.12 kg (Groeheveldt, 1960, 52). 1 kati = 16 *dharana* = 256 masa.
5. Sima adalah daerah yang dibebaskan membayar pajak pada

raja atau daerah perdikan. Mereka ini biasanya mempunyai kewajiban memelihara bangunan di daerahnya.

6. Rakarayan adalah penguasa daerah yang mempunyai daerah otonom yang cukup luas, serta mempunyai birokrasi tersendiri. Rakarayan i sirikan menurut Boechari adalah salah seorang putra raja.
7. Prasasti ini telah dibahas secara mendalam oleh Titi Surti Nastiti di dalam skripsi sarjanaya tahun 1981.
8. Di dalam prasasti dituliskan sebagai berikut: " . . . tatkala sanghadyan kulupturi kapwa rakryan tolobang manusuk sima Imah waharu pinda ni ukurnya lima (ng) tampah kalilirana dening anak putu buyut santana pratisantana sanghadyan kuluptiru . . ."
9. Prasasti ini tidak berangka tahun.
10. Yugala adalah ukuran untuk kain yang artinya kurang lebih sepasang, sedangkan rangga adalah salah satu jenis kain yang dikenal pada abad 9 M. Kain ini biasanya dipakai oleh pejabat tinggi kerajaan.
11. Dalam prasasti Alasantan (939 M) harga tanah kebun seluas 13 tampah adalah 12 kupang emas. Dalam prasasti Mamali (878 M) harga tanah kebun seluas 331 dpa adalah 1 kati emas. Prasasti Taragal (880 M) harga 450 dpa 2 hasta tanah adalah 1 kati dan 1 suwarna emas dan prasasti Lintakan harga 1 tampah sawah adalah 1 kati, 13 dharana dan 6 masa perak.
12. " . . . lua nikanang Imah wuli yan sampuna dadi sawah pangawaitannya lamwean kidul dpa 146, pangalornya lamwean waitan dpa 33, panguluannya lamweanlor dpa 106, pangidulnya lamwean kuluan dpa 46, pakulilingnya pinda dpa 331 . . ."
13. Kedua prasasti ini telah dibicarakan oleh Boechari dalam karangannya "Jayapatra. Sekelumit tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat Jawa kuna", *Simposium Sejarah Hukum*, 1976, 79-88.

14. Istilah *krpek* sama dengan istilah *gantungsiwur* dalam masyarakat yaitu 4 tingkatan keatas setelah buyut, Kutipan dari prasastinya " . . . bapa, kaki (kakek), buyut, pitung, anggas, muning, *krpek* . . ."
15. Lihat Surtinastiti, 1981, 87 - 108; 1982, 13 - 24; ter Haar, 1960, 78; van Dijk, 1954, 61.
16. Dalam berita Cina dari masa dinasti Sung disebutkan di kerajaan Jawa (Hong-ling) ada 30.000 anggota angkatan perang yang digaji $\frac{1}{2}$ tahun sekali (Groeneveldt, 1960, 13).
17. Asuji adalah bulan ketiga menurut perhitungan tarikh Saka dan Kartika adalah bulan keempat menurut tarikh Saka.
18. Disini tahlil berarti pajak, berbeda dengan tahlil ukuran berat.
19. Kutipan tahlil prasastinya seperti berikut
" . . . kuneng ikang sawah, gaga renek, kebuwan, ya tika mijilakna pirak ma l ing sa-rahi . . ."
20. Istilah ini kita jumpai di dalam prasasti Sarwwadharma dari jaman Majapahit. Istilah ini mengingatkan kita pada istilah *teker turun* di Jawa sekarang yaitu pajak berupa uang dari *bekel* desa kepada *lurah patuh* untuk diteruskan kepada raja (Bausastra Jawa, hal. 586).
21. Pajak pangguhan adalah pajak khusus hasil bumi. Kadang-kadang pajak ini dinilai dalam bentuk uang.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Soemadio dkk (penyuntingan)

1985 *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid 2. Jakarta: Balai Pustaka.

Brandes, J.L.A.

1913 ") ud-javaansche oorkonden, nagelaten transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, unigegeven door Dr. N.J. Krom". *VBG*. 60

Boechari

1976 "Jayapatra: Sekelumit tentang Pelaksanaan hukum dalam masyarakat Jawa Kuna", *Simposium Sejarah Hukum*. 79 – 88. Jakarta: Bina Cipta.

Casparis, J.G. de

1956 "Selected Inscritions from the 7th to 9th Century AD", *Prasasti Indonesia* 2. Bandung: Masa Baru.

Cohen Stuart, A.B.

1875 *Kawi-oorkonden in facsimile, met inleiding en transcriptie*. Leiden: E.J. Brill.

Edhie Wurjantoro

- 1982 "Pajak dalam abad kesebelas dan keduabelas", *MISI* XI, 73-79.

Groenevelt, W.P.

- 1960 *Historical Notes in Indonesia and Malaya, compiled from Chinese sources*, cetakan kedua. Jakarta: Bhratara.

Geldern, R. von Heine

- 1972 *Konsep tentang Negara dan kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Diterjemahkan oleh Deliar Noer. Cetakan kedua. Jakarta: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Goris, R.

- 1941 "Enkele historische en sociologische gegevens uit de Balische oorkonden", *TBG*. 81. 279-294.

Naerssen, F.H. van

- 1941 "De Astadasawyahara in het oudjavaansche", *BKI*. 100, 357-376.
- 1977a "Some Aspects of Hindu Javanese kraton", *Majalah Relung Pustaka* edisi Agustus, Sala: Yayasan Pahaman Radya Pustaka.
- 1977 *The Economic and Administrative History of Early Indonesia*. Leiden, Koln : E.J. Brill. Ditulis bersama R.C. de Jongh.

Pigeaud, Th. g Th

- 1967 *Literature of Java: Catalogue Raisons of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other and Public Collections in the Netherlands*, jilid 1. The Hague: M. Nijhoff.

Puja, G. dan Cokorde Rai Sudarta

- 1977-8 *Manawa Dharsastra*, Jakarta, Junasco.

Schrieke, B.J.O

- 1975 *Sedikit tentang pranata perdikan*, diterjemahkan oleh Jakarta: Bhratara.

Slametmuljana

- 1967 *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta: Bhratara.

Stutterheim, W.F.

- 1925 "Transcriptie van twee Jayapatra", *OV*. 57-60
 1940 "Oorkonde van Dang Acaryya Munindra uit 805 AD (Randoesari ii) *Inscripties van Nederlads Indie*, 1, 29-32

Sucipto, F.A.

- 1968 "Struktur Birokrasi Mataram", *MISI* 4.1-2: 57-70.

Titi Surti Nastiti

- 1981 *Prasasti Panggumpulan*. (Suatu telaah tentang masalah tanah abad 9 & 10 Masehi), Skripsi Sarjana FSUI. Jakarta.
 1982 "Hak milik atas tanah", *MISI* XI. 1 : 13-24. Jakarta.

**KRISIS DI AWAL KEBANGKITAN: PENGGUNTINGAN
UANG PADA MASA RIS, 1950
(oleh: Bambang Purwanto)**

Perang dan perundingan yang berlarut-larut, telah membawa perekonomian Indonesia mencapai tingkat yang memprihatinkan. Sejak awal kemerdekaan telah terjadi inflasi yang cepat, jumlah uang yang beredar tidak dapat ditekan karena pemerintah Indonesia tidak memiliki uang, kecuali hanya bisa menetapkan mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam wilayah RI.¹ Dalam usaha memperbaiki keadaan ini, pada tahun 1946 diberlakukan pinjaman nasional dengan cara mewajibkan penyetoran uang ke Bank Tabungan Pos dan Rumah Gadai. Selain itu pemerintah RI juga memerlukan penggunaan uang ORI (Oeang Republik Indonesia) untuk mengganti uang pendudukan Jepang. Kesulitan ekonomi semakin terasa, karena sepanjang tahun 1947 sampai pertengahan tahun 1949 terjadi peperangan antara Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan dengan Belanda yang ingin berkuasa kembali.

Secara politik pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia menjadi satu negara yang terikat sebagai satu uni dengan kerajaan

an Belanda. Walaupun secara politis Republik Indonesia masih diakui sebagai satu pemerintahan yang berdaulat, tetapi hanya merupakan satu negara bagian yang berkedudukan di Yogyakarta. Sebelumnya pada tanggal 16 Desember 1949 di Kepatihan Yogyakarta. Sidang gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS telah memilih Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Empat hari kemudian Presiden Sukarno menunjuk Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Anak Agung Gde Agung dari Sultan Hamid II sebagai formatur untuk membentuk kabinet. Mereka menetapkan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan merangkap Menteri Luar Negeri, dibantu 12 orang menteri dan 3 orang menteri negara.

Setelah terbentuknya RIS sebagai realisasi Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia, Belanda dan negara-negara BFO, keadaan ekonomi cukup memprihatinkan. Pemerintah RIS mewarisi hutang luar negeri kurang lebih satu setengah milyar rupiah. Pemerintah juga harus menghadapi peredaran uang yang banyak dan kenaikan biaya hidup, yang mengakibatkan pemerintah mengalami defisit lebih dari lima milyar rupiah.² Sementara itu pemerintah federal hanya berhasil mengumpulkan penerimaan total sebesar 66% dari anggaran belanja kotor, yang berarti terjadi defisit anggaran belanja. Ketika dua pemerintahan digabungkan, inflasi tidak dapat ditahan karena Republik Indonesia tidak mempunyai penerimaan. Padahal pemerintah RIS memerlukan biaya yang banyak untuk pembelanjaan negara, merekonstruksi kerja terutama pada daerah-daerah yang dibumihanguskan, kebutuhan militer dan keamanan, serta untuk pemeliharaan birokrasi.³ Inflasi dan defisit pemerintah RIS ini diperberat dengan timbulnya penyelundupan dan pasar gelap valuta asing, yang mengakibatkan berkurangnya devisa luar negeri sebagai sumber pendapatan negara. Sementara itu penimbunan barang dan spekulasi yang banyak dilakukan para pedagang, mendorong terjadinya kenaikan harga yang tidak terkontrol.⁴

Sebagian besar negara bagian tidak mempunyai kekuatan finansial yang dapat mendukung jalannya pemerintahan. Biar-pun ada, kekuatan finansial itu tidak seimbang antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi perekonomian pemerintah pusat, yang terpaksa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menjalankan pemerintah. Sementara itu banyak negara serikat itu sering menimbulkan kesulitan dan perselisihan, dalam menentukan tindakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Hasil KMB masih memberikan kesempatan kepada Belanda untuk campur tangan dalam berbagai bidang, seperti perselisihan tentang *de Javasche Bank*. Sedangkan RIS dan Republik Indonesia berselisih tentang pengaturan Bank Nasional Indonesia (BNI), padahal Bank mempunyai kedudukan yang penting dalam proses perkembangan perekonomian negara.⁵

Inflasi yang terjadi telah menimbulkan berbagai gejala dalam masyarakat. Berbagai pemogokan terjadi di beberapa kota, seperti pemogokan kerja dok dan pekerja pabrik dan pemogokan buruh di daerah-daerah perkebunan. Dalam usaha memperkecil inflasi dan menambah penerimaan negara, pada tanggal 13 Maret 1950 pemerintah RIS memperkenalkan sertifikat devisa untuk memajukan ekspor. Mata uang rupiah tidak lagi direferensikan dengan mata uang Belanda melainkan dengan Dollar Amerika. Nilai tukar rupiah sebesar 3,80 setiap satu dollar menjadi 7,60 rupiah tiap satu dollar dan 11,40 rupiah tiap dollar untuk impor.⁶

II

Lima tahun pertama sejak bangsa Indonesia menyatakan Proklamasi Kemerdekaan, merupakan masa yang penuh perubahan. Secara politik masa itu telah menimbulkan perubahan yang penting dari kekuasaan asing ke bangsa Indonesia, biar-pun terjadi beberapa hambatan politis dari luar pada kurun waktu tersebut. Tetapi revolusi Indonesia tetap saja bukan merupa-

kan revolusi total, karena tidak terjadi perubahan radikal dalam struktur sosial dan ekonomi melainkan hanya terjadi transformasi sosial dan ekonomi.⁷ Walaupun Indonesia telah menghilangkan kekuasaan politik kolonial, tetapi tidak secara langsung muncul masyarakat nasional yang baru.

Keadaan Indonesia pada umumnya setelah pernyataan kemerdekaan itu tetap masih merupakan kelanjutan proses masa-masa sebelumnya, dengan ciri kolonial yang masih tetap kuat. Warisan kolonial masih begitu terasa, sehingga sebagian besar daerah Indonesia tidak bisa berkembang. Sementara itu ekonomi kolonial yang diwariskan tergantung pada daerah perkebunan, mengakibatkan banyak modal yang lari ke luar negeri.⁸ Modal asing yang ada mengakibatkan pemindahan modal yang besar ke luar negeri dibandingkan hasil modal yang bisa bertahan di dalam negeri, karena modal luar negeri merupakan substitusi bukan sebagai tambahan tabungan dalam negeri.⁹

Inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga terus menerus atau turunnya nilai mata uang terus menerus, merupakan masalah yang dihadapi kabinet RIS yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.¹⁰ Sebagai seorang ekonom, Mohammad Hatta banyak dipengaruhi oleh ide-ide sosialis. Menurut Hatta, perencanaan ekonomi tidak dapat dijalankan dalam sistem harga yang tidak seimbang.¹¹ Hatta berusaha untuk memperbesar kemampuan daya beli rakyat, karena apabila daya beli riil rakyat tidak bertambah maka rakyat akan tetap mengalami kesulitan ekonomi. Daya beli rakyat ini dapat dilakukan dengan cara memperluas sumber penghidupan, dengan adanya produksi yang sesuai antara produksi dan konsumsi.¹² Menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu tersebut, maka kabinet Hatta mempertimbangkan untuk mengadakan tindakan moneter yang drastis untuk memperbaiki struktur ekonomi yang ada.¹³

Peredaran uang dalam masyarakat pada masa Kabinet Hatta banyak sekali sehingga harga-harga barang tidak terkendali, sedangkan pemerintah mengalami kesulitan keuangan terus menerus untuk berbagai usaha yang sangat perlu.¹⁴ Karena itu

Kabinet Hatta membentuk panitia kecil yang diketuainya sendiri dengan anggota beberapa orang menteri kabinet, di antaranya Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Djuanda, dan Menteri Perburuan Wilopo. Panitia kecil ini disiapkan untuk mengadakan tindakan moneter, sebagai usaha pemerintah RIS memperbaiki situasi ekonomi rakyat.¹⁵ Tindakan moneter tersebut dilaksanakan untuk mengkoordinir peredaran uang dalam masyarakat serta tujuan lain yang berhubungan dengan pemulihan perekonomian negara secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan moneter yang akan dilakukan sudah menjadi rahasia umum, terutama para penguasa di dalam maupun di luar negeri.¹⁶

Melalui Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara, pemerintah RIS pada hari Minggu tanggal 19 Maret 1950, pukul 20.00 WIB, mengumumkan peraturan moneter baru berdasarkan Undang-undang Darurat tentang Peminjaman Uang No. 13 tahun 1950, yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 1950. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kepada Menteri Keuangan selama tahun 1950 untuk mengambil tindakan dalam bidang keuangan, dengan cara mengatur peredaran uang dan mengadakan pinjaman untuk negara dan dalam keadaan mendesak dapat menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku kecuali konstitusi.¹⁷ Menteri Keuangan berdasarkan undang-undang tersebut, mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan RIS No. PU 1 dan PU 2, yang menunjukkan perlu adanya pencapaian konsolidasi hutang negara jangka pendek dan mengatur peredaran uang.¹⁸

Peraturan Menteri Keuangan No. Pu 1 berisi kewajiban untuk memotong menjadi dua semua uang kertas biasa, uang chartal maupun uang dalam Bank, uang giral yang bernilai lima rupiah ke atas. Potongan uang yang berlaku untuk alat pembayaran yang sah sejak tanggal 19 Maret 1950 pukul 20.00 WIB adalah potongan sebelah kiri, dengan harga 50% dari harga nominal yang tertulis. Sedangkan potongan sebelah kanan dipergunakan untuk menutup obligasi pemerintah dengan bunga

3% setahun atas tanggungan pemerintah RIS. Bagian kiri yang dimaksud adalah setengah bagian dari uang di sebelah kiri, apabila uang yang memuat tanda tangan ada di depan mata sedangkan tulisan pokok yang tampak dapat dibaca normal. Uang yang bernilai di bawah lima rupiah baik uang kertas maupun uang logam tetap berlaku seperti biasa, untuk melindungi masyarakat kecil.¹⁹ Uang sebelah kiri ini berlaku sampai tanggal 16 April 1950, oleh sebab itu sejak tanggal 22 Maret sampai 16 April 1950, uang sebelah kiri dapat ditukarkan dengan uang baru yang dikeluarkan oleh *de Jabasche Bank* dengan harga separuh dari nilai nominal yang tertulis. Sedangkan uang Republik Indonesia (ORI), sejak tanggal 1 Mei 1950 tidak berlaku sebagai alat tukar yang sah, oleh sebab itu sejak tanggal 27 Maret sampai 1 Mei 1950 dapat ditukar dengan uang baru sesuai dengan kurs yang berlaku.²⁰

Pemotongan uang tidak hanya dilakukan secara riil, tetapi juga dilakukan terhadap rekening koran pada nasabah Bank. Sejak penutupan kas tanggal 18 Maret 1950, bank diwajibkan untuk memindahkan seperdua dari simpanan pemegang rekening, rekening *houder* ke rekening kumpulan, dan *verzanel* rekening yang tidak melahirkan kewajiban untuk membayar bunga, tanpa memungut ongkos pemindahan.²¹ Semua rekening di dalam bank harus dikurangi nilai simpanannya. Di samping itu ada simpanan yang dibebaskan dari aturan di atas, ialah simpanan di bank atas nama kepala lembaga-lembaga milik negara. Seperti kantor pusat pengiriman uang, kas negara, kantor pembantu kas negara, kantor pos, jawatan dan perusahaan negara, serta pegawai negeri dalam kedudukan tertentu. Tetapi tiga lembaga yang terakhir harus memperlihatkan surat dari negara, yang membuktikan bahwa diijinkan mempunyai rekening di bank. Juga dibebaskan dari aturan tersebut adalah kedutaan besar negara asing, konsulat negara asing, yayasan badan sosial dan amal, dan bank sirkulasi luar negeri. Selain itu dibebaskan juga dua ratus rupiah pertama dari simpanan di bawah seribu rupiah. Sedangkan seribu rupiah atau lebih di-

pindahkan seperdua dari jumlah simpanan yang dibulatkan ke bawah sampai dua ratus rupiah atau kelipatannya, yang dipergunakan untuk pinjaman negara dengan bunga 3%.²²

Keputusan Menteri Keuangan RIS No. PU 2, pada dasarnya berisi ketentuan tentang pinjaman pemerintah dengan bunga 3% atas tanggungan pemerintah RIS. Pemerintah mengeluarkan surat pinjaman atas nama pemegang dengan bunga 3% setahun, yang dibayar tiap-tiap 1 September. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 1 September 1951, jadi kupon pertama dibayar 17 bulan. Penukaran obligasi ini menggunakan uang sebelah kanan yang belum rusak, dengan nilai 50% dari nilai nominal. Surat pinjaman ini disediakan dalam lembaran nominal seratus, lima ratus, dan seribu rupiah, jika perlu pemerintah akan mengeluarkan lembaran obligasi dengan nilai nominal yang besar. Obligasi tersebut tidak dapat digadaikan sebagai jaminan hutang.²³

Berhubungan dengan pinjaman pemerintah tersebut, bank berkewajiban ikut dalam pinjaman yang diadakan berdasarkan keputusan pemerintah tadi. Partisipasi tersebut dilakukan dengan cara memindahkan jumlah atas rekening kumpulan, dan pemindahan tersebut sudah harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1950 pada *de Javasche Bank*.²⁴

III

Seperti sudah dikatakan di atas, tindakan pemerintah dalam bidang moneter tersebut sudah diduga oleh beberapa pihak di luar maupun dalam negeri. Tindakan pemerintah RIS mengadakan pemotongan tentu saja mengundang banyak reaksi dari pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan langsung atau tidak, akibat tindakan pemerintah tersebut.

Reaksi luar negeri terhadap tindakan tersebut tampaknya positif. Pihak luar negeri menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah RIS, dalam keadaan perekonomian yang memprihatinkan. Tindakan tersebut di-

anggap sebagai taktik yang cerdas, yang akan memperkuat ekspor Indonesia. Pemotongan uang oleh pemerintah RIS dikatakan sebagai suatu kelanjutan yang tidak dapat dihindari dari peraturan *deviezen* baru, tindakan tersebut memang keras tetapi tepat.²⁵ Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah RIS membuat peraturan tersebut, yang bertujuan untuk menaikkan ekspor, naiknya daya beli rakyat, naiknya produksi dan menarik uang yang berlebihan dari rakyat serta sekaligus dapat menghambat inflasi.²⁶

Sementara ini pendapat yang hampir serupa juga terdengar dari dalam negeri. Mereka menganggap pemotongan uang tersebut sebagai usaha pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat di dalam negeri dan pihak-pihak di luar negeri terhadap mata uang negara. Karena selama ini nilai uang Indonesia terus merosot atas nilai mata uang asing. Sedangkan di dalam negeri uang terlalu banyak beredar, sehingga harga terus naik.²⁷

Keputusan pemerintah RIS mengadakan pemotongan uang juga mendapat tanggapan yang negatif. Tindakan pemerintah tersebut dianggap hanya untuk menutup kekurangan anggaran belanja RIS. Kenaikan harga barang mengakibatkan barang impor menjadi tiga kali lebih mahal. Dengan kenaikan tersebut pemerintah akan mendapat angka anggaran yang lebih tinggi, tetapi defisit yang akan ditanggung anggaran belanja tahun berikutnya semakin tinggi. Tindakan uang tersebut juga dianggap akan menaikkan harga barang impor menjadi enam kali lebih mahal jadi bukan hanya tiga kali lipat dari harga sebelumnya, karena valuta luar negeri tidak dipotong. Tujuan pemerintah untuk mendapatkan deflasi dikatakan hanya akan merubah menjadi inflasi.²⁸

Reaksi yang lebih keras juga muncul, baik dari anggota partai politik tertentu maupun bukan. Tindakan pemerintah dianggap tidak adil, karena pemerintah menciptakan jurang yang semakin dalam antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Tindakan Pemerintah RIS itu dikatakan akan me-

ngurangi jumlah uang yang dimiliki orang-orang miskin yang memang mempunyai sedikit, sedangkan orang kaya tidak terlalu merasakan akibatnya.²⁹ Di lain pihak ada pendapat yang menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah RIS tidak terlalu terpaksa pada tindakan tersebut, karena pemerintah seharusnya lebih memperhatikan politik strategi untuk menyelesaikan masalah dalam negeri, seperti konflik negara bagian, rasionalisasi angkatan bersenjata dan sebagainya.³⁰

Setelah pengumuman Menteri Keuangan pada tanggal 19 Maret 1950 pukul 20.00 WIB, banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut sampai pagi hari pukul 10.00 tanggal 20 Maret, sehingga banyak terjadi kekacauan di pasar. Informasi yang lambat menimbulkan salah pengertian. Mereka yang sejak malam sudah mengetahui adanya pemotongan uang tetap membuka toko mereka. Tetapi setelah mengetahui adanya tindakan moneter oleh pemerintah RIS, para pedagang cepat-cepat menutup toko mereka.

Keadaan pasar simpang siur, di Yogyakarta ada pedagang menjual daging kaleng yang biasanya empat rupiah hanya mau menerima uang sepuluh rupiah serta tidak mau memotong uang dan mengembalikan sisi sebelah kanan. Masyarakat berbondong-bondong membelanjakan uang lima rupiah ke atas, tetapi banyak toko tutup dan menolak pembayaran dengan uang potongan. Ada yang membeli barang seringgitan tanpa memotong uang lima rupiah, dan ada juga yang menyamaratakan uang besar dan uang kecil harganya turun separuh.³¹ Seorang wanita membagi-bagikan uangnya, karena ada yang mengatakan uang tidak laku lagi.³² Bakul desa tidak mau menerima uang yang belum dipotong, mereka menolak untuk menjual barang-barang karena mendengar pengalaman teman-teman mereka.³³ Informasi yang tidak merata diterima oleh masyarakat mengakibatkan keadaan menjadi kacau, orang tidak dapat berbelanja walaupun mempunyai uang karena tidak ada pedagang yang berjualan.

Beberapa kota di Indonesia yang dapat dimonitor juga mengalami goncangan akibat tindakan moneter pemerintah RIS tersebut. Para pedagang menutup toko-toko mereka, menolak uang yang dipotong, menaikkan harga barang, banyak pedagang menumpuk barang walaupun sudah ada larangan pemerintah untuk melakukan itu dengan disertai ancaman hukuman dan denda. Di Semarang seluruh toko di kota tutup. Di Pasar Johar dari bakul loak sampai pedagang besar juga tutup, juga pompa bensin. Di pelabuhan barang-barang menumpuk, karena tidak bisa diekspor. Di Palembang toko-toko di pasar juga tutup, harga kebutuhan sehari-hari naik tiga kali lipat. Di Jakarta banyak pedagang di Glodok ditangkap, karena menutup toko, menaikkan harga, dan menimbun barang. Selain itu juga ada perdagangan potongan kanan uang pada waktu itu.³⁴

Kekacauan seperti itu terus berlangsung beberapa hari, pengaruh pemotongan uang terasa dalam berbagai hal. Walaupun pemerintah mengharuskan membayar wesel, lotere, hutang, sewa dan sebagainya yang belum ditransaksikan sampai pukul 20.00 WIB tanggal 19 Maret 1950 dengan harga penuh, tetap saja terjadi ketegangan. Pembayaran harus dilakukan dengan uang baru atau uang sebelah kiri yang dihitung separuh harga dari nilai nominal. Beberapa pihak menolak membayar penuh seperti ketentuan di atas, seperti kasus pembayaran upah buruh di Surabaya yang mengakibatkan perkelahian.³⁵ Para mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri terutama di negeri Belanda mengalami kesukaran, baik mahasiswa Indonesia asli, keturunan Cina, dan orang Belanda yang orang tuanya tinggal di Indonesia.³⁶ Ongkos kapal laut dan kapal terbang ke luar negeri naik, sehingga banyak perusahaan menghentikan operasinya. Masalah naik haji pun menjadi pelik, karena ongkos harus ditambah dua ratus persen akibat adanya perbedaan kurs uang RIS dengan uang Belanda.³⁷

IV

Krisis ekonomi yang terjadi pada masa pemerintah RIS merupakan kelanjutan dari perkembangan ekonomi yang tidak menentu pada masa-masa sebelumnya. Tekanan warisan kolonial begitu terasa dalam kebanyakan sistem ekonomi yang berlaku pada masa itu, baik sebagai kesinambungan ekonomi kolonial maupun krisis ekonomi yang muncul setelah pernyataan kemerdekaan pada tahun 1945 akibat tidak adanya kesempatan untuk berbenah.

Inflasi merupakan masalah utama yang dihadapi kabinet RIS yang dipimpin oleh Mohammad Hatta, oleh sebab itu sebagai ekonom yang dipengaruhi ide-ide sosialis, Hatta berusaha merubah struktur yang sudah mapan untuk dapat memperbaiki daya beli rakyat. Hatta melihat tindakan moneter yang drastis merupakan cara yang penting untuk dapat memperkuat kemampuan daya beli rakyat, karena harga pasar dan peredaran uang dapat terkontrol dengan adanya penataan sejak dari awal.

Tindakan moneter pemerintah RIS pada dasarnya bertujuan untuk menanggulangi inflasi, pemerintah ingin menarik uang yang banyak beredar dalam masyarakat, sementara itu pemerintah tidak dapat lagi mencetak uang. Tindakan memotong uang dan hanya memberlakukan setengah harga nominal dan mengeluarkan pinjaman untuk setengah harga yang lain, berarti pemerintah RIS bisa menarik setengah dari seluruh uang yang beredar. Tindakan mengeluarkan uang baru merupakan upaya lanjutan untuk membatasi dan mengkoordinir jumlah uang yang beredar.

Upaya pemerintah RIS menata perekonomian tersebut ternyata tidak berjalan lancar, kekacauan yang terjadi dalam masyarakat pada beberapa hari sejak pemotongan uang tersebut, sebagai distorsi yang menyulitkan pemerintah seperti kenaikan harga barang, kenaikan ongkos angkut, dan spekulasi pedagang sulit dicegah. Selain itu, tindakan pemerintah RIS juga dijadikan isu politik oleh mereka yang tidak menyetujui ben-

tuk negara RIS maupun terhadap figur-figur politik yang berkuasa, akibat perkembangannya persaingan politik pada masa itu. Meminjam istilah Herbert Feith, masa kabinet RIS merupakan masa transisi dan unifikasi. Secara umum kabinet Hatta cukup berhasil dengan tindakan moneterinya, karena di akhir kabinet Hatta krisis ekonomi telah lewat.***

DAFTAR CATATAN

1. Sartono Kartodirdjo (eds.), *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976), hlm. 218.
2. *Ibid.*, 228.
3. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1973), hlm. 84.
4. *Ibid.*
5. Syamsuddin Mahmud, "Bank Sentral dan Pengaturan Moneter di Indonesia", *Prisma*, No. 7 (Jakarta: LP3ES, Juli 1977), hlm. 21.
6. Sartono Kartodirdjo (eds), *op. cit.*, hlm. 85.
7. Sartono Kartodirdjo, "Revolusi Kita 1945 Belum Revolusi Total", *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta: 16 Agustus 1979).
8. *Ibid.*
9. Sritua Arief, "Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi", *Prisma*, No. 1 (Jakarta: LP3ES, Januari 1982), hlm. 33.

10. Definisi Inflasi yang berlaku secara umum, lihat K. Guna-
di, "Tiga Perangkap" dalam ekonomi Indonesia", *Prisma*, No. 7 (Jakarta: LP3ES, Juli 1977), hlm. 30.
11. Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*
(Djakarta: Djambatan, 1967), hlm. 34.
12. *Ibid.*, hlm. 35.
13. Panitia Peringatan Wilopo 70 tahun, *Wilopo 70 Tahun*
(Djakarta: Gunung Agung, 1979), hlm. 92. Dalam bi-
dang ekonomi, kabinet Hatta berusaha memperbaiki ke-
adaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubung-
an, perumahan dan kesehatan, mengadakan peraturan upah
minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi
agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat se-
luruhnya, lihat Departemen Penerangan RI, *Lukisan Re-
volusi Rakyat Indonesia 1945 - 1949* (Yogyakarta: 1949),
hlm. 379.
14. Keterangan Menteri Keuangan RIS, *Persatuan* 20 Maret
1950.
15. Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, *op. cit.*, hlm. 93.
16. *Persatuan*, 11 Maret 1950. Bandingkan dengan *Sinmin*,
25 Maret 1950.
17. *Warta Indonesia*, 20 Maret 1950.
18. *Ibid.*
19. *Ibid.*
20. *Ibid.*
21. *Ibid.*
22. *Ibid.*
23. *Ibid.*
24. *Ibid.*
25. Keterangan di Inggris, *Warta Indonesia*, 21 Maret 1950.
Keterangan kalangan keuangan di Belanda, 21 Maret 1950.
26. *Merdeka*, 21 Maret 1950. Bandingkan dengan Keterangan
Menteri Keuangan RIS dalam *Warta Indonesia*, 21 Maret
1950.

27. Keterangan Sutan Sjahrir dalam *Warta Indonesia*, 21 Maret 1950.
28. Keterangan Ong Eng Djie, *Ibid.* Bandingkan dengan keterangan Loekman Hakim, *Nasional*, 23 Maret 1950.
29. Keterangan cc. PKI dalam *Warta Indonesia*, 24 Maret 1950. Hal yang hampir sama dengan keterangan SOBSI dalam *Warta Indonesia*, 22 Maret 1950.
30. A.K. Gani dalam *Merdeka*, 25 Maret 1950. Bandingkan dengan Protes KIT dalam *Sinmin*, 22 Maret 1950.
31. *Warta Indonesia*, 21 Maret 1950.
32. *Nasional*, 21 Maret 1950.
33. *Sinmin*, 23 Maret 1950.
34. *Persatuan*, 21 Maret 1950.
35. *Nasional*, 21 Maret 1950.
36. *Persatuan*, 25 Maret 1950.
37. Keterangan Wachid Hasjim dalam *Persatuan*, 20 Maret 1950.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Penerangan RI, *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia 1945-1949*. Yogyakarta: 1949.
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1973.
- K. Gunadi, "Tiga Perangkap" dalam *Ekonomi Indonesia*", *Prisma* No. 7, Jakarta: LP3ES, Juli 1977.
- Merdeka*, tanggal 21 sampai 25 Maret 1950.
- Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Djakarta: Djambatan, 1967.
- Nasional*, tanggal 20 sampai 23 Maret 1950.
- Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, *Wilopo 70 Tahun*. Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- Persatuan*, tanggal 10, 20, 21 dan 25 Maret 1950.
- Sartono Kartodirdjo, "Revolusi Kita 1945 Belum Revolusi Total", *Kedaulatan Rakyat*, 16 Agustus 1950.
- Sartono Kartodirdjo (eds), *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976.
- Sinmin*, tanggal 21 sampai 25 Maret 1950.
- Sritua Arief, "Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi", *Prisma* No. 1. Jakarta: LP3ES, Januari 1982.

Syamsuddin Mahmud, Bank Sentral dan Pengaturan Moneter di Indonesia", *Prisma*. No. 7. Jakarta: LP3ES, Juli 1977.
Warta Indonesia, tanggal 20 dan 21 Maret 1950.

DINAMIKA PEREKONOMIAN BANGSA INDONESIA

(oleh Wisnuadji)

Perekonomian Sebagai Suatu Sistem

Pada masa kini, cara melihat organisasi sebagai suatu sistem (system approach) makin meluas. Cara berfikir dalam sistem sudah lama dilakukan. Ludwig von Bertalanfy menyebutkan antara lain; Cara-cara Ibn Khaldun memandang ilmu sejarah. Von Bertalanfy tersebut mulai mempersoalkan teori sistem ini pada tahun-tahun 1925, yang kemudian disempurnakan dalam buku General System Theory 1968.

Penggunaan pendekatan sistem (*system approach*) berunsur (a) keseluruhan (*holism*) dan (b) hukum-hukum sistem. Maka kemampuan manusia untuk mengerti bekerjanya alam semesta makin meningkat. Fakta-fakta yang tadinya berserakan tanpa kaitan, seperti mozaik, kemudian dapat disatukan dalam suatu sistem dengan ada hubungan satu sama lain, sehingga makin terbuka kemungkinan-kemungkinan manusia untuk melalui kognisi, mengadakan prediksi dan di mana perlu mengadakan manipulasi.

Sistem ekonomi sebagai subsistem masyarakat meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan makin meningkatnya teknologi, kegiatan-kegiatan ekonomi makin dikuantifikasi. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua tujuan hidup dapat diangkakan. Angka-angka tentang harapan hidup, penyakit, bunuh diri, pendapatan dan lain-lain belum dapat menggambarkan sepenuhnya taraf kebahagiaan bangsa. Dengan demikian adanya deretan angka sepanjang waktu (time series) perlu dihadapi dengan tafsir yang tepat, karena unsur kebahagiaan dapat saja berubah.

Angka-angka tentang sistem ekonomi meliputi GDP (Gross Domestic Product, Produk Domestik Bruto), hasil tanah air Indonesia, dan GNP (Gross National Product = Produk Nasional Bruto), hasil bangsa Indonesia. Bangsa Jepang misalnya GNP lebih besar daripada GDP. Adalah cita-cita kita agar dikemudian hari kita mengalami demikian.

Bangsa Indonesia

Yang sekarang dinamakan bangsa Indonesia, sebetulnya mengalami perubahan-perubahan dalam komposisi rasial dan etnisitas. Saudara-saudara kita dari Timor Timur sekarang termasuk bangsa Indonesia, sedang orang-orang keturunan Minangkabau, yang membentuk kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu menjadi bangsa Malaysia.

Perundang-undangan Hindia Belanda menyebut sebagai kawula negara (*burgerschap*)

- a. Orang-orang Eropa (*Europeanen*)
- b. Orang-orang Bumiputera (*Inlanders*)
- c. Orang-orang Cina (*Chinezen*), dan
- d. Orang-orang Timur Asing lainnya (*Vreemde Costerlingen*).

Kemudian orang-orang Bumiputera dan Cina dibagi lagi dalam golongan yang disamakan dengan bangsa Eropa (*gelijkgesteld*) dan yang tak disamakan. Status disamakan atau tidak, berpengaruh dalam pengaturan hukum, dan karenanya juga dalam ke-

giatan ekonomi. Dibedakan N.V. (Naamloze Vennootschap = P.T.) yang tunduk hukum perdata Eropa dan MAI (Maatschappij of Aandelen voor Inlanders), perusahaan perseroan bagi Bumiputera, yang ber hukum sendiri.

Selain itu produksi kaum Bumiputera sebagai bahan mentah diolah oleh lembaga pengolah (processing) non Bumiputera sehingga dalam statistik tidak presis berapa bagian yang berasal dari bangsa Bumiputera.

Jika mengenai saudara-saudara kita dari Timor Timur tak begitu menjadi soal, lain halnya dengan saudara-saudara bangsa kita keturunan Cina, karena kegiatan ekonominya cukup besar.

Sejarah Perekonomian (*Economic History*)

Sejarah perekonomian jangan dikacaukan dengan sejarah teori-teori ekonomi (History of Economic Doctrines), walaupun antara kedua ilmu ada hubungan saling membantu. Apakah obyek, metode dan batas-batas ilmu Sejarah Perekonomian?. Ada fihak yang mempertentangkan Ilmu Sejarah dan Ilmu Ekonomi. Sejarah mencari hal-hal yang unik, sebaliknya ekonomi mencari hukum (law), hal-hal yang kembali berulang-ulang (P.D.Mc. Clelland).

Tetapi kerja sama sebetulnya mutlak. Seorang sejarawan perekonomian tak mungkin bekerja dengan mengabaikan teori-teori ekonomi. Susahnya yang dinamakan Teori Ekonomi bukan satu teori, tetapi banyak teori-teori. Dan adalah keharusan sejarawan untuk mengembangkan kreativitas, dengan menemukan teori ekonomi sendiri, bila bekerja secara eklektik mengenai teori ekonomi sudah tak berhasil. Selain itu juga banyak faktor non ekonomik mempengaruhi proses ekonomi sehingga perlu bekerja secara multi disipliner. Dengan perkataan lain; Teori ekonomi kurang daripada kenyataan ekonomi, sedangkan sejarah perekonomian meliputi lebih daripada teori ekonomi dan juga lebih daripada kenyataan ekonomi (J.F.E. Blasing).

Dengan demikian, apakah ilmu sejarah perekonomian termasuk ilmu sejarah ataukah ilmu ekonomi.

Huizinga menyatakan sebagai berikut:

1. Obyek sejarah perekonomian ialah perekonomian dalam perspektif sejarah.
2. Sejarah perekonomian merupakan bagian ilmu sejarah.
3. Metodanya ialah penggunaan peralatan ilmu ekonomi yang ditentukan oleh ilmu sejarah (instrumentalisme).

Memang ada juga yang berpendapat bahwa sejarah perekonomian termasuk ilmu ekonomi (Cliometrics), tetapi mereka dikritik bahwa dengan demikian sifat mereka ahistoris.

Manfaat Sejarah Perekonomian

Pada masa pembangunan, dimana mata kita terpancang ke masa yang akan datang, timbul pertanyaan: Apa manfaat menengok kembali ke masa lalu?

Dalam pembangunan unsur yang menonjol ialah perencanaan. Dengan perencanaan diharap kita dapat menang dari kejaran waktu. Kemiskinan, keterbelakangan, ketergantungan bila tidak diatasi akan makin membelenggu kita.

Perkembangan masa depan mengandung unsur-unsur:

- a. Penerusan perkembangan masa lalu, kelanggengan trend historis (Kontinuitas time series).
- b. Kehendak untuk secara sadar membentuk masa depan sesuai cita-cita.
- c. Unsur-unsur tak terduga.

Pengetahuan tentang time series, akan menambah kesadaran diri, juga motivasi untuk terus berjuang. Susahnya ialah, bahwa jenis time series ini tak langsung tersedia. Selain tergantung alat-alat pencatat masa lalu, juga jenis-jenis time series untuk keperluan masa kini, dalam catatan-catatan masa lalu belum tentu sesuai.

Dinamika Perekonomian

Dengan dinamika ini dimaksud:

- a. Pertumbuhan GDP/GNP, (PDB/PNB)
- b. Perkembangan kelembagaan, struktur, sektor, dan segmen ekonomi.
- c. Konjungtur

Dalam dinamika tersebut apa yang dinamakan surplus ekonomi merupakan pokok persoalan. Cara-cara dalam:

- a. Penciptaan surplus ekonomi.
- b. Allokasi surplus ekonomi tersebut mempengaruhi perkembangan perekonomian dengan melalui hal ihwal surplus ekonomi tersebut.

Sebagai contoh dapat dipertanyakan mengenai candi Borobudur. Dengan menyalurkan surplus ekonomi ke bentuk candi:

- a. Bagaimana memperolehnya? (jumlah, mutu, waktu).
- b. Mengapa diarahkan ke candi tadi?
- c. Bagaimana akibatnya terhadap perekonomian?.

Paradigma tentang masa lalu

Di sini diulangi lagi peranan sejarawan dalam perencanaan. Masa yang akan datang mengandung unsur-unsur:

- a. Kontinuitas trend-trend masa lalu.
- b. Kehendak sadar, untuk mengarahkan masa depan ke tujuan tertentu.
- c. Hal-hal yang tak terduga.

Dalam menemukan hal (a) tersebut, perlu ada dialog antara ilmuwan (*filosofy of science*) dan sejarawan (*historian*). Jangan sampai terjadi:

- a. Salah guna fakta sejarah oleh ilmuwan (*misuse of history*), seperti pembenaran (justifikasi) struktur kini.
- b. Sejarah tak bermutu (*bad history*), yaitu mengemukakan statement-statement yang tak benar (sejarah palsu). Seja-

rah yang tak lengkap dan tak mendetil, tidak secara otomatis sejarah tak bermutu (palsu).

Pertanyaan lain ialah: Apakah hanya satu gambaran tentang masa lalu? Dengan adanya proliferasi informasi dan teori pada masa kini, boleh dikatakan bahwa kita menikmati suatu pluralisme dalam ilmu pengetahuan, adanya berbagai logika. Hal ini tak berarti bahwa ada kecenderungan memelihara suatu ilmu pribadi (*private science*). Suatu ilmu harus mempunyai cukup dukungan, agar mampu bertahan dan berkembang, dan mungkin saja berasal dari ilmu pribadi yang bermutu, dan karenanya meluas.

Salah satu bentuk logika ialah: paradigma (Kuhn). Istilah ini agak kabur dalam pendefinisian. Seorang kritikus menemukan pada tulisan Kuhn k.l. 23 arti tentang paradigma. Dalam dialog epistemologis, agaknya paradigma mengandung unsur-unsur:

- a. sejenis *Weltanschauung*.
- b. sejenis *exemplar* (contoh).

Paradigma tersebut perlu cukup pengaruh. Sewaktu-waktu terjadi pergantian paradigma secara tak terduga, (*Scientific Revolution*) dengan gejala-gejala.

Paradigma yang ditawarkan di sini ialah:

1. Paradigma tentang *Modern World System*, dari Immanuel Wallerstein pada Fernand Brandel Center for the Study of Economics, Historical Systems, and Civilization.
2. Teori-teori *Dependencia* oleh A.G. Frank Samir amin, Tamas Szentes dan lain-lain.

Ada baiknya dipaparkan di sini isi paradigma-paradigma tersebut:

Immanuel Wallerstein mengemukakan secara singkat:

1. Dalam dunia modern, pembagian kerja terjadi dalam apa yang dinamakan "*Capitalist world economy*". Dalam *World Economy* ini ada apa yang dinamakan *Core* dan *periphery*.

2. Pembagian kerja di atas memerlukan:
 - a. suatu zone *semi periphery*
 - b. pertukaran produksi yang tak seimbang (*unequal exchange*)
 - c. pentingnya pembentukan modal (*surplus extraction*) yang terjadi secara berbeda-beda.
3. *World economy* ini terdiri dari negara-negara dan di dalam negara-negara ada golongan-golongan. Antar negara dan antar golongan tersebut terdapat persaingan, pertentangan, juga kerja sama.
4. Dunia kapitalis mengalami siklus-siklus ekspansi dan penyusutan (*conjunctuur*), antara lain gelombang *kondratieff*.
5. Sebagai akibat perjuangan-perjuangan antar gabungan dan gelombang-gelombang *conjunctuur* ada usaha-usaha untuk mengatasi gangguan-gangguan terhadap berfungsinya sistem dunia. Akan tetapi usaha-usaha mengatasi tersebut juga menciptakan kondisi-kondisi bagi timbulnya daya-daya yang membahayakan kelangsungan hidup sistem. Perkembangan-perkembangan tersebut dijabarkan dalam cara-cara:
 - a. Berdasarkan waktu dan tempat.
 - b. Berdasarkan lembaga-lembaga seperti lembaga-lembaga produksi, pasar, kekuasaan, dan lain-lain.
 - c. Berdasarkan golongan-golongan suku, agama, ras, golongan-golongan berstatus.

Kemudian bagaimana perkembangan-perkembangan tersebut melahirkan daya-daya yang mengancam keselamatan sistem. Yang sedikit banyak berpikir sesuai paradigma ini antara lain sejarawan D.H. Burger, dengan:

1. Disertasi: *De ontsluiting van Java's Binnenland voor het Wereldverkeer 1939*. Pembukaan pedalaman Jawa bagi lalu lintas dunia.
2. Karangan: *Sociologisch Economische Geschiedenis van Indonesia*. (Sejarah Sosiologis Ekonomis Indonesia). Dengan pendek ia kemukakan sebagai berikut:

Masyarakat Jawa terdiri dari lapisan:

- a) desa yang hidup berswadaya
- b) lapisan di atas desa baik bupati atau raja, elite politik
- c) lapisan pedagang di pantai Utara, Pesisir, elite ekonomi, pedagang internasional.

Bila sebelum kedatangan orang-orang Barat elite politik dan elite ekonomi ada, dan dengan bekerja sama, menghasilkan negara-negara besar, maka pada kedatangan orang-orang Barat terjadi penghancuran elite ekonomi oleh elite politik pada pemerintahan Sultan Agung. Akibatnya pusat perdagangan internasional bumiputera Jawa pindah ke Makasar dan memudahkan orang-orang Belanda mampu menjadi pedagang dan akhirnya juga penguasa.

Inkorporasi Jawa dalam jangkau lingkungan *core* terjadi melalui tahapan-tahapan kegiatan *core*, yaitu:

- a. Kerja sama dengan raja
- b. Kerja sama dengan kepala desa
- c. Akhirnya kerja sama dengan individu-individu desa.

Tahapan terakhir sedang berjalan dengan sedikit banyak ber-sisa-sisa tahapan-tahapan sebelumnya.

Dalam teori dependencia, maka melalui bentuk-bentuk dependencia:

1. Ketergantungan langsung (investasi langsung oleh modal Asing).
2. Ketergantungan perdagangan, pemasaran
3. Ketergantungan finansial, permodalan
4. Ketergantungan teknologis, seperti royalties
5. Ketergantungan di luar kegiatan ekonomi seperti politik, militer, kebudayaan (westernisasi dalam modernisasi).

Dependencia menghalangi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga statusnya tetap sebagai periphery.

Periodisasi

Dengan periodisasi dapat dijelaskan tahapan-tahapan dalam relasi *core-periphery*. Wallerstein hanya membedakan prainkorporasi dan postinkorporasi.

Bagi Indonesia yang daerah-daerah ekonominya mempunyai struktur ekonomi yang berbeda-beda, dapat saja diadakan periodisasi dengan memperhatikan aspek regional.

Dengan mengambil sebagai tujuan pokok preambule UUD 45 dimana kebebasan adalah hak setiap bangsa, dan dimana negara kita secara aktif memperjuangkan hilangnya penjajahan, maka dalam rangka Wallerstein kita ingin masuk menjadi "core" dengan tidak berarti bahwa kita akan menciptakan periphery. Dengan perkataan lain, kita melakukan neocolonialisme di dalam dan di luar negeri. Wawasan Nusantara akan menjadi jaminan bahwa hal itu tak terjadi. Berdasarkan tahapan-tahapan dalam mencapai Wawasan Nusantara untuk tiap daerah dapat disusun periodisasi untuk tiap daerah ekonomi. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa batas-batas daerah ekonomi dapat berubah-ubah, sesuai perkembangan proses ekonomi.

Perekonomian Hindia Belanda yang terutama berdasar ekspor produksi primer, pertanian, dan kelak pertambangan memerlukan sebagai syarat, biaya produksi yang rendah dalam hal ini buruh dan tanah, dan di lain pihak mutu produksi yang tinggi, antara lain melalui panca usaha seperti sekarang. Perkembangan dalam ekspor produksi pertanian ialah peralihan dari perdagangan barang luxe (rempah-rempah, lada), ke bahan mentah industri yang bervolume besar. Hal ini akibat revolusi industri "core" dan pembukaan Terusan Suez.

Dalam kegiatan ini pengusaha Belanda dan Eropa lain, mempunyai keunggulan:

- a. Adanya hubungan langsung antara produsen dan pasar (perdagangan jarak jauh).
- b. Keunggulan organisasi.
- c. Hubungan akrab dengan pemerintah jajahan dan core.

Kekuatan ini tak dapat ditandingi oleh pengusaha Bumiputera. Elite ekonomi di Pesisir dihancurkan dan dihalau oleh Sultan Agung, dan di Pasundan, bupati yang dalam stelsel Priangan, merangkap jadi pengusaha, kemudian dijadikan alat administrasi negara melulu. Elite ekonomi laut di Makasar, Aceh, lambat laun juga dibatasi kegiatannya. Salah satu tanda kemunduran ialah berubahnya menjadi pembajak laut, yang akhirnya juga diberantas. Peluang ekonomi yang tersisa (dianggap oleh pengusaha Barat tak menguntungkan) ialah sebagai perantara antara ekonomi internasional dan masyarakat periphery di desa, juga konsumen kecil di kota. Fungsi ini pada umumnya diisi oleh kaum imigran Cina dan keturunannya, dan hanya beberapa suku Bumiputera ikut serta seperti Minangkabau.

Perkembangan cara produksi juga terjadi, fase pertama pembelian surplus, fase kedua memproduksi secara feodal (Cultuurstelsel) dan fase ketiga produksi secara kapitalis. Mengingat jauhnya jarak antara produsen dan konsumen hanya organisasi besar yang mampu melaksanakannya (Pemerintah, Swasta besar, Cultuurbank). Hal ini juga berlaku dalam sektor pertambangan pada umumnya. Di pulau Belitung dan Bangka, dimana ada timah tidak terlalu sulit di tambang terjadi produksi oleh kongsi-kongsi Cina, yaitu semacam koperasi produksi (bukan koperasi produsen) yang menjual produksi ke perusahaan Belanda. Tetapi ini hanya sementara saja.

Masyarakat pertanian Bumiputera, sebagai sumber buruh dan juga tenaga murah, dianggap sebagai sumber yang mempunyai daya regenerasi yang cukup besar. Campur tangan pemerintah, hanya bila ada bahaya kepunahan (kemiskinan, kerusakan panen) atau gangguan (ibarat binatang buas), seperti ancaman oleh produksi karet rakyat, pemberontakan rakyat, atau aksi serikat buruh. Petani sebagai produsen bahan makanan dan bahan perdagangan menghadapi berbagai kebijakan pemerintah.

Dr. De Vries dalam majalah *Landbouw* No. 788, Juli Agustus 1937 dalam artikel: Politik Perberasan, mengatakan:

1. Diperlukan adanya stabilisasi harga beras semenjak dulu.
2. Pada jaman VOC harga beras ditekan, untuk kepentingan konsumen kota Batavia, sehingga produksi tidak menarik.
3. Harga padi pada akhir abad ke XIX mengikuti perkembangan conjunctuur yang menurun. (Laporan "Mindere Welvaarcommissie" tak menghubungkan hal itu).
4. Harga padi harus dijadikan alat, agar pertanian ekspor tetap dapat bersaing. Akan tetapi hal itu tak berarti agar harga padi ditekan sampai kurang daripada harga beras impor, karena penekanan harga padi memerlukan biaya terlampau tinggi dan juga tidak adil.

5. Jangan sampai pulau Jawa yang terlalu padat penduduknya mengalami kerawanan pangan, dan untuk itu luar Jawa perlu dinaikkan produksinya (Sulawesi Selatan, Bali, Lombok, Minangkabau). Bila pada produksi padi komersialisasi kurang terjadi, maka kenaikan produktivitas diusahakan, melalui pendidikan, kredit, irigasi, dan lain-lain.

Dalam pendidikan teknologi perlu disebut, bahwa Panjenengan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono ingkang kaping VII ing Surakarta Adiningrat memberikan kepada penanggalan Mangsa Kuno dasar baru, dan dinamakan Pranatamangsa, pada Jumahat Pon, 7 Sawal, Dal 1783 atau 22 Juni 1855. Pranatamangsa mengalami perbaikan lagi pada 1900, yaitu lamanya 365 31/128 hari, sehingga lebih sesuai dengan tahun matahari.

Petani dapat menanam tanaman perdagangan dimana ada kesempatan, baik dilihat dari sudut ruang (tanah) maupun aturan (larangan menanam tebu, Van der Kolff, Nota Beniso 15-1-1926).

Yang dapat disebut di sini ialah: palawija (gaplek kacang), sayuran, dan tanaman keras, kelapa, kapok, kopi, buah-buahan, karet, lada, tembakau, teh, sereh (minyak), di sawah maupun pekarangan. Di luar pertanian ini dapat pula disebut: produksi hutan, rotan, getah-getah, tengkawang, dan lain-lain.

Pada umumnya dapat dikatakan:

- a. Di luar Jawa kesempatan menanam tanaman perdagangan lebih luas, karena tanah belum menjadi soal.
- b. Kedudukan petani di mana-mana lemah dibanding dengan tengkulak dan eksportir.
- c. Petani subsistence makin didorong dalam rumah tangga uang (monetisasi) dengan kedudukan yang makin lemah.

Petrus Baker dalam dissertasinya tentang lalu lintas uang pada masyarakat Bumiputera mengatakan (h. 123), pajak merupakan beban pengeluaran, dan sumber keuangan ialah perusahaan perkebunan Barat modal besar. Tanpa organisasi sosial (serikat buruh, serikat pengusaha), petani merupakan pihak lemah dalam menghadapi perusahaan Barat modal besar, yang selain bersatu (ALS 1923, Algemene Landbouw Syndicaat, BENISO 1918 Bond Van Eigenaren van Med. Indische Suiker Ordenemingen, D.P.V. 1879 Deli Planters Vereniging dan sebagainya), juga dekat dengan pemerintah baik pusat maupun daerah. Commissie Visman 1942 mengatakan bahwa serekat buruh (pada golongan Bumiputera) dan perkumpulan-perkumpulan koperasi berkembang pelan-pelan dan dengan banyak kesulitan, berlainan dengan pihak pengusaha modal besar.

Tentang industrialisasi, Creutzberg (Het Ekonomisch Beleid in Ned. Indie, h. 2) mengatakan:

1. Impor barang-barang murah produksi massa dari Barat untuk keperluan sehari-hari masyarakat Indonesia yang miskin memukul industri kecil dalam negeri. Walaupun kelak ada kesempatan karena pasar meluas, akibat lalu lintas yang makin lancar, ternyata keadaannya sudah terlalu payah.
2. Industri batik semenjak pertengahan abad ke XIX, industri rokok akhir abad ke XIX, dan industri pertenunan semenjak krisis 1930 dapat menyelamatkan diri, karena nilai produk yang tinggi dapat mengatasi biaya transpor yang tinggi. Akan tetapi bentuk industrinya tetap dalam bentuk industri rumah tangga.

Halangan-halangan pokok berlanjut Creutzberg:

1. Daya beli penduduk rendah.
2. Pemerintah enggan membantu industrialisasi dengan proteksi, yang juga menaikkan harga pokok, sehingga nanti industri ekspor akan mengalami kenaikan biaya (upah), dan daya saingnya akan terkena.
3. Industrialisasi dengan restriksi impor akan mengundang tindakan balasan di luar negeri (Nederland), yang mempunyai pasar di Indonesia, dan juga karenanya ekspor Indonesia akan dibalas dengan halangan-halangan.

Memang akibat isolasi karena Perang Dunia pertama antara tahun 1914—1918, ada suara-suara untuk mendirikan industri substitusi impor, tetapi begitu perang selesai, anjuran-anjuran tersebut hilang juga.

Baru setelah krisis besar 1930 dengan ancaman ekspor murah dari Jepang, dan kemudian ada ancaman Perang Dunia kedua, industrialisasi mendapat perhatian.

Krisis-krisis ekonomi.

Krisis-krisis ekonomi internasional terjadi pada:

1. Akhir abad ke-19 Kondratieff.
2. ± 1921 yang pendek tetapi cukup tajam.
3. ± 1929—1934 krisis besar.

Krisis akhir abad ke-19 penting, karena menimbulkan "Ethische Politiek" antara lain terdorong Rapport Mindere Welvoort Commissie 1904. Dengan semboyan: *Educatie, Irrigatie dan Transmigratie*, diharapkan nasib Bumiputera akan dapat diperbaiki.

Periode akhir abad ke-19 sampai tahun 1913 merupakan periode tenang, perkembangan ekonomi, emansipasi politik. Kemudian menurut W.A. Lewis dalam *Tropical Development*, setelah tahun 1913 sampai 1950 negara-negara tropik mengalami masa depresi panjang karena Perang Dunia I, Krisis 1921, Krisis 1930, dan akhirnya Perang Dunia II. Per tahun perdagangan negara-negara tropik dalam volume mengalami kenaikan.

Besarnya kenaikan antara 1883–1913 yaitu 3,6%, antara 1913–1929 yaitu 3,1%, dan antara 1929–1955 hanya 1,5%. Selain itu terms of trade (daya tukar) merosot pada 1910–1913 dengan indeks 100 dan pada 1926–1929 menjadi 91. Dengan demikian timbul tahayul bahwa negara-negara tropik sulit dibangun, kata Lewis. Permulaan industrialisasi negara-negara tropik pada masa emas 1883–1913 hanya sebagai perkecualian, dan ini terjadi di India, Brazilia, Ceylon, dan Columbia.

Kemungkinan kegagalan indutrialisasi ialah:

1. Perdagangan internasional yang berakibat destruktif bagi kerajinan dalam negeri.
2. Pembagian pendapatan yang tak merata.
3. Penggunaan kekuasaan politik oleh pengusaha asing.
4. Keperluan akan perlindungan untuk industri baru (proteksis).
5. Tiadanya tambang batu bara dan besi yang dekat.
6. Ekspor hasil pertanian yang sangat menguntungkan.
7. Ketiadaan kelas pengusaha Bumiputera.

Terutama sebab no. 7 merupakan sebab yang pokok menurut Lewis. Hal ini diperkuat dengan kurangnya investasi dalam pendidikan, seperti terjadi di Hindia Belanda. Hal ini berbeda keadaannya di Ceylon, dimana pada tahun 1910, 31% penduduk yang berumur 5–14 tahun dapat bersekolah. Sebagai perbandingan menurut laporan Visman (1942): Laporan pengajaran (*Algemeen Onderwijs Verslag 1930/1931*), mengatakan bahwa anak-anak berusia 6–9 tahun yang bersekolah sebesar 34,5%. Jadi Hindia Belanda terbelakang kurang lebih 20 tahun, bila dibandingkan dengan Ceylon, yang juga tanah jajahan.

Pertanyaan yang kemudian dapat diajukan sebagai berikut: Apakah kekurangan kelas pengusaha dapat dimanfaatkan? Kita mengetahui bahwa pemberontakan-pemberontakan akhir abad XIX, seperti di Cilegon (Sartono) 1908 di Sumatera Barat, juga 1927 di Sumatera Barat, di kapal perang "De 7 Provincieen", semua menemui kegagalan, begitu juga kegiatan-kegiatan serekat buruh Pegadaian, Pabrik Gula, dan Kereta Api. Kekuasaan

Belanda dijamin secara internasional dimana pada tahun 1922 di Washington, Jepang setuju membatasi besarnya armada perang, dan selain itu statusquo jajahan Belanda yaitu Hindia Belanda, dijamin. Namun kita juga melihat bahwa mengenai peraturan "Poenale Sanctie" yang memberi hak kepada perkebunan untuk menyeret kulinya yang melarikan diri ke muka hakim sebagai pelanggar pidana. Mereka pada Oktober 1931 menulis pada menteri jajahan, secara suka rela melepaskan hak menggunakan ketentuan-ketentuan "poenale sanctie". Ternyata hal ini adalah untuk menghadapi semangat proteksionis dari Amerika Serikat. Semangat Mac Kinley's Tariff Act 1890, dihidupkan lagi dengan Hawley Smoot Act 1929 dan kemudian diamendemen oleh Senator Blaine, yang berisi larangan mengimpor barang-barang yang diproduksi berdasarkan perbudakan (poenale sanctie). Perkebunan tembakau merasa akan terkena, karena itu menulis surat pada menteri Jajahan tadi.

Pertentangan antar negara "core" memberi peluang untuk emansipasi dan hal ini terjadi lagi setelah Perang Dunia II selesai. Bila pertentangan antara Inggris dan Belanda ternyata tidak kuat untuk menahan negara Belanda, maka kemudian pihak Amerika Serikat yang dapat memaksa Belanda mundur. Selain tekanan Amerika Serikat, memang situasi peperangan sudah tak dapat diatasi Belanda. Bila dulu VOC dengan armada laut yang kuat akhirnya dapat menaklukkan Mataram, maka Republik Indonesia dengan struktur pertanian bahan makanan yang belum sepenuhnya komersial, dapat mengungguli tentara Belanda, yang berpusat di kota-kota. Armada laut juga tak mampu menghalangi penyelundupan di Selat Malaka. Seandainya pertanian RI sudah komersial, maka penduduk sebagian besar di kota, dan tak dapat diadakan pembentukan kekuasaan tandingan seperti TNI di desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikemukakan sebagai kesimpulan:

1. Hilangnya elite ekonomi Bumiputera merupakan hambatan besar dalam pengembangan Ekonomi Bangsa.

2. Pluralisme ekstrim dalam masyarakat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan dapat merupakan sumber konflik sosial.
3. Unsur-unsur dependencia dapat mempertajam pluralisme
4. Pendidikan masa lampau bersifat mempersiapkan diri menjadi elite administratif, bukan elite ekonomi.

Kesimpulan lain dari sejarah perekonomian:

1. Inkorporasi dalam World system merupakan basis terjadinya Negara Indonesia dikemudian hari.
2. Perkembangan dalam penciptaan surplus ekonomi menumbuhkan daya-daya anti sistem seperti nasionalisme, di samping itu ada juga sejenis escapisme (Gerakan Samin).
3. Kemajuan periphery tergantung kecakapannya mempergunakan perbedaan kepentingan negara-negara "core".
4. Belum terpikir/tercipta persatuan kaum periphery internasional efektif.

Berdasarkan perkembangan-perkembangan masa lalu dan perbedaan daerah mungkin saja diadakan semacam paralellisasi dalam arti: inkorporasi Jawa merupakan semacam pola contoh, untuk masing-masing daerah dalam pembagian waktu, dengan memperhatikan hal-hal khusus untuk daerah tersebut.

Bagi Jawa, meliputi beberapa periode yaitu:

- periode I : pra kedatangan orang Barat.
- periode II : kedatangan pedagang Barat sampai dengan VOC.
- periode III : Daendels dan Raffles.
- periode IV : Cultuurstelsel.
- periode V : akhir abad XIX sampai Perang Dunia I.
- periode VI : Perang Dunia I sampai Krisis Dunia 1930
- periode VII : Post crisis sampai Perang Dunia II
- periode VIII : Perang Dunia II — Pengakuan kemerdekaan.
- periode IX : 1950 — 1959 kembali UUD 45.
- periode X : 1959 — 1965 Pra Orde Baru.
- periode XI : 1965 — sekarang, Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Metodologi

1. Bertalanfy, Ludwig von. *General System Theory* 1968.
2. Blang, Mark. *The Methodology of Economics* 1980.
3. Blasing, J.F.E. *Inleiding tot de elementaire economische Geschiedenis* 1980
4. McClelland P.D. *Causal Explanation and Model Building in History, Economics and the New Economic History* 1975.
5. Suppe, F. *The Structure of Scientific Theories* 1979
6. Van Doorn, J. & Van Vugt, F. *Forecasting* 1978.

Worldsystems & Dependencia Theories, Pluralisme

1. Amir, Samir. *Underdevelopment and Dependence in Black Africa. Historical Virgins and Contemporary Forms Social and Economic Studies* Vol. XXII No. 1, 1973.
2. Tamas Szentes. *The Heterogeneous Social Structure* Academic Press 1971.

3. Smooha, Sammy. *Pluralism and Conflict. A Theoretical Exploration Plural Societies*. Vol. 6, No. 3,
4. Blusse, Wesseling, G.D. Winius. *History and Underdevelopment* 1980.
5. Waller Stein, J. *A Historical Perspective on the Emergence of the New International Order*. The Capitalist World Economy 1979.

Komentar Tentang Sejarah Perekonomian di Indonesia

1. Allen G.C. & Donnithorne A.G. *Western Enterprise in Indonesia and Malaya* 1957.
2. Cator. *The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indies* 1936.
3. Bakker, Petrus. *Eenige Beschouwingen over het Geldverkeer in de Inheemse Samenleving*. Dissertasi 1936.
4. Bosch, F. van den. *Der Javanische Mangsa Kalender Bydragen tot de Taal —, Land — on Volkenkunde*. Deel 136, 1980.
5. Burger, D.H. *De Ontsluiting van Java's Binnenland voor het Wereldverkeer*. Dissertasi 1939.
6. *Sociologisch Economisch Geschiedenis van Indonesia* 1975.
7. Creutzberg, P. *Het Economisch Beleid in Nederland Indie* 1975.
8. Elson, R.E. *The Cultivation System and Agricultural Involution Centre of South East Asian Studies* No. 14. Australia.
9. Koeff, G.v.d. *Bevolkingsrietcultuur in Nederland Indie*. Dissertasi 1925.
10. Lewis, W.A. *Tropical Development 1880 — 1913*, 1970.
11. *Economic Survey 1919 — 1939*, 1949

12. Landbouwkundig Tijd schrift. No. 7 & 8, 1937.
 - a. E. de Vries. *Rijstpolitiek in vroeger jaren.*
 - b. Schimmel, G.J. *De Rijstpolitiek in de jaren 1933 – 1937*
 - c. Koolhaas, D.R. *Algemene Bescheuwingen over de Kwaliteit van het Bevelkings export product*
13. Oorschot, H.J. van. *De Ontwikkeling van de nijverheid in Indonesie 1956.*

Time Series

1. Mansvelt W.M.F. reedited and continued by Creutzberg, P. *The Changing Economy in Indonesia.*
 - Vol. 1. Indonesia's Export Crops 1816 – 1940, 1975.
 - Vol. 2. Public Finance 1816 – 1939, 1976.
 - Vol. 3. Expenditure on Fixed Assets. 1977.
 - Vol. 4. Rice Prices. 1978.
 - Vol. 5. National Income. 1979.
 - Vol. 6. Money and Banking 1816-1940. 1980.
 Ditunggu : Vol. tentang Balance of Payment.
2. Visman, Commisie. *Verslag tet Bestudering van Staats recht Elijke Hervormingen Indie's Ontwikkeling tussen den Eersten en den Tweeden. Wereldoorlog Deel I & II, 1944.*
3. Centraal Kantoor Statistiek (C.K.S.) No. 167. *Concept. De Economische Ontwikkeling van Nederlandsch Indie. 1939.*

DAFTAR PEMBAWA MAKALAH

No.	Nama	Judul Makalah
1	2	3
Subtema Umum		
1.	Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo	Sebuah Biografi dari Historiografi Indonesia
2.	Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar	Fakta dalam Penulisan Sejarah Indonesia
3.	Dr. Taufik Abdullah	Pengalaman yang Berlaku, Tantangan yang Mendatang: Ilmu Sejarah di Tahun 1970-an dan 1980-an
Subtema Dinamika Perkembangan Politik Bangsa Indonesia		
1.	Drs. Anhar Gonggong	Tema Sentral Persatuan dan Alur Pemikiran Soekarno, 1926 – 1966
2.	Hanoch Luhukay	Front Penentang "Republik Maluku Selatan" di Makassar, Terbentuk pada Tanggal 26 April 1950
3.	Drs. P.J. Suwarno	Rekonstruksi Historis Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974
4.	Drs. R. Nalenan	Konsepsi Presiden 21-2-1957 dan Dampak Sejarahnya
5.	Sudjarwo	Digul Sebuah Filter Radikalisme: Potret Dinamika Pertumbuhan Bangsa
6.	Sudarini, SS	Komisi Tiga Negara

1	2	3
7.	Drs. Moch Hudan	Kelas Menengah dan Pergerakan Nasional di Indonesia
8.	Drs. Harlem Siahaan	Gerak Revivalitas-Nativistis Perang Batak, 1978 – 1907
9.	Drs. M. Isa Sulaiman	Islam, Etnisitas, dan Propaganda Anti Belanda : Suatu Tinjauan Terhadap Semangat Aceh 1945
10.	Dra. Erwiza Erman	Peranan Kelompok Nasionalis (PNI) dalam KNIP
11.	Drs. Riyadi Gunawan	Dinamika Wajah Antar Golongan Politik di Indonesia Periode Revolusi: Sebuah Pengantar Diskusi
12.	Drs. Muhammad Ibrahim	Pemerintahan Adat dan Pergerakan Nasional di Aceh
13.	Dra. Chusnul Hayati	Aktivitas Aisyiah dalam Meningkatkan Peranan Sosial Wanita di Indonesia
14.	Dra. Tiurma Tobing	Punguan Kristen Batak: Gereja Batak Pertama yang Merdeka
	Drs. Husain Haikal	Ustadh Abdullah Hinduan dan Ma'had Islam Pekalongan
16.	Drs. JA. Pattikayhatu	Guru Midras dan Peranannya dalam Masyarakat Pedesaan di Ambon Uliase

1	2	3
17.	Drs. I Ktut Ardhana	Perkembangan Muhamaddiyah di Bali, 1934 – 1968
18.	Drs. Mohammad Iskandar	Pembrontakan Kaum Priyayi Tahun 1893 di Kabupaten Bandung
19.	Drs. FEW. Parengkuan	Intervensi Asing Terhadap Sistem Pemerintahan Tradisional Minahasa Sampai Akhir Abad Ke-19
20.	Dra Marleily R. Asmuni	Sejarah Pertumbuhan Kerajaan Siak Sri Indrapura dan Sistem Pemerintahannya
21.	Sagimun MD.	Aru Palaka: Pengkianat atau Pahlawankah Dia?
22.	FS. Watuseke	Perang Tondano, 1808 – 1809
23.	Dr. Hasan M. Ambary	Dinamika Perkembangan Sejarah Islam di Indonesia Abad Ke-13 – 18
24.	Dr. Hamid Abdullah	Peranan Elit Pedesaan dalam Gerakan Sosial
25.	Drs. A. Gazali Usman	Pengaruh Pengajian Tassawuf dan Dzikir Terhadap Rakyat Banjar dalam Usaha Menghadapi Kolonialisme Belanda
26.	Drs. Helius Syamsuddin	Perubahan Politik dan Sosial di Pulau Sum-bawa : Kesultanan Bima dan Kesultanan Sum-bawa, 1815 – 1950
Subtema Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia		
1.	Drs. AA. Bagus Wirawan	Pengaruh Ekonomi Penjajahan (<i>landrente</i>) Terhadap Kehidupan Bangsa Indonesia

1	2	3
2.	Drs. Rusdi Sufi	Pasifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh
3.	Dra. Cokorda Istri Suryawati	Singaraja : Kota Perdagangan pada Belahan Kedua Abad Ke-19
4.	Drs. Muhammad Gade Ismail	Truman dan Barus : Dua Pusat Perdagangan di Pantai Barat Sumatra pada awal Abad Ke-19
5.	Daud Limbu Gau	Perekonomian Makassar, 1874 – 1849
6.	Dra. Tri Wahyuning M. Irsyam	Golongan Etnis Cina Sebagai Pedagang Perantara di Indonesia, 1870 – 1930
7.	Drs. Azhar Djohan	Beberapa Faktor Kesejarahan Sebagai Penyebab Mobilitas Ekonomi Masyarakat Cina dan Pengaruhnya bagi Orang Melayu
8.	Drs. I Putu Gde Suwitha	Peranan Orang-orang Perantara dalam Kehidupan Perekonomian di Deli Abad Ke-19
9.	Drs. Anwar Thosibo	Peranan Suku Bugis-Makassar dalam Aktivitas Perekonomian di Kerajaan Gowa-Tallo Abad Ke-17
10.	Drs. Edhie Wuryantoro	Masyarakat Jawa Kuna dan Masalah Tanah
11.	Drs. Bambang Purwanto	Krisis di Awal Kebangkitan Pengguntingan Uang pada Masa RIS, 1950
12.	Drs. Wisnuadji	Dinamika Perekonomian Bangsa Indonesia

1	2	3
Subtema Dinamika Perkembangan Sosial-Budaya Bangsa Indonesia		
1.	Drs. Kusen	Dinamika Kreativitas Kesenirupaian di Jawa Abad Ke-9 – 16
2.	Drs. M. Alimansyur	Ratu Sinuhun dalam Perkembangan Sosial-Budaya di Wilayah Sumatra Selatan
3.	Dra. Mona Lohanda	Budaya "Indisch" dalam Konteks Budaya Betawi
4.	Dr. Usman Pelly, MA.	Dampak Teknologi Maritim : Pasang-surut Perahu Bugis Pinisi
5.	Drs. Suripan Sadi Hutomo	Tukang Kentrung Sebagai Penutur Sejarah
Subtema Historiografi		
1.	Drs. Edward Pulinggomang, MA.	Beberapa Catatan Tentang Historiografi Sulawesi Selatan
2.	Drs. I Made Suastika	Konsepsi Kepemimpinan Hindu di Bali : Telaah Teks Bahasa Jawa Kuna serta Penerapannya Zaman Gelgel
3.	Drs. Djoko Dwiyanto	Penemuan Beberapa Prasasti Baru Sebagai Sum-bangan bagi Historiografi Indonesia
4.	Drs. Sudarmono	Setiap Generasi Menulis Sejarahnya Kembali
5.	Drs. A. Adaby Darban	Pendekatan Sejarah Struktur dan Relevansinya untuk Sejarah Nasional

1	2	3
6.	Drs. Dirman Surachmat	Prasasti Cisaga
7.	Dr. Hasan Djafar	Prasasti Sebagai Historiografi
Subtema Studi Bandingan		
1.	Drs. Husin Sayuti	Hubungan Lampung dengan Kesultanan Banten dan Palembang dalam Perspektif Sejarah, 1500–1900
2.	Drs. Ida Bagus Rama	Makna Hubungan Bali dan Jawa dalam Revolusi Fisik di Bali, 1945–1950
3.	Dr. I Ktut Surajaya	Masalah Pendidikan Sejarah di Sekolah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Jepang
4.	Dr. Edi Sedyawati	Perekonomian Masa Kadiri: Bandingan Data dan Teori
5.	Dr. Nurhadi Magetsari	Perbandingan Sejarah dan Agama
6.	Dr. Ayatrohaedi	Historiografi Daerah: Sebuah Kajian Bandingan Kerajaan Kamboja dan Kerajaan Mataram–Jawa Tengah: Suatu Studi Bandingan Tentang Kedu- dukan dan Martabat Raja dalam Masyarakat Asia Tenggara
7.	Drs. Suwadi Sjafei	
8.	Drs. Buchari	Sriwijaya dan Mataram: Kajian Bandingan Mengenai Struktur Kerajaan dan Struktur Birokrasi

1	2	3
9.	Dr. Mukhlis P.	Studi Bandingan Gerakan Ibnu Hajar dan Kahar Muzakar
Subtema Pendidikan Sejarah		
1.	Drs. G. Mudjanto, MA.	Pengembangan Konsep Diri Lewat Pengakaran Sejarah
2.	Dr. S. Hamid Hassan	Pengajaran Sejarah di Sekolah : Antara Keinginan dan Realita
3.	Drs. Sarita Pawiloy	Pemilihan dan Pengungkapan Fakta Sejarah untuk Tujuan Pendidikan
4.	Drs. Suwardi MS.	Prestasi Hasil Belajar Siswa SMA dalam Bidang Studi Sejarah di Propinsi Riau
5.	Drs. Sanusi	Penyajian Sejarah dan Pemahaman Ilmu Sejarah
6.	Drs. EJ. Manuhutu	Relevansi Pendidikan Sejarah dalam Pendidikan Nasional
7.	Dr. Djohan Makmur	Pendidikan Sejarah
8.	Dr. Suyatno	Suatu Konseptualisasi Sejarah Perkotaan
9.	Dr. Edi S. Ekadjati	Unsur Pendidikan dalam Pendidikan Sejarah
10.	Dr. Djoko Suryo	Pendidikan Sejarah
11.	Drs. RZ. Leirissa, MA.	Pengembangan Kurikulum Sastra Satu Jurusan Ilmu Sejarah
12.	Drs. M. Habib Mustopo	Wajah Pendidikan Sejarah Nasional pada Jenjang

Lampiran 1

RUMUSAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL IV**A PENGANTAR**

Dari tanggal 16 s.d. 19 Desember 1985 di Yogyakarta diadakan Seminar Sejarah Nasional IV bertema "Sumbangan Penelitian dan Penulisan Sejarah Terhadap Pembangunan Nasional" dan bertujuan :

1. Memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penelitian dan penulisan sejarah selama empat tahun terakhir (1981-1985);
2. Memperoleh data kesejarahan yang baru baik dalam artian fisik maupun tafsirannya, dan menjangkau para peneliti dan penulis sejarah untuk selalu melibatkan diri dalam setiap kegiatan kesejarahan;
3. Memperluas cakrawala pemikiran mengenai sejarah; dan
4. Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengajaran sejarah.

Seminar dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hasan, yang memberikan pengarahan bertolak dari pantulan filsafat tentang sejarah.

Seminar dibagi dalam sidang-sidang umum dan kelompok. Dalam sidang umum disajikan tiga ceramah umum, masing-masing yakni :

1. Ceramah umum Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo berjudul "Sebuah Biografi dari Historiografi Indonesia";
2. Ceramah umum Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar, berjudul "Fakta dan Penulisan Sejarah";

3. Ceramah umum dr. Taufik Abdullah berjudul "Pengalaman yang berlalu, Tantangan yang Mendatang : Ilmu Sejarah di Tahun 1970-an dan 1980-an".

B. PESERTA

Peserta Seminar terdiri atas tiga unsur, yakni peserta pembawa makalah, peserta undangan, dan peninjau. Berdasarkan daerahnya, peserta pembawa makalah berasal dari Jakarta (24 orang), Yogyakarta (14 orang), Ujungpandang (6 orang), Banda Aceh (5 orang), Bandung (3 orang), Manado (3 orang), Medan (2 orang), Surakarta (2 orang), Semarang (2 orang), Pekanbaru (2 orang) dan dari Malang, Palembang, Ambon, Lampung, Banjarmasin, serta Surabaya, masing-masing seorang.

Para pembuat makalah terdiri atas mereka yang (a) pernah mengikuti studi tambahan, (b) pernah aktif dalam pusat-pusat studi wilayah, (c) sudah terbiasa mengikuti berbagai seminar dan (d) pertama kali tampil. Keberagaman latar belakang itu mempengaruhi baik isi makalah maupun pendekatan yang dipergunakan penulisnya. Selain itu juga terlibat adanya gabungan antara usaha penelitian dengan pengalaman penulis, terutama pada Subtema Pendidikan Sejarah dan Dinamika Politik.

Para peserta berasal dari berbagai lembaga pendidikan dan lembaga penelitian, baik negeri maupun swasta.

C. MASALAH POKOK

Ada enam masalah pokok yang dibahas dalam Seminar Sejarah Nasional IV ini : 1) Dinamika Politik, 2) Dinamika Ekonomi, 3) Dinamika Sosial Budaya, 4) Historiografi, 5) Kajian Bandingan, dan 6) Pendidikan Sejarah.

1. Dinamika Politik

Makalah yang membicarakan masalah politik yang berjumlah 15 buah pada umumnya memilih periode Pergerakan Nasional dan Revolusi Fisik. Sebagai bahasan mencakup daerah

yang cukup luas (Aceh, Sumatera Timur, Lampung, Banten, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara); delapan di antaranya berskala nasional.

Pokok-pokok yang dibicarakan mencakup masalah hubungan antara pusat dan daerah, hubungan antara daerah dan daerah, hubungan antar golongan politik, hubungan internasional, kepemimpinan dan hubungan antar golongan sosial. Selain itu ditonjolkan pula sejarah tematis seperti sejarah parlementer, sejarah pemikiran, sejarah hubungan internasional, dan sejarah perundang-undangan.

2. Dinamika Ekonomi

Berbicara mengenai dinamika ekonomi, berarti akan mengaitkan demikian banyak masalah. Dalam perbincangan selama seminar yang membicarakan 16 makalah ini ada sembilan aspek dinamika pertumbuhan ekonomi yang muncul sebagai topik diskusi, yakni :

- a. Aspek perubahan sosial sebagai akibat sistem perekonomian baru (ekonomi uang, sistem pajak, penanaman modal swasta dan lain-lain)
- b. Aspek perubahan kehidupan perekonomian daerah sebagai akibat masuknya pembaharuan dari luar, termasuk sejarah perusahaan (*business history*)
- c. Aspek perdagangan antar pulau dan munculnya kota-kota dagang dengan kegiatan perdagangannya
- d. Aspek mobilitas sosial
- e. Peranan pedagang perantau dari golongan Cina dan pribumi
- f. Krisis perekonomian
- g. Aspek perbandingan perekonomian zaman kolonial dan zaman kemerdekaan.

Sekalipun lingkup ruang masih terbatas pada Aceh, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa, lingkup waktunya mencakup zaman kuna, zaman kolonial dan zaman revolusi sampai masa kontemporer.

3. **Dinamika Sosial Budaya**

Ada 16 makalah yang membahas aspek sosial budaya, namun yang menjadi perhatian utama tampaknya belum bervariasi. Aspek-aspek yang hangat mencakup masalah, yakni :

- a. Perubahan kebudayaan
- b. Sejarah institusi yang di dalamnya mencakup banyak bahasan tentang pranata sosial
- c. Pengaruh Tokoh-tokoh Sejarah terhadap perubahan sosial
- d. Peranan kelompok masyarakat tertentu terhadap perubahan sosial.

4. **Historiografi**

Tujuh makalah membahas historiografi tradisional dan dua yang membicarakan historiografi modern. Ada 3 masalah yang dianggap menonjol pada kelompok ini, yakni :

- a. Bahasan tentang struktur historiografi tradisional,
- b. Kepemimpinan kharismatik dalam historiografi tradisional, dan
- c. Bentuk-bentuk penuturan sejarah di berbagai daerah.

Sekalipun tidak ada pendekatan baru yang dimunculkan dalam berbagai makalah, patut diakui bahwa usaha ke arah penelitian "sejarah tradisional" seperti kentrung, mulai nampak.

5. **Kajian Bandingan**

Meskipun hanya ada tiga makalah yang secara khusus membahas masalah bandingan, tetapi aspek pokok yang dibicarakan berbeda-beda. Makalah pertama mencoba membandingkan tiga naskah sejarah yang berasal dari 3 daerah yang berbeda-beda. Makalah kedua membandingkan pribadi dua tokoh yang sama-sama melakukan "pemberontakan" terhadap Pemerintah RI. Keduanya berbeda dalam tindakan, keduanya berbeda dalam proses sosialisasi yang menyebabkan pula sentuhannya dalam sejarah berbeda. Makalah ketiga membanding-

kan unsur-unsur kebudayaan dalam proses modernisasi di Indonesia pada abad ke 9 dan 10. Ketiganya pun bervariasi dalam tiga skop temporal abad ke 9 16 dan 20.

6. Pendidikan Sejarah

Tiga belas makalah mencoba mengamati masalah pendidikan sejarah dalam seminar ini. Tampaknya cara mengajar dan sistem evaluasi menjadi topik yang menarik. Di samping itu tema yang tak kalah pentingnya antara lain : 1) pemilihan materi pengajaran dan bahan bacaan, 2) guru sejarah dan ahli sejarah profesional, 3) kurikulum, 4) subyektifitas penulis dan pengajar, dan 5) evaluasi silabus.

D. SIDANG-SIDANG

Seminar terdiri atas sidang umum dan sidang kelompok. Di dalam sidang-sidang umum dibicarakan masalah-masalah yang termasuk tema umum sedangkan di dalam sidang kelompok dibicarakan masalah yang sesuai dengan tema-tema khusus yang telah ditentukan.

Baik sidang umum maupun sidang kelompok memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dan berdialog secara bebas sesuai dengan tata tertib persidangan.

Penyelenggaraan sidang-sidang diwarnai oleh suasana yang akrab, di antara para peserta, baik yang sudah saling kenal maupun yang baru bertemu di dalam seminar ini.

Secara khusus perlu dicatat bahwa dalam sidang-sidang kelompok dilaksanakan dialog secara terbuka dan akrab. Mutu diskusi pada umumnya cukup baik. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta sidang memperlihatkan pemahaman terhadap masalah yang dibahas, sedang pembawa makalah dapat memberikan jawaban-jawaban yang menunjukkan penguasaan terhadap masalah yang ditanyakan.

E. TINJAUAN UMUM

Makalah seminar terdiri dari dua kelompok, yakni :

- (a) makalah berasal dari peserta berdasarkan undangan panitia pengarah, dan
- (b) makalah yang diajukan peserta setelah melalui penyaringan panitia pengarah.

Makalah yang diajukan pada umumnya belum seluruhnya memperlihatkan perluasan wilayah perhatian dan pendalaman dalam wawasan teori dan metodologi sejarah.

Meskipun diskusi kadang-kadang telah menyentuh masalah kritik sumber dan interpretasi fakta, tetapi pada umumnya lebih banyak berkisar pada ketepatan historis dari peristiwa yang dibicarakan. Namun perlu juga dicatat kesadaran akan pentingnya kecermatan dan kematangan dalam konseptualisasi peristiwa dan gejala kesejarahan makin kelihatan.

F. IMBAUAN DAN SARAN

Dari ceramah umum dan makalah-makalah yang diajukan serta diskusi yang menyusul, maka seyogyanya seminar mengimbau para sejarawan atas beberapa hal :

1. Peneguhan integrasi keilmuan dan social concern merupakan unsur terpenting dari proses profesionalisasi kesejarahan; dan
2. Peningkatan kemampuan teknis kesejarahan dan perluasan wawasan teori dan metodologi adalah landasan bagi kemajuan ilmu sejarah.

Dengan kedua hal ini ilmu sejarah akan lebih memungkinkan untuk memberi sumbangan yang berharga bagi pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya seminar menganggap perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam seminar-seminar sejarah yang akan datang patut dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan sumber-sumber sejarah dan metodologi sejarah. Di samping itu sudah tiba waktunya seminar yang akan datang juga memberi tempat bagi dinamika sejarah Asia Tenggara dan wilayah lainnya;
2. Seminar Sejarah Nasional diusulkan agar diselenggarakan setiap empat tahun sekali, diselingi dua kali seminar sejarah lokal;
3. Untuk meningkatkan kemampuan profesional para sejarawan perlu diusahakan penyelenggaraan penataran sejarah secara rutin, khususnya yang berhubungan dengan teori dan metodologi;
4. Guna menjamin komunikasi antara sesama sejarawan atau antara sejarawan dengan masyarakat, perlu diusahakan wadah penerbitan, baik berupa jurnal maupun terbitan lain yang berhubungan dengan kesejarahan; dan
5. Sehubungan dengan kegunaan sejarah sebagai alat pendidikan, perlu diusahakan pertemuan berkala antara para sejarawan profesional dengan para guru sejarah sehingga karya kesejarahan yang dihasilkan para sejarawan dapat digunakan secara tepat oleh guru sejarah.

Yogyakarta, 19 Desember 1985
Tim Perumus Seminar Sejarah Nasional IV

Ketua : Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian

Sekrt : Dr. Ayatrohaedi

Anggota : Drs. A.B. Lopian

Dr. Djoko Suryo

Dr. Edi Sedyawati

Drs. R.Z. Leirissa, MA

Drs. Budhari

Dr. Nurhadi Magetsari

Dr. Taufik Abdullah

Dr. Muchlis

Drs. Anhar Gonggong

Drs. J.R. Chaniago

Dr. Edi S. Ekajati

**SAMBUTAN PEMIMPIN PROYEK INVENTARISASI
DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SEMINAR
SEJARAH NASIONAL IV**

Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Yth. Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Wilayah Daerah, Bapak Drs. Soemidjan

Yth. Para undangan dan peserta Seminar Sejarah Nasional IV

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali setelah Seminar Sejarah Nasional III di Hotel Wisata Jakarta pada tahun 1981. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan undangan Seminar Sejarah Nasional IV.

Untuk ketiga kalinya Kota Yogyakarta mendapat kehormatan menjadi tempat penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yaitu pada tahun 1957, 1970, dan kini menjelang hari bersejarah 19 Desember 1985, yaitu hari-hari awal agresi Belanda ke-2.

Hadirin yang saya hormati, Seminar Sejarah Nasional IV ini diselenggarakan sejalan dengan perintah Garis-Garis Besar

Haluan Negara yang antara lain menyatakan bahwa di bidang pendidikan,

"Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa"

Sedang di bidang kebudayaan GBHN menyatakan,

"Nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, dan mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa kesatuan".

Untuk melaksanakan perintah wakil-wakil rakyat dalam rangka usaha pembinaan kesadaran sejarah bagi masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yang mendukungnya. Demikian pula sejarah yang akan menambah pengetahuan dan memperkuat kesadaran sejarah bagi masyarakat perlu ditunjang dengan berbagai sarana, prasarana, dan usaha. Dalam kaitan usaha inilah Seminar Sejarah Nasional IV diselenggarakan. Seminar Sejarah kali ini diharapkan dapat mewujudkan forum yang akan memacu kegiatan penelitian, pengungkapan dan penulisan sejarah, serta menjadi forum tempat bertukar pikiran, menyampaikan hasil penelitian dan pengalaman di lapangan pengajaran sejarah. Seminar juga diharapkan akan mampu merangsang penyempurnaan dan pengembangan penulisan sejarah yang amat diperlukan dalam rangka memperluas dan memperdaam cakrawala sejarah masyarakat Indonesia.

Dari tahun ke tahun melalui Seminar Sejarah Nasional maupun Seminar Sejarah Lokal terlihat adanya kecenderungan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat. Hal itu harus ditun-

jang dengan penelitian, penulisan dan metode pengajaran yang memadai. Sedangkan dari pihak peneliti dan penulis sejarah, masih terasa perlunya peningkatan melalui berbagai cara dan rangsangan.

Seminar Sejarah ini diharapkan dapat memacu dan meningkatkan mutu penelitian dan penulisan sejarah Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah yang hasilnya amat diperlukan guna menunjang perintah Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang pendidikan dan kebudayaan. Atas dasar kenyataan itu Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional secara lebih terarah dan berkesinambungan mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan forum komunikasi antara sesama anggota masyarakat sejarawan dan masyarakat luas untuk senantiasa meningkatkan kesadaran sejarah masyarakat dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hadirin yang saya hormati,

Seminar Sejarah Nasional IV kali ini mengambil tema "Sumbangan Penelitian dan Penulisan Sejarah Terhadap Pembangunan Nasional". Untuk mencapai sasaran sesuai dengan tema tersebut, maka rangkaian acara seminar akan membahas materi kesejarahan:

- a. Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia;
- b. Dinamika pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia;
- c. Dinamika perkembangan sosial budaya bangsa Indonesia;
- d. Historiografi;
- e. Studi bandingan; dan
- f. Pendidikan sejarah

Selanjutnya perkenalkan kami melaporkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa peserta Seminar Sejarah Nasional IV terdiri atas:

1. Tokoh-tokoh sejarawan dan masyarakat peminat sejarah;

2. Peserta pembawa makalah dan peninjau dari berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian swasta dan pemerintah; dan
3. Undangan

Sebanyak $\pm$ 350 orang telah hadir di Hotel Garuda Yogyakarta sejak tanggal 15 Desember 1985 dalam keadaan sehat walafiat. Seminar akan membahas 75 makalah yang mencakup ke-6 bidang permasalahan.

Akhirnya kami mohon pengarahan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sekaligus membuka seminar ini secara resmi. Semoga Tuhan Yang Mahaesa. senantiasa memberikan hikmah dan memberkati usaha kita.
Terimakasih.

Yogyakarta, 16 Desember 1985

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional selaku penanggungjawab Seminar

Drs. M. Soenjata Kartadarmadja
NIP. 130 054 919

Lampiran 3

SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA PEMBUKAAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL IV OLEH MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TANGGAL 16 DESEMBER 1985

Assalamu'alaikum wr. wb,
Yth. Bapak Menteri,
Yth. Para tamu, segenap peserta Seminar,
dan hadirin sekalian,

Kami berbahagia atas penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yang ke-4 di kota Yogyakarta. Kita menginsyafi bahwa kegiatan ini sangat penting dan sedang menjadi sorotan tajam dari masyarakat yang nampaknya sangat haus akan data kebenaran sejarah. Tentu saja kita bersyukur atas keinginan masyarakat yang demikian itu. Tepat sekali bila GBHN menyebutkan bahwa murid-murid sekolah dari semua jenis dan jenjang pendidikan, perlu diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Bahwa dengan belajar sejarah, bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar.

Sekarang ini P-4 telah sedemikian jauh disebarluaskan. Tentu saja kita semua berkewajiban untuk lebih banyak lagi mendalami nilai-nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa kita itu. Sementara ini generasi muda terus di-

hantui oleh berbagai macam kekuatan yang merusak, antara lain nilai-nilai budaya yang tidak selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia, ataupun perbuatan yang memang bertentangan dengan etika umum.

Oleh karena itulah, pendidikan Moral Pancasila dan pendidikan sejarah sangat dirasakan kemanfaatannya. Namun kita pun memaklumi bahwa menulis sejarah tidak mudah. Justru penulisan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, yang pelaku-pelakunya masih ada, kadang-kadang dijumpai kesulitan tersebut. Namun kami yakin bahwa para ahli senantiasa akan mencatat sejarah itu menurut kebenarannya dan menyajikannya segala yang patut untuk kepentingan pembangunan bangsa.

Semoga Seminar ini berjalan dengan lancar.

Kepada saudara-saudara, kami ucapkan selamat bermusyawarah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Desember 1985

WAKIL GUBERNUR



WAKIL GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

Perpus
Jend